KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamua'laikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Ucapan rasa syukur atas nikmat dan rahmat Tuhan Yang Maha ESA sehinga atas ijin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 17 Ayal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, kami telah menyusun LKPJ Tahun 2020 untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kebumen.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya yang diberikan, semoga LKPJ Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja yang baik serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian laporan ini terdapat kekurangan dan kesalahan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kebumen, Maret 2021

BUPATI KEBUMEN

H. ARIF SUGIYANTO, S.H

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Dasar Hukum 1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah 2
1.2.1. Visi dan Misi 2
1.2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 4
1.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 12
1.3. Data Umum Daerah 12
1.3.1. Data Geografis Wilayah 12
1.3.2. Jumlah Penduduk 15
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk 16
1.3.4. Jumlah PNS 17
1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 19
1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 21
1.3.7. Realisasi Pembiayaan menurut jenis Pembiayaan 21

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD 23
2.1. Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah 24
2.2. Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah 26
2.3. Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah 28

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 30
3.1. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah 30
3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 32
1. Urusan Pendidikan 32
2. Urusan Kesehatan 48
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 79

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.....109
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....117
6. Urusan Sosial.....151
3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....162
1. Urusan Tenaga Kerja.....163
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....169
3. Urusan Pangan.....175
4. Urusan Pertanahan.....182
5. Urusan Lingkungan Hidup.....184
6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....200
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.....205
8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.....242
9. Urusan Perhubungan.....247
10. Urusan Komunikasi Dan Informatika.....254
11. Urusan Koperasi (Usaha Kecil Dan Menengah).....261
12. Urusan Penanaman Modal.....267
13. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga.....271
14. Urusan Statistik.....282
15. Urusan Kebudayaan.....292
16. Urusan Perpustakaan.....295
17. Urusan Kearsipan.....301
3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan.....306
1. Urusan Kelautan dan Perikanan.....306
2. Urusan Pariwisata.....316
3. Urusan Pertanian.....321
4. Urusan Perdagangan.....334
5. Urusan Perindustrian.....342
6. Urusan Transmigrasi.....347
7. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral.....349
3.1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....351
1. Fungsi Perencanaan.....353
2. Fungsi Keuangan.....361

3. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 366
4. Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan 377
5. Pelaksanaan Fungsi Lainnya 381
3.1.5. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah 397
3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan 418
3.3. Rekomdasi DPRD atas LKPJ Tahun 2019 451

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN 510

4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan 510
4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Tingkat Pemerintah tingkat atasnya 510
4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya 523
4.2. Hambatan Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian 525

BAB V PENUTUP 526

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB I 1
Tabel 1.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen 5
Tabel 1.2 Jumlah Desa, Kelurahan, RW Dan RT Kabupaten Kebumen 13
Tabel 1.3 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen 14
Tabel 1.4 Persebaran CAT Kabupaten Kebumen 15
Tabel 1.5 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen 15
Tabel 1.6 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen 16
Tabel 1.7 Jumlah Perangkat Daerah Dan ASN Kabupaten Kebumen 17
Tabel 1.8 Target Dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen 20
Tabel 1.9 Realisasi Belanja Kabupaten Kebumen 21
Tabel 1.10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kebumen 22

BAB II 23
Tabel 2.1 Sumber Dana Kabupaten Kebumen 25
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Kabupaten Kebumen 27
Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen 28

BAB III 30
Tabel 3.1 Skala Penilaian 31
Tabel 3.2 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan 33
Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan 45
Tabel 3.4 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan 47
Tabel 3.5 Data Kasus Kematian Bayi Kabupaten Kebumen 74
Tabel 3.6 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kesehatan 75
Tabel 3.7 Capaian Program dan Kegiatan Urusan PUPR 78
Tabel 3.8 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan PUPR 104
Tabel 3.9 Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi 105
Tabel 3.10 Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen 105
Tabel 3.11 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Perumahan dan Permukiman 107
Tabel 3.12 Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen 112
Tabel 3.13 Capaian Penanganan Rumah Layak Huni 113
Tabel 3.14 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 115
Tabel 3.15 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 145
Tabel 3.16 Data Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah 145
Tabel 3.17 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Sosial 146
Tabel 3.18 Cakupan Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen 156

Tabel 3.19 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja 158
Tabel 3.20 Capaian Peningkatan Keterserapan Urusan Tenaga Kerja 163
Tabel 3.21 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... 164
Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... 169
Tabel 3.23 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pangan..... 170
Tabel 3.24 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pangan..... 174
Tabel 3.25 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan..... 176
Tabel 3.26 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup..... 178
Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 191
Tabel 3.28 Capaian IKLH Kabupaten Kebumen..... 192
Tabel 3.29 Cakupan Pelayanan Sampah di Kabupaten Kebumen..... 193
Tabel 3.30 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 194
Tabel 3.31 Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan..... 196
Tabel 3.32 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarat dan Desa..... 199
Tabel 3.33 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarat dan Desa 233
Tabel 3.34 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... 236
Tabel 3.35 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... 239
Tabel 3.36 Capaian kinerja cakupan peserta KB Aktif..... 240
Tabel 3.37 Rekapitulasi Tingkat Kesejahteraan Keluarga 240
Tabel 3.38 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan..... 241
Tabel 3.39 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perhubungan..... 246
Tabel 3.40 Sarana Kelengkapan Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 246
Tabel 3.41 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika..... 248
Tabel 3.42 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika..... 253
Tabel 3.43 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 255
Tabel 3.44 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah..... 258
Tabel 3.45 Data Jumlah Koperasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020..... 258
Tabel 3.46 Jumlah UMKM Kabupaten Kebumen Tahun 2020..... 259
Tabel 3.47 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal 261
Tabel 3.48 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal 263
Tabel 3.49 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan

dan Olah Raga 265
Tabel 3.50 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan 274
Tabel 3.51 Jumlah Perhitungan Capaian Realisasi 275
Tabel 3.52 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Statistik..... 276
Tabel 3.53 Kinerja Urusan statistik Kabupaten Kebumen..... 285
Tabel 3.54 Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Kebudayaan..... 286
Tabel 3.55 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 287
Tabel 3.56 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan 289
Tabel 3.57 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan 292
Tabel 3.58 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan
Perpustakaan 293
Tabel 3.59 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan 294
Tabel 3.60 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kearsipan 296
Tabel 3.61 Perkembangan Penerapan Arsip Baku 297
Tabel 3.62 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Kelautan
dan Perikanan Kabupaten 298
Tabel 3.63 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan..... 307
Tabel 3.64 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata..... 308
Tabel 3.65 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata 311
Tabel 3.66 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pertanian..... 313
Tabel 3.67 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian..... 324
Tabel 3.68 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan..... 326
Tabel 3.69 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan..... 330
Tabel 3.70 Data Pasar Tradisional Kabupaten Kebumen..... 330
Tabel 3.71 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian 333
Tabel 3.72 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian 336
Tabel 3.73 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi..... 338
Tabel 3.74 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi..... 339
Tabel 3.75 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Energi
dan Sumber Daya Mineral 340
Tabel 3.76 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral..... 341
Tabel 3.77 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Penunjang
Fungsi Perencanaan..... 343
Tabel 3.78 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan 350
Tabel 3.79 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Penunjang
Fungsi Keuangan..... 351
Tabel 3.80 Capaian Kinerja Opini BPK atas LKPD..... 354
Tabel 3.81 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Penunjang
Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 356
Tabel 3.82 Perkembangan Indikator Kinerja Fungsi Penunjang
Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan 364
Tabel 3.83 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Penunjang

Fungsi Pengawasan 367
Tabel 3.84 Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan 369
Tabel 3.85 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Lainnya 371
Tabel 3.86 Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Publik 385
Tabel 3.87 Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen 386
Tabel 3.88 Realisasi Angka Partisipasi Sekolah dan Sekolah Terakreditasi 389
Tabel 3.89 Capaian Cabang Olahraga dan Keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional 389
Tabel 3.90 Data jumlah penduduk usia >75 tahun 390
Tabel 3.91 Rincian Jumlah Siswa Lulus Sekolah Bisa Membaca Al Qur'an 391
Table 3.92 Rincian Indikator Pendukung Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan 392
Tabel 3.93 Kunjungan Obyek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Non Pemkab Kebumen Realisasi Pengunjung Tahun 2015 – 2020 397
Tabel 3.94 Ketersediaan Jalan Sesuai Kondisi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020 (dalam kilometer) 399
Tabel 3.95 IKLH Kementerian Lingkungan Hidup 400
Tabel 3.96 Angkatan Kerja 401
Tabel 3.97 Jumlah Gedung PAUD/ SD /SMP Kebumen 402
Tabel 3.98 Realisasi ASN dan Pegawai BUMD membayar Zakat 405
Tabel 3.99 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Daerah 407
Tabel 3.100 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2019 terhadap IKU Daerah 438
Tabel 3.101 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2019 terhadap Urusan Pemerintahan 456
Tabel 3.102 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2019 terhadap Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah 486

BAB IV 496
Tabel 4.1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2020 498
Tabel 4.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya yang dilaksanakan oleh Desa 507

BAB V 510

DAFTAR GAMBAR

Halaman

BAB I 1

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen 12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

Mendasari ketentuan diatas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Terhadap LKPJ Tahun 2020, memuat capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah:

"Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta

kemanusiaan yang adil dan beradab;

2. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
3. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
4. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
5. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan. Misi Kabupaten Kebumen terbagi dalam 6 (enam) sasaran yaitu:

a. membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
b. peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;

c. mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
d. meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
e. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
f. memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal *(Good and Clean Government)* dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

1.2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Selanjutnya Rumusan strategi disusun menjadi langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas							
1.	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1	Meningkatkan mutu pendi-dikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	a	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal.
				2	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	b	Perluasan akses pendidikan formal
		1.2	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	c	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
		1.3	Meningkat-nya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4	Meningkatkan mutu/ kualitas pembinaan pemuda, olahraga dan prasarana olahraga	d	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan pemuda, olah raga dan prasarana olah raga
		1.4	Meningkat-nya derajat kesehatan masyarakat	5	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	e	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
				6	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan		
				7	Meningkatkan upaya penanggulang-an penyakit		
				8	Meningkatkan perilaku hidup sehat	f	Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat
				9	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	g	Peningkatan akses dan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				10	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	h	Peningkatan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada kesehatan yang baik dan standar
Misi 2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat							
1.	Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	1.1	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	1	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama	a	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidup-an berbangsa dan bernega-ra berda-sarkan nilai-nilai ajaran agama
				2	Meningkatkan Pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya	b	Peningkatan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan toleransi beragama
2.	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	2.1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	3	Meningkatkan Koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	c	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
<u>Misi 3</u>: Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan							
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	1.1	Meningkat-nya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	a	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
				2	Mengembang-kan kawasan perdesaan	b	Pembangun-an wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah
				3	Mengembangkan Kawasan Industri		
				4	Meningkatkan kualitas SDM koperasi	c	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahtera-an anggota.
				5	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi		
				6	Penganekara-gaman ketahanaan pangan berbasis potensi lokal	d	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal
				7	Peningkatan operasi pasar	e	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegi-atan perda-gangan dalam negeri dalam usaha mening-katlan kese-jahtaan para pelaku usaha dan masyara-kat yang terlibat	f	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri.
				9	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah	g	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.
				10	Meningkatkan akses permo-dalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah		
				11	Mengembang-kan unit usaha syariah pada BUMD	h	Peningkatan kegiatan eko-nomi ber-basis syariah
2.	Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	2.1	Meningkat-nya daya saing investasi daerah	12	Mengembang-kan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu	i	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.
		2.2	Meningkat-nya kunjungan wisatawan	13	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	j	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/ masyarakat
3.	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	3.1	Meningkat-nya pelayan-an infra-struktur yang men-dukung pengembangan wilayah	14	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	i	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah
				15	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi		
				16	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi		
				17	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)	j	Optimalisasi dan pening-katan kuali-tas sarana - prasatana transportasi dan komunikasi untuk menunjang

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				18	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa		dan memperlancar proses pembangunan daerah
				19	Meningkatkan kapasitas sa-rana dan pra-sarana bidang keciptakar-yaan	k	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya
				20	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA	l	Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA
				21	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik	m	Peningkatan dan optimalitas ketertiban administrasi pertanahan secara baik
				22	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan	n	Peningkatan pelayanan bidang ketenaga-listrikan
4.	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	4.1	Meningkat-nya perlindung-an dan konservasi sumberdaya alam	23	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	o	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
<u>Misi 4</u>: Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan							
1.	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	1.1	Meningkat-nya Keberdayaan Masyarakat	1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulang-an kemiskinan	a	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
2.	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	2.1	Meningkat-nya keterserapan tenaga kerja	2	Meningkatkan keterampilan masyarakat	b	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan Masyaraat Ekonomi Asean (MEA)
				3	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat		
Misi 5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat							
1.	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	1.1	Meningkat-nya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas	a	Peningkataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
				2	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan		
		1.2	Meningkat-nya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	3	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	b	Peningkataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan
Misi 6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama							

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1.	Mewujudkan penyelengga-raan pemerin-tahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	1.1	Meningkat-nya kapasi-tas kelemba-gaan dan aparatur pemerintah	1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	a	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik (*Good and Clean Governance*)
				2	Meningkatkan prosedur pelaporan sisten keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembanganan yang semakin baik	b	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangun-an menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesimambungan
		1.2	Meningkat-nya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	3	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	c	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021

1.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kabumen tahun 2020 merupakan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Pembangunan pada tahapan ini diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh optimalisasi potensi unggulan daerah. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Target, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2020 yang telah direncanakan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan, demi kepentingan yang lebih strategis, yaitu penanganan dan pengurangan dampak Pandemi Covid-19.

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di antara 7º27'-7º50' Lintang Selatan dan 109º22'-109º50' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan (Gambar 1.1) :

- Sebelah timur Kabupaten Purworejo
- Sebelah selatan Samudera Hindia
- Sebelah barat Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta
- Sebelah utara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Kebumen



Sumber : BAP3DA Kab. Kebumen, 2020

Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 kilometer persegi. Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah, yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya berkisar antara 0-997,5 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km^2 atau 8,53% dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km^2 atau 7,82% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km^2.

Tabel 1.2
Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
1	Ayah	18	0	81	396
2	Buayan	20	0	90	341
3	Puring	23	0	98	318
4	Petanahan	21	0	81	258
5	Klirong	24	0	107	318
6	Buluspesantren	21	0	82	386
7	Ambal	32	0	113	313
8	Mirit	22	0	70	265
9	Bonorowo	11	0	42	139
10	Prembun	13	0	40	130
11	Padureso	9	0	23	86
12	Kutowinangun	19	0	80	241
13	Alian	16	0	73	254
14	Poncowarno	11	0	34	100
15	Kebumen	24	5	138	554
16	Pejagoan	13	0	64	257
17	Sruweng	21	0	97	332
18	Adimulyo	23	0	81	227
19	Kuwarasan	22	0	86	247
20	Rowokele	11	0	61	294
21	Sempor	16	0	74	368
22	Gombong	12	2	81	288
23	Karanganyar	7	4	61	242
24	Karanggayam	19	0	76	390
25	Sadang	7	0	35	131
26	Karangsambung	14	0	62	252
	Total	**449**	**11**	**1930**	**7127**

Sumber : BAP3DA Kab. Kebumen, 2020

Dilihat dari kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas pantai, dataran rendah dan kawasan perbukitan dengan ketinggian permukaan antara 0 s.d. 997,5 meter. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 6 tingkatan, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0-7 meter	26.378,15	20,59
2	7-18 meter	22.163,28	17,30
3	18-25 meter	15.360,36	11,69
4	25-100 meter	23.316,29	18,20
5	100-500 meter	40.111,17	31,31
6	500-997,5 meter	781,71	0,61

Sumber: Kebumen dalam Angka, Tahun 2020

Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu:

1. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar 52,26%;
2. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
3. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 hektar atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.

Secara Hidrogeologis, Sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (*akuifer*) di bawah permukaan tanah. Potensi air tanah di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar 5,7 juta m²/tahun. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Salah satu jenis air tanah dalam adalah Cekungan Air Tanah. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang meliputi Cekungan Air Tanah Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen

Purworejo dan Cekungan Air Tanah Kroya. Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Persebaran CAT Kabupaten Kebumen

No	Cekungan Air Tanah	Lokasi
1	Cekungan Air Tanah Banyumundal	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.
2	Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo	Sebagian wilayah Kecamatan Gombong, Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.
3	Cekungan Air Tanah Kroya	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.

Sumber: BAP3DA Kabupaten Kebumen, 2020

1.3.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.394.038 jiwa, tumbuh sebesar 0,4% dari tahun 2019. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 707.236 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 686.802 jiwa. Adapun data jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebagaimana data berikut ini :

Tabel 1.5
Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ayah	33.266	32.205	65.471
2	Buayan	34.002	32.528	66.530
3	Puring	32.851	31.970	64.821
4	Petanahan	30.778	30.177	60.955
5	Klirong	33.126	32.362	65.488
6	Buluspesantren	30.478	29.261	59.739
7	Ambal	32.629	31.380	64.009
8	Mirit	27.669	26.725	54.394
9	Prembun	14.744	14.711	29.455
10	Kutowinangun	25.004	24.209	49.213
11	Alian	34.948	33.224	68.172
12	Kebumen	68.071	66.394	134.465
13	Pejagoan	28.473	27.251	55.724
14	Sruweng	31.944	31.277	63.221
15	Adimulyo	19.057	19.315	38.372
16	Kuwarasan	26.348	25.511	51.859
17	Rowokele	26.434	26.016	52.450
18	Sempor	35.965	34.835	70.800

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
19	Gombong	25.551	25.746	51.297
20	Karanganyar	19.337	19.074	38.411
21	Karanggayam	30.805	29.444	60.249
22	Sadang	11.866	11.145	23.011
23	Bonorowo	11.355	10.969	22.324
24	Padureso	8.602	8.392	16.994
25	Poncowarno	9.553	9.201	18.754
26	Karangsambung	24.380	23.480	47.860
	Jumlah	**707.236**	**686.802**	**1.394.038**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kebumen 2021

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kebumen lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2020 berkisar antara 102%. Nilai ini diartikan setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat 102 penduduk laki-laki. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang di Kabupaten Kebumen. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kebumen sebanyak 134.465 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Padureso sebanyak 16.994 jiwa.

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 capaian pertumbuhan sebesar 0,40%. Faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan tingkat pertumbuhan penduduk tahun 2020 dibandingkan dengan 2019 yaitu dipengaruhi oleh faktor kelahiran (fertilitas). Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk yang berstatus kawin sejumlah 353.185 di Tahun 2019 dan 367.422 di Tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.6
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	Jumlah		Pertumbuhan Penduduk
		2019	2020	
1	Ayah	65.016	65.471	0,69%
2	Buayan	66.212	66.530	0,48%
3	Puring	64.620	64.821	0,31%
4	Petanahan	60.644	60.955	0,51%
5	Klirong	64.967	65.488	0,80%
6	Buluspesantren	59.444	59.739	0,49%
7	Ambal	63.779	64.009	0,36%
8	Mirit	54.236	54.394	0,29%
9	Prembun	29.368	29.455	0,30%
10	Kutowinangun	48.972	49.213	0,49%
11	Alian	67.863	68.172	0,45%

No	Kecamatan	Jumlah		Pertumbuhan Penduduk
		2019	2020	
12	Kebumen	134.083	134.465	0,28%
13	Pejagoan	55.318	55.724	0,73%
14	Sruweng	62.975	63.221	0,39%
15	Adimulyo	38.277	38.372	0,25%
16	Kuwarasan	51.700	51.859	0,31%
17	Rowokele	52.297	52.450	0,29%
18	Sempor	70.498	70.800	0,43%
19	Gombong	51.332	51.297	-0,07%
20	Karanganyar	38.392	38.411	0,05%
21	Karanggayam	60.072	60.249	0,29%
22	Sadang	22.909	23.011	0,44%
23	Bonorowo	22.249	22.324	0,34%
24	Padureso	16.969	16.994	0,15%
25	Poncowarno	18.668	18.754	0,46%
26	Karangsambung	47.630	47.860	0,48%
Jumlah		**1.388.490**	**1.394.038**	0,40%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kebumen, 2020

1.3.4. Jumlah PNS

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah perangkat daerah di Kabupaten Kebumen terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat; 17 (tujuh belas) Dinas, 4 (empat) Badan; dan 26 Kecamatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersebar pada perangkat daerah tersebut sampai dengan tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7
Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1.	Sekretariat Daerah	94	63	157
2.	Staf Ahli Bupati	1	1	2
3.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	33	21	54
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19	4	23
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26	26	52
6.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	38	13	51
7.	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah	21	16	37
8.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	11	19
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	27	12	39
10.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	56	11	67
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	15	32
12.	Dinas Kesehatan	485	1369	1854
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22	11	33
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	192	28	220
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21	19	40

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
	dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	14	28
17.	Dinas Pendidikan	3055	3720	6775
18.	Dinas Perhubungan	36	7	43
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	88	20	108
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	61	56	117
21.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	39	18	57
22.	UPT Daerah Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Barat	16	2	18
23.	UPT Daerah Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Timur	36	8	44
24.	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18	13	31
25.	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	34	19	53
26.	Inspektorat	25	16	41
27.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12	3	15
28.	Kecamatan Adimulyo	15	5	20
29.	Kecamatan Alian	13	1	14
30.	Kecamatan Ambal	10	4	14
31.	Kecamatan Ayah	14	6	20
32.	Kecamatan Bonorowo	13	3	16
33.	Kecamatan Buayan	16		16
34.	Kecamatan Buluspesantren	8	5	13
35.	Kecamatan Gombong	10	5	15
36.	Kecamatan Karanganyar	11	5	16
37.	Kecamatan Karanggayam	12	1	13
38.	Kecamatan Karangsambung	13	4	17
39.	Kecamatan Kebumen	8	4	12
40.	Kecamatan Klirong	11	2	13
41.	Kecamatan Kutowinangun	15	3	18
42.	Kecamatan Kuwarasan	14	3	17
43.	Kecamatan Mirit	9	6	15
44.	Kecamatan Padureso	8	2	10
45.	Kecamatan Pejagoan	11	4	15
46.	Kecamatan Petanahan	10	7	17
47.	Kecamatan Poncowarno	12	3	15
48.	Kecamatan Prembun	6	11	17
49.	Kecamatan Puring	16	2	18
50.	Kecamatan Rowokele	9	5	14
51.	Kecamatan Sadang	9	3	12
52.	Kecamatan Sempor	13	4	17
53.	Kecamatan Sruweng	13	3	16
54.	Kelurahan Bumirejo	3	3	6
55.	Kelurahan Gombong	4	2	6
56.	Kelurahan Jatiluhur	4	4	8
57.	Kelurahan Karanganyar	7	1	8
58.	Kelurahan Kebumen	1	4	5

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
59.	Kelurahan Panjatan	5	2	7
60.	Kelurahan Panjer	3	2	5
61.	Kelurahan Plarangan	5	3	8
62.	Kelurahan Selang	5	2	7
63.	Kelurahan Tamanwinangun	3	4	7
64.	Kelurahan Wonokriyo	6	1	7
65.	Sanggar Kegiatan Belajar	6	5	11
66.	Satuan Polisi Pamong Praja	47	3	50
67.	Sekretariat DPRD Kab. Kebumen	21	8	29
	JUMLAH	4913	5661	10.574

Sumber : BKPPD Tahun 2020

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Alokasi dan realisasi pendapatan Kabupaten Kebumen tahun 2020 serta perbandingan realisasi pendapatan Kabupaten Kebumen tahun 2019 dengan 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp.2.670.926.408,000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.764.082.529.730,00 atau mencapai sebesar 103,49%.

Kondisi tersebut ditopang oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 403.805.016.754,00 atau tercapai 126,99% dari target sebesar Rp 317.991.639.000,00, Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp1.624.225.405.094,00 dari anggaran sebesar Rp.1.611.022.902.000,00 atau sebesar 100,82% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah dari target sebesar Rp 736.052.107.882,00 tercapai Rp.741.911.867.000,00 atau 99,21%.

Dari Tabel berikut diketahui Pendapatan Asli Daerah yang dapat melampaui target yaitu dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Adapun yang belum memenuhi adalah dari Hasil Retribusi Daerah. Lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel pada halaman selanjutnya :

Tabel 1.8
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	URAIAN	TARGET PENDAPATAN (Rp)		% CAPAIAN
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
	PENDAPATAN	**2.670.926.408.000,00**	**2.764.082.529.730,00**	**103,49%**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**			
	1. Pendapatan Pajak Daerah	89.697.000.000,00	100.877.584.517,00	112,46%
	2. Hasil Retribusi Daerah	23.587.096.000,00	22.068.306.403,00	93,56%
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.243.497.000,00	15.727.758.649,00	118,76%
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	191.464.046.000,00	265.131.367.185,00	138,48%
	JUMLAH (I)	**317.991.639.000,00**	**403.805.016.754,00**	**126,99%**
2	**DANA PERIMBANGAN**			
	1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.335.926.000,00	35.146.538.958,00	96,73%
	2. Dana Alokasi Umum	1.206.245.637.000,00	1.197.504.293.000,00	99,28%
	3. Dana Alokasi Khusus	368.441.339.000,00	391.574.573.136,00	106,28%
	JUMLAH (II)	**1.611.022.902.000,00**	**1.624.225.405.094,00**	**100,82%**
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**			
	1. Pendapatan Hibah	133.718.200.000,00	136.824.438.691,00	102,32%
	2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	138.797.133.000,00	130.996.524.602,00	94,36%
	3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.127.000.000,00	17.991.610.589,00	98,46%
	4. Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	405.025.869.000,00	405.025.869.000,00	100,00%
	JUMLAH (III)	**741.911.867.000,00**	**736.052.107.882,00**	**99,21%**

Sumber data : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen (angka tahun 2020 sebelum audit BPK/unaudit)

Ditinjau dari sumber daya pendapatan, Dana Perimbangan masih merupakan faktor yang dominan dalam APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Dana Perimbangan tahun 2020 sebesar Rp 1.624.225.405.094,00 atau 58,76% dari seluruh realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp2.764.082.529.730,00.

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Secara umum belanja daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2020 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos terutama terkait pencegahan, penanganan, serta pemulihan dampak secara sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19. Berikut ini Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2020 :

Tabel 1.9
Realisasi Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.870.474.061.000**	**1.791.140.378.464**	**95,76%**
1	Belanja Pegawai	1.137.941.281.000	1.069.722.845.778	94,01%
2	Belanja Hibah	83.175.383.000	81.112.633.737	97,52%
3	Belanja Bantuan Sosial	34.248.370.000	30.833.250.000	90,03%
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.696.177.000	13.527.756.700	98,77%
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	586.167.850.000	585.755.067.000	99,93%
6	Belanja Tidak Terduga	15.245.000.000	10.188.825.249	66,83%
II	**BELANJA LANGSUNG**	**1.027.711.042.000**	**946.575.249.616**	**92,11%**
1	Belanja Pegawai	110.067.517.000	99.973.754.872	90,83%
2	Belanja Barang dan Jasa	604.262.315.000	557.802.742.626	92,31%
3	Belanja Modal	313.381.210.000	288.798.752.118	92,16%
	Total Belanja (Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung)	**2.898.185.103.000**	**2.737.715.628.080**	**94,46%**

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen (angka tahun 2020 sebelum audit BPK/unaudit)

1.3.7. Realisasi Pembiayaan menurut jenis Pembiayaan

Secara umum pembiayaan daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2020 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos serta pemulihan dampak secara sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan sebagaimana data berikut ini :

Tabel 1.10
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**204.167.918.000**	**204.132.918.416,18**	**99,98%**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	202.667.918.000	202.667.918.416,18	100%
2	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.500.000.000	1.465.000.000	97,67%
II	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**9.550.000.000**	**9.550.000.000**	**100%**
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.050.000.000	8.050.000.000	100%
2	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	100%
	PEMBIAYAAN NETTO	194.617.918.000	194.582.918.416,18	99,98%

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen (angka tahun 2020 sebelum audit BPK/unaudit)

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Mengingat terjadinya penurunan aktivitas ekonomi pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Kebumen lebih diarahkan dalam rangka mengatasi penyebaran Covid-19 serta dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Selain itu juga diarahkan pada pemulihan aktivitas ekonomi dengan memfokuskan kepada penciptaan lapangan kerja untuk penurunan angka pengangguran, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan serta dengan prioritisasi dan optimalisasi sektor unggulan dan sektor pendukungnya yang tangguh terhadap berbagai ancaman *disruptive* di kemudian hari. Penerapan kebijakan ekonomi daerah dalam konsep yang implementatif diterapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
2. Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan melalui pemulihan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pemulihan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
4. Pemulihan produktivitas UMKM dan industri pengolahan yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja serta berbasis produk pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan produk pangan yang kompetitif serta tangguh;
5. Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya dan yang menghasilkan produk pangan unggulan;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan wirausaha baru dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif secara formal maupun non formal;
7. Pengembangan serta memperkuat klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal dalam rangka pemerataan pengembangan ekonomi wilayah;
8. Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan;
9. Peningkatan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
10. Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum serta mendorong investasi yang bersifat padat karya;
11. Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat;
12. Pemulihan aktivitas pariwisata dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan mencegah penyebaran Covid-19;

13. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mengurangi beban logistik melalui upaya padat karya dan penggunaan tenaga kerja lokal pada proyek infrastruktur; serta
14. Pengembangan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah paling substantif yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 serta mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan tahunan maupun jangka menengah. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan Perubahan RKPD Tahun 2020 juga dilakukan baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

2.1. Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2020 telah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 untuk mengasumsikan anggaran DAK pada RKPD Perubahan Tahun 2020. Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja pendapatan daerah pada tahun 2020 akan ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi PAD melalui:
    a. Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
    b. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
    c. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial;
    d. Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
    e. Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai aturan yang berlaku;
    f. Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
    g. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
    h. Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

i. Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
j. Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi;
k. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
l. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional; dan
m. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah;

2. Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan hibah.

Secara umum pendapatan daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama semester I Tahun 2020 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos. Perubahan anggaran pendapatan pada kelompok-kelompok sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Dana Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	URAIAN	APBD 2020		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
A.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**417.693.691.000**	**317.991.639.000**	**-99.702.052.000**	**-23,87%**
1.	Pajak daerah	110.640.014.000	89.697.000.000	-20.943.014.000	-18,93%
2.	Retribusi daerah	33.639.811.000	23.587.096.000	-10.052.715.000	-29,88%
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.030.679.000	13.243.497.000	212.818.000	1,63%
4.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	260.383.187.000	191.464.046.000	-68.919.141.000	-26,47%
B.	**Dana Perimbangan (Transfer)**	**1.748.404.196.000**	**1.611.022.902.000**	**-137.381.294.000**	**-7,86%**
1.	Dana Bagi Hasil	30.513.954.000	36.335.926.000	5.821.972.000	19,08%
2.	Dana Alokasi Umum	1.322.910.412.000	1.206.245.637.000	-116.664.775.000	-8,82%
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	394.979.830.000	368.441.339.000	-26.538.491.000	-6,72%

NO	URAIAN	APBD 2020		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**712.458.881.000**	**741.911.867.000**	**29.452.986.000**	**4,13%**
1.	Hibah	122.124.800.000	133.718.200.000	11.593.400.000	9,49%
2.	Dana Darurat	0	0	0	0 %
3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota	134.668.233.000	138.797.133.000	4.128.900.000	3,07%
4.	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	45.787.636.000	45.243.665.000	-543.971.000	-1,19%
5.	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya		19.127.000.000	19.127.000.000	
6.	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	409.878.212.000	405.025.869.000	-4.852.343.000	-1,18%
	Pendapatan (A+B+C)	**2.878.556.768.000**	**2.670.926.408.000**	**-222.692.218.423**	**-7,21%**

Sumber : BAPPENDA Kabupaten Kebumen 2021
Keterangan : Data belum audit BPK

2.2. Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah

Adapun kebijakan umum perubahan belanja daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 antara lain:

1. Pencegahan, penanganan, serta pemulihan dampak secara sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19 untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan tangguh;
2. Penyesuaian dan pemenuhan belanja wajib/transitoris (baik anggaran, target, lokasi, maupun sasaran) yang sudah tercantum pada APBD dan Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 yang sudah ditetapkan;
3. Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan mandatory spending sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
5. Akselerasi pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen dan Renstra OPD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021; dan

6. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk meminimalisir sumber ketidakefisienan dan ketidakefektifan keuangan daerah.

Secara umum belanja daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2020 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos terutama terkait pencegahan, penanganan, serta pemulihan dampak secara sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19. Perubahan anggaran belanja pada kelompok-kelompok sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	URAIAN	APBD MURNI 2020 (Rp)	APBD PERUBAHAN 2020 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**1.888.463.325.000**	**1.870.474.061.000**	**-17.989.264.000**	**-0,95%**
1.	Belanja Pegawai	1.163.648.534.000	1.137.941.281.000	-25.707.253.000	**-2,21%**
2.	Belanja Bunga	0	0	0	**0,00%**
3.	Belanja Subsidi	0	0	0	**0,00%**
4.	Belanja Hibah	86.827.718.000	83.175.383.000	-3.652.335.000	**-4,21%**
5.	Belanja Bantuan Sosial	29.467.249.000	34.248.370.000	4.781.121.000	**16,23%**
6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.696.177.000	13.696.177.000	0	**0,00%**
7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	593.823.647.000	586.167.850.000	-7.655.797.000	**-1,29%**
8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	15.245.000.000	14.245.000.000	**1424,50%**
B.	**Belanja Langsung**	**1.145.293.443.000**	**1.027.711.042.000**	**-117.582.401.000**	**-10,27%**
	Total Belanja (A + B)	**3.033.756.768.000**	**2.898.185.103.000**	**-135.571.665.000**	**-4,47%**

Sumber : BPKAD Kabupaten Kebumen, 2020
Keterangan : Data belum audit BPK

2.3. Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Arah perubahan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

a. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan untuk menutup defisit anggaran atau memperkuat surplus anggaran daerah; dan
b. Optimalisasi pembiayaan daerah untuk menampung semua jenis penerimaan daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan daerah dan semua jenis pengeluaran yang tidak dapat dikategorikan sebagai belanja daerah.

Kenaikan Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang tercantum pada penerimaan pembiayaan perubahan RKPD Tahun 2020 akan dimanfaatkan untuk:

a. Pemenuhan belanja dalam rangka penanganan Covid-19 serta jaring pengaman sosial dan ekonomi untuk pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
b. Pemenuhan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK);
c. Pemenuhan belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
d. Pemenuhan belanja Dana Insentif Daerah (DID);
e. Pemenuhan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
f. Pemenuhan belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
g. Pemenuhan belanja Bantuan Propinsi Tahun 2020;
h. Pemenuhan belanja Dana Desa; dan
i. Pemenuhan belanja Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan bagi Kelurahan

Secara umum pembiayaan daerah mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan pelaksanaan yang terjadi selama Tahun 2020 dimana terjadi perubahan baik pergeseran, peningkatan maupun penurunan di beberapa pos. Perubahan anggaran pembiayaan pada kelompok-kelompok sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	URAIAN	APBD MURNI 2020 (Rp)	APBD PERUBAHAN 2020 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
A.	**Penerimaan Pembiayaan**	**165.500.000.000**	**204.167.918.000**	**38.667.918.000**	**23,36%**
1.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0,00%
2.	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	164.000.000.000	202.667.918.000	38.667.918.000	23,58%

NO	URAIAN	APBD MURNI 2020 (Rp)	APBD PERUBAHAN 2020 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
3.	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0,00%
4.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0,00%
5.	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0,00%
6.	Sisa Belanja Dana Alokasi Khusus	0	0	0	0,00%
B.	**Pengeluaran pembiayaan**	**10.300.000.000**	**9.550.000.000**	**-750.000.000**	**-7,28%**
1.	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0,00%
2.	Penyertaan modal (investasi) daerah	8.800.000.000	8.050.000.000	-750.000.000	-8,52%
3.	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0,00%
4.	Pemberian pinjaman daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0,00%
5.	Kelompok Usaha Masyarakat	0	0	0	0,00%
6.	Penyediaan Dana Talangan Pangan	0	0	0	0,00%
	Pembiayaan Netto/Defisit (A-B)	**155.200.000.000**	**194.617.918.000**	**39.417.918.000**	**25,40%**

Sumber : BPKAD Kabupaten Kebumen, 2020
Keterangan : Data belum audit BPK

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah Tahun 2020 merupakan laporan realisasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dimana merupakan pelaksanaan tahunan kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Tema pembangunan tahun 2020 mengusung tema "Pemantapan Perekonomian Daerah menuju Agrobisnis bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan" dan 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu:

1. Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung oleh pembangunan pertanian dan pariwisata;
2. Pemantapan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
3. Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
4. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas; dan
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penentuan lima prioritas pembangunan daerah tahun 2020 tersebut di atas merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Untuk mengukur ketercapaiannya maka telah dirumuskan 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan 103 IKU Perangkat Daerah. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2020 dapat digambarkan dalam capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan hasil capaian kinerja program dan kegiatan pada seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelum menjelaskan hasil Capaian IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah terlebih dahulu digambarkan tentang capaian program dan kegiatan yang dilaksanan selama tahun 2020.

3.1. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Indikator Kinerja Program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Dengan indikator outcome, pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Indikator hasil program

yang akan dicapai tertuang dalam RPJMD yang direncanakan atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasanuntuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah berkenaan.

Untuk mengetahui capaian kinerja urusan pemerintah daerah dapat dilihat dari evaluasi kinerja tahun 2020 dengan mengidentifikasi Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja, demikian pula dengan perhitungan analisis tingkat capaian antara kegiatan dengan target kinerja program dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Penilaian

SKALA NILAI		
1.	Sangat Tinggi	≥ 91%
2.	Tinggi	76 – 90,99%
3.	Sedang	66 – 75,99%
4.	Rendah	51 – 65,99%
5.	Sangat Rendah	≤ 50,99

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b. Hasil Sedang

   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal

c. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Mendasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 12 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

1. Urusan Pendidikan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan pendidikan dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yaitu Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Program Peningkatan Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	**Pendidikan**		**Dinas Pendidikan**	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**1. APK PAUD 0-6**	**Persen**	**64,57**	**44,86**	**69%**	**Disebabkan faktor motivasi, kecenderungan dari masyarakat di Kabupaten Kebumen yang menganggap bahwa pendidikan anak usia dini belum sepenuhnya dianggap penting**	**Sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat agar paham mengenai tujuan pendidikan anak usia dini melalui penguatan peran Bunda PAUD**
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	**2. Persentase Gedung Paud Sederajat dalam kondisi baik**	**Persen**	**84,2**	**84,25**	**100%**	**Ada kecenderungan bahwa yang disebut dengan sekolah dimulai dari tingkat Sekolah Dasar**	
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah paket pengadaan alat peraga edukatif	Paket	18	18	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	2. Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Paket Media Pendidikan (TIK)	paket	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19	
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	3. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Jumlah Bangunan Sekolah Yang Di Rehab.	Lembaga	2	2	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	4. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	jumlah peserta pelatihan diklat dasar bagi pendidik PAUD	Orang	180	180	100%		
	Pendidikan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Dinas Pendidikan	5. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1. Jumlah Pendidik PAUD Yang Diberi Kesejahteraan	Orang	2176	2176	100%		
			Dinas Pendidikan		2. Jumlah Lembaga PAUD Yang Difasilitasi Akreditasinya	Lembaga	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19	
			Dinas Pendidikan		3. Jumlah PAUD Negeri Yang Dibina	Lembaga	2	2	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Dinas Pendidikan		4. Jumlah PAUD Yang difasilitasi Fasilitasi BOP	Lembaga	1128	1116	99%	12 lembaga PAUD tidak memenuhi syarat fasilitasi BOP (jumlah murid kurang dari jumlah minimal penerima BOP)	Pemberian motivasi penguatan kelembagaan 12 PAUD yang belum memenuhi syarat fasilitasi BOP
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	6. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	1. Jumlah anak yang terfasilitasi Gebyar PAUD	Anak	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19	
			Dinas Pendidikan		2. Jumlah Peserta Lomba Gugus PAUD	Gugus	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19	
			Dinas Pendidikan		3. Jumlah Bunda PAUD Yang Diberi Apresiasi	Orang	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19	
			Dinas Pendidikan		4. Jumlah Kegiatan GOPTKI yang difasilitasi	Kegiatan	2	2	100%		
			Dinas Pendidikan		5. Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Pelatihan/Sosialisasi	Rapat	6	6	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	7. Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan sarana dan prasarana PAUD	Dokumen	45	45	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	8. Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga PAUD yang di monev	Lembaga	50	120	240%		
	Pendidikan		**Dinas Pendidikan**	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**1. APK SD/MI**	**Persen**	**103,72**	**100,46**	**97%**	**Sebagian peserta didik baru kelas I jenjang SD/MI masih berusia kurang dari 7 tahun**	**Kebijakan PPDB di Sekolah Dasar berbasis zonasi dan umur**
					2. Persentase Gedung SD/SMP Sederajat dalam kondisi baik	**Persen**	**77,5**	**85**	**110%**		
					3 Persentase Gedung SD Sederajat dalam kondisi baik	**Persen**	**68,53**	**83**	**121%**		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					4 Persentase Gedung SMP Sederajat dalam kondisi baik	**Persen**	**86,48**	**87**	**101%**		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	1. Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Talud Sekolah yang Terbangun	Paket	5	5	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	2. Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah baru yang ditambah	Ruang	2	2	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	3. Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah Paket Pengadaan Mebeluer sekolah	Paket	27	9	33%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	4. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	jumlah bulan pemeliharaan bangunan sekolah	Bulan	12	12	100%		
	Pendidikan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Dinas Pendidikan	5. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah/madrasah yang terehabilitasi	Ruang	26	26	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	6. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan BOS	Sekolah	822	822	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	7. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah SD dan SMP yang Melaksananan MBS	Sekolah	915	915	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	8. Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	1. Jumlah jenis lomba berprestasi yang diikuti peserta didik 1. OSN SD, SMP 2. OOSN SD, SMP 3. FLS2N SD, SMP 4. LCC SD, SMP 5. DOKTER KECIL SD 6. KKR SMP 7. MAPSI SD, SMP 8. LSS SD, SMP 9. LBM SD	9	9	4	44%	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19	
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		2. Jumlah Paket Penghargaan Peserta Didik dan Pendidik Berprestasi	Paket	1510	1510	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	9. Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)	1. Jumlah Tenaga pendidik yang mengikuti Bimtek Bedah Kisi-kisi 3 Mapel USBN SD						
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		2. Jumlah Tenaga pendidik yang mengikuti Bimtek Bedah Kisi-kisi 6 Mapel USBN 114 SMP	Orang	240	240	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	10. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah SD, SMP terakreditasi	Sekolah	231	231	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah SD, SMP yang dimonev pelaporan BOS nya	Sekolah	822	822	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	12. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB	Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan USBN	Sekolah	905	905	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	13. Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD	Jumlah lokasi Pendataan sarana dan prasarana SD	Kec	26	26	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	14. Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP	1. Jumlah paket Pengadaan peralatan Lab. Komputer SMP	Paket	11	11	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		2. Jumlah Ruang kelas dan jamban MI MTs yang direhabilitasi	Ruang	11	11	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		3. Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Ruang	3	3	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		4. Jumlah talud pengaman bangunan sekolah yang dibangun	Paket	1	1	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		5. Jumlah Ruang Kelas Rusak Sedang/Berat yang direhabilitasi	Ruang	7	7	100%		
	Pendidikan				6 Jumlah drainase sekolah yang dibangun	Paket	1	1	100%		
	Pendidikan				7 Jumlah pagar sekolah yang dibangun	Paket	2	2	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	15. Fasilitasi Pendidikan Inklusi	Jumlah SD, SMP penyelenggara pendidikan inklusi	Sekolah	20	20	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	16. Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD (DAK)	1. Jumlah paket Pembangunan RKB beserta perabot	Paket	8	8	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		2. Jumlah Ruang Kelas Sekolah dan ruang penunjang lainya yang direhabilitasi	Ruang	25	25	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		3. Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	Ruang	9	9	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		4. Jumlah jamban siswa/guru yang direhabilitasi	Ruang	32	28	88%	4 rehab jamban tidak direhab karena adanya regrouping sekolah	Anggaran yang tidak terserap dikembalikan ke kas daerah
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		5. Jumlah Jamban siswa/guru yang dibangun	Unit	1	1	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		7. Jumlah ruang guru yang direhabilitasi	Ruang	1	1	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	17. Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP (DAK)	1. Jumlah Ruang Kelas Baru SMP yang dibangun	Ruang	1	1	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		2. Jumlah Paket Pengadaan peralatan Laboratorium Komputer	Paket	1	1	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		3. Jumlah Ruang Laboratorium yang direhabilitasi	Ruang	3	3	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		4. Jumlah Ruang Kelas/ Bangunan SMP yang direhabilitasi	Ruang	6	6	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	18. Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan USBN	unit	10	10	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pendidikan		**Dinas Pendidikan**	**Program Pendidikan Non Formal**	**% Lembaga PNF yang terakreditasi**	**Persen**	**40,54**	**31,67**	**78%**	**Sebagian besar lembaga PNF belum terakreditasi badan PNF, akreditasi PNF lanjutan di tahun 2020 terkendala pandemi Covid 19**	**Lanjutan akreditasi lembaga PNF di Tahun 2021**
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	1. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	1. Jumlah Sarasehan dan pameran kegiatan pendidikan kecakapan hidup pada lembaga non formal	Lembaga	59	30	51%	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19	
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		2. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) penerima bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha yang di monev	Lembaga	7	7	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		3. Jumlah peserta kursus Bahasa Inggris di Kampung Inggris Kebumen	Orang	2000	188	9%	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19	Kursus secara tatap muka tidak bisa dilaksanakan (pembelajaran secara mandiri)
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		4. Jumlah peserta kursus Bahasa Arab di Kampung Arab Kebumen	Orang	100	100	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	2. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	1. Jumlah lembaga penerima bantuan DAK Non Fisik Kesetaraan bagi PKBM	Lembaga	22	19	86%	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19	Evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan pengisian Dapodikmas/SIMDAK Lembaga PKBM

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		2. Jumlah peserta Workshop Penguatan Program Bindikel bagi pengurus Paguyuban Orang Tua Murid dan Guru(POMG) pada satuan pendidikan	Orang	250	250	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		3. Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) pada usia sekolah yang diverifikasi	Orang	6788	6788	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	3. Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal	Jumlah lembaga PKBM dan LKP yang mengikuti Pelatihan kegiatan pendampingan akreditasi/sertifikasi	Lembaga	11	11	100%		
	Pendidikan		**Dinas Pendidikan**	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Persentase Pendidik berkualifikasi S1**	**Persen**	**68,36**	**86,55**	**127%**		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	1. Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	1. Jumlah penerima Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Peserta PPG yang terfasilitasi	Orang	6590	6590	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		2. Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang terfasilitasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Gurunya	Orang	3622	3622	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	2. pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah Guru TK, SD dan SMP yang mengikuti Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah	Orang	100	100	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	3. Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)	Jumlah lembaga PAUD yang diberi Fasilitasi dan Pendampingan Akreditasi	Lembaga	1	1	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	4. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1. Jumlah peserta Pemilihan PTK Berprestasi Tahun 2020	Orang	42	0	0%	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19	
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		2. Jumlah peserta Olimpiade Guru Nasional (OGN) Tingkat Kabupaten Tahun 2020	Orang	21	0	0%	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19	
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	5. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah GTTdan PTT pada sekolah Negeri dan korwilcambidik yang sudah terferifikasi pertanggal 31 Desember 2015	Orang	2841	2670	94%	Terdapat GTT dan PTT yang TMS karena tidak aktif & diterima CPNS	Sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah
	Pendidikan		**Dinas Pendidikan**	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**Indeks Survey Layanan Pendidikan**	**Persen**	**82,5**	**80,47**	**98%**	**Belum semua layanan pendidikan sesuai dengan harapan publik**	**Optimalisasi seluruh sumber daya Dinas Pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan**
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	1. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	1. Jumlah kepala sekolah TK, SD dan SMP Negeri yang di evaluasi	Orang	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19	
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		2. Jumlah pengawas TK, SD dan SMP Negeri yang di evaluasi	Orang	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		3. Jumlah Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Tokoh Agama yang mendapatkan sosialisasi program penggiatan peran orang tua dan masyarakat dalam proses belajar	Orang	850	850	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	2. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	1. Jumlah sekolah yang difasilitasi Penyelenggaraan PPDB Online	Sekolah	59	77	130,51%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		2. Jumlah server dan jaringan backbone dapodik yang terawat dengan baik	Unit	1	1	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		3. Jumlah paket aplikasi pengelolaan pendidikan	Paket	1	1	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		4. Jumlah paket SIM Pengelolaan APBS	Paket	1	1	100%		
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Pendidikan	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1. Jumlah peserta Sosialisasi Program Indonesia Pintar	Sekolah	1026	1026	100%		
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		2 Jumlah siswa yang mendapatkan Beasiswa Kurang Mampu (APBD)	Siswa	6317	6232	98,65%	Sampai batas akhir waktu yang ditentukan (31 Agustus 2020) 2 sekolah tidak mengajukan pencairan beasiswa	Sisa anggaran yang tidak bisa dicairkan dikembalikan ke kas daerah
	Pendidikan		Dinas Pendidikan		3 Jumlah sekolah yang dilakukan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dapodik	Sekolah	1026	1026	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pendidikan		**Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen**	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Tersedianya sarpras pendukung PAUD di Kelurahan**	**%**	**100**	**93**	**93%**		
		Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	1. Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah PAUD yang terehab	%	100	99	99%		
		Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah kegiatan PAUD yang terselenggara	%	100	61	61%	Rasionalisasi untuk penanganan covid 19	
	Pendidikan		**Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen**	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Tersedianya sarpras pendukung PAUD di Kelurahan**	**%**	**0**	**0**	**0%**	**Rasionalisasi untuk penanganan covid 19**	
		Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen	1. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah kegiatan rehabilitasi ruang kelas	Kegiatan	0	0	0%	Rasionalisasi untuk penanganan covid 19	
	Pendidikan		**Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen**	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Tersedianya sarpras pendukung PAUD di Kelurahan**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
		Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	1. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Jumlah paket pembangunan sarpras gedung PAUD yang terselenggara	paket	1	1	100%		
	Pendidikan		**Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen**	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Tersedianya Sarpras Pendukung PAUD di Kelurahan**	**paket**	**7**	**0**	**0%**		
		Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Paket Pengadaan Alat Peraga Edukatif	paket	2	0	0%	PAUD yang akan diberikan bantuan bukan milik kelurahan dan sudah tidak memiliki siswa	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Tersedianya sarpras pendukung PAUD di Kelurahan**	**%**	**0**	**0**	**0%**	**Rasionalisasi untuk penanganan covid 19**	
	Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar	1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Paket Pengadaan alat praktik Siswa	Paket	0	0	0%	Rasionalisasi untuk penanganan covid 19	
	Pendidikan		**Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar**	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Prosentase pingkatan pendidikan anak usia dini**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
		Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar	1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah paket APD untuk PAUD	paket	1	1	100%		
	Pendidikan		**Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong**	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Prosentase kualitas gedung sekolah**	**unit**	**1**	**0**	**0%**	**Rasionalisasi untuk penanganan covid 19**	
		Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	1. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Jumlah gedung sekolah yang terpelihara (Untuk Gedung TK dan Paud)	unit	0	0	0%	Rasionalisasi untuk penanganan covid 19	

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan pendidikan adalah 66,28% atau kategori sedang dimana Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 79,28%. Terhadap tingkat kesesuain antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 83,61% atau kategori tinggi.

c. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perkembangan Indikator Kinerja
Urusan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,91	13,04	13,34	102,3	13,20
2. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,34	7,16	7,54	105,31	7,11
3. Angka Kelulusan	%	99,97	99.91	100	100,09	99,92
4. Persentase pendidik yang berpendidikan S1	%	82,08	68,36	88,62	129,63	68,37
5. Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan	%	B	B	B	B	B
6. Angka Partisipasi Sekolah	%	94,49	92,86	95,88	103,25	93,36
7. Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	30,20	30,08	33,42	111,10	33,42
8. Angka Melek Huruf Al Quran	%	100	100	100	100	100

INDIKATOR KINERJA URUSAN	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
Siswa Lulus Sekolah SD						
9. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah SMP	%	100	100	100	100	100
10. Persentase Gedung PAUD/sederajat dalam kondisi baik	%	82,95	84,2	84,21	100,01	85,20
11. Persentase Gedung SD/sederajat dalam kondisi baik	%	78,49	68,53	85,84	125,26	68,88
12. Persentase Gedung SMP/ sederajat dalam kondisi baik	%	86,76	86,48	88,89	102,79	87,60

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, 2020

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Rata-Rata Lama Sekolah. Sampai dengan tahun 2020 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kebumen memiliki peluang bersekolah sampai 13,34 tahun atau setara dengan Diploma I. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS:2019). Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 dari target sebesar 7,16 (rata-rata penduduk Kebumen yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,56 tahun atau menamatkan/menyelesaikan kelas VII) yang berarti secara rata-rata penduduk kebumen yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,56 tahun atau telah menamatkan/menyelesaikan kelas VIII.

Capaian angka kelulusan siswa di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 yang mencapai 100 persen dari target 99,91 persen menunjukkan bahwa capaian angka kelulusan siswa di Kabupaten Kebumen termasuk dalam kategori sangat baik. Persentase pendidik di Kabupaten Kebumen yang berpendidikan tinggi (S1 ke atas) sebesar 88,64 % menunjukkan bahwa dari total pendidik di jenjang pendidikan dasar, rata-rata berpendidikan S1..

Capaian indeks survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang mencapai angka B menunjukkan bahwa secara umum masyarakat

memandang bahwa layanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Kebumen di Tahun 2020 masuk dalam kategori baik. APS pendidikan dasar 7-15 tahun di Kabupaten Kebumen sebesar 95,88% yang berarti bahwa 95,88 persen penduduk Kebumen berusia 7-15 tahun sedang bersekolah. Dari target persentase sekolah terakreditasi A sebesar 30,08 persen, capaian di tahun 2020 sebesar 33,42 persen. Hal tersebut menunjukkan lebih dari sepertiga sekolah jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen memiliki standar mutu dan kualitas grade A.

Pada indikator sasaran angka melek huruf Al Qur'an mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2019 capaiannya sama yaitu 100%. Angka Melek Huruf Al-Quran secara umum dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sama yaitu seluruh siswa kelas 6 (enam) SD/MI dan siswa kelas 3 (tiga) SMP/MTs sebesar 100 persen, yang berarti bahwa seluruh siswa tersebut melek huruf Al Qur'an.

Pada indikator persentase gedung sekolah dalam kondisi baik (PAUD, SD, SMP sederajat) mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja diatas target yang ditetapkan dan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 ada peningkatan. Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain adalah sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN dengan mengedepankan skala prioritas sesuai kebutuhan dan kondisi riil sekolah. Selama Tahun 2020, kegiatan rehabilitasi gedung SD/MI di 44 sekolah, rehab gedung SMP/MTs di 12 sekolah dan rehab 7 PAUD terbukti mampu meningkatkan tingkat persentase gedung sekolah dalam kondisi baik, sehingga capaian kinerjanya melebihi target.

Pandemi/wabah Covid-19 sangat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Siswa diharuskan mengubah cara hidup dan cara belajarnya untuk membatasi aktivitasnya dengan saling menjaga jarak (*social distancing*), mengurangi berkumpul dan bepergian dan belajar dari rumah dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19. Pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan menurunnya minat dalam mendaftarkan anaknya masuk sekolah pendidikan anak usia dini. Secara umum kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan adalah faktor motivasi masyarakat, kecenderungan dari masyarakat di Kabupaten Kebumen yang menganggap bahwa pendidikan anak dimulai dari kelas 1 (satu) SD, sementara pendidikan usia dini belum sepenuhnya dianggap penting.

Sebagai pembanding capaian kinerja yang telah disebutkan diatas, untuk diketahui bahwa pada tahun 2020, Jumlah anak sekolah yang menerima Program Indonesia Pintar 2016 tingkat Ssekolah dasar sebanyak : 49.541 siswa, tingkat Sekolah Menengah Pertama : 24.283 siswa. Sementara Jumlah Keluarga Miskin yang menerima Beasiswa Kurang Mampu Kelas Akhir tingkat Sekolah dasar

sebanyak 4.754 siswa, tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2.977 siswa. Sedangkan jumlah anak usia 7 tahun pada tahun 2016 sesuai data BPS sebanyak 20.591 siswa, jumlah anak usia 7 tahun pada tahun 2016 yang sekolah jenjang Sekolah DAsar sebanyak 17.923 siswa. Untuk Jumlah anak usia 7 tahun pada tahun 2016 yang dikategorikan anak dari keluarga tidak mampu sebanyak 75.985 siswa SD kurang mampu kelas 1-6

2. Urusan Kesehatan

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kesehatan dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) program yang meliputi : Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Dan Jaringannya, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Program BLUD. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
2.	**Kesehatan**		**Dinas Kesehatan**	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	**Tercukupinya Obat dan Perbekalan Kesehatan di tempat Pelayanan Kesehatan Dasar**	**puskesmas**	**35**	**35**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Dinas Kesehatan	1. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Jumlah paket Pengadaan Obat dan Perbekkes	paket	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2. Jumlah pertemuan di kegiatan pengadaan obat dan perbekkes	kali	11	11	100%		
	Kesehatan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Dinas Kesehatan	2. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3. Jumlah Paket Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Gudang Farmasi	paket	1	0	0%	Dana untuk rehabilitasi bangunan gudang farmasi tidak turun sesuai dengan pengajuan DAK, sehingga tidak dilaksanakan kegiatan rehabilitasi bangunan	
	Kesehatan		**Dinas Kesehatan**	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas**	**%**	**80**	**89**	**111%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	1. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	1 Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Layanan Cepat Tanggap Darurat Kesehatan oleh PSC 119,	paket	5	3	60%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah Pertemuan Evaluasi Kinerja puskesmas	paket	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah Pertemuan Pembinaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	paket	1	0	0%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah Pertemuan Peningkatan Jejaring Rujukan FKTP dan FKTL	paket	1	0	0%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		5 Jumlah Koordinasi Program Perkesmas	paket	1	0	0%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		6 Jumlah Pembinaan Jejaring PONED, PONEK	paket	1	0	0%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		7 Jumlah Pembinaan Nakes, Saryankes	paket	2	0	0%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		8 Jumlah paket kegiatan peningkatan Kemampuan Gawat Darurat bagi petugas puskesmas	paket	2	1	50%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		9 Jumlah paket kegiatan Peningkatan Kapasitas Dokter Puskesmas dalam Pedoman Klinis 144 Diagnosa	paket	2	0	0%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		10 Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	paket	1	0	0%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		11 Jumlah Pembinaan Kesehatan Tradisional (Kestrad)	paket	1	0	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		12 Jumlah pelaksanaan Koordinasi Posko Lebaran, Posko Natal	paket	2		0%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		13 Perjalanan Dalam Daerah Petugas PSC (Rujukan)	paket	1	1	100%		
	Kesehatan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Dinas Kesehatan	2. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	1 Jumlah kegiatan UKM sekunder	bidang	3	3	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah pelaksanaan kalibrasi alat Puskesmas	kegiatan	0	0	0%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif penanganan Covid-19	orang	1373	1373	100%		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	3. Revitalisasi Posyandu	1 Jumlah peningkatan kapasitas dan kualitas petugas promkes	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah peningkatan kapasitas pengelola pokjanal posyandu	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah pemenuhan Alat Permainan Edukatif (APE) dalam gedung + APE Pokir (12 paket lokasi Panjer,tanjungsari,pakuran sruweng,tambakmulyo puring)	paket	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah peningkatan kapasitas kader posyandu	kegiatan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	4. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	1 Jumlah Pertemuan Program PTM	Pertemuan	15	15	100%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi/refocusing karena pandemi Covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 jumlah pelatihan program PTM	pelatihan	0	0	0%	Semua petugas sudah terlatih	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah Posbindu kit	paket	460	214	47%	Usulan melalui DAK tidak semua terpenuhi. Belum semua Desa ada Posbindu Kit. Penggunaannya mobile berganti-gantian.	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah belanja Co analyzer, cryoterapi	unit/unit	35/35	Apr-20	11%/57%	Usulan melalui DAK tidak semua terpenuhi	
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	5. Fasilitasi Pengelolaan Penyelenggaraan BLUD	1 Jumlah UPTD yang dilaksankan pembinaan dan pengawasan	36	36	36	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah pelaksanaan Bintek	paket	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah Pertemuan perencaanaan keg BLUD dan rapat rapat LS	kali	10	5	50%	dana dilakukan rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah pengiriman peserta Bintek Kursus Singkat	kali	0	0	0%	dana dilakukan rasionalisasi	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		5 Jumlah dokumen pendukung BLUD	buah	3	3	100%		
	Kesehatan		**Dinas Kesehatan**	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	**Banyaknya Fasilitasi Pengawasan Obat dan Makanan**	**%**	**100**	**114%**	**114%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	1. Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	Jumlah pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan di Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	pertemuan	13	17	100%	Masa Pandemi pertemuan dengan jumlah peserta besar dipecah menjadi beberapa pertemuan kecil untuk memenuhi protokol kesehatan	
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	2. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	1 Jumlah Pengadaan Bahan Reagen di Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	paket	3	3	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah bulan pemberian honor THL logistik Obat	bulan	12	12	100%		
	Kesehatan		**Dinas Kesehatan**	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**Meningkatnya Prosentase Desa Strata Siaga Aktif Mandiri**	**persen**	**37,14%**	**42%**	**113%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	1 Jumlah Publikasi Iklan TV Spot dan Radio Spot	putaran	21	21	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah Cetak untuk Media promosi	paket	1 (poster 200 buah, spanduk 190 buah, stiker 200 buah, blanko 9 rim)	1 (leaflet 16 rim, banner 82 buah)	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah Sosialisasi kesehatan melalui Pemutaran Film Kesehatan	kegiatan	15	5	33%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah Kegiatan Pameran Kesehatan	kegiatan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		5 Jumlah Pawai Budaya / Karnaval Pembangunan	kegiatan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		6 Jumlah Peningkatan Kapasitas Tenaga Promkes	kegiatan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		7 Jumlah Pembentukan dan Pemberdayaan Pemuda Peduli Kesehatan	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		8 Jumlah Kampanye Promosi Kegiatan Lintas Sektor	kegiatan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		9 Jumlah Gerakan Kampanye Hidup Sehat di Masyarakat	kegiatan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	2. Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat(Desa Siaga)	1 Jumlah pertemuan workshop Desa Siaga Tangguh Bencana	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah kegiatan lomba DESI	kegiatan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah Pembinaan Pramuka Ska Bakti Husada	kegiatan	20	20	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah peningkatan kapasitas pengelola desa siaga aktif	kegiatan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	3. Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kabupaten Kebumen	1 Jumlah Lomba Kawasan Rumah Bebas Asap Rokok	kegiatan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah Cetak Untuk Kegiatan PHBS	paket	1 (275 banner, 3000 lembar leaflet, 900 poster)	1 (275 banner, 3000 lembar leaflet, 900 poster)	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah Pertemuan Deseminasi Informasi Perda KTR di Sekolah	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah Pembinaan PHBS Rumah Tangga	kegiatan	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		5 Jumlah Pembinaan PHBS Institusi pendidikan	kegiatan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		6 Jumlah Pertemuan Monitoring Perda KTR	kegiatan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		7 Jumlah Pertemuan Monitoring Klinik Berhenti Merokok	kegiatan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		8 Jumlah Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Promkes	kegiatan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		9 Jumlah Sosialisasi Program Kesehatan	kegiatan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		**Dinas Kesehatan**	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**Prosentase Ibu Hamil dan Remaja Putri Yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD);**	**%**	**67,50%**	**99,90%**	**148,00%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	1. Pemberian tambahan makanan dan vitamin	1 Jumlah Pengadaan PMT Pemulihan untuk Balita Gizi Buruk	balita	18	18	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah Pengadaan suplemen gizi Taburia bagi anak usia 6 - 59 bulan	balita	297	297	100%		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	2. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium	1 Jumlah Rencana dan Evaluasi (Renval) Program Gizi	Paket	2	2	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya							
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pendampingan PMT- gizi buruk, gizi kurang dan PMT Bumil KEK	Paket	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah kegiatan Akselerasi Perbaikan Gizi pada 1000 HPK dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Stunting	Paket	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah kegiatan Optimalisasi Klinik Gizi dan Ruang Laktasi Di Fasilitas Kesehatan	Paket	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		5 Jumlah Sosialisasi dan Advokasi Penanggulangan masalah GAKI	Paket	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		6 Jumlah Pemantauan Garam Iodium di pasar	lokasi	10	10	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		7 Jumlah Pelacakan Gizi Buruk puskesmas	lokasi	10	10	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		8 Jumlah Pelatihan PMBA untuk mencegah Stunting	paket	2	2	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		9 Jumlah Pengadaan Alat Antropometri Kit	paket	168	168	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		10 Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penurunan Stunting	Paket	10	10	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		11 Jumlah paket pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Anemia rematri/WUS	Paket	2	2	100%		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	3. Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Institusi(UPGI)	1 Jumlah Pembinaan Anemia Gizi pada Anak Sekolah/Remaja Putri	orang	60	120	200%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dan Guru PAUD/TK tentang Gizi Anak Sekolah dan Jajanan Anak Sekolah	orang	orang	0	0%	Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah Pembinaan Gizi Institusi Puskesmas Rawat Inap/Rumah Sakit	instritusi	10	10	100%		
	Kesehatan		**Dinas Kesehatan**	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**Jumlah Desa Pelaksana STBM**	**desa**	**460**	**460**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Dinas Kesehatan	1. Pelayanan Penyehatan Lingkungan	1 Jumlah Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Kesehatan Lingkungan	pertemuan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah Pertemuan kesehatan olahraga bagi petugas Puskesmas	pertemuan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah Pertemuan kesehatan kerja bagi petugas Puskesmas	pertemuan	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 jumlah Pelatihan keamanan pangan bagi pengelola Tempat Pengelolaan Makanan	pertemuan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		5 Jumlah Sosialisasi pengadaan jamban keluarga	pertemuan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		6 jumlah Tes kebugaran bagi calon jamaah haji tahun 2020	kegiatan	0	0	0%	adanya wabah covid 19 sehingga tdk ada pemberangkatan jamaah haji (diundur 2021)	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		7 jumlah Tes kebugaran bagi karyawan Dinkes	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		8 jumlah Senam sehat bersama	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		9 jumlah Pembangunan jamban keluarga	jamban	0	0	0%	adanya refocusing anggaran akibat covid 19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		10 jumlah Lomba desa STBM	kegiatan	1	1	100%	adanya refocusing anggaran akibat covid 19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		11 jumlah dilatih pengolahan limbah Puskesmas dan RS	pertemuan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		12 jumlah peserta Pertemuan minat hibah sanitasi	pertemuan	0	0	0%	adanya refocusing anggaran akibat covid 19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		13 jumlah di periksa sopir bus dalam rangka arus mudik lebaran dan natal tahun baru	kegiatan	0	0	0%	adanya refocusing anggaran akibat covid 19	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		14 Survey EHRA	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		15 Jumlah Pengadaan Alat Pemantauan Lingkungan Kesling KIT	paket	1	1	100%		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	2. Survailans Kualitas Air	1 jumlah Pertemuan Surveilans Kualitas Air	pertemuan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah Desinfektan tersedia	paket	1	1	100%		
	Kesehatan		**Dinas Kesehatan**	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	**Tertanganinya Kasus TB Paru, Diare dan DBD**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	1. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1 Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas program penyakit menular	kegiatan	12	8	67%	Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah Kegiatan Seminar Program Penyakit Menular	kegiatan	1	0	0%	Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah kegiatan Workshop Penyakit Menular	kegiatan	3	2	67%	Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah Pemenuhan PMT bagi Penderita Penyakit Menular	paket	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		5 Jumlah Fogging Fokus pada Kasus DBD	fokus	30	20	67%	Kegiatan foging merupakan alternatif terakhir apabila kasus DBD/Chikungunya tidak bisa dikendalikan dengan PSN. Foging dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		6 Jumlah Pemenuhan Bahan Habis Pakai Laborat Pemeriksaan HIV	paket	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		7 Jumlah Pemeriksaan Viral Load dan CD4 bagi Odha	tes		CD$ = 90, VL = 270			
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	2. Peningkatan imuniasasi	1 Jumlah review renval program imunisasi	pertemuan	2	1	50%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah Pertemuan Validasi Data Imunisasi	pertemuan	3	1	33%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah Pertemuan Koordinas Pet Imunisasi dan KIA dalam rangka Imunisasi Lanjutan	pertemuan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah Pertemuan Persiapan BIAS	pertemuan	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		5 Jumlah pelatihan safe injenction program imunisas	paket	0	0	0%	Anggaran bersumber DAU di rasionalisasi karena pandemi covid-19	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		6 Jumlah pengadaan refrigerator	paket	0	0	0%	Anggaran DAK berkurang sehingga diprioritaskan untuk beli medikal transpor box sebanyak 6 unit	
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	3. Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	1 Jumlah Review Perencanaan Program Surveilans	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah Review Evaluasi Program Surveilans	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah Review Istithaah Kesehatan Haji	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah Pertemuan Penguatan dan Orientasi Siskohatkes	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		5 Jumlah Review Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		6 Jumlah Pelaksanaan Imunisasi Meningitis	kegiatan	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		7 Jumlah workshop Pembentukan AKHI (asosiasi kesehatan haji Indonesia)	kegiatan	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		8 Jumlah Pertemuan Validasi Data SKDR	kegiatan	3	1	33%	Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		9 Jumlah Pertemuan Peningkatan Kapasitas Surveilans AFP&Campak	kegiatan	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid-19	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		10 Jumlah Rakor KLB/Upacara Gladi Bencana	kali	3	3	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		11 Jumlah Rapat persiapan dan evaluasi pelaksanaan imunisasi meningitis	kali	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid-19	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		Jumlah rapat penentuan istithaah kesehatan haji	kali	2	2	100%		
	Kesehatan		**Dinas Kesehatan**	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**Tingkat Mutu Pelayanan Sarana Kesehatan**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	1. Penyusunan standar pelayanan kesehatan	1 Jumlah pendampingan pasca survei Akreditasi	Puskesmas	35	35	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah Survei Re-Akreditasi	Puskesmas	0	0	0%	Pandemi Covid-19 Tidak ada Penilaian Survei Re-Akreditasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah Bitek Pengembangan SDM	Kali	6	6	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah Bintek Custamer Service	Kali	2	2	100%		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	2. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	1 Jumlah pembinaan dan Pengawasan Perijinan Tenaga Kesehatan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah pemilihan tenaga kesehatan Teladan UPTD Puskesmas	9 Organisasi	9 Organisasi Profesi	9 Organisasi Profesi	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah Bintek Profil SDM	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah Pelaksanaan Uji Kompetensi Nakes	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	3. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	1 Jumlah buku Profil Kesehatan yang tersusun	DOK	90	55	61%	RASIONALISASI	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 jumlah pertemuan pembinaan SIMPUS dan Profil Kesehatan	KALI	5	3	60%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 jumlah program SIMPUS terupgrade	PAKET	0	0	0%	RASIONALISASI	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 jumlah pertemuan PPID Dinkes	KALI	3	1	33%		
	Kesehatan		**Dinas Kesehatan**	**Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya**	**Banyaknya Puskesmas Yang Mempunya Sarana dan Prasarana Untuk Pelayanan Rawat Inap**	**Puskesmas**	**11**	**11**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	1. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1 Jumlah pengadaan kendaraan Pusling dan ambulans untuk Puskesmas dan mobil labkesda (1 unit)	unit	22	6	27%	refokusing covid	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah pengadaan sarpras UPTD	paket	22	6	27%	refokusing covid	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah pengadaan sarana prasarana UPTD	paket	22	6	27%	refokusing covid	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	2. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Jumlah paket ruangan dan fasilitas yang memadai	paket	12	13	100%	adanya tambahan anggaran DID	
	Kesehatan		**Dinas Kesehatan**	**Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	**Prosentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan**	**prosen**	**100**	**85**	**85%**	**Cakupan UHC th 2020 baru mencapai 85%**	
	Kesehatan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Dinas Kesehatan	1. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	1 Jumlah Pertemuan Binwas dan Evaluasi bg FKTP pd program JKN/KIS, Non JKN/KIS, Jamkesda	paket	0	0	0%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 Jumlah Sosialisasi JKN/KIS-BPJS, Non JKN/KIS dan Integritas Jamkesda ke JKN/KIS	paket	0	0	0%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah Koordinasi dan Konsolidasi JKN/KIS-BPJS, Non JKN/KIS dan Integrasi Jamkesda	paket	0	0	0%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola JKN/KIS, Non JKN/KIS dan Jamkesda	paket	0	0	0%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		5 Jumlah Pelayanan Kesehatan Non JKN/KIS	paket	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		6 Jumlah Premi BPJS	orang	59393	79665	135%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		7 Jumlah Operasional Tim Monev JKN/KIS-BPJS, Non JKN/KIS dan Tim Pelaksana Jamkesda	paket	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		8 Jumlah Pertemuan Pembinaan dan Evaluasi Program JKN	paket	2	1	50%	Rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		9 Jumlah Pertemuan Pembinaan dan Evaluasi bagi FKTL (RS) pada program JKN/KIS, Non JKN/KIS dan Jamkesda	paket	2	2	100%		
	Kesehatan		**Dinas Kesehatan**	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	**Jumlah Kasus Kematian Bayi**	**kasus**	**215**	**127**	**59%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Kesehatan	1. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	1 Jumlah pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		2 jumlah pertemuan renval program kesehatan keluarga	paket	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		3 Jumlah pelksanaan AMP	paket	0	0	0%	rasionalisasi	
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		4 Jumlah hasil rekomendasi audit maternal perinatal	paket	0	0	0%	tidak dilaksanakan AMP	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		5 jumlah peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan keluarga dengan kohort ibu, bayi dan balita; penerapan PKM mampu tata laksana KTA; petugas dalam pelaksanaan SDIDTK ; Peningkatan kapasitas petugas dalam Pengelolaan program kesehatan ; pengelola kesehatan lansia ;pelayanan ANC terpadu dan pertolongan persalinan di Faskes	paket	6	6	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		6 jumlah penemuan kasus resti dan pengelolaannya mll pelaksanaan kelas bumil dan balita	paket	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		7 Jumlah kegiatan penguatan manajemen program KB	paket	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		8 Jumlah peringatan hari lanjut usia	paket	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		9 Jumlah peningkatan penjaringan kesehatan anak usia sekolah	paket	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		10 Jumlah yang dilayani Jampersal	orang	595	198	33%	keterbatasan akses	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		11 Penata Laksanaan Kegawadaruratan Obstetri dna Neonatal	paket	1	1	100%		
	Kesehatan		Dinas Kesehatan		12 Peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir, MTBM, peningkatan kualitas pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita	paket	2	2	100%		
	Kesehatan		**Upt Rumah Sakit Umum Daerah Soedirman**	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	**Bertambahnya Aset Daerah di RSUD**	**Paket**	**1**	**1**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Upt Rumah Sakit Umum Daerah Soedirman	1. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Unit Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran	Unit	2	2	100%		
	Kesehatan		**Upt Rumah Sakit Umum Daerah Soedirman**	**Program BLUD**	**Capaian target SPM**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Upt Rumah Sakit Umum Daerah Soedirman	Kegiatan BLUD RSUD Kebumen	Jumlah bulan terwujudnya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Bermutu	Bulan	12	12	100%		
	Kesehatan		**Upt Rumah Sakit Umum Daerah Prembun**	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Jumlah kunjungan rawat jalan**	**%**	**80**	**100**	**125%**		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Upt Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	Pengembangan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah bulan tersedianya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Prembun (UPT Rumah Sakit Umum Daerah Prembun)	bulan	12	12	100%		
	Kesehatan		**Upt Rumah Sakit Umum Daerah Prembun**	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	**Bertambahnya aset daerah di RSUD**	**%**	**85**	**134**	**158%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Upt Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	1. Pengembangan ruang operasi	Jumlah paket penyediaan pembenahan ruang operasi	paket	1	1	100%		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Upt Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	2. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah paket alat alat kesehatan rumah sakit	paket	5	5	100%		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Upt Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	3. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah paket tercukupinya Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	paket	8	8	100%		
	Kesehatan		Upt Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	4. Penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Jumlah bulan tersedianya pendampingan sistem penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	bulan	0	0	0%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		Upt Rumah Sakit Umum Daerah Prembun		Jumlah paket penambahan SIM BLUD	paket	0	0	0%		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Upt Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Jumlah bulan tersedia pemeliharaan Rutin/Berkala di Bangsal/Instalasi Penunjang Rumah Sakit	bulan	12	12	100%		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Upt Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala alat alat kesehatan rumah sakit	bulan	12	12	100%		
	Kesehatan		**Upt Rumah Sakit Umum Daerah Prembun**	**Program BLUD**	**Capaian target SPM**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Upt Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	Kegiatan BLUD RSUD Prembun	Jumlah bulan tersedianya pelayanan kesehatan rujukan RSUD Prembun	bulan	12	12	100%		
	Kesehatan		Kecamatan Kebumen								
	Kesehatan		**Kelurahan Panjer**	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Terfasilitasinya Pemberian TMT bagi Masyarakat di kelurahan**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Kelurahan Panjer	Revitalisasi Posyandu	Jumlah Kegiatan Revitalisasi Posyandu	%	100	74	74%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		**Kelurahan Selang**	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**Presentasi Balita Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Selang	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	1 Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan dan vitamin	%	10	10	100%		
	Kesehatan		Kelurahan Selang		2 Jumlah Rumah Tangga Menerima BPNT	RT	10	10	100%		
	Kesehatan		**Kelurahan Selang**	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**Tercapainya Kelurahan Pelaksana STBM**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Selang	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan penyehatan lingkungan	bln	12	12	100%		
	Kesehatan		**Kelurahan Tamanwinangun**	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Terfasilitasinya Upaya Kesehatan Masyarakat**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Tamanwinangun	1. Perbaikan gizi masyarakat	Jumlah Kegiatan pos posyandu yang perlu peningkatan gizi - 10 posyandu	kegiatan	1	1	100%		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Tamanwinangun	2. Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah kelompok tim percepatan penyehatan lingkungan dan kader yang terfasilitasi	kelompok	12	12	100%		
	Kesehatan		**Kelurahan Tamanwinangun**	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**Tercapainya Kelurahan Pelaksana STBM**	**%**	**100**	**100**	**100%**		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Tamanwinangun	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Jumlah KK miskin penerima bantuan jamban keluarga	KK	6	6	100%		
	Kesehatan		**Kelurahan Kebumen**	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Terfasilitasinya Upaya Kesehatan Masyarakat**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Kelurahan Kebumen	Revitalisasi Posyandu	Jumlah kegiatan revitalisasi posyandu	kegiatan	7	7	100%		
	Kesehatan		**Kelurahan Kebumen**	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**Tercapainya Kelurahan Pelaksana STBM**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Kebumen	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Jumlah jamban yang terbangun	Unit	2	2	100%		
	Kesehatan		**Kelurahan Bumirejo**	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Terfasilitasi Pemberian TMT Bagi Masyarakat Di Kelurahan**	**%**					
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Bumirejo	1. Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	kegiatan	2	2	100%		
	Kesehatan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Kelurahan Bumirejo	2. Revitalisasi Posyandu	1 Jumlah Lokasi Posyandu Yang Diberi Tambahan Makanan, dan Vitamin	posyandu	8	8	100%		
	Kesehatan		Kelurahan Bumirejo		2 Jumlah Lokasi Posyandu yang Terfasilitasi	posyandu	8	8	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		**Kelurahan Bumirejo**	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**Tercapainya STBM kelurahan**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Bumirejo	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Unit Pengadaan Bantuan Sehat Jamban Keluarga	unit	8	8	100%		
	Kesehatan		**Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar**	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Terfasilitasinya Upaya Kesehatan Masyarakat**	**%**	**100**	**75**	**75%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar	Peningkatan kesehatan masyarakat	1 Jumlah unit pemberian bantuan jamban keluarga	Unit	3	0	0%		
	Kesehatan		Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar		2 Jumlah Paket Pengadaan Alat Kesehatan	Buah	9	9	100%		
	Kesehatan		**Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar**	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**Presentasi Balita Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan**	**%**	**100**	**75**	**75%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah Bulan Penyediaan Tambahan Makanan dan vitamin	Bulan	12	9	75%	pembatasan kegiatan karena pandemi covid 19	
	Kesehatan		**Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar**	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**Terselenggaranya perbaikan gizi masyarakat**	**%**	**100**	**50**	**50%**		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin Bagi Lansia Dan Balita	Kegiatan	2	1	0%	pembatasan kegiatan karena pandemi covid 19	
	Kesehatan		**Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar**	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**Tercapainya Kelurahan Pelaksana STBM**	**%**	**80**	**20**	**25%**	**Anggaran pelaksanaan kegiatan dirasionalisasi**	
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Jumlah jamban keluarga miskin yang dibangun	Unit	15	0	0%	kapasitas sdm dalam menyelesaikan administrasi keuangan belum optimal	
	Kesehatan		**Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar**	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Terfasilitasinya Upaya Keseahatan Masyarakat**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar	Perbaikan gizi masyarakat	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan perbaikan gizi masyarakat	bulan	12	12	100%		
	Kesehatan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar	Revitalisasi Posyandu	Jumlah Bulan penyelenggaraan Revitalisasi Posyandu	bulan	12	12	100%		
	Kesehatan		**Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong**	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**Presentasi Balita Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan**	**%**	**100**	**17**	**17%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah bulan penyediaan tambahan makanan dan vitamin	bulan	12	2	17%	dilakukan refocusing anggaran	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kesehatan		**Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong**	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**prosentase peningkatan ling.sehat**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	1 Jumlah masyarakat yang derajat kesehatannya meningkat	KK	10	10	100%		
	Kesehatan		Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong		2 Jumlah KK miskin penerima bantuan jamban keluarga	KK	10	10	100%		
	Kesehatan		**Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong**	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**prosentase meningkatnya kesehatan masyarakat**	**%**	**10**	**10**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong	Revitalisasi Posyandu	Jumlah kelompok posyandu yang difasilitasi	kelompok	10	10	100%		
	Kesehatan		**Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong**	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**Jumlah Kelurahan Pelaksana STBM**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Kesehatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Jumlah rumah KK miskin penerima bantuan jamban keluarga	kk/unit	10	10	100%		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan kesehatan adalah 95,61% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 83,29%. Terhadap tingkat kesesuain antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 114,79% atau kategori sangat tinggi.

Faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program adalah dengan dukungan kegiatan antara lain adanya tambahan anggaran untuk penanganan Covid-19, dukungan anggaran Pusat untuk insentif tenaga kesehatan serta penyediaaan anggaran dari BLUD UPTD Dinas Kesehatan dalam menunjang program tersebut. Adapun Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita tingkat capaian 59%. Hal ini bukan berarti capaian kinerjanya rendah, namun semakin rendah capaian, semakin menggambarkan bahwa jumlah kasus kematian bayi lebih rendah dari jumlah kasus yang diperkirakan terjadi. Yaitu semula diperkirakan 215 kasus realisasi hanya 127 kasus. Angka kematian bayi dipengaruhi pula oleh pemeriksaan dan perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan neonatus dan status gizi bayi (0-11 bulan). Adapaun persebaran 127 kasus tersebut dapat dilihat dari data sebagai berikut :

Tabel 3.5
Data Kasus Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Keterangan (Penyebab)
1.	Ayah	2	Kelainan bawaan
2.	Buayan	2	infeksi
3.	Puring	2	Asfeksia (gagal nafas)
4.	Petanahan	4	BBLR, Asfeksi, kelainan bawaan, infeksi
5	Klirong	8	BBLR, Asfeksia, kel bawaan, pnemonia
6.	Buluspesantren	2	infeksi
7.	Ambal	9	BBLR, Asfeksia, kel bawaan, infeksi
8.	Mirit	5	BBLR, Asfeksia, kel bawaan, infeksi
9.	Bonorowo	1	Asfeksia
10.	Prembun	4	Kelainan bawaan, BBLR
11.	Kutowinangun	4	BBLR, Asfeksia, kel bawaan, pnemonia
12.	Alian	3	Asfiksia, kel bawaan, pnemonia
13.	Padureso	2	BBLR
14.	Poncowarno	2	Asfeksia, kel bawaan
15.	Kebumen	9	BBLR, Asfeksia, kel bawaan, pnemonia
16.	Pejagoan	1	BBLR

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Keterangan (Penyebab)
17.	Sruweng	6	BBLR, asfeksia, kel bawaan
18.	Adimulyo	3	BBLR, asfeksia, infeksi
19.	Kuwarasan	4	BBLR, Infeksi, Diare
20.	Rowokele	4	Diare, infeksi, sepsis
21.	Sempor	4	BBLR, Kel bawaan
22.	Gombong	2	Kelainan bawaan, diare
23.	Karanganyar	5	BBLR, Asfiksia, infeksi
24.	Karanggayam	4	BBLR, Asfiksia, infeksi
25.	Sadang	2	Infeksi , asfeksia
26.	Karangsambung	7	BBLR, Asfiksia,kel bawaan, pneumonia

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, 2020

c. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kesehatan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perkembangan Indikator Kinerja
Urusan Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	100	100 %	100 %	100	96
2. Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	%	83,7	100 %	86 %	86	100
3. Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	%	83	84	84	100	84
4. Cakupan penanganan ibu hamil resiko tinggi	%	100	95 %	99 %	104	100
5. Persentase Kasus Gizi Buruk	%	0,04	0,03	0,03	100	0,01%

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
6. Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar kesehatan	%	100	100	100	100	90
7. Tingkat pelayanan kegawatdaruratan	%	100	100	100	100	100
8. Tingkat mutu pelayanan sarana kesehatan	%	100	100	100	100	98
9. Nilai kinerja kesehatan BLUD	-	100	100	100	100	A

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, 2020

Prosentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam bidang kesehatan. Tolak ukur ini dilihat dari tingkat ketersedaan obat dan perbekalan kesehatan, tingkat pelayanan kegawatdaruratan dan tingkat mutu pelaynan kesehatan dilihat dari semua Puskesmas sudah menerapkan manajemen kesehatan dalam hal ini akreditasi. Capaian sudah melebihi dari target yang ditetapkan berkat adanya dukungan anggaran yang cukup dan Puskesmas sudah menerapkan PPK BLUD.

Indikator penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan tolak ukurnya yaitu jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan dibandingkan dengan total jumlah penduduk, dari target yang ditetapkan yaitu 100 % tercapai 83,7 % . Hal yang mendasar yang sangat mempengaruhi tidak tercapainya indicator kinerja tersebut karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan bahwasanya terdapat harga iuran peserta yang naik sehingga alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan kurang, disamping itu perlu adanya verifikasi dan validasi lagi dari tim terkait.

Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan (Indek Survay Kepuasan Masyarakat) dari target yang ditetapkan yaitu 82 % telah mencapai 83 %, hal ini menunjukan bahwa pelayanan yang diberikan pada masyarakat sudah cukup optimal. Terhadap Cakupan pelayanan ibu hamil resiko tinggi tercapai 100 %, hal ini diartikan bahwa semua ibu hamil yang mengalami resiko tinggi (tidak normal) sudah ditangani dan ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan. Posentase kasus Gizi Buruk sudah tercapai (<0,1 %) hal ini dikarenakan adanya intervensi pada balita baik

bailta kurang dan gizi buruk, intervensi yang telah dilakukan antara lain pemberian PMT Pemulihan (selama 90 hari), PMT Penyuluhan dan edukasi mengenai PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak). Selain itu dilakukan kegiatan survailan gizi yang dimulai dari masyarakat (Posyandu), Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Pengumpulan data individu yang teratur aksn bias mendeteksi secara dini masalah gizi yang dihadapi sehingga analisis dan intervensi yang dilakukan akan tepat saran dan tepat waktu.

Jumlah kasus gizi buruk yang terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Kebumen sebanyak 18 Kasus. 18 kasus tersebut tersebar pada Kecamatan Buayan 2 kasus, Kecamatan Mirit 4 kasus, Kecamatan Prembun 1 kasus, Kecamatan Kutowinangun 1 kasus, Kecamatan Alian 1 kasus, Kecamatan Poncowarno 1 kasus, Kecamatan Kebumen 3 kasus, Kecamatan Pejagoan 1 kasus, Kecamatan Adimulyo 1 kasus, Kecamatan Rowokele 1 Kasus, Kecamatan Sempor 1 kasus, dan Kecamatan Gombong 2 kasus.

Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar kesehatan tercapai 100%. Adanya kebijakan sesuai dengan SPM Pelayanan Kefarmasian pada Kementrian Kesehatan setiap unit pelayanan dasara minimal terdapat 20 item jenis obat mewajibkan semua Puskesmas mengalokasikan minimal 20 obat item tersebut tercapai 100 %, adanya dukungna dana DAK maka obat tersebut bisa terpenuhi. Tingkat pelayanan kegawatdaruratan tercapai 100 % bahwa semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen sudah mampu melayani pasien kegawatdarutatan. Terhadap Tingkat mutu pelayanan sarana kesehatan tercapai 100 %. Tolok ukur indicator ini bahwa semua Puskesmas sudah menerapkan sistem manajemen kesehatan yaitu dari total 35 Puskesmas sudah dilakukan penilaian dan lulus akreditasi standart Nasional.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui program dan kegiatan berikut dengan capaian kinerja program dan kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.7

Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangmKabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**12**
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Program Peningkatan Jalan & Jembatan**	Prosentase jalan kabupaten kualitas baik	%	60,00	73,16	121,93%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Kegiatan Peningkatan Jalan	1 Jumlah persentase jalan yang tertangani	Km	31,71	31,71	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		2 Jumlah persentase JJLU di Kawasan Perhutani (Wadasmalang slepi , Wadasmalang sadangkulon ,Wadasmalag sadangkulon (nonperhutani) , Kebakalan giritirto , Pagebangan somagede, Kenteng ketileng) yang tertangani	Km	1,40	1,40	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		3 Jumlah ruas Jalur alternatif mudik -Giwangretno adikarto (pelebaran) , Adikarto Kemujan, Kemujan Karangsari (jembatan baru dibangun 2 di caruban dan bonjok), Meles Banjareja , Banjareja Rogodono Petanahan pantai yang tertangani	Km	5,55	5,55	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		4 Jumlah panjang Jalan Stasiun Kereta Api Kebumen yang tertangani	Km	0,50	0,50	100,00%	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		5 Jumlah Ruas Jalan Beton (Jalan Jatisari - Kejayan (SMPN 1 Bulus Ketimur), Jalan Kaliputih-Jatipurus (Dekat Makam Somalangu), Jalan Patukgawemulyo - Patukrejomulyo, Jalan, Sidogede - Pejagatan, Jalan Mirit Petikusan - Pantai, Jalan Kedungbajul - Poncowarno, Jalan Karangsari - Babadsari,, Jalan Krakal-Kaligending,, Jalan Kembaran - Kedungbener, Jalan Mertakanda - Giwangretno, Jalan Karanggayam - Kebakalan, Jalan Gunungsari - Selogiri, Jalan Selokerto - Buayan, Jalan Jatiluhur - Wonoharjo, Jalan Rowokele- Banyumudal, Jalan Geblug-Candirenggo, Jalan Korowelang-Mulyosari, Jalan Gumeter - Kabuaran, Jalan Semali - Kedungwringin) Yang Tertangani	Km	24,26	24,26	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		6 Jumlah ruas Jalan menuju kawasan industri di desa tegalretno yang tertangani	Km	0,00	0,00	0,00%	Masih tahap pembebasan lahan	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2 Kegiatan Peningkatan Jembatan	-Jembatan pada Ruas Jalan Wonotirto-Gunungsari, Jalan Banjareja - Rogodono, Jalan Meles-Banjareja, Jalan Pagebangan-Somagede, Jalan Kenteng-Ketileng, Jl. Lajerkidul-Sinungrejo, Jl. Sidogede-Pejagatan, Jl. Kabekelan-Lembupurwo, Jalan Karangsambung-Sadangwetan, Jl. Grenggeng-Pohkumbang, Jl. Sinungrejo-Pekutan,	Unit	11,00	5,00	45,45%	Rasionalisasi Anggaran	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	capaian jalan dalam kondisi mantap	%	70,94	73,16	103%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Perencanaan pembangunan jalan	1 Jumlah dokumen perencanaan jalan yang dibuat	Dokumen	6,00	6,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		2 Jumlah DED Jalan lingkar pesisir Ayah yang dibuat	Dokumen	1,00	0,00	0,00%	Gagal Lelang	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		3 Jumlah izin lingkungan dan izin perhutani JJLU yang dibuat	Dokumen	8,00	8,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		4 Jumlah DED JJLU dan DED pembangunan jalan yang dibuat	Dokumen	1,00	1,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		5 Jumlah dokumen perencanaan jalan yang dibuat	Dokumen	6,00	6,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		6 Jumlah Amdal perhutani yang dibuat	Dokumen	1,00	0,00	0,00%	Tidak dapat dilaksanakan, karena wilayah hutan lindung	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2 Pembangunan jalan	1 Jumlah paket jalan yang dibangun	Paket	1,00	1,00	100,00%	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		2 Jumlah jalan Menuju Kawasan Industri yang terbangun (Petanahan - Pantai)	Paket	1,00	1,00	100,00%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3 Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jembatan kabupaten	Dokumen	2,00	3,00	150,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4 Pembangunan jembatan	Jumlah unit jembatan yang dibangun	Unit	1,00	1,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Jumlah bulan Monev Kegiatan dan Operasional bidang Binamarga yang dilaksanakan	Bulan	12,00	12,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		2 Jumlah kegiatan Operasional Seksi Jalan yang dilaksanakan	Kegiatan	25,00	25,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		3 Jumlah kegiatan Operasinal Seksi OP Jalan yang dilaksanakan	Kegiatan	36,00	36,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		4 Jumlah kegiatan Operasional Seksi Jembatan yang dilaksanakan	Kegiatan	2,00	2,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Program pembangunan saluran Drainase/ gorong-gorong**	Prosentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	75,00	75,00	100,00%	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah lokasi Saluran Drainasi/Gorong-Gorong yang dibangun	Lokasi	23,00	23,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2 Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong	Jumlah lokasi saluran Drainase/Gorong-gorong yang dipelihara	Lokasi	10,00	10,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Program pembangunan turap/talud/bronjong**	Jumlah Turap/Talud/Bronjong Yang Terbangun	Meter	700,00	700,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Perencanaan turap/talud/bronjong	Jumlah dokumen perencanaan turap/talud/bronjong yang direncanakan	Dokumen	2,00	0,00	0,00%	Rasionalisasi Anggaran	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2 Pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah panjang turap/tanggul/bronjong yang yang dibangun	Meter	700,00	700,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**	Jumlah Ruas Jalan dan Jembatan Yang Terpelihara	Km	31,83	30,81	96,79%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah dokumen perencanaan perbaikan jalan kabupaten yang direncanakan	Dokumen	15,00	15,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi jembatan kabupaten yang direncanakan	Dokumen	4,00	4,00	100,00%	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	1 Jumlah panjang Ruas Jalan Tanjungsari Nampudadi, Ruas Jalan Podourip Sugihwaras, Ruas Jalan Lajer Kidul Sinungrejo, Ngabean Pekutan, Kembaran-Kedungbener yang direhabilitasi/dipelihara	Km	4,51	4,51	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		2 Jumlah persentase Perbaikan jalan Kabupaten lainnya oleh Tim Reaksi Cepat dan UPTD DPUPR (200 ruas) yang diperbaiki	Ruas	200,00	78,00	39,00%	Bertambahnya panjang jalan yang mengalami kerusakan/ memerlukan pemeliharaan rutin	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		3 Jumlah panjang Ruas Jalan Triwarno Jlegiwinangun, Ruas Jalan Rejosari Pagedangan, Ruas Jalan Kebulusan Sidomulyo, Ruas Jalan Kritig Petanahan, Ruas Jalan Langse Pujegan, Ruas Jalan Kemujan Adikarto, Ruas Jalan Sidomulyo Patemon, Ruas Jalan Sidodadi Kamulyan, Ruas Jalan Adimulyo Duduhan, Ruas Jalan Puring Pantai, Ruas Jalan Petanahan Pantai, Ruas Jalan Sempor Lama, Ruas Jalan Purbowangi Jatinegara, Ruas Jalan Rogodono Gondosulih, Ruas Jalan Jatijajar Candirenggo, Ruas Jalan Karangbolong Goa Bolong, Ruas Jalan Pasir TPI, Ruas Jalan Karangduwur TPI, Ruas Jalan Karanggayam Kebakalan, Ruas Jalan Peniron Kebakala, Ruas Jalan Pringtutul Jatijajar, Ruas Jalan Demangsari	Km	16,28	16,28	100,00%	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Jatijajaryang direhabilitasi/dipelihara						
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah unit jembatan yang direhabilitasi	Unit	16,00	15,00	93,75%	Rasionalisasi Anggaran	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5 Pengadaan Aspal/PC untuk bantuan ke Tk Desa/Kelurahan	1 Jumlah sak Aspal/PC untuk bantuan ke Tk Desa/Kelurahan yang diadakan	Zak	53.000,00	53.000,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		2 Jumlah pengadaan aspal/PC Jalan ke makan Bulupitu Kutowinangun	-	-	-	-	Tidak ada program bantuan aspal/PC jalan ke makam Bulupitu Kutowinangun	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan (DAK)	1 Jumlah ruas jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala atau peningkatan struktur	Ruas	4,00	3,00	75,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		2 Jumlah Ruas Jalan Buamiagung - Demangsari yang dilakukan pemeliharaan berkala	Km	5,00	5,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		3 Jumlah Ruas Jalan Demangsari - Ayah yang dilakukan pemeliharaan berkala	Km	3,00	3,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		4 Jumlah Ruas Jalan Kedungwinangun - Bendogarap yang dilakukan pemeliharaan berkala	Km	2,02	2,02	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		5 Jumlah Ruas Jalan Gumenter - Kabuaran yang dilakukan Peningkatan Strukturnya	Km	1,02	0,00	0,00%	Rasionalisasi Anggaran	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat yang dilaksanakan	Bulan	12,00	12,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**	Capaian Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Ha	9.195,00	8.987,00	97,74%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah Dokumentasi Perenanaan Teknis yang tercukupi	Paket	10,00	10,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2 Perencanaan pembangunan pintu air	Jumlah dokumen perencanaan pintu air yang tersusun	Paket	2,00	2,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3 Perencanaan normalisasi saluran sungai	Jumlah dokumen perencanaan teknik jaringan sungai yang disusun	Dokumen	6,00	6,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Jumlah paket pembangunan fisik jaringan irigasi DI Pringtutul dan DI Jatinegara (IPDMIP) dan pembangunan fisik jaringan irigasi nonn IPDMIP	Paket	13,00	13,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5 Pemberdayaan petani pemakai air	1 Persentase kegiatan IPDMIP yang dilaksanakan	Kegiatan	4,00	4,00	100,00%	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		2 Persentase kegiatan Operasional program IPDMIP yang dlaksanakan	Kegiatan	3,00	3,00	100,00%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		3 Persentase kegiatan Pembentukan dan penguatan Persatuan Petani Pengguna Air yang dlaksanakan	P3A	265,00	265,00	100,00%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Jumlah kegiatan belanja operasional seksi sungai yang dilaksanakan	Kegiatan	6,00	6,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		2 Jumlah kegiatan belanja operasional seksi air baku yang dilaksanakan	Kegiatan	4,00	4,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		3 Jumlah kegiatan belanja operasional seksi irigasi yang dilaksanakan	Kegiatan	6,00	6,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7 Opersi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah paket fungsi jaringan irigasi yang dipelihara	Paket	13,00	13,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8 Operasi dan pemeliharaan Sungai	Jumlah lokasi jaringan sungai yang berfungsi dengan baik	Lokasi	5,00	5,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	Jumlah paket fungsi jaringan irigasi yang terpelihara	Paket	2,00	2,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**	Terpenuhinya Kebutuhan Air Baku Pada Saat Musim Kemarau	Lokasi	2,00	2,00	100,00%	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Jumlah lokasi prasarana pengambilan/saluran pembawa yang terbangun	Lokasi	2,00	2,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**	Terwujudnya Konservasi Sumber Air yang berkelanjutan	Lokasi	9,00	9,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah lokasi Embung yang terbangun	Embung	2,00	2,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah lokasi Bangunan Embung direhabilitasi	Lokasi	7,00	7,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3 Perencanaan bangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan Embung yang disusun	Dokumen	7,00	7,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	16,53	12,70	76,83%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah lokasi Sarana dan prasarana Air Minum masyarakat berpengasilan rendah yang tersedia	Lokasi	15,00	15,00	100,00%	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Program Pengendalian Banjir**	Prosentase Peningkatan Perlindungan Perumahan Penduduk dan Areal Persawahan Serta Areal Pariwisata Beserta Infrastrukturnya Dari Bencana Banjir dan Abrasi	Lokasi	27,00	27,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Jumlah lokasi bantaran dan tanggul sungai yang dipelihara	Lokasi	8,00	8,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Jumlah lokasi pengendalian banjir yang dicapai	Lokasi	5,00	5,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3 Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase	Jumlah lokasi drainase yang dibangun/dipelihara	Lokasi	9,00	9,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4 Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara	Jumlah lokasi pantai dan muara sungai yang berfungsi dengan baik	Lokasi	5,00	5,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	Prosentase Air Bersih Dalam Kondisi Baik	%	16,53	19,74	119,42%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Jumlah lokasi SPAM yang dibangun	Lokasi	13,00	13,00	100,00%	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Jumllah desa yang tersedia Air bersih yang aman	Desa	160,00	160,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya**	Prosentase Kondisi Pembangunan Keciptakaryaan	Paket	48,00	48,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	Jumlah paket kegiatan pembangunan gedung kantor pemerintah yang dibangun	Paket	4,00	4,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor pemerintahan	Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemerintahan yang dilaksanakan	Paket	10,00	10,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3 Perencanaan Sarana/ Prasarana Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan sarana dan prasarana permukiman yang tersedia	Dokumen	30,00	30,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4 Perencanaan Gedung	Jumlah dokumen DED gedung kantor pemerintah yang direncanakan	Paket	4,00	4,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Program Perencanaan Tata Ruang**	Penataan Ruang	Kegiatan	13,00	12,00	92,31%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen teknis rencana detail tata ruang perkotaan kutowinangun Kabupaten Kebumen yang tersedia	Dokumen	1,00	0,00	0,00%	Gagal Lelang	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah Rapat Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah dan Pelayanan	Rapat	12,00	12,00	100,00%	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		infrastruktur yang berkualitas			Informasi Tata Ruang (ITR) yang terlaksana						
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Pemohon	459,00	459,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Pengawasan pemanfaatan ruang	1 Jumlah persentase kegiatan pengawasan penataan ruang yang terlaksana	Pemohon ITR	600,00	600,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		2 Jumlah pemohon kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten kebumen terkait IMB yang dilaksanakan	Pemohon ITR	600,00	600,00	100,00%	Personil Terbatas, ITR dijadikan syarat untuk IMB	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		3 Jumlah persentase kegiatan tim Koordinasi penataan ruang daerah kab.kebumen yang dilaksanakan	Rapat	12,00	12,00	100,00%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		4 Jumlah persentase kegiatan tim ahli bangunan gedung dan sertifikasi layak fungsi yang dilaksanakan	Pemohon IMB dan ITR	177,00	177,00	100,00%	Pemohon SLF sebanyak 45, tidak semua pemohon IMB mengajukan SLF	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Program tanggap darurat jalan dan jembatan**	Berfungsinya kembali jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana	%	100	100	100.00%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanganan infrastruktur jalan pasca bencana alam	Jumlah Jembatan yang diperbaiki	paket	1	1	100.00%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Program Pengendalian Banjir**	Berfungsinya kembali secara normal tebing/tanggul sungai yang rusak akibat bencana	%	100	100	100.00%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembangunan Infrastruktur Pengarian Pasca Bencana Alam	Jumlah perbaikan pasca bencana (Tebing sungai Cangkring, sungai Kedungdawa,sungai Roworejo,sungai Krasak dan sungai Besole)	paket	5	5	100.00%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	Terpeliharanya fasilitas pelayanan publik di tingkat kelurahan	%	100	97	97%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	1. Jumlah Paket Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum Pelayanan Publik	%	100	96	96%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		2. Jumlah Lingkungan Tematik di RW 001 yang terpelihara	%	100	99	99%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		3. Jumlah Saluran Drainase di RW 004 yang terpelihara	%	100	85	85%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		4. Jumlah Saluran Drainase (Perbatasan Kel. Kebumen) di RW 003 yang terpelihara	%	100	97	97%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		5. Jumlah Saluran Drainase di RT 001 RW 006 yang terpelihara	%	100	99	99%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		6. Jumlah Jalan Setapak (ke makam) di RT 002 RW 004 yang terpelihara	%	100	93	93%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		7. Jumlah Jalan di RW 006 yang terpelihara	%	100	99	99%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		8. Jumlah Jalan Aspal di RW 007 & RW 008 yang terpelihara	%	100	92	92%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		9. Jumlah Jalan Setapak di RT 002 RW 003 Kelurahan Panjer	%	100	96	96%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		10. Jumlah Saluran Drainase (depan SD N 1 Panjer) di RW 002 yang terpelihara	%	100	99	99%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		11. Jumlah Lingkungan Tematik di Jl. Gelatik yang terpelihara	%	100	99	99%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		12. Jumlah Saluran Drainase di RT 005 dan 007 yang terpelihara	%	100	99	99%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	Terpeliharanya fasilitas pelayanan publik di tingkat kelurahan	paket	13	13	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	1. Jumlah Paket pemeliharaan prasarana fasilitas umum pelayanan publik	M'	13	13	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		2. Jumlah jalan lingkungan di RW 7 yang terpelihara	M'	320	320	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		3. Jumlah jalan setapak RT. 01 RW. 05 yang terpelihara	M'	186	186	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		4. Perbaikan plat deker di RW. 01 yang terpelihara	M'	300	300	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		5. Pemeliharaan drainase di RW. 01 yang terpelihara	M'	300	300	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		6. Pemeliharaan drainase RW. 07 yang terpelihara	M'	120	120	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		7. Jumlah jalan setapak di RW. 06 yang terpelihara	M'	140	140	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		8. Jumlah rabat beton di RW. 10 yang terpelihara	M'	90	90	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		9. Jumlah talud lapangan yang terpelihara	M'	210	210	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		10 Jumlah drainase di RW. 06 yang terpelihara	M'	180	180	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		11. Jumlah drainase di RW. 03 yang terpelihara	M'	140	140	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		12. Jumlah drainase di RW. 09 yang terpelihara	M'	220	220	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		13. Jumlah setapak RT. 03 RW. 09 yang terpelihara	M'	340	340	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	Terpeliharanya fasilitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan	%	100	100	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	1. Jumlah prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	lokasi	19	19	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		2. Jumlah Talud Makam yang terpelihara di RW 01 (lanjutan)	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		3. Jumlah Talud yang terpelihara di RT 03 RW 02 (lanjutan)	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		4. Jumlah Talud yang terpelihara di RW 03 (lanjutan)	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		5. Jumlah Jalan Paving yang terpelihara di RT.05 RW 04	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		6. Jumlah Drainase yang terpelihara di RW 04	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		7. Jumlah Jalan Setapak yang terpelihara di RT 03 RW 05	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		8. Jumlah Drainase yang terpelihara di RW 05	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		9. Jumlah Pavingisasi yang terpelihara di RT. 05 RW 07	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		10. Jumlah Drainase yang terpelihara di RW 07	paket	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		11. Jumlah Talud yang terpelihara di RT 03 RW 07	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		12. Jumlah Jalan Aspal yang terpelihara di RW 08	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		13. Jumlah Jalan Setapak yang terpelihara di RW 08	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		14. Jumlah Drainase Got U yang terpelihara di RW 08	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		15. Jumlah Jembatan yang terpelihara di RW 08	paket	0	0	0%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		16. Jumlah Talud saluran yang terpelihara di RT 01 RW 09	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		17. Jumlah Tenaga Harian Lepas	bulan	12	12	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		18. Jumlah Administrasi Pelaksanaan Pelayanan Publik	bulan	10	6	60%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		19. Jumlah Jalan Aspal yang terpelihara di RW 09	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		20. Jumlah Saluran air yang terpelihara di RW 03	paket	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		21. Jumlah Bantan Sumur Bor yang tersedia di RW 01	paket	0	0	0%	rasionalisasi anggaran	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		22. Jumlah Jalan Setapak yang terpelihara di RT 04 RW 09	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan	%	100	100	100,00%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	jumlah kegiatan pembangunan fasilitas umum	Kegiatan	3	3	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	Terpeliharanya Fasilitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kelurahan	%	100	100	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Jumlah pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik (RW 1 untuk 2 Lokasi, RW 2 untuk 2 Lokasi, RW 3 untuk 2 Lokasi, RW 4 untuk 3 Lokasi, RW 5 untuk 3 Lokasi, RW 6 untuk 3 Lokasi)	unit	15	15	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	Prosentase meningkatnya infrastruktur perdesaan	%	100	76	76%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	1. Jumlah prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Unit	19	13	68%	Pelaksana Teknis Kegiatan tdk cukup waktu untuk menyelesaikan	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan		2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Orang/ Bulan	5	0	0%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Karanganyar								
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		3. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	Bulan	12	12	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		4. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	Kali	0	0	0%	rasionalisasi anggaran	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		5. Rabat Beton RT 04 RW 01	M'	75	75	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		6. Rabat Beton RT 06 RW 01	M'	50	50	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		7. Rabat Beton RT 01 RW 02	M'	150	150	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		8. Rabat Beton RT 02 RW 02	M'	150	150	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		9. Rabat Beton RT 03 RW 03	M'	150	150	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		10. Pembangunan Talud Makam Gama RW 03	M'	0	0	0%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		11. Pemeliharaan Jalan Kali Gawe Rw 04	M'	130	130	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		12. Talud PAUD Kuncup Mekar RW 04	M'	30	30	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		13. Pembangunan Posyandu RW 04	Unit	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		14. Pemeliharaan Saluran Tersier Ngebak RW 02	M'	75	75	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		15. Pembangunan Gedung Pertemuan RT 02 RW 02	Unit	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		16. Talud Pengaman Banjir RT 03 RW 02	M'	100	0	0%	rasionalisasi anggaran	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		17. Talud Sikenong RW 04	M'	25	0	0%	Pagu pekerjaan dirasionalisasi	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		18. Drainase RT 04 RW 04	M'	100	100	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		19. Drainase RT 02 RW 05	M'	75	0	0%	Pagu pekerjaan dirasionalisasi	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		20. Drainase Bentar RW 05	M'	75	0	0%	Pagu pekerjaan dirasionalisasi	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		21. Pemeliharaan Jalan Siladrang RT 02 RW 05	Unit	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		22. Talud Purwakuning RW 05	M'	25	25	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		23. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Orang/ Bulan	5	0	0%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		24. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	Bulan	12	12	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		25 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	Kali	4	0	0%	rasionalisasi anggaran	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		26 Belanja Upah Harian	Orang/ Hari	2366	1966	83%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar		27 Terpeliharanya fasilitas pelayanan publik di tingkat kelurahan	Kegiatan	7	6	86%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	Prosentase meningkatnya infrastruktur perdesaan	%	100	99,62	99,62%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	1 Jumlah paket	Paket	2	2	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar		2 Pemeliharaan gedung Serba Guna	Unit	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar		3 Pembuatan Talud Makam	m	1	0	0%	Rasionalisasi anggaran	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar		4 Pemeliharaan Saluran Irigasi	m3	60	60	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar		5 Rabat Beton RW 02	m3	50	50	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar		6 Rabat Beton RW 03	m3	150	150	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	Prosentase meningkatnya infrastruktur perdesaan	%	100	100	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	1 Pemeliharaan jalan RT.07 RW.01	paket	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong		2 Rehab Drainase RT 08 RW 01	meter	100	100	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong		3 Rehab Rabat Beton RT 02 RW 01	m2	189,8	189,8	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong		4 Rehab Rabat Beton RT 05 RW 03	m2	260	260	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Gombong Kecamatan		5 Pemeliharaan Dainase pinggir jalan aspal Gang Anggrek RW 01	paket	1	1	100%	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Gombong								
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong		6 Refraktor (lampu spion kaca cembung)	buah	10	10	100%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong		7 Sewa molen	hari	30	30	100%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong		8 Pemeliharaan Drainase RT.07 RW.03	meter	77	77	100%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong		9 Rabat Beton RT 02 RW 03	m2	612	612	100%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong		10 Rabat Beton RT 03 RW 01	m2	160	160	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong		11 Pemeliharaan rabat beton TPU Kawo	m2	50	50	100%	-	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	Terpeliharanya fasilitas pelayanan publik di tingkat kelurahan	%	100	100	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	1 Jumlah lokasi prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik yang dibangun/dipelihara	lokasi/unit	16	16	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		2 Jumlah meter talud jalan Semondo-Wonokriyo yang terbangun	meter	50	50	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		3 Jumlah meter rehab rabat beton RW. 8	meter	25	25	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		4 Jumlah meter saluran tersier blok Pusri yang terbangun	meter	200	200	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		5 Jumlah meter saluran tersier blok Kendalgrowong yang terbangun	meter	200	200	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		6 Jumlah meter rehab drainase RW. 2	meter	30	30	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		7 Jumlah unit Rehab gedung PKD	unit	1	1	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		8 Jumlah meter Pengaspalan jalan RW. 7	meter	75	75	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		9 Jumlah meter rabat jalan makam Karangduren	meter	200	200	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		10 Jumlah meter pengaspalan jalan Kepodang RW. 4	meter	150	150	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		11 Jumlah meter rehab Drainase RW. 7	meter	100	100	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		12 Jumlah meter pengaspalan jalan RW. 2	meter	200	200	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		13 Jumlah meter pengaspalan jalan RW. 1	meter	150	150	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		14 Jumlah meter rehab plat deker RW. 9	meter	3x 1,5	3x 1,5	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		15 Jumlah meter pembangunan talud lapangan wonokriyo	meter	110	110	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		16 Jumlah meter Pengurugan lapangan Wonokriyo	meter kubik	283	283	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		17 Jumlah meter rehab drainase RW. 6	meter	25	25	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	Terpeliharanya fasilitas pelayanan publik di tingkat kelurahan	%	100	100	100%		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	1 Jumlah lokasi prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik yang dibangun/dipelihara	lokasi/unit	16	16	100%		
					- pemeliharaan Pengaspalan RW 1	m	717	717	100%		
					- penguatan jalan RW 2	m	190	190	100%		
					- penguatan saluran RW 3	m	130	130	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					- pemeliharaan jalan RW 4	m	652	652	100%		
					- pemeliharaan saluran RW 5	m	235	235	100%		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatas, dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 99,20% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan. Sementara capaian kinerja kegiatan adalah 95,07%, sehingga kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah sangat tinggi.

Adapaun program yang tidak mencapai target adalah Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Faktor yang menjadi penyebab adalah :

1. Masih terdapat lebar Jalan Kabupaten yang belum standar dan lebar RMJ kurang memenuhi kebutuhan lebar jalan standar
2. Sebagian besar Jalan Kabupaten terdapat di daerah pegunungan, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih kompleks
3. Jalan Kabupaten dilalui Kendaraan ODOL sehingga mengurangi umur ekonomi
4. Kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang masuk dalam daerah rawan bencana dan berdampak pada infrastruktur
5. Perlunya penanganan drainase perkotaan
6. Permasalahan perijinan dengan Perhutani
7. Masih ada wilayah irigasi yang belum bisa terairi sepanjang musim tanam

c. Capaian Kinerja Urusan

Pelaksanaan program pada urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah. Adapan perkembangan indikator kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perkembangan Indikator Kinerja
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 2019-2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Capaian jalan kabupaten dalam kondisi matap	%	54,691	60	73,16	121,93	60,00
2. Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	68,18	77	73,3	95,19	80,00
3. Cakupan pelayanan air bersih	%	66,75	16,53	19,74	119,42	16,53

Sumber : DPU PR Kabupaten Kebumen

Panjang jalan di Kabupaten Kebumen yang baru adalah 960,358 kilometer sedangkan jalan dalam kondisi mantap tahun 2020 adalah sebesar 702,591 kilometer atau capaian sebesar 73,16 %.

Tabel 3.9
Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

NO.	URAIAN	Kondisi awal	PANJANG JALAN (km)	
		2015	2019	2020
1	Kondisi Baik	447,82	525,233	365,191
2	Kondisi Sedang	199,61	187,625	337,400
3	Kondisi Rusak Ringan	150,21	121,138	124,364
4	Kondisi Rusak Berat	176,69	126,362	133,403
5	Jalan secara keseluruhan	974,33	960,358	960,358
Proporsi Kondisi Baik (%)		45,96	54,5	38,027
Proporsi Kondisi Sedang (%)		20,49	16,67	35,133
Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)		15,42	11,9	12,950
Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)		18,13	16,94	13,891

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2020

Pada Tahun Tahun 2020 jumlah luasan jaringan dalam kondisi baik sebesar 8.986,06 Ha, Sedangkan Total luasan jaringan irigasi sebesar 12.260 Ha, atau capaian kinerja sebesar 73,3%. Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya lebih lebih tinggi, namun capaian tersebut masih di bawah target yang direncanakan hal ini disebabkan oleh masih banyak saluran dan bendungan yang mengalami kerusakan.

Tabel 3.10
Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen

NO.	URAIAN	2019	2020
1	Irigasi Teknis Sekunder (m)	184.418	184.418
2	Irigasi Teknis Tersier (m)	28.300	28.300
3	Irigasi Kondisi Baik (%)	68,18%	73,3%
4	Irigasi Kondisi Sedang (%)	3,20%	1,73%
5	Irigasi Kondisi Rusak Ringan	0,97%	1,28%
6	Irigasi Kondisi Rusak Berat	27,65%	23,69%

Sumber: DPUPR, 2020

Cakupan Air bersih yang digunakan oleh rumah tangga sejumlah 89.637 sambungan rumah dengan jumlah seluruh rumah tangga 454.165 rumah tangga atau capaian kinerja sebesar 19,74 %. keberhasilan indikator ini didukung oleh ketersediaan sumber mata air dan pengelola (kelompok pengelola SPAM), apabila sumber mata air banyak dan pengelolaan yang baik berkelanjutan maka bangunan akan berfungsi dengan baik, sehingga air bersih dapat tersalurkan ke masyarakat.

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dilaksanakan dengan 3 (tiga) prioritas program kegiatan yaitu : Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Capaian kinerja program dan kegiatan urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.11

Capaian Program dan Kegiatan Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	**Program Pengembangan Perumahan**	Cakupan rumah layak huni	%	100	99,55	99,55%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1. Fasilitasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu yang difasilitasi (DAK 117 unit, P2MKM 862 unit, APBD Provinsi 708 unit)	unit	1687	1687	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah	unit	9	9	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		3. BOP fasilitasi DAK Perumahan (TFL, Sosialisasi, Monev)	bulan	12	12	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		4. BOP fasilitasi P2MKM	bulan	12	12	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	Prosentae penanganan kawasan kumuh perkotaan	%	83,33	48	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Penanganan kawasan kumuh perkotaan	Fasilitasi dan operasional penanganan kawasan kumuh perkotaan	bulan	12	12	100%		
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		Jumlah sosialisasi dan pendampingan serta oprasional penanganan kawasan kumuh (bankeu dan kotaku)	desa	4	4	100%		
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		Jumlah sosialisasi dan pendampingan serta oprasional DAK sanitasi (di kawasan kumuh)	lokasi	0	0	0%	realisasi anggaran karena covid 19	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh Dk. Kemitir	dokumen	1	1	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	**Program pengelolaan areal pemakaman**	Areal pemakaman umum yang tertata	lokasi	2	2	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah dokumen review DED areal pemakaman	paket	1	1	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah bulan pemeliharaanpemakaman milik pemerintah daerah yang dipelihara	bulan	12	12	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial**	**Berfunsinya kembali rumah hunian yang layak akibat bencana alam/sosial**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Jumlah material bahan bangunan bantuan perbaikan rumah rusak akibat bencana	ls	1	1	100.00%	nihil	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Satuan Polisi Pamong Praja	**Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**	**Kesiapsi-agaan Pencegahan bahaya kebakaran di lokasi kelem-bagaan pemerintah, sekolah dan Dunia Usaha**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah kegiatan penanggulangan kebakaran	bulan	12	12	100%		
		Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah peserta pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran (sebagai relawan)	org	240	240	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	3. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran;	unit	12	12	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen	**Program Pengembangan Perumahan**	Jumlah RTLH Yang Tertangani Oleh Kelurahan	%	100	100	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah RTLH yang tertangani	unit	3	3	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	**Program Pengembangan Perumahan**	Jumlah RTLH yang tertangani oleh kelurahan	%	100	100	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab	unit	6	6	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	**Program Pengembangan Perumahan**	Jumlah RTLH yang tertangani oleh kelurahan	%	100	100	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	%	10	10	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	**Program Pengembangan Perumahan**	Jumlah RTLH yang tertangani oleh kelurahan	%	100	100	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah RTLH yang direhabilitasi	%	8	8	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar	**Program Pengembangan Perumahan**	Jumlah RTLH yang tertangani oleh kelurahan	%	100	0	0%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	Unit	4	0	0%	Belum terbitnya SK bupati tentang penerima Bansos	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar	**Program Pengembangan Perumahan**	Prosentase meningkatnya RTLH	Unit	2	0	0	Belum tercukupinya syarat pencairan administrasi	akan dilaksanakan tahun berikutnya
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	Unit	2	0		Belum tercukupinya syarat pencairan karena belum ada SK Bupati tentang alokasi Bansos tingkat Kelurahan	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	**Program Pengembangan Perumahan**	Prosentase meningkatnya RTLH	%	100	100	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK)	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	unit	7	7	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Kelurahan Pnjatan Kecamatan Karanganyar	**Program Pengembangan Perumahan**	Prosentase meningkatnya RTLH	%	100	100	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK)	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	unit	3	3	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	**Program Pengembangan Perumahan**	prosentase meningkatnya jumlah perumahan layak huni	%	100	60	60%	rasionalisasi di perubahan anggaran	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah Rumah RTLH yang terehabilitasi	unit	10	6	60%	rasionalisasi di perubahan anggaran	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong	**Program Pengembangan Perumahan**	Jumlah RTLH yang tertangani oleh kelurahan	unit	5	5	100%		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah Rumah RTLH yang terehabilitasi	unit	5	5	100%		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Perumahan dan Permukiman diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 83,97% atau kategori Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sementara rata-rata capaian kegiatan adalah 91,25%. Analisis tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 92,02% atau sangat tinggi.

Adapun Program Program Pengembangan Perumahan persentase tingkat capaian 99,55%. Faktor yang menyebabkan tidak tercapaianya kinerja program adalah adanya refocusing anggaran kegiatan. upaya yang akan dilakukan pada masa yang akan datang antara lain merencanakan anggaran untuk penyelesaian sisa kinerja yang belum dicapai.

c. Capaian Kinerja Urusan

Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020 sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perkembangan Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	%	32,27	83,33	48,78	58,54	100
2. Cakupan rumah layak huni	%	98,04	100	99,55	99,55	100

Sumber : DISPERKIM LH Kabupaten Kebumen, 2020

Penanganan kawasan kumuh mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 7 indikator yaitu penataan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/563/KEP/2014 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen seluas 213,622 Ha, meliputi 5 wilayah kecamatan yaitu Kec. Gombong (2 kelurahan), Kec. Karanganyar (2 kelurahan dan 1 desa), Kec. Kebumen (5 kelurahan dan 3 desa), Kec. Kutowinangun (4 desa), Kec. Prembun (4 desa).

Belum tercapainya indicator penanganan kawasan kumuh terutama disebabkan anggaran penanganan kawasan kumuh membutuhkan anggaran yang relative besar dengan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sampai saat ini alokasi anggaran untuk penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat belum sesuai dengan rencana, di samping itu untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah desa masih terkendala dengan permasalahan asset.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan koordinasi dan mengusulkan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi (APBD provinsi) dan pusat (APBN dan DAK). Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya yaitu dengan merencanakan program/kegiatan dan melakukan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi anggaran penanganan kawasan kumuh sesuai dengan pembagian kewenangannya.

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiaman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat. Berikut data perkembangan Cakupan rumah layak huni Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 :

Tabel 3.13
Capaian Penanganan Rumah Layak Huni
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

NO	URAIAN	2019	2020
1	Jumlah rumah	306.885	306.885
2	Jumlah rumah layak huni	300.873	305.506
3	Jumlah rumah tidak layak huni	6.012	1.379
4	Persentase rumah layak huni	98,04%	99,55
5	Persentase rumah tidak layak huni	1,96%	0,45

Sumber ; Disperkim LH Kab. Kebumen,2020

Berdasarkan Database Perumahan Kabupaten Kebumen yang disusun tahun 2014 sebagai data dasar penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kebumen, jumlah rumah di Kabupaten Kebumen sebanyak 306.885 unit dengan jumlah RTLH sebanyak 26.908 unit.Sampai dengan akhir tahun 2019, dari RTLH sejumlah 26.860 unit sudah tertangani sejumlah 25.481 unit, sehingga masih tersisa 1.379 unit yang akan ditangani pada tahun 2021.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program prioritas antara lain : Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal.

Keseluruhan program tersebut terbagi dalam beberapa perangkat daerah diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Kecamatan. Adapun capaian program dan kegiatan sesuai dengan target perjanjian kinerja sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik**		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**bulan**	6	6	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah bulan terlaksananya rakor Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, Rakor Kamtibmas, Evaluasi Kamtibmas	Bulan	6	6	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	**Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik**		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Banyaknya masyarakat yang sadar akan nilai-nilai luhur budaya bangsa**	**%**	**100**	**93**	**93%**		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah orang yang terbina rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Kabupaten Kebumen	orang	0	0	0%	refocusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan rangkaian peringatan HUT RI dan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen Tahun 2020	kegiatan	7	7	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	3. Penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peningkatan penghayatan ideologi pancasila	orang	140	140	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	**Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik**		**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	**Banyaknya masyarakat yang paham akan penting-nya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat**	**orang**	**0**	**0**	**0%**	**refocusing**	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang persaudaraan bangsa dan kerukunan umat beragama (FKUB dan FPBI)	orang	0	0	0%	refocusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti diskusi mengenai wawasan kebangsaan	orang	0	0	0%	refocusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	3. Pendayagunaan Potensi Organisasi Masyarakat	Jumlah orang pengurus organisasi kemasyarakatan yang terbina di Kabupaten Kebumen	orang	0	0	0%	refocusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	**Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik**		**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**Banyaknya masyarakat yang paham potensi konflik dan langkah penyelesaiannya**	**orang**	**100**	**95**	**95%**		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial	Jumlah pengurus parpol yang mengikuti Bimtek bantuan keuangan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kab. Kebumen dan LPJ Bantuan Keuangan partai politik	orang	10	10	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peningkatan kapasitas sipil dalam penyelesaian konflik sosial	orang	0	0	0%	refocusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	**Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik**		**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	**Terwujudnya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat**	**orang**	**225**	**225**	**100%**		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah orang yang tersosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan partisipasi dalam pemberantasan narkoba melalui sosialisasi P4GN, sidak narkoba dan Pemilihan Duta Pelajar Anti Narkoba dalam rangka peringatan HANI 2020	orang	225	225	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik		**Program pendidikan politik masyarakat**	Capaian partisipasi masyaraka / penduduk dalam proses pemilihan umum	%	100	98	98%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah pengurus parpol, ormas, tokoh masyarakat perempuan yang tersosialisasi dalam pilkada 2020 di Kab. Kebumen	orang	0	0	0%	refocusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah orang yang terbina mengenai pendidikan politik di kabupaten kebumen	orang	1200	1200	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	60	60	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal dan peningkatan Ketrampilan Fisik (DUA KEGIATAN)	orang	85	85	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan; Respon Time terhadap penaggulangan bencana dan kebakaran	%	100	84	84%	adanya rasionalisasi anggaran	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	1. Jumlah tenaga pengamanan lingkungan dan tenaga harian lepas pemadam kebakaran	orang	158	158	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja			2. Jumlah tenaga harian lepas pemadam kebakaran	orang	67	67	100%	-	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja			3. Jumlah tenaga pengamanan lingkungan Pol PP	orang	91	91	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pelaksanaan patroli dan pengawalan Bupati	Kegiatan	250	250	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja			jumlah bulan pelaksanaan operasional Satpol PP	bulan	12	12	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Survei kepuasan masyarakat analisis kegiatan dan laporan capaian kinerja	dokumen	0	0	0%	refocusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	4. Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	Jumlah kegiatan Jambore Linmas, Pembinaan Linmas Kecamatan dan pengiriman TK Provinsi	orang	150	35	23%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	5. Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	Jumlah peserta pelatihan Anggota Linmas	orang	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja		**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	Terfasilitasinya upaya pencegahan tindak kriminal	Bulan	12	12	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah operasi penertiban umum (reklame, PGOT, Penertiban Pelanggaran Perda)	bulan	12	12	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah kegiatan pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Tahun Baru oleh Satpol, TNI dan Polri	Kegiatan	2	2	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Kegiatan Kerjasama Penegakan Perda dengan TNI ,Polri dan OPD lain	kegiatan	16	16	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah penyeledikan/ deteksi dini pelanggaran Perda	kali	33	33	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	3. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah bulan Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Satpol PP, Satlinmas, TNI dan Polri	bulan	11	11	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	4. Penegakan Peraturan Daerah	1. Jumlah Perda yang diprioritaskan untuk ditegakkan	jenis	17	17	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja			2. Jumlah koordinasi/operasi penegakkan Perda	kegiatan	78	78	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	5. Pengawasan dan Penertiban Cukai Rokok Palsu	Jumlah pengamatan/penyelidikan dan atau pengawasan/penertiban Pita cukai Rokok Palsu/bekas dan Pita cukai lainya	kali	36	36	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja		**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	Meningkatnya jumlah satlinmas; Banyaknya masyarakat yang paham potensi konflik dan langkah penyelesaiannya	%	0	0	0%	realisasi anggaran	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum	Jumlah peserta pelatihan bagi Kader Siaga Trantib (KST)	orang	135	0	0%	refocusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	Prosentase desa siaga/ tangguh bencana	desa	95	70	33%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pengiriman dan Pemulangan Jamaah Haji dari Kebumen ke Asrama Haji Donohudan Solo dan sebaliknya	kegiatan	2	2	100%		
			Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah sarpras kebencanaan (APD, Jack Hamer, Pemotong Beton)	unit	1	1	100%		
			Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	3. Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	Jumlah gladi/ simulasi penanggulangan bencana	kegiatan	2	2	100%		
			Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	4. Droping Air Bersih	Jumlah bantuan air bersih bagi korban kekeringan dan bencana lainnya		1450	50	3%	Tahun 2020, tidak terjadi musim kemarau, sehingga tidak droping air bersih, yang terealisasi adalah untuk membantu dropping air karena kasis banjir pada Bulan Oktober dan November 2020 ketika sumur warga terrendam	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	5. Pelatihan penanggulangan bencana	Jumlah orang yang dilatih peningkatan kemampuan masyarakat penyandang bencana dan guru difabel (50); gladi penanggulangan bencana (300)	orang	350	350	100%		
			Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	6. Penyusunan peta resiko rawan bencana	Jumlah peta risiko rawan bencana	dokumen	6	6	100%		
			Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	7. Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana	jumlah terbentuknya desa tanggap bencana	desa	35	10	29%		
			Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	8. Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Relawan	Jumlah kegiatan forum PRB dan Relawan	kali	2	2	100%		
			Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	9. Pengembangan sekolah aman bencana	Jumlah sekolah sasaran sosialisasi dan Desiminasi Kebencanaan pada sekolah di daereah rawan bencana	unit	0	0	0%	refocusing	
			Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	10. Pelatihan tekhnis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana	Jumlah Pelatihan Pasca Bencana; Pelaihan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana untukTim Jitupasna ; Pelatihan Recovery mental (Traumahealing) untuk Tim recovery mental	kali	32	32	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Banyaknya masyarakat yang sadar akan nilai-nilai luhur budaya bangsa; Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Tercapainya pelaksanaan pemilu; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	71	71%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Fasilitasi penyelenggaraan haji daerah	1. Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pengiriman dan Pemulangan Jamaah Haji dari Kebumen ke Asrama Haji Donohudan Solo dan sebaliknya	%	70	54,5	78%	adanya keputusan pemerintah tentang tidak dilaksanakan Haji karena pandemi Covid 19	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen			2. Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penghargaan Untuk Ulama/Umaro Hafidz/Hafidzoh (Umroh)	%	0	0	0	adanya keputusan pemerintah tentang tidak dilaksanakan Haji karena pandemi Covid 19	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ	1. Jumlah fasilitasi kegiatan MTQ Tk Kabupaten , Pembinaan Qori Kabupaten Kebumen, Pengiriman Kafilah Kabupaten Kebumen ke Provinsi	kali	3	2	67%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen			2. Jumlah fasilitasi Kegiatan MTQ Tk Kabupaten	kali	0	0	0%	rasionalisasi	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen			3. Jumlah fasilitasi Kegiatan Pembinaan Qori Kabupaten Kebumen	kali	1	1	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen			4. Jumlah fasilitasi kegiatan Pengiriman Kafilah MTQ ke Tingkat Provinsi	kali	1	1	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	Terwujudnya kemi-traan pengembangan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama.	%	100	82	82%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2020	%	100	82	82%	adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan di masa pandemi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Kebumen		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan;	%	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Jumah linmas terlatih	Orang	0	0	0%	rasionalisasi	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Kebumen		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	0	0	0	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI	kegiatan	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Kebumen		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan;	%	100	100	100,00%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Linmas Terlatih	orang	55	55	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Kebumen		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan dalam rangka Peringatan HUT RI	Kegiatan	0	0	0%	rasionalisasi	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Panjer		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan;	%	100	67	67%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Panjer	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Linmas Terlatih	jumlah	15	10	67%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Selang		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan;	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Selang	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Linmas terlatih	jumlah	40	40	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Selang		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; TTerfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Selang	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan dalam rangka Peringatan HUT RI	keg	0	0	0%	rasionalisasi	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Tamanwinangun		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Tamanwinangun	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan keyamanan lingkungan	orang	60	60	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Tamanwinangun		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; TTerfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Tamanwinangun	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan dalam rangka Peringatan HUT RI	kegiatan	1	1	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Bumirejo		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Bumirejo	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Linmas terlatih	kegiatan	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Alian		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan	kegiatan	100	31	31%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Alian	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Petugas Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Yang dilatih	orang	64	20	31%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Alian		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen;Terfasilitasinya kegiatan kegiatan HUT RI	%	100	33	33%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Alian	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Nilai Luhur Budaya Bangsa	kegiatan	3	1	33%	adanya rasionalisasi anggaran menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Karangsambung		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Terfasilita-sinya upaya pemantau-an keaman-an dan ke-nyamanan lingkungan	%	0	0	0%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Karangsambung	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Petugas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Yang dilatih	orang	0	0	0%	rasionalisasi	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Karangsambung		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Terfasilitasinya kegiatan kegiatan HUT RI	%	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Karangsambung	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	kegiatan	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Prembun		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	Desa	13	13	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Prembun	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Petugas yang deri Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Desa	26	26	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Prembun		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen;Terfasilitasiny a kegiatan2 HUT RI	Kegiatan	1	1	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Prembun	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI	Kegiatan	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Mirit		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan.	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Mirit	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Petugas yang diberi Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Orang	44	44	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Mirit		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen;Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	50	50%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Mirit	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kegiatan	2	1	50%	adanya pandemi covid menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Mirit		**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	Prosentase desa siaga/ tangguh bencana	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Mirit	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	Jumlah Kegiatan pelatihan Linmas	Orang	44	44	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Kutowinangun		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Prosentase masyarakat yang berwawasan kebangsaan	%	100	100	100%	Karena masih dalam Pandemi Covid kegiatan dilaksanakan secara sederhana	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Kutowinangun	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen;Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	Kegiatan	2	2	100%	Karena masih dalam Pandemi Covid kegiatan dilaksanakan secara sederhana	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Ambal		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Ambal	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah petugas Linmas yang dilatih	orang	138	138	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Ambal		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	48.23	48%	refocusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Ambal	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan dalam rangka Peringatan HUT RI	kegiatan	3	1	33%	refocusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Buluspesantren		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	0	0%	kegiatan pelatihan linmas tdk dilaksanakan karena wabah Pandemi Covid 19 masih berlangsung	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Buluspesantren	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah petugas Linmas terlatih	orang	0	0	0%	kegiatan pelatihan linmas tdk dilaksanakan karena wabah Pandemi Covid 19 masih berlangsung	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Buluspesantren		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen;Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	0	0%	kegiatan tidak dilaksanakan karena wabah Pandemi Covid 19 masih berlangsung	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Buluspesantren	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 75	kegiatan	0	0	0%	kegiatan tidak dilaksanakan karena wabah Pandemi Covid 19 masih berlangsung	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Pejagoan		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Pejagoan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah petugas Linmas yang terlatih	orang	40	40	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Pejagoan		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Pejagoan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Tercapainya penyelenggaraan peringatan HUT RI dan Hari jadi Kabupaten Kebumen	kegiatan	2	2	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Klirong		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	0	0	0%	refocusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Klirong	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Linmas yang terlatih	orang	0	0	0%	refocusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Klirong		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	33	33%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Klirong	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan dalam Rangka Peringatan HUT RI	kegiatan	3	1	33%	refocusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Petanahan		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Petanahan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Jumlah petugas linmas yang terlatih	orang	21	21	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Petanahan			2 Jumlah bulan monitoring bencana alam	desa	21	21	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Petanahan		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Petanahan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI	Kegiatan	1	1	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sruweng		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sruweng	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1 Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah bulan Pengendalian keamanan lingkungan	bulan	12	12	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sruweng	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2 Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	Jumlah anggota linmas yang terbina	orang	31	31	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sruweng		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	33	33%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sruweng	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlahkegiatan dalam rangka Peringatan HUT RI	kegiatan	3	1	33.33%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Karanganyar		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	0	0	0%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Karanganyar	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah petugas Linmas yang dilatih	Orang	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Karanganyar		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Prosentase masyarakat yang berwawasan kebangsaan	%	100	0	0%	kegiatan tdk dilaksanakan karena wabah covid 19 masih berlangsung	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Karanganyar	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan dalam Rangka Peringatan HUT RI	orang	55	0	0%	kegiatan tdk dilaksanakan karena wabah covid 19 masih berlangsung	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Jatiluhur		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Jatiluhur	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Linmas terlatih	Orang	25	25	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Plarangan		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	0	0	0%	refocusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Plarangan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Linmas terlatih	Orang	0	0	0%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Panjatan		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan;	Kegiatan	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Panjatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	Jumlah Linmas terlatih	Orang	20	20	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Panjatan			Jumlah unit pengadan Pakai Kerja Lapangan	Stel	20	20	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Karanggayam		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan	%	100	100	100%	-	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Karanggayam	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Petugas Linmas Yang Dilatih	orang	12	12	100%	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Karanggayam		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen dan kegiatan2 HUT RI	kegiatan	1	1	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Karanggayam	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-nilai luhur budaya bangsa	kegiatan	1	1	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Adimulyo		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Adimulyo	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Petugas Linmas Yang Dilatih	Orang	46	46	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Adimulyo		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Adimulyo	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan Peningkatan KeSadaran Masyarakat Terhadap Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa	Kegiatan	3	3	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Kuwarasan		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	0	0	0%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Kuwarasan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah anggota Linmas yang terlatih	orang	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Kuwarasan		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Kuwarasan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI	Kegiatan	2	2	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Puring		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Puring	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	Jumlah Petugas keamanan (Linmas Desa) yang Dilatih	orang	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Puring		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Puring	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan dalam rangka Peringatan HUT RI	kegiatan	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Gombong		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	57,14	57,14%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Gombong	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta Pelatihan Linmas	orang	24	24	100	-	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Gombong		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Gombong	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan dalam rangka Peringatan HUT RI	kegiatan	1	1	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Gombong		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Gombong	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah orang Linmas terlatih	orang	40	40	100%	-	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Gombong		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Prosentase partisipasi masyarakat yang berwawasan kebangsaan	%	100	100	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Gombong	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan dalam rangka Peringatan Hari - Hari besar (HUT RI, Hari Ibu, Hari Kartini, Hari Besar Islan)	keg	1	1	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Wonokriyo		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	75	75%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Wonokriyo	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah orang LINMAS terlatih	orang	60	45	75%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sempor		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	orang	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sempor	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Linmas terlatih	orang	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sempor		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen;Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	orang	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sempor	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan rangkaian peringatan HUT RI	kegiatan	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Buayan		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100%	100%	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Buayan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah petugas linmas diberi pelatihan	orang	60	60	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Buayan		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100%	50%	50%	ada 1 (satu) kegiatan yang tdk bisa dilaksanakan karena pandemi covid 19	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Buayan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI	kegiatan	2	1	50%	ada 1 (satu) kegiatan yang tdk bisa dilaksanakan karena pandemi covid 19	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Rowokele		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	orang	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Rowokele	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Petugas Linmas Yang Dilatih	orang	0	0	0%	rasionalisasi	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Rowokele		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Rowokele	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa	Kegiatan	1	1	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Ayah		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	0	0	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Ayah	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Linmas Terlatih	orang	0	0	0%	refoqusing	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Ayah		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Ayah	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI	kegiatan	2	2	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sadang		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sadang	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah anggota Linmas yang terlatih	orang	35	35	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sadang	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Jumlah/kegiatan sosialisasi bagi pengusaha dan UMKM	kegiatan	1	1	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sadang		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen;Terfasilitasiny a kegiatan2 HUT RI	%	100	50	50%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sadang	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan dalam Rangka Peringatan HUT RI	kegiatan	2	1	50%	dilaksanakan sebagian dan menyesuaikan protokol kesehatan	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sadang		**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	Banyaknya masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba dan ikut berpartisipasi dalam pemberan-tasan narkoba	%	100	100	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Sadang	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah kegiatan sosialisasi /penyuluhan pencegahan peredaran Narkoba dan Miras	orang	14	14	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Poncowarno		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	100	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Poncowarno	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Petugas Linmas yang dilatih	orang	33	33	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Poncowarno		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100	50	50%	pembatasan kehadiran personil/kerumunan karena pandemi Covid 19	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Poncowarno	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan dalam rangka Peringatan HUT RI	kegiatan	2	1	50%	pembatasan kehadiran personil/kerumunan karena pandemi Covid 19	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Padureso		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	10	10	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Padureso	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	Jumlah Limnas terlatih	Orang	27	27	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Padureso			Jumlah pelatihan tanggap bencana bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) Tingkat Desa	Orang	0	0	0%	rasionalisasi	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Padureso		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	20	20	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Padureso	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI	Kegiatan	3	3	100%		
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Bonorowo		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengendalian keamanan; Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan ke-nyamanan lingkungan	%	100	66	67%	pembatasan kehadiran personil/kerumunan karena pandemi Covid 19	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Bonorowo	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah petugas Linmas yang dilatih	orang	33	22	67%	pembatasan kehadiran personil/kerumunan karena pandemi Covid 19	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Bonorowo		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen; Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100%	75%	75%	pembatasan kehadiran personil/kerumunan karena pandemi Covid 19	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Bonorowo	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	kegiatan	4	3	75%	pembatasan kehadiran personil/kerumunan karena pandemi Covid 19	

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 66,65% atau kategori Gradasi sedang cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Rata-rata capaian kegiatan adalah 64,60%. Analisis kesesuain antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram adalah 102,44% atau sangat tinggi.

Terdapat Program Pengembangan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen serta Terfasilitasinya kegiatan HUT RI mengalami refocusing, meskipun dilaksanakan dengan cara sederhana dan memperhatikan protokol Covid 19. Faktor yang menyebabkan tidak tercapaianya kinerja program adalah tidak dilaksanakannya semua rangkaian kegiatan HUT RI sesuai dengan yang telah direncanakan, upaya yang akan dilakukan pada masa yang akan datang melaksanakan semua rangkaian kegiatan HUT RI.

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator program Banyaknya masyarakat yang paham potensi konflik dan langkah penyelesaiannya terealisasi 95%. Faktor yang mendorong tidak tercapaianya kinerja program adalah kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial tidak dilaksanakan karena kegiatan yang mengumpulkan orang (sosialisasi) sehingga direfocusing / dialihkan. Adanya pandemi Covid 19 juga menyebabkan hampir seluruh kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja hingga Kecamatan mengalami refocusing anggaran. Kegiatan-kegiatan tersebut seharusnya menunjang tingkat capaian program - program.

c. Capaian Kinerja Urusan

Pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kecamatan dan Kelurahan se Kabupaten Kebumen. Program yang tingkat capaiannya sampai dengan 100% adalah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan , Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Tabel 3.15
Perkembangan Capaian Kinerja Kebumen Tahun 2016-2020

URAIAN KINERJA	CAPAIAN TAHUN	
	2019	2020
1. Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	54	49
2. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	10.033	10.033
3. Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	72,4	72,4
4. Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	88	21
5. Jumlah Pelanggaran Perda	634	60

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen, 2020

Pada tahun 2020 kasus pelanggaran hukum Peraturan Daerah yang terjadi di Kabupaten Kebumen semula ditargetkan 400 kasus, teralisasi 60 kasus. Berikut data kasus pelanggaran hukum yang terjadi tahun 2020 :

Tabel 3.16
Data Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Jenis perda	Jumlah pelanggaran	Proses sidang
1	Perda No 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5 kasus	-
2	Perda No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	6 kasus	-
3	Perda No 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	7 kasus	3
4	Perda No 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	18 kasus	3
5	Perda No 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	24 kasus	

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen 2020

6. Urusan Sosial.

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan sosial dilaksanakan melalui lima program prioritas yang terdiri dari : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Para Penyandang Penyakit dan Trauma, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dan Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**.** Adapun capaian kinerja program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	Prosentase Fakir Miskin, KAT, dan PMKS yang diberdayakan	%	25	25	100		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	1. Jumlah peserta Rakoor Pendamping dan Operator PKH	orang	249	250	100.40		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			2. Jumlah peserta Bimtek pendamping	orang	100	100	100		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		2. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	1. Jumlah KK miskin yang di berdayakan	orang	640654	640654	100		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			2. Jumlah KUBE yang mendapatkan pendampingan	KUBE	340	340	100		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			3. Jumlah Rakor BPNT yang di laksanakan	orang	60	60	100%		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		3. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang diberi bantuan	orang	55	55	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial**	prosentase orang yang terlayani dan terehabilitasi kesejahteraan sosialnya; Banyaknya Fasilitasi Pelayanan dan Rehabllitasi Kesejahteraan Sosial;	%	25	25	100		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan	orang	130	130	100		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		2. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	1. Jumlah korban bencana alam/bencana sosial yang diberikan bantuan	orang	1000	1000	100%		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			2. Jumlah calon anggota TAGANA yang mengikuti Bimtek	orang	45	45	100		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		3. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah Orang PMKS (ODGJ) yang di layani	orang	30	30	100	target pelayanan per tiga (3) bulan sebanyak 30 orang dikalikan 4 4 x 30 = 120 org	
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		4. Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data base PMKS dan PSKS (non kemiskinan)	dokumen	1	1	100		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		**Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**	Jumlah anak nakal, penyandang cacat, dan trauma yang terbina	%	25	25	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah orang penyandang cacat terlantar yang diberikan bantuan	0rang	287	287	100		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		**Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)**	Jumlah eks penyandang penyakit sosial lainnya yang diberikan bantuan	orang	50	50	100		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah PGOT yang di berikan bantuan	orang	50	50	100		
	Sosial	**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**1. Meningkatnya kapasitas SDM kesos**	**%**	**75**	**93**	**124%**		
					2. Jumlah anggota kelembagaan sosial yang diberdayakan	**orang**	**117**	**93**	**79%**		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		1. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah pengurus ORSOS dan panti asuhan, pelaku usaha kesejahteraan sosial yang di koordinir	orang	36	36	100		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		2. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	1. Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang dibina	orang	50	50	100		
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			2. Jumlah TKSK yang diberikan honorarium bulanan	orang	26	26	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			3. Jumlah penjaga makam pahlawan yang diberikan honorarium	orang	1	1	100		
	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial**	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana alam/sosial	%	100	100	100		
	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah bulan penanganan strategis tanggap darurat, kejadian luar biasa, evakuasi korban bencana.	bulan	12	12	100		
	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		2. Pengadaan Logistik Bantuan Kebencanaan	Jumlah bantuan logistik Makanan, Non Makanan dan Dapur Umum	jenis	3	3	100		
	Sosial	Kecamatan Kebumen		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Kebumen		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	29	29	100		
	Sosial	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	%	100	95	95	Adanya Rasionalisasi Anggaran untuk COVID 19 satuannya harusnya dokumen	
	Sosial	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah dokumen Pendataan PMKS	%	57	57	100		
	Sosial	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		2. Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Pendataan Penduduk Miskin di Wilayah Kelurahan Panjer	kegiatan	100	100	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Sosial	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	%	100	100	100%		
	Sosial	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Pendataan Penduduk Miskin di Wilayah Kelurahan Panjer	kegiatan	1	1	1%		
	Sosial	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Prosentase meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	100	100	100		
	Sosial	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KKel	kegiatan	1	1	100		
	Sosial	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KKel	kegiatan	1	1	100		
	Sosial	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KKel	kegiatan	1	1	100		
	Sosial	Kecamatan alian		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan alian		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	16	16	100		
	Sosial	Kecamatan Karangsambung		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Sosial	Kecamatan Karangsambung		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	14	14	100		
	Sosial	Kecamatan Prembun		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Prembun		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	13	13	100		
	Sosial	Kecamatan Mirit		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Mirit		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	22	22	100		
	Sosial	Kecamatan Kutowinangun		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Prosentase peningkatan pelayanan dan rehabilitasikesejahteraan sosial	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Kutowinangun		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	19	19	100		
	Sosial	Kecamatan Ambal		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Ambal		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	32	32	100		
	Sosial	Kecamatan Buluspesantren		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Buluspesantren		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	21	21	100		
	Sosial	Kecamatan Pejagoan		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Pejagoan		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	13	13	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Sosial	Kecamatan Klirong		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Klirong		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	24	24	100		
	Sosial	Kecamatan Petanahan		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Petanahan		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	21	21	100		
	Sosial	Kecamatan Sruweng		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Sruweng		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	21	21	100		
	Sosial	Kecamatan Karanganyar		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Karanganyar		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	7	7	100		
	Sosial	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Kegiatan	2	2	100		
	Sosial	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100%		
	Sosial	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Kegiatan Dokumen TKP2KDes/Kel	dokumen	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Sosial	Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Kegiatan Fasailitasi TKP2KDes/Kel	Kegiatan	1	1	100		
	Sosial	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Kegiatan Fasailitasi TKP2KDes/Kel	Kegiatan	1	1	100		
	Sosial	Kecamatan Karanggayam		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Karanggayam		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	19	19	100		
	Sosial	Kecamatan Adimulyo		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Adimulyo		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	23	23	100		
	Sosial	Kecamatan Kuwarasan		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Kuwarasan		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	22	22	100		
	Sosial	Kecamatan Puring		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Sosial	Kecamatan Puring		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa/Kel terfasilitasi TKP2KDes/Kel	desa	23	23	100		
	Sosial	Kecamatan Gombong		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Prosentase peningkatan pelayanan dan rehabilitasikesejahteraan sosial	%	100	0	0	karena pandemi covid	
	Sosial	Kecamatan Gombong		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes	kegiatan	1	0	0		
	Sosial	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Prosentase peningkatan pelayanan dan rehabilitasikesejahteraan sosial	%	100	100	100		
	Sosial	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes	kegiatan	3	3	100		
	Sosial	Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes	kegiatan	1	1	100		
	Sosial	Kecamatan Sempor		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Sempor		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes	desa	16	16	100		
	Sosial	Kecamatan Buayan		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Buayan		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah desa yang terfasilitasi TKP2KDesnya	desa	20	20	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Sosial	Kecamatan Rowokele		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Rowokele		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa yang TKP2KDesnya difasilitasi	desa	11	11	100		
	Sosial	Kecamatan Ayah		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Ayah		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa yang TKP2KDesnya difasilitasi	desa	18	18	100		
	Sosial	Kecamatan Sadang		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Sadang		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa yang TKP2KDesnya difasilitasi	desa	7	7	100		
	Sosial	Kecamatan Poncowarno		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Poncowarno		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa yang TKP2KDesnya difasilitasi	desa	11	11	100		
	Sosial	Kecamatan Padureso		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Padureso		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa yang TKP2KDesnya difasilitasi	desa	9	9	100		
	Sosial	Kecamatan Bonorowo		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100	100	100		
	Sosial	Kecamatan Bonorowo		Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Jumlah Desa yang TKP2KDesnya difasilitasi	desa	11	11	100		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan sosial diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 90,65% atau kategori tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adapun rata-rata capaian kegiatannya adalah 92,04%. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja adalah 98,50% atau sangat tinggi.

c. Capaian Kinerja Urusan

Pelaksanaan urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Kecamatan dan Kelurahan se Kabupaten Kebumen. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kebumen sebagai indikator capaian urusan sosial semakin meningkat selama tahun 2019 hingga 2020. Pada tahun 2019 persentase penanganan PMKS sebesar 70,60% meningkat menjadi 96,12% pada tahun 2020. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS. Adapun rincian Jumlah PMKS di Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Tabel 3.18
Cakupan Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

NO	URAIAN	2019	2020
1	Jumlah PMKS	638.092	640.654
2	PMKS yang tertangani	450.840	615.792
3	Persentase Penanganan PMKS	70,60%	96,12%

Sumber : DINSOS PPKB Kab. Kebumen, 2020

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Urusan Pangan, Urusan Pertanahan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi Dan Informatika, Urusan Koperasi (Usaha Kecil Dan Menengah), Urusan Penanaman Modal, Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan. Keseluruhan urusan

tersebut dilaksanakan di Kabupaten Kebumen sesuai dengan Rencana Kerja Daerah Tahun 2020.

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan tenaga kerja dilaksanakan melalui program prioritas yang terdiri dari Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Capaian realisasi program dan kegiatan pada urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.19
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Tenaga Kerja**	**Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**		**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Besaran tenaga kerja yang menda-patkan pelatihan**	**Orang**	**560**	**560**	**100%**		
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	1. Pembangunan balai latihan kerja	jumlah gedung BKLN dan kantor BLK	unit	100	60	60%	tahapan sampai dengan pembuatan DED BLKLN atau kinerja sampai dengan 60%, dikarenakan rasionalisasi anggaran untuk pandemi covid	
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	2. Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah peralatan pelatihan bagi pencaker	Unit	3	3	100%		
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	3. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah tenaga kepelatihan di LPK Swata dan Pemerintah yang bersertifikasi	orang	0	0	0%	rasionalisasi	
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	4. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah tenaga praktek kerja industri (prakerin) bagi siswa SMK dan pencari kerja	Orang	380	380	100%		
	Tenaga Kerja	**Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**		**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**Penempatan tenaga kerja/pencari kerja yang terdaftar x 100%**	**Persen**	**28,43**	**27,68**	**97%**		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	1. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah pelayanan rutin pendaftaran pencari kerja di Kabupaten Kebumen, training softskill bagi pencaker kerja di wilayah kec. Karanggayam, Rowokele,Alian Ayah, standar pelayanan sesuai standar manajemen mutu	Orang	12000	13582	113%		
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	2. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah pekerja imigran Indonesia yang terlayani paspor, dan jumlah pekerja Migran Indonesia yang terlayani sosialisasi penempatan dan perlindungan	orang	2700	460	17%	adanya rasionalisasi anggaran	
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	3. Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Jumlah tenaga kerja yang trampil melalui kegiatan pelatihan di LPK	orang	175	175	100%		
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	4. Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah Pelatihan melalui kegiatan trnaga kerja siap pakai pelatihan perbengkelan, tukang kayu, perukangan, pengelasan, home industri, setir mobil, rias penganten, batik dan Jumlah calon pendaftaran anggota polri di Kabupaten kebumen;	paket	15	15	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	5. Pemberdayaan SDM calon tenaga kerja melalui pemagangan dalam dan luar negeri	Jumlah sosialisasi pemagangan dalam dan luar negeri bagi pelayanan publik yang optimal	Kegiatan	2	2	100%		
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	6. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Jumlah padat karya infrastruktur maupun usaha produktif lainnya bagi masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat	Kegiatan	17	17	100%		
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	7. Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna	Jumlah orang yang mengikuti penguatan jejaring purna pekerja migran, dan jumlah yang mengikuti pelatihan kewirausahaan bagi purna pekerja migran Indonesia	orang	2	2	100%		
	Tenaga Kerja	**Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**		**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**Persentase kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB) dengan jumlah kasus yang dicatatkan**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	1. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah orang Terfasilitasi penyelesaian prosedur hubungan industrial PHI dan PHK, fasilitasi Lembaga Ketenagakerjaan, Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan.	Orang	280	280	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	2. Pembinaan ketenagakerjaan LKS tripartit	Jumlah orang yang sadar terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan di perusaahaan dan kegiatan Hari Buruh dan pembinaan LKS Tripartit	Orang	25	25	100%		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Tenaga kerja diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 99,12% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sementara rata-rata capaian kegiatan adalah 118% atau sangat tinggi kesesuaiannya.

Adapun Program Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan indikator kinerja Penempatan tenaga kerja/pencari kerja yang terdaftar capaiannya sebesar 55% dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi covid 19 menyebabkan banyak perusahaan yang tidak membuka peluang untuk bekerja sehingga prosentase penempatan tidak tercapai. Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 adalah masalah penempatan dari tenaga kerja yang masih kecil. Untuk itu upaya yang akan dilakukan pada masa yang akan datang adalah dengan mengadakan peningkatan pelindungan dan kompetensi calon migran/pekerja migran indonesia serta pemberdayaan pekerja migran purna penempatan.

c. Capaian Kinerja Urusan

Hasil pelaksanaan program urusan tenaga kerja adalah Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja. Untuk mengetahui jumlah Peningkatan keterserapan tenaga keja dihitung dengan rumus % jumlah penempatan tenaga kerja/ jumlah pencari kerja yang terdata ditambah dengan % jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan kemudian dibagi 2, atau lebih jelasnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja} = \frac{\text{\% jumlah penempatan tenaga kerja/ jumlah pencari kerja yang terdata} + \text{\% jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan}}{2}$$

Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja tahun 2020 sebesar 15,76 %. Capaian tersebut berdasarkan persentase jumlah penempatan tenaga kerja/ jumlah pencari kerja yang terdata sebesar 15,73% ditambah Persentase jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan 15,79 % dibagi 2. Adapun rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.20
Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

NO	URAIAN	JUMLAH	
		2019	2020
1	Pencaker	16.477	13.582
2	penempatan pencaker	2.291	2.137
3	prosentase penempatan	13,90	15,73
4	Pelatihan	480	380
5	penempatan pelatihan	199	60
6	prosentase penempatan	41,46	15,79

Sumber : Disnaker UMK Kab. Kebumen, 2020

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 ini memperparah kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen akan meningkat karena berhenti bekerjanya buruh tidak tetap di Kabupaten Kebumen akibat sektor ekonomi yang mempekerjakannya berhenti beroperasi akibat pandemi Covid-19. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen juga meningkat akibat pulangnya penduduk asli Kebumen yang merantau bekerja di kota besar (pekerja migran). Mereka berhenti bekerja karena diterapkannya kebijakan lock down di tempat bekerjanya akibat pandemi Covid-19 dan memilih pulang ke Kebumen untuk mengurangi beban ekonomi kehidupannya.

Pada tahun 2020 Jumlah pengangguran mencapai 6,07 persen. Angka ini diporoleh dari persentase jumlah angkatan kerja tahun 2020 616.494 orang dibagi dengan jumlah Angkatan Kerja Yang Tidak Memperoleh Kesempatan Kerja sejumlah 37.421 orang.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yaitu Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan. Adapun capaian program dan kegiatan urusan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan	%	20	20	100%		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	1. Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KKGBA) yang tertangani;	Kasus	130	127	98%	Keterbatasan penjangkauan kepada Korban dikarenakan Pandemi Covid 19	Koordinasi melalui KPAD/K atau Pemdes setempat
					2. Jumlah perempuan dan anak yang mendapat fasilitasi pencegahan kekerasan ;	Kasus	130	127	98%	Upaya Pencegahan tidak bisa langsung ke masyarakat	Pencegahan Kekerasan selama Pandemi dilakukan melalui KIE dg memanfaatkan Molin
					3. Jumlah pelaksanaan Rakor serta Capacity Building bagi P2TP2A dan PPT Kartika	Kali	2	2	100%		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	1. Jumlah kelompok KPAD yang mendapatkan fasilitasi Capacity Building	Kelompok	52	52	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					2. Jumlah desa yang mendapat fasilitasi advokasi dan sosialisasi Desa Ramah Anak (DRA)	Desa	4	1	25%	Adanya Rasionalisasi sehingga hanya terlaksana pada 1 Desa	Rintisan Desa Ramah Anak yg telah ditunjuk akan dilakukan pemantauan melalui kunjungan lapangan
					3. Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan	Sekolah	5	0	0%	Adanya Rasionalisasi	Dilaksanakan pada tahun berikutnya melalui kunjungan sekolah
					4. Jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan	Unit	5	0	0%	Adanya Rasionalisasi	Dilaksanakan pada tahun berikutnya melalui kunjungan puskesmas
					5. Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi tentang Perlindungan Anak	Sekolah	20	0	0%	Adanya Rasionalisasi	Dilaksanakan kunjungan sekolah bersama dengan Inisiasi Sekolah Ramah Anak
					6. Jumlah tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA)	Orang	60	0	0%	Adanya Rasionalisasi	Dilaksanakan pada Tahun Berikutnya
					7. Jumlah sekolah yang mendapat fasilitasi pembentukan Satgas Perlindungan Anak	Sekolah	5	0	0%	Adanya Rasionalisasi	Dilaksanakan dengan kunjungan sekolah bersama dgn Inisiasi SRA
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah ketersediaan buku data pilah gender	Buku	40	40	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	4. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Forum Anak Kabupaten, Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa yang terfasilitasi	Kelompok	24	6	25%	Rasionalisasi anggaran. Partisipasi anak perlu memiliki wadah berupa Forum Anak yang berjenjang di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten, sebagai salah satu upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan saat ini jumlah Desa yang memiliki Forum Anak masih sedikit	Sosialisasi dan pembentukan serta peningkatan kapasitas Forum Anak Desa
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Jumlah kelompok (Pokja) Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK TKI) Kecamatan yang terfasilitasi dan Pokja BK TKI Desa yang terbentuk ;	Kelompok	4	2	50%	Rasionalisasi anggaran.	Dilaksanakan tahun berikutnya, berupa kegiatan pembentukan, peningkatan kapasitas dan peran Pokja Bina Keluarga TKI di wilayah basis TKI
					Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kali	2	0	0%	Rasionalisasi anggaran.	Dilaksanakan tahun berikutnya
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah masyarakat desa yang mendapat fasilitasi penguatan PUG	Desa/Kelurahan	10	4	40%	Rasionalisasi anggaran.	Desa yang belum mendapatkan penguatan PUG rencananya akan dilaksanakan tahun berikutnya
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan		**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	Meningkatnya Pemahaman, kemampuan dan ketrampilan perempuan	Organisasi	29	29	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Perlindungan Anak									
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan; terlaksananya peringatan hari kartini dan hari ibu.	Orang	29	29	100%		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		**Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan**	Jumlah organisasi perempuan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	Organisasi	29	27	93%	Rasionalsasi anggaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Pembinaan Berbasis Gender	Jumlah perempuan di perdesaan (Desa Karangkembang Kecamatan Alian dan Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor) yang mendapat fasilitasi peningkatan peran dalam pembangunan	Orang	80	0	0%	Rasionalsasi anggaran	Dilaksanakan tahun berikutnya
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	2. Pembinaan PKK	1. Jumlah TTP. PKK yang mendapat fasilitasi kegiatan (TP.PKK Kabupaten dan TP. PKK Kecamatan)	Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kab=1 Tim, Kec = 26, Desa/Kel =460 Tim	Kab = 1 Tim, Kec = 26 dan desa/Kel = 460 Tim	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			2. Jumlah kecamatan yang mendapat evaluasi program Babonisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Kecamatan	26	26	100%	Rasionalisasi anggaran	

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 97,75% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 68,11%. Tingkat kesesuaian kegiatan terhadap capaian program adalah 143,44% atau sangat tinggi.

Adapun Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan dengan target indikator kinerja Jumlah organisasi perempuan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa hanya mencapai 93%, dikarenakan adanya refocusing anggaran pada program tersebut, yaitu pada kegiatan pembinaan berbasis gender yang semula akan dilaksanakan di dua lokasi,yaitu di Desa Karangkembang Kecamatan Alian dan Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor tidak dapat terlaksana. Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 adalah adanya refocusing anggaran serta adanya dampak Covid 19 yang mengharuskan beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring yang dirasa kurang efektif dibandingkan dengan pelaksanaan pembinaan secara langsung di desa, selain itu juga adanya pembatasan jumlah peserta sesuai protokol kesehatan, sehingga peserta pembinaan tidak sesuai jumlah target. Untuk itu upaya yang akan dilakukan pada masa yang akan datang adalah mengusulkan kembali anggaran untuk kegiatan yang belum dapat terlaksana di tahun 2020, yaitu pembinaan berbasis gender yang akan dilaksanakan di Desa Karangkembang Kecamatan Alian dan Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor, serta memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien.

c. Capaian Kinerja Urusan

Target kinerja yang ditetapkan terkait urusan pemberdayaan perempuan adalah Prosentase penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pada tahun 2020 kasus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 112 kasus yang terdiri kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 32 kasus, kasus Kekerasan terhadap Anak sejumlah 70 kasus dan selebihnya atau sebanyak 10 kasus adalah kasus anak sebagai pelaku kekerasan yang juga mendapat penanganan atau pendampingan dari Dispermades P3A Kabupaten Kebumen.

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator	2019	2020
1	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	135	112
2	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	71	60
3	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	35	26
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	36	26
5	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	4	0

Sumber: Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, 2020

3. Urusan Pangan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan pangan dilaksanakan melalui program prioritas yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan). Indikator capaian program ini adalah Capaian Skor Pola Pangan Harapan. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor PPH ini berfungsi sebagai: Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan. Baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah.

Pelaksanaan program ini didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan yang meliputi : Penanganan daerah rawan pangan, Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah, Pengembangan cadangan pangan daerah, Pengembangan lumbung pangan desa, Pengembangan model distribusi pangan yang efisien, Peningkatan mutu dan keamanan pangan, dan Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan. Adapun capaian program dan kegiatan sebegaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.23
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan		**Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)**	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	Persen	93,7	87	92,85%		
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	1. Penanganan daerah rawan pangan	1. Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Bantuan penanganan rawan pangan akibat gizi kurang dan gizi buruk	Kecamatan	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			2. Jumlah dokumen peta kerawanan pangan	Dokumen	1	1	100%	-	
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			3. Jumlah Dokumen database potensi produk pangan (NBM)	Dokumen	1	1	100%	-	
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			4. Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan mandiri pangan	Desa	3	3	100%	-	
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	2. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	1. Jumlah dokumen hasil Fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui Rakor Dewan Ketahanan Pangan	Dokumen	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			2. Jumlah kegiatan penilaian dan pembinaan calon penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	Kegiatan	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			3. Jumlah Dokumen Rancangan Teknis Perencanaan Ketahanan Pangan	Dokumen	1	1	100%		
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	3. Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Pengadaan cadangan pangan berupa gabah kering giling (GKG)	ton	35	35	100%		
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	4. Pengembangan lumbung pangan desa	1. Jumlah desa yang dilaksanakan Pembangunan lumbung pangan desa, pengembangan lumbung pangan masyarakat	Desa	6	6	100%	Penambahan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19	
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			2. Jumlah DED Pengembangan Lumbung Pangan	Dokumen	1	1	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	5. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	1. Jumlah desa yang melaksanakan padat karya pangan pembuatan jalan usaha tani	desa	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			2. Jumlah desa yang melaksanakan padat karya pangan pembuatan jalan usaha tani (kuota kecamatan)	desa	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			3. Jumlah Jalan Usaha Tani (JUT) yang terbangun = Kuota Kecamatan	desa	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			4. Jumlah desa yang melaksanakan pasar murah	desa	0	0	0%	anggaran digunakan untuk bantuan sosial pemberian beras untuk KK miskin di 6 Desa	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			5. Jumlah Kelompok yang dilakukan Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Dana Talangan Pengadaan Pangan	kelompok	31	31	100%	pembinaan dilaksanakan sesuai dengan jumlah kelompok penerima dana talangan	
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			6. Jumlah kelompok yang dilaksanakan Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan (Pembangunan, Pengembangan dan Pembinaan)	kelompok	5	5	100%		
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			7. Jumlah dokumen hasil dari Pengumpulan dan pengolahan data laporan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	dokumen	52	52	100%		
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			8. Jumlah dokumen data arus bahan pangan	dokumen	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	6. Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah pengawasan/ pemeriksaan sampel pangan pada Pengawasan pangan dipasar dan pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada produsen dan pedagang	sampel	170	170	100%	Masih ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya	Pembinaan terhadap pedagang dan pelaku usaha
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	7. Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan	1. Jumlah Desa yang dilaksanakan Pembinaan dan Pemberian Stimulan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	desa	10	10	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			2. Jumlah Kegiatan Sosialisasi P2KP dan Promosi P2KP	kegiatan	1	1	100%		
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			3. Jumlah kegiatan pengolahan data PPH hasil Susenas	dokumen	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan			4. Jumlah dokumen pengolahan data PPH hasil Susenas	dokumen	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pangan diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 92,85% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Pelaksanaan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dengan rata-rata capaian kegiatan adalah 52,17%. Dengan demikian tingkat kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 177% atau sangat tinggi.

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program adalah Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan yang anggarannya direfocusing yang seharusnya menunjang tingkat capaian program. Kegiatan yang direfocusing tersebut meliputi Penanganan daerah rawan pangan, Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah, Pengembangan cadangan pangan daerah, Pengembangan model distribusi pangan yang efisien, Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan.

Permasalahan yang lainnya yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 urusan pangan adalah anggaran jumlah desa yang melaksanakan pasar murah digunakan untuk bantuan sosial pemberian beras untuk KK miskin di 6 Desa, Pembinaan dilaksanakan sesuai dengan jumlah kelompok penerima dana talangan, masih ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya untuk itu upaya yang akan dilakukan pada masa yang akan datang yaitu pembinaan terhadap pedagang yang pelaku usaha terkait masih ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya

c. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program prioritas yang telah disampaikan telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat berdasarkan kesadaran atas hukum. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari dengan indicator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3.24
Perkembangan Indikator Kinerja
Kabupaten Kebumen Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Persentase penanganan kerawanan pangan	%	78,63	63,36	80,91	127,69	70,23
2. Persentase kelompok/gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya	%	49,78	59,57	59,57	100	69,35
3. Persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan	%	55,21	54,35	61,08	112,38	60,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, 2020

Capaian kinerja indikator prosentase Penanganan Kerawanan Pangan dengan target 63,36 % terealisasi sebesar 80,91 %. Prosentase ini diperoleh dengan perhitungan : jumlah desa yang tertangani sampai dengan tahun 2020 sejumlah 106 desa dibanding Jumlah desa rawan pangan (sesuai Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) sejumlah 131 desa kali 100%.

Capaian kinerja indikator prosentase kelompok/ gapoktan yang tertangani stabilitas harganya dengan target 59,57 % terealisasi sebesar 59,57 %. Prosentase ini diperoleh dengan perhitungan : Jumlah Gapoktan yang tertangani stabilitas harganya tahun 2020 sejumlah 460 dibanding jumlah gapoktan sejumlah 460 Gapoktan kali 100%.

Capaian kinerja indikator prosentase kelompok wanita yang melaksanakan penganeka-ragaman konsumsi pangan dengan target 54,35 % terealisasi sebesar 61,08 %. Prosentase ini diperoleh dengan perhitungan: Jumlah kelompok wanita yang melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan s.d. tahun 2020 sejumlah 281 desa dibanding jumlah desa dan kelurahan (460 desa/ kelurahan) kali 100%.

4. Urusan Pertanahan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan Pertanahan dilaksanakan melalui program prioritas Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dengan kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Output dari pelaksanaan kegiatan ini termasuk dalam fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah milik pemerintah Kabupaten Kebumen serta penanganan permasalahan tanah pada umumnya di Kabupaten Kebumen. Adapaun capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.25
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanahan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		**Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	Cakupan lahan Bersertifikat	Persen	20	26	130%		
	Pertanahan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah usulan dokumen Pensertifikatan Tanah Aset Pemkab Kebumen	dok	240	300	125%		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan pertanahan diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah adalah 130% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dilaksanakan untuk pensertifikatan tanah asset milik pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Adapun rata-rata capaian kegiatannya sebesar 125%, dengan dekimian tingkat kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 104% atau sangat tinggi.

c. Capaian Kinerja Urusan

Pada tahun 2020 jumlah target tanah yang diajukan pemberkasan sertifikat tanah sebanyak 240 bidang dan terealisasi 300 bidang. Untuk tahapan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai pemohon yang menyediakan berbagai syarat pensertifikatan, sementara untuk dokumen sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kebumen. Untuk memudahkan pelaksanaannya, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kebumen malaksanakan Kesepakatan bersama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Kebumen tentang Kerjasama di Bidang Pertanahan. Ruang lingkup kerjasama meliputi Pengamanan tanah milik pemerintah Kabupaten Kebumen serta pemanfaatan data pertanahan dan perpajakan di Kabupaten Kebumen.

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan Lingkungan hidup dilaksanakan melalui 8 (delapan) program prioritas yang meliputi : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Adapun capaian kinerja program dan kegiatan urusan ini sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.26
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	Cakupan pelayanan sampah	%	42,94	58,73	137%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	1. Jumlah pengadaan paket sarpras pengelolaan persampahan dan DED TPS3R	paket	8	8	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			2. Jumlah pengadaan unit Dump Truck	unit	0	0	0%	realisasi anggaran karena covid 19	
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			3. Jumlah pengadaan unit armroll	unit	0	0	0%	realisasi anggaran karena covid 19	
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			4. Jumlah TPS3R Kelurahan Bumirejo yang dibangun	unit	0	0	0%	realisasi anggaran karena covid 19	
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			5. Jumlah pengadaan paket material urugan TPA Kaligending dan semali	paket	0	0	0%	realisasi anggaran karena covid 19	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			6. Jumlah paket landasan container dan TPS yang dibangun	paket	0	0	0%	realisasi anggaran karena covid 19	
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			7. Jumlah paket fasilitas TPA Kaligending dan semali yang ditingkatkan	paket	0	0	0%	realisasi anggaran karena covid 19	
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			8. Jumlah pengadaan Konsultan pengawas peningkatan fasilitas TPA	orang	0	0	0%	realisasi anggaran karena covid 19	
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			9. Jumlah pengadaan Konsultan pengawas pembangunan TPS3R Kel. Bumirejo	orang	0	0	0%	realisasi anggaran karena covid 19	
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			10. Jumlah pengadaan paket sarpras komposting dan sarpras bank sampah	paket	0	0	0%	realisasi anggaran karena covid 19	
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			11. Penyusunan DED TPS3R Bumirejo	dokumen	0	0	0%	realisasi anggaran karena covid 19	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah paket pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, jasa khusus tenaga penyapuan, penyusunan perencanaan pengelolaan persampahan, penyusunan perencanaan pemeliharaan fasilitas TPA, pemeliharaan kontener sampah	paket	5	5	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	3. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	1. Jumlah fasilitasi kegiatan latihan dan pendampingan aparat pengelola persampahan TPS3R dan bank sampah.	kegiatan	2	2	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			2. Jumlah pelatihan pengelolaan persampahan bagi aparatur pengelolaan sampah	orang	240	240	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			3. Jumlah kecamatan yang memperoleh pendampingan pembentukan desa mandiri sampah	kecamatan	9	9	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah desa yang memperoleh sosialisasi pengelolaan persampahan dan operasional TPST 3R.	desa	70	70	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	Prosentase penurunan beban pencemaran	%	10	10	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah sosialisasi, pembinaan dan koordinasi dalam rangka penilaian kota sehat/adipura	kali	4	4	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Pemantauan Kualitas Lingkungan	1. Jumlah paket pelatihan pemantauan kualitas lingkungan dan studi kelayakan pencemaran lingkungan	paket	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			2. Pelatihan Manajemen Laboratorium	kegiatan	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			3. Penyusunan Study Identifikasi Sumber Pencemar	paket	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			4. Operasional laboratorium lingkungan	kegiatan	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			5. Pembuatan disinfektan, hand sanitiser dan sabun dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19	paket	2	2	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah kegiatan usaha dan penanganan pengaduan masyarakat	unit	25	25	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	4. Pengelolaan B3 dan Limbah B3	1. Jumlah kegiatan penyuluhan Pengelolaan LImbah B3 dan Penyusunan Dokumen Laporan Identifikasi LImbah B3	kegiatan	2	2	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			2. Jumlah Penyuluhan Pengelolaan Limbah B3	kegiatan	2	2	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			3. Jumlah Dokumen Identifikasi Limbah B3 (LB3), Gas Rumah Kaca (GRK), Bahan Perusak Ozon (BPO) yang disusun	dokumen	2	2	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	5. Pengkajian dampak lingkungan	1. Penyusunan dokumen lingkungan hidup, operasional komisi amdal	dokumen	2	2	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			2. Operasional Komisi Amdal Daerah	kegiatan	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			3. dokumen D3TLH	dokumen	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan			4. Dokumen RPPLH	dokumen	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Lingkungan Hidup									
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			5. Identifikasi/inventarisasi data penyusunan RPPLH	kegiatan	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			6. BOP identifikasi/inventarisasi data penyusunan RPPLH	kegiatan	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	6. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA DIBIDANG LINGKUNGAN	desa	10	10	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	1. Jumlah sosialisasi pengendalian lingkungan hidup	kali	6	6	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			2. Jumlah sarpras yang diadakan (biopori dan papan informasi)	paket	2	2	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	8. Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	1. Jumlah pengadaaan paket Alat Laboratorium, dan Pengadaan Peralatan Persampahan Terpilah dan penghijauan LIngkungan	paket	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			2. Jumlah pengadaan paket Alat Lab Kualitas Udara	ls	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			3. Julmlah pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah		0	0		realisasi anggaran karena covid 19	
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			4. Jumlah pengadaaan Tong Sampah Terpilah dan Pot Bunga Penghijauan		0	0		realisasi anggaran karena covid 19	
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	9. Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL (DBHCHT)	1. Jumlah sosialisasi dan pengadaan sarpras pengelolaan lingkungan	desa	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			2. Jumlah sosialisasi Limbah industri rokok	desa	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			3. Jumlah pengadaan Becak Sampah		0	0		realisasi anggaran karena covid 19	
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	Tersedianya profil keanekaragaman hayati	dokumen	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	1. Jumlah dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	dokumen	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			2. Jumlah sosialisasi kehati	kali	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		**Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam**	Prosentase penanganan konservasi sumber daya alam	%	27	27	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	1. Jumlah sosialisasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam	kali	4	4	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			2. Jumlah sarpras konservasi sumber daya alam yang diadakan 1. belanja bahan material bibit (2. jasa konsultansi (green belt lukulo; sungai wawar) 3. belanja hibah masyarakat,4. balanja modal prasasti,) dan. operasional kegiatan, bantuan kampung iklim (proklim), bibit tanaman konservasi	kegiatan	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			3. Bantuan Kampung Iklim (Proklim) di Desa Lembupurwo Kec. Mirit, Desa Sadang Wetan Kec. Sadang, Desa Wonoharjo Kec. Rowokele, Desa Argopeni Kec. Ayah)	kegiatan	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	Terfasilitasinya upaya akses Infor-masi Sumberdaya Lingkungan Hidup	kegiatan	3	3	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah pembinaan dan seleksi sekolah berwawasan lingkungan dan saka kalpataru	sekolah	12	12	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang disusun	dokumen	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	3. Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	Jumlah bulan pelaksaan car freeday, hari lingkungan hidup, pameran dan pawai lingkungan hidup	bulan	0	0		realisasi anggaran karena covid 19	
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		**Program peningkatan pengendalian polusi**	Prosentase penurunan sumber polusi	%	5	5	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	1. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Jumlah IPAL industri kecil dan Biogas yang dibangun	unit	4	4	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Jumlah penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran kepada pengusaha dan industri kecil	kali	2	2	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		**Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	Bertambahnya ruang terbuka hijau yang terbangun	lokasi	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	1. Penyusunan program pengembahan RTH	Jumlah dokumen perencanaan penataan RTH yang disusun	dokumen	5	5	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	2. Penataan RTH	1. Jumlah lokasi RTH (Pemb. Hutan kota Kbm lanjutan, Pembangunan alun-alun Gombong Lanjutan, Penataan dan pemeliharaan Alun2 Karanganyar) yang ditata	paket	3	3	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			2. Jumlah pembangunan Hutan Kota	lokasi	0	0	0%	realisasi anggaran karena covid 19	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	3. Pemeliharaan RTH	1. Jumlah kegiatan pemeliharaan RTH (1. operasional penataan RTH, 2. belanja bahan material, 3. belanja alat listrik dan kebersihan, 4. belanja pemeliharaan, 5. tenaga ahli, 6. Honor THL)	kegiatan	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			2. Jumlah trotoar kota kebumen; trotoar gombong yang dipelihara	kegiatan	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup			3. BOP Pemeliharaan kendaraan taman, servis/suku cadang dan BBM)	kegiatan	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	Prosentase Penanganan Sampah di tingkat desa/kelurahan	%	100	100	100%		
	Lingkungan Hidup	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	kegiatan	12	12	100%		
	Lingkungan Hidup	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	Prosentase Penanganan Sampah di tingkat desa/kelurahan	%	100	100	100%		
	Lingkungan Hidup	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah bulan penyelenggaraan kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	bulan	11	11	100%		
	Lingkungan Hidup	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	Prosentase Penanganan Sampah di tingkat desa/kelurahan	%	42,94	42,94	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Lingkungan Hidup	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	1. Jumlah Petugas Pengelola Sarana dan Prasarana Persampahan	orang	2	2	100%		
	Lingkungan Hidup	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen			2. Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	kegiatan	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	Prosentase Penanganan Sampah di tingkat desa/kelurahan	%	100	100	100%		
	Lingkungan Hidup	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	Jumlah kegiatan pendukung pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan	kegiatan	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	cakupan pelayanan sampah	kegiatan	1	1	100%		
	Lingkungan Hidup	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	Jumlah bulan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	bulan	12	12	100%		
	Lingkungan Hidup	Kelurahan wonokriyo Kecamatan Gombong		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	Prosentase penanganan sampah di tingkat desa/ kelurahan	%	100	100	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Lingkungan Hidup	Kelurahan wonokriyo Kecamatan Gombong	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	Jumlah kegiatan penanganan dan pengelolaan sampah	kegiatan	2	2	100%		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Lingkungan Hidup diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 103% atau kategori Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adapaun rata-rata capaian kegiatan adalah 81,97%, dengan demikian tingkat kesesuai antara kegiatan dan target kinerja adalah 125,45%, atau sangat tinggi. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan lingkungan hidup antara lain adanya pertambahan penduduk yang cukup tinggi yang berakibat pada bertambahnya volume sampah maupun limbah, sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang limbah dan sampah secara sembarangan.

Adapun upaya untuk menyelesaiakan masalah antara lain:

a) sosialisasi secara terus menerus dan terpadu dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kebumen
b) penerapan teknologi yang murah dan mudah untuk pengolahan air limbah
c) melakukan konservasi lahan secara massif, melalu gerakan “sak uwong selawe wit sak lawase urip”
d) mendorong dan memfasilitasi pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
e) melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbukan pencemaran/kerusakan lingkungan
f) melaksanakan penegakan hukum lingkungan

Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan yang anggarannya direfocusing yang seharusnya menunjang tingkat capaian program.

c. Capaian Kinerja Urusan

Urusan Lingkungan hidup diarahkan untuk mencapai sasaran kelima RPJMD yaitu meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2019	2020			TARGET AKHIR RPJMD 2021
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,61	76	74,22	97,66%	77,5

Sumber : DISPERKIM LH Kabupaten Kebumen, 2020

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

a) Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
c) Sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator yang digunakan dalam penghitungan IKLH Kabupaten Kebumen berdasarkan Perbup IKU Nomor 30 Tahun 2016 mencakup dua variabel yaitu angka Indeks Kualitas Udara dan angka Indeks Kualitas Air (tidak menggunakan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dikarenakan Urusan Kehutanan menjadi urusan pemerintah Provinsi). Dari target IKLH yang ditetapkan Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebesar 76, realisasi mencapai 74,22 (prosentase capaian sebesar 97,66 %). Adapun capaian IKLH tahun 2020 dengan menggunakan 3 variabel berdasarkan standar perhitungan IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indek Tutupan Lahan. Dengan indikator Predikat IKLH : < 40 = waspada • 40-50 = sangat kurang baik • 50-60 = kurang baik • 60-70 = cukup baik • 70-80 = baik • > 80 = sangat baik. Pada tahun 2020, nilai capaian IKLH Kabupaten Kebumen sebesar 73,92, atau masuk kategori “BAIK”.

Tabel 3.28
Capaian IKLH Kabupaten Kebumen

No	Variabel	Capaian Tahun		Predikat
		2019	2020	
1.	Indeks Kualitas Udara	88,44	90,75	Sangat Baik
2.	Indeks Kualitas Air	63,33	57,69	Kurang Baik
3.	Indek Tutupan Lahan	70,66	70,66	Baik
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,80	73,92	Sangat Baik

Sumber : DISPERKIM LH Kabupaten Kebumen, 2020

Selanjutnya jumlah produksi sampah dengan cakupan pelayanan pada tahun 2020 meliputi wilayah perkotaan Kecamatan Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kutowinangun dan Prembun, sebagai berikut :

Tabel 3.29
Cakupan Pelayanan Sampah di Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN	JUMLAH
Wilayah perkotaan yang dilayani : Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kutowinangun, Prembun		
1.	Jumlah Desa/Kelurahan kawasan perlotaan	88
2.	Jumlah Desa/Kelurahan di Kawasan Perkotaan Terlayani s/d 2020	88
3.	Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kawasan Perkotaan (Jiwa)	189.327
4.	Timbulan Sampah Yg Dihasilkan (m3/hr)	633,42
5.	Timbulan Sampah Yg Terangkut ke TPA (m3/hr	372,00
6.	Sampah Yg Terangkut Ke TPA (%)	58,73%

Sumber : DISPERKIM LH Kabupaten Kebumen 2020

6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan. Capaian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.30

Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Tertatanya administrasi kependudukan secara terpadu sesuai SPM	%	100	100	100		
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah Tempat Terselenggaranya Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan (SIAK)	lokasi	27	27	100		
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	jumlah terlaksananya koordinasi pelayanan kependuudkan dan pencatatan sipil dengan institusi lainnya	kali	4	4	100		
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	jumlah tercetaknya buku profil kependudukan dan buku agregat kependudukan	buku	1650	1650	100		
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah bulan pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan penerapan program KIA, pelayanan CFD, pendataan dan pelayanan Penduduk Rentan Adminduk, pelaksanaan program Ketapel 17, pelayanan perekaman door to door, penduduk difabel, jompo, dan lansia.	bulan	12	12	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	jumlah operator yang diberikan pembinaan pengetahuan dan keterampilan aparat kependudukan dan pencatatan sipil	orang	96	96	100		
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	6. Sosialisasi kebijakan kependudukan	jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan	orang	486	486	100		
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	7. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	jumlah penerbitan akta kematian dan kepemilikan akta kelahiran	dokumen	1500	1500	100		
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumah bulan terlaksananya evaluasi pelayanan administrasi kependudukan yang optimal di 26 kecamatan	bulan	12	12	100		
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	9. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	jumlah lokasi tersedianya akses informasi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan	lokasi	26	26	100		
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	10. Peningkatan pelayanan publik di bidang pencatatan sipil	Jumlah bulan terselenggaranya Pelayanan Publik di Bidang Pencatatan Sipil, pelayanan Jemput Bola, penyelenggaraan program inovasi Baladewa Lahir	bulan	12	12	100		
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	11. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	jumlah bulan meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	bulan	12	12	100		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, sehingga kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah sangat tinggi.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah adanya pandemi covid 19, sehingga diberlakukan pembatasan kegiatan pelayanan adminduk (sosialisasi dan jemput bola). Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara pelayanan pendaftaran online dan sosialisasi secara virtual / zoom (dukcapil menyapa masyarakat).

c. Capaian Kinerja Urusan

Urusan Ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran urusan, Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah berdasarkan kesadaran atas hukum. Capaian kinerja urusan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.31
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Prosentase cakupan penerbitan akta kematian	%	100	70	100	100	70
Presentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	%	97,41	90	97,07	97,07	90

Sumber Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2020

Selain pada UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan, Pembuatan Akta kematian diatur dalam Perpres 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dari data diatas Indikator penduduk yang memiliki akta kematian pada tahun 2020 memperoleh angka capaian yaitu 100%. Capaian tersebut dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Cakupan Penerbitan Akta Kematian} = \frac{\sum \text{Kutipan Akta Kematian pada thn Y}}{\sum \text{ Kematian pada thn Y}} \times 100\%$$

Jumlah penduduk yang meninggal pada tahun 2020 berjumlah 3383 jiwa sedangkan jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 3383 jiwa. Pada dasarnya warga masyarakat pada umumnya masih belum paham dan belum merasa penting akan kepemilikan akta kematian. Warga merasa akta kematian tersebut hanya penting bagi mereka dengan ekonomi menengah ke atas yang memiliki warisan saja. salah satu pentingnya akta kematian adalah untuk validasi data kependudukan. Aspek kepentingan terkait pemuktahiran data kependudukan memang lebih pada kebutuhan negara, sehingga masyarakat kurang merasa hal itu sebagai kebutuhan dan kewajiban untuk mereka penuhi. Dengan demikian menjadi tugas aparatur negara untuk proaktif mendorong dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan memfasilitasi berbagai kemudahan untuk masyarakat yang mengurus dokumen akta kematian.

Secara prosedural setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh pemerintah desa/kelurahan ke Disdukcapil. Disdukcapil kemudian mengeluarkan akta kematian untuk validasi data kependudukan, agar yang sudah mati tidak masuk lagi database kependudukan. Selain itu dapat digunakan untuk pengklaiman asuransi ataupun perbankan, taspen dan urusan lainnya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk. kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran. Capaian sasaran kepemilikan akta kelahiran Tahun 2020 sebesar 97,07% angka ini bersifat fluktuatif (setiap detik, menit dan hari bisa berubah) sehingga belum optimal dan masih perlu perhatian. Angka tersebut dihasilkan dari perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran} = \frac{\sum \text{Kepemilikan Akta 0-18 Thn pada Thn Y}}{\sum \text{ Usia 0-18 Thn pada Thn Y}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 jumlah Kutipan Akta Kelahiran 386.787 dokumen, sementara jumlah kelahiran mencapai 398.458 jiwa. Permasalahan ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang terlambat dalam pembuatan akta kelahiran atau melaporkan kelahiranya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terus melakukan upaya peningkatan capaian kinerja tersebut diantaranya dengan adanya :

a) pencanangan pelayanan BALADEWA LAHIR (Bayi Lahir dengan Membawa Akta Kelahiran) Baladewa Lahir merupakan program penerbitan Akta Kelahiran cepat bagi bayi yang dilahirkan pada bangsal rumah sakit/puskesmas di Kabupaten Kebumen.
b) Melaksanakan Kerjasama dengan seluruh puskesmas di Kabupaten Kebumen dan beberapa RS/RSKIA di Kabupaten Kebumen, bahwasanya bayi yang lahir di Puskesmas atau RS/RSKIA di Kabupaten Kebumen dapat langsung membawa akta kelahiranya pada saat keluar dari tempat tersebut.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yaitu : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Adapun capaian program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.32
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Terfasilitasinya Upaya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	%	16,66	15	90,03%	Rasionalisasi anggaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	1. Jumlah anggota RT/LKMD (LPMD) yang terbina	Orang	130	130	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			2. Jumlah anggota Pokja Posyandu yang terbina	Orang	120	40	33,33%	Rasionalisasi anggaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			3. Jumlah anggota BPD yang mendapatkan pembinaan = 120 orang dan BPD sebagai percontohan = 30 orang	Orang	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			4. Jumlah anggota kelompok Warga Peduli AIDS (WPA) yang mendapat pembinaan	Orang	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			5. Jumlah anggota Pokjanal Kecamatan yang mendapat pembinaan	Orang	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	1. Jumlah desa yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan TTG	Desa	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			2. Jumlah keikutsertaan Gelar TTG tingkat nasional	Kali	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3. Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan bagi perangkat desa	Desa	78	26	33,33%	Rasionalisasi anggaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	4. Fasilitasi program pembangunan perdesaan	1. Jumlah terbentuknya kawasan perdesaan, Kawasan Gula Semut (Desa Jladri, Rangkah, Geblug, Pakuran, Wonodadi) dan Kawasan Wisata Pesisir (Desa Pasir, Karangbolong, Srati, Karangduwur, Argopeni, Ayah, Candirenggo)	Kawasan	2	2	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			2. Jumlah pelaksanaan publikasi Kawasan Perdesaan	Acara	5	0	0%	Rasionalisasi anggaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	5. Pengendalian dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM	1. Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi fasilitasi pengendalian dan pelestarian aset Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) serta koordinasi kelembagaan pengelola aset DAPM di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.	Kecamatan	26	26	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			2. Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi dan koordinasi kelembagaan pengelola aset DAPM	Kecamatan	26	26	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	Prosentase BUMDES Yang Terbentuk	%	16,92	16,92	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	1. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	1. Jumlah desa yang mendapatkan pelatihan ketrampilan BUM Desa	Desa	160	80	50%	Rasionalisasi anggaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			2. Jumlah pelaksanaan inventarisasi lembaga BUMDES	Kali	1	1	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			3. Jumlah profil BUMDES yang tersusun	Buku	10	10	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			4. Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pembentukan BUMDES	Desa	76	76	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			5. Jumlah pelaksanaan Pasar BUMDES	Kali	1	0	100%	rasionalisasi anggaran	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	2 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan bagi lembaga ekonomi masyarakat desa (Desa Karanggedang Kec.Sruweng, Desa Joho, Desa Candiiwulan Kec.Adimulyo, Desa Balingasal, Desa Bagung Kec.Prembun, Desa Muktisari, Desa Jatimulyo Kec.Alian, Desa Kaliwungu, Desa Kedungwinangun, Desa Jeruk Agung Kec. Klirong, Desa Pekutan Kec.Mirit,Desa Banjarsari, Kelurahan Wonokriyo Kec.Gombong, Desa Bocor Kec.Buluspesantren, Desa Buayan Kec.Buayan, Desa Sidomulyo Kec.Karanganyar, Desa Karangreja Kec.Petanahan, Desa Pagedangan Kec.Ambal, Desa Meles Kec.Adimulyo, Desa Tlogorejo Kec.Bonorowo, Desa Grenggeng Kec.Karanganyar).	Desa	21	0	0%	Rasionalisasi anggaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pembinaan Pasar Desa	Jumlah terlaksananya pembinaan pengelolaan pasar desa	Kali	40	40	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	10	10	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan lembaga BP SPAMS 149 desa	Desa	149	0	0%	Rasionalisasi anggaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	2. Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi terlaksananya dan terdukungnya kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Sengkuyung Tahap II di desa Argopeni Kecamatan Ayah dan Sengkuyung Tahap III di ddesa Sidogede Kecamatan Prembun untuk kegiatan fisik dan non fisik di 3 desa di Kabupaten Kebumen	Desa	3	3	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	3. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	1. Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten Kebumen Terlaksananya BBGRM di desa dan kelurahan Terfasilitasinya keikutsertaan lomba pelaksanaan terbaik gotong royong	%	100	78%	78%	Kebumen menjadi juara I lomba BBGRM, namun terjadi pembatalan kegiatan karena pandemi covid 19, capaian yang sudah dilaksanakan sampai dengan persiapan awal untuk pencanangan bbgrm	dipersiapkan untuk tahun berikutnya
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			2. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan BBGRM	Desa di 26 Kecamatan	26	26	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			3. Jumlah keikutsertaan lomba pelaksanaan terbaik gotong royong	Kali	1	1	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	4. Fasilitasi Alokasi Dana Desa	1. Jumlah desa yang mendapat fasilitasi alokasi Dana Desa (Dana Desa APBN)	Desa	449	449	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			2. Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk Penghasilan Tetap Kepala Desa (Siltap)	Desa	449	449	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan			3. Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Desa	449	449	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Perempuan Dan Perlindungan Anak			Daerah						
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			4. Jumlah desa yang mendapat fasilitasi bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten dan bantuan keuangan lainnya	Desa	449	449	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5. Fasilitasi penguatan perencanaan pembangunan	1. Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi Penguatan Perencanaan Pembangunan,Tahun 2021	Kecamatan	26	26	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			2. Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes Tahun 2020 dan penyusunan RKPDes Tahun 2021	Desa	52	52	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	6. Pelaksanaan Lomba Desa	3. Persentase fasilitasi penyelenggaraan perlombaan desa Tingkat Kabupaten Kebumen dan Kepala Desa Teladan	%	100	12	12%	persiapan (rapat rapat/sos lomba desa) telah dilaksanakan namun karena pandemi covid dilakukan Rasionalisasi anggaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	7. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengendalian KPMD dan Pendamping Desa	Desa	449	449	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	8. Belanja Operasional / Bantuan Keuangan Desa Berdikari, Desa Pemula dan Desa Prakarsa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi program keberlanjutan pengembangan potensi desa untuk 26 desa	Desa	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Prosentase aparatur desa yang meningkat kapasitasnya	%	20	20	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	1. Jumlah aparatur pemerintah desa dan kelembagaan desa yang mendapat pelatihan	Orang	898	2236	248,99%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			2. Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi desa dan fasilitasi BPD	Desa	449	449	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			3. Jumlah desa yang mendapat fasilitasi penyusunan LKPJ, LPPD, IPPD Desa serta terlaksananya penetapan kewenangan desa ditingkat desa	Desa	449	449	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Fasilitasi penataan aset-aset desa	Jumlah desa yang mendapat pelatihan Penataan Aset aset Desa dan terfasilitasinya Penataan Aset aset Desa, Sertifikasi Tanah Desa dan Tukar menukar Tanah Kas Desa	Desa	52	52	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		**Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	Prosentase desa yang menyusun APBDes sesuai standar	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan keuangan desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	119	119	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kebumen		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Tingkat partisipasi RT/RW yang berperan dalam kelembagaan desa/kelurahan	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kebumen	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengisian perangkat desa	desa	24	24	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kebumen		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kebumen	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	1. Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi ADD	desa	24	24	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kebumen	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Fasilitasi APBDes	Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes	desa	24	24	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kebumen	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah kegiatan fasilitasi program pembangunan	kegiatan	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kebumen		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kebumen	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Pembinaan PKK	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	kegiatan	1	1	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Tingkat partisipasi RT/ RW yang berperan dalam Kelembagaan Kelurahan	%	100	100	100%	Adanya Rasionalisasi Anggaran untuk COVID 19	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah kali pertemuan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	lembaga	8	8	100%	Adanya Rasionalisasi Anggaran untuk COVID 19	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%	Adanya Rasionalisasi Anggaran untuk COVID 19	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan PKK	Jumlah kali kegiatan Pembinaan PKK	kali	6	6	100%	Adanya Rasionalisasi Anggaran untuk COVID 19	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Tingkat partisipasi RT/ RW yang berperan dalam Kelembagaan Kelurahan	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi RT , RW dan LKMK	bulan	4	4	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	Prosentase BUMDES yang terbentuk	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Jumlah KK miskin pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalannya	kk	8	8	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan PKK	Jumlah Rakor PKK Kelurahan	kali	6	6	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Tingkat partisipasi RT/ RW yang berperan dalam Kelembagaan Kelurahan	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah peserta pembinaan kelembagaan RT/RW	orang	72	72	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan PKK	Jumlah anggota PKK yang terbina	orang	60	60	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Tingkat partisipasi RT/ RW yang berperan dalam Kelembagaan Kelurahan	%	100	100	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan pemberdayaan	kegiatan	4	4	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan PKK	Jumlah kegiatan pembinaan PKK	kegiatan	2	2	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Tingkat Partisipasi RT RW Yang Berperan Dalam Kelembagaan Des/ Kelurahan	%	0	0	0%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan RT/RW	keg	0	0	0%	Adanya Rasionalisasi Anggaran untuk COVID 19	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Yang Berperan Dalam Pembangunan Desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan PKK	Jumlah bulan penyelenggaraan kegiatan PKK	bulan	12	12	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Alian		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100%	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Alian	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung	1. Fasilitasi APBDes	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Penyusunan APBDesnya	desa	16	16	100%	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			dengan pembangunan pertanian dan pariwisata								
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Alian	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	2. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah Desa Yang terfasilitasi program pembangunannya	desa	16	16	100%	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Alian		**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Prosentase Aparatur Desa Yang Meningkat Kapasitasnya	%	100	100	100%	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Alian	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Diberi Pelatihan	desa	16	16	100%	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Alian		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Alian	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pembinaan PKK	Jumlah Desa Yang Dibina PKKnya	desa	16	16	100%	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karangsambung		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	50	50	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karangsambung	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Fasilitasi APBDes	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan APBDes	desa	14	14	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karangsambung	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah kegiatan program pembangunan	desa	0	0	0%	Adanya Rasionalisasi Anggaran untuk COVID 19	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karangsambung		**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Prosentase aparatur desa yang meningkat kapsitasnya	%	0	0	0%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karangsambung	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan administrasi desa	kegiatan	0	0	0%	Adanya Rasionalisasi Anggaran untuk COVID 19	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karangsambung		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	50	50%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karangsambung	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan PKK	Jumlah kegiatan pembinaan PKK yang dibina	kegiatan	28	14	50%	Adanya Rasionalisasi Anggaran untuk COVID 19	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Prembun		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Tingkat Partisipasi RT RW Yang Berperan Dalam Kelembagaan Des/ Kelurahan	Desa	13	13	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Prembun	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas	Jumlah desa yang perangkat desa dan linmasnya diberi pelatihan	Desa	13	13	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Prembun		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Desa	13	13	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Prembun	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Fasilitasi APBDes	Jumlah bulan kegiatan Fasilitasi Penyusunan APBDes di 13 Desa	Desa	13	13	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Prembun	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah desa yang terfasilitasi program pembangunan	Desa	13	13	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Prembun		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	Desa	13	13	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Prembun	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan PKK	Jumlah desa binaan PKK	Desa	13	13	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Mirit		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Tingkat Partisipasi RT RW Yang Berperan Dalam Kelembagaan Desa/ Kelurahan	Desa	22	22	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Mirit	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Jumlah desa yang terfasilitasi program pembangunan desa	Desa	22	22	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Mirit		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Desa	100	99,9	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Mirit	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Fasilitasi APBDes	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyusunan APBDes di Desa	Desa	22	22	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Mirit	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah desa yang terfasilitasi Program Pembangunan	Desa	22	22	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Mirit		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	Desa	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Mirit	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK (22 Desa)	Desa	22	22	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kutowinangun		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kutowinangun	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Fasilitasi APBDes	Jumlah desa yang dilakukan Fasilitasi Penyusunan APBDes	Desa	19	19	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kutowinangun	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah desa yang terfasilitasi program pembangunannya	Desa	0	0	0%	Adanya Rasionalisasi Anggaran untuk COVID 19	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kutowinangun		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kutowinangun	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Jumlah desa binaan PKK	desa	19	19	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Ambal		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	%	100	98	98%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Ambal	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Fasilitasi APBDes	Jumlah desa yang terfasilitasi Penyusunan APBDes nya	desa	32	32	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Ambal	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah desa yang terfasilitasi program - program pembangunannya	desa	32	32	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Ambal		**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Prosentase aparatur desa yang meningkat kapasitas-nya	desa	32	32	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Ambal	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah desa yang diberi pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan	desa	32	32	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Ambal		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	desa	32	32	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Ambal	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Jumlah desa pembinaan TP-PKK	desa	32	32	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Buluspesantren		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Buluspesantren	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Fasilitasi APBDes	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Penyusunan APBDes nya	desa	21	21	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Buluspesantren	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Fasilitasi program pembangunan	JumlahDesa FasilitasiKegiatan program Pembangunan	desa	21	21	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Buluspesantren		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Buluspesantren	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	1. Jumlah Desa Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	desa	21	21	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Buluspesantren			2. Jumlah Kepala Keluarga yang Menerima Bantuan Babonisasi	0	0	0	0%	Adanya Rasionalisasi Anggaran untuk COVID 19	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Pejagoan		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Pejagoan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	1. Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi oleh dana alokasi desa	desa	13	13	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Pejagoan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	2. Fasilitasi APBDes	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDes	desa	13	13	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Pejagoan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	3. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Program Pembangunannya	desa	13	13	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Pejagoan		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	organisasi	4	4	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Pejagoan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Pembinaan PKK	Jumlah desa binaan PKK	desa	13	13	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Klirong		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Klirong	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Fasilitasi APBDes	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan APBDesnya	Desa	24	24	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Klirong	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah desa fasilitasi program pembangunan	Desa	24	24	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Klirong		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Klirong	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan PKK	Jumlah Desa yang dibina	Desa	24	24	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Petanahan		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Tingkat partisipasi RT/RW yang berperan dalam kelembagaan desa./kel	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Petanahan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Desa Yang Mengikuti Sosialisasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Desa	21	21	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Petanahan		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Petanahan		1. Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi DD/ADD nya	Desa	21	21	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Petanahan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Fasilitasi APBDes	Jumlah Desa yang di fasilitasi APBDesnya	Desa	21	21	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Petanahan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	3. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah desa yang di fasilitasi program pembangunannya	Desa	21	21	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Petanahan		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Petanahan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan PKK	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	Desa	21	21	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sruweng		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sruweng	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Fasilitasi APBDes	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan APBDes	desa	21	21	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sruweng	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah kegiatan fasilitasi program pembangunan	desa	21	21	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sruweng		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sruweng	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan PKK	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	Desa	21	21	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karanganyar		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	58,5	58,5		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karanganyar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Fasilitasi APBDes	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan APBDes di 7 Desa	kegiatan	2	1	50%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karanganyar		Fasilitasi program pembangunan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan	kegiatan	3	2	67%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karanganyar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karanganyar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan PKK	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK yang dibinaan	kegiatan	2	2	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Tingkat partisipasi RT/ RW yang berperan dalam Kelembagaan Kelurahan	%	100	25	25%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Rakor Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kali	4	1	25%	Belum optimalnya dalam pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar		**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	Prosentase BUMDES yang terbentuk	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan	Orang	26	26	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	75	75%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Pembinaan PKK	Jumlah bulan kegiatan pembinaan PKK yang dibinaan	Bulan	11	8	75%	adanya pembatasan kegiatan dikarenakan pandemi covid 19	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	0	0%	Belum optimalnya dalam pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan PKK	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	Kegiatan	12	0	0%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Tingkat partisipasi RT/RW yang berperan dalam kelembagaan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Bulan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Bulan	12	12	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	Kegiatan	1	1	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Pembinaan PKK	Jumlah anggota PKK yang terbina	Orang	20	20	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Karanganyar	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Pembinaan PKK	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	kegiatan	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karanggayam		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100%	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karanggayam		1. Fasilitasi APBDes	Jumlah Desa Yang difasilitasi Penyusunan APBDesnya	desa	19	19	100%	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karanggayam		2. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah Desa Yang difasilitasi program pembangunanya	desa	19	19	100%	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karanggayam	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	desa	19	19	100%	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karanggayam	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan PKK	Jumlah Desa Binaan PKK	desa	19	19	100%	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Karanggayam	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat		Jumlah Pembinaan Perempuan di perdesaan	kegiatan	1	1	100%	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Adimulyo		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Adimulyo	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Fasilitasi APBDes	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Penyusunan APBDesnya	Desa	23	23	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Adimulyo		2. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Program pembangunannya	Desa	23	23	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Adimulyo	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Prosentase aparatur desa yang meningkat kapasitas-nya	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Adimulyo	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang diberi pembinaan tentang Administrasi Desa	Orang	46	46	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Adimulyo		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Adimulyo		Pembinaan PKK	Jumlah Desa Binaan PKK	Desa	23	23	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kuwarasan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	10	10	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kuwarasan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	1. Fasilitasi APBDes	Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan Fasilitasi APBDes	Desa	22	22	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kuwarasan		2. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan	Desa	22	22	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kuwarasan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kuwarasan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan PKK	Jumlah desa yang terbina	Desa	22	22	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Puring	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Puring		1. Fasilitasi APBDes	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDes	desa	23	23	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Puring		2. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah kegiatan fasilitasi program pembangunan	kegiatan	1	1	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Puring	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Prosentase aparatur desa yang meningkat kapasitas-nya	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Puring	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan	Fasilitasi penataan aset-aset desa	Jumlah perangkat desa yang terlatih	orang	46	46	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			pertanian dan pariwisata								
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Puring		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Puring	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan PKK	Jumlah kegiatan pembinaan PKK	kelompok	23	23	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Gombong		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Gombong	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	1. Fasilitasi APBDes	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan APBDes	kegiatan	1	1	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Gombong		2. Fasilitasi program pembangunan	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan di wilayah kecamatan	kegiatan	1	1	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Gombong	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Gombong	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	kegiatan	3	3	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Tingkat partisipasi RT/ RW yang berperan dalam Kelembagaan Kelurahan	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan pemberdayaan	keg	2	2	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan PKK	Jumlah kegiatan pembinaan PKK	kali	6	6	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Tingkat partisipasi RT/ RW yang berperan dalam Kelembagaan Kelurahan	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah kegiatan pemberdayaan	kegiatan	1	1	1		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan PKK	Jumlah kegiatan pembinaan PKK yang dilaksanakan	kegiatan	3	3	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sempor		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Tingkat partisipasi RT/RW yang berperan dalam kelembagaan desa/kel	desa	16	16	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sempor	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Jumlah kegiatan fasilitasi program pembangunan	kelompok	16	16	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sempor		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	persen	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sempor	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Fasilitasi APBDes	Jumlah kegiatan fasilitasi penyusunan APBDes di 16 desa	desa	16	16	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sempor		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	kelompok	16	16	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sempor	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Jumlah kegiatan pembinaan PKK yang menjadi binaan	kelompok	16	16	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Buayan		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100%	100%	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Buayan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Fasilitasi APBDes	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan APBDesa nya	desa	20	20	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Buayan		Fasilitasi program pembangunan	Jumlah desa yang terfasilitasi program-pembangunan di desa	desa	20	20	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Buayan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100%	100%	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Buayan		Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Jumlah Desa Binaan PKK oleh TP PKK Kecamatan	desa	20	20	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Rowokele	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Rowokele	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1 Fasilitasi APBDes	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan APBDes di Desa	Desa	11	11	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Rowokele		2 Fasilitasi program pembangunan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan	Desa	11	11	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Rowokele	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Rowokele	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pembinaan PKK	Jumlah desa yang dibina	Desa	11	11	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Ayah		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Ayah	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Fasilitasi APBDes	Jumlah kegiatan Fasilitasi peyusunan APBdes di desa	desa	18	18	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Ayah		Fasilitasi program pembangunan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi program pembangunan	desa	18	18	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Ayah	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Ayah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan PKK	Jumlah kegiatan pembinaan PKK yang dibina	desa	18	18	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sadang		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sadang	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1 Fasilitasi APBDes	Jumlah desa yng terfasilitasi APBDes	desa	7	7	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sadang		2 Fasilitasi program pembangunan	Jumlah desa yang terfasilitasi program pembangunan	desa	7	7	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sadang	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Prosentase aparatur desa yang meningkat kapasitas-nya	%	100	100	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sadang	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah desa yang aparatur pemerintah desa mendapat pelathan pembinaan adminitrasi desa	desa	7	7	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sadang		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	20	20	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Sadang	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan PKK	Jumlah desa binaan PKK oleh TP PKK Kecamatan	desa	7	7	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Poncowarno		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Poncowarno	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	1 Fasilitasi APBDes	Jumlah Desa yang di fasilitasi Penyusunan APBDesnya	Desa	11	11	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Poncowarno		2 Fasilitasi program pembangunan	Jumlah desa yang di fasilitasi program pembangunannya	Desa	11	11	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Poncowarno	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	55	55%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Poncowarno	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan PKK	Jumlah kegiatan Pembinaan PKK	Desa	11	6	55%	adanya rasionalisasi anggaran	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Padureso		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	20	20	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Padureso	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Fasilitasi APBDes	Jumlah kegiatan fasilitasi Penyusunan APBDesa di 9 desa	Desa	9	9	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Padureso		Fasilitasi program pembangunan	Jumlah kegiatan fasilitasi program pembangunan	Desa	9	9	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Padureso	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	20	20	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Padureso	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan PKK	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di bina	Desa	7	7	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Bonorowo		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100%	100%	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Bonorowo	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1 Fasilitasi APBDes	Jumlah desa yang di fasilitasi penyusunan APBDesnya	desa	11	11	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Bonorowo		2 Fasilitasi program pembangunan	Jumlah Desa yang terfasilitasi program pembangunannya	desa	11	11	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Bonorowo	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Jumlah desa yang mengikuti Rakor Evaluasi BPNT	desa	11	11	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Bonorowo	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	desa	11	11	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Bonorowo		Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan PKK	desa	11	11	100%		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pemberdayaan masyarakat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 94,35% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan sebesar 87,08% sehingga tingkat kesesuain antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 108,35% atau sangat tinggi

Adapun Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan indikator Terfasilitasinya Upaya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa mencapai 90,03% dikarenakan terdapat kegiatan Pengendalian dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM. Demikian juga Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan indikator Prosentase Aparatur Pemerintah Desa yang Meningkat Kapasitasnya mencapai 165,99% atau melebihi target, dikarenakan terdapat kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa.

Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 adalah adanya refocusing anggaran serta adanya dampak Covid 19 yang mengharuskan beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring yang dirasa kurang efektif dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung di desa, selain itu juga adanya pembatasan jumlah peserta sesuai protokol kesehatan, sehingga peserta kegiatan tidak sesuai jumlah target. Untuk itu upaya yang akan dilakukan pada masa yang akan datang mengusulkan kembali kegiatan tersebut dan memanfaatkan serta mengefektifkan anggaran yang tersedia.

c. Capaian Kinerja Urusan

Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan urusan dengan indicator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3.33
Perkembangan Indikator Kinerja
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Prosentase pembentukan Bumdes	%	77,95 (350 desa)	16,92 (76 desa)	16 ,92 (76 desa)	100%	70
2. Prosentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan tentang pemerintahan desa	%	11,64 (979 orang)	16,66% (1.347 orang)	27,65% (2.236 orang)	165,99%	90
3. Prosentase penanganan kasus penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100% (159 kasus)	100% (140 kasus tertagani)	100% (126 kasus tertangani)	100%	100 (412 kasus)

Sumber : DISPERMADES P3A Kabupaten Kebumen, 2020

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), maka Renstra/RPJMD menargetkan sebanyak 449 telah membentuk Bumdes. Adapun tujuan pendirian Bumdes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan asli desa, meningkatkan, pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 16,92% atau sebanyak 76 Bumdes dan telah terealisasi sebanyak 76 Bumdes atau sebanyak 16,92% dari jumlah seluruh desa yang ada di Kabupaten Kebumen, yaitu sebanyak 449 desa. Sehingga sampai dengan tahun 2020 telah terbentuk sebanyak 426 Bumdes atau sebanyak 94,87% dari 449 desa di Kabupaten Kebumen.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa. Selama periode Renstra Dispermades P3A Kabupaten Kebumen telah menargetkan sebanyak 8.082 orang aparatur pemerintah desa atau sebanyak 90,50% dari jumlah aparatur yang ada pada awal periode Renstra yaitu sebanyak 8.930

orang. Sampai dengan tahun 2020 aparatur pemerintah desa yang sudah dilatih sebanyak 7.256 orang dan pada tahun 2020 melatih sebanyak 2.236 orang jadi jumlah seluruh aparatur pemerintah desa yang sudah dilatih sampai dengan tahun 2020 sebanyak 7.256 orang atau sebanyak 89,78% dari target periode Renstra.

Penanganan kasus penyelenggaraan pemerintahan desa dan kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat ditangani 100%. Terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat atau kasus, pada Dispermades P3A, setiap tahun pada periode Renstra telah ditargetkan sebanyak 100%, dengan rumus jumlah kasus yang masuk dibagi dengan jumlah kasus atau pengaduan masyarakat yang tertangani. Pada tahun 2020 kasus atau aduan masyarakat yang masuk seluruhnya berjumlah 126 kasus, yang terbagi dalam dua kriteria, yaitu kasus tentang penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak 13 kasus dan sebanyak 113 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari jumlah kasus yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, hampir sebagian besar adalah kasus mengenai pelanggaran larangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa

8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas yang terdiri dari Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Adapun capaian program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.34

Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		**Program keluarga berencana**	**Peningkatan Pelayanan KB di Kecamatan**	**%**	**85,5**	**70,6**	**82,57%**	**tidak terdapat masalah dalam pelaksanaannya, capaian ini bahkan melebihi dari ketentuan target nasional cakupan peserta kb aktif yang ditargetkan sebesar 65%**	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	1. Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah lokasi pelayanan KB yang difasilitasi	kec	26	26	100		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	2. Pelayanan KIE	Jumlah kecamatan yang terlayani KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) keluarga bencana	kec	26	26	100		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	3. Pembinaan Petugas Keluarga Berencana	Jumlah kader PPKBD , sub PPKBD dan petugas pencatatan dan pelaporan KB yang di bina	orang	2187	2187	100		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang diadakan	unit	40	40	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	5. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Jumlah lokasi kampung KB yang mendapatkan fasilitasi program KKBPK	kec	26	26	100		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	**Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**	**Persentase pelayanan informasi dan konseling KRR**	%	100	100	100		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Jumlah remaja dan masyarakat peserta sosialisasi	org	750	750	100		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	**Program pelayanan kontrasepsi**	**jumlah calon akseptor MOP dan MOW, implan, iud suntik, pil dan kondom**	**akseptor**	**162891**	**162891**	**100**		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah calon akseptor KB yang dilayani	akseptor	162891	162891	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	**Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga**	**Pemberdayaan Kader kelompok Tribina**	**orang**	**130**	**130**	**100**	**-**	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		Pemberdayaan Bina Keluarga Balita,Bina Keluarga Remaja,Bina Keluarga Lansia dan Bina Lembaga Keluarga	Jumlah kader BKB, BKR, BKL, dan BLK yang dibina	orang	130	130	100	-	

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 95,64% atau kategori tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 95,64% atau sangat tinggi.

Adapun Program keluarga berencana tingkat capainnya hanya 82,57%, yaitu Program Kelarga Berencana kegiatan Penyediaan pelayanan KB adan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dan Program pelayanan kontrasepsi kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Hal ini karena Kegiatan banyak melibatkan masyarakat dalam bentuk pertemuan pada masa pandemi covid-19, kegiatan pertemuan tersebut di batasi, dan kegiatan pelayanan MOW dan MOP di rumah sakit di batasi karena adanya pandemi covid -19

Permasalahan yang dihadapai selama pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan urusan PPKB adalah belum adanya fasilitasi permodalan bagi kelompok UPPKS dan DO dan *Unmeet need* yang masih tinggi, untuk itu upaya yang akan dilakukan pada masa yang akan datang adalah membantu kelompok UPPKS dalam pemasaran produk, KB paska salin dan paska keguguran untuk bisa dimaksimalkan, KIE dipertajam melalui berbagai media baik elektronik, cetak dan media luar ruang, KIE perorangan dan kelompok serta media sosial lainnya.

c. Capaian Kinerja Urusan

Adapun capaian kinerja urusan dengan indikator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3.35
Perkembangan Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Cakupan peserta KB aktif	%	71,41	85,10	70,60	82,96	85,10
2. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	%	53,02	32,37	44,04	136,05	32,31

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kebumen, 2020

Capaian kinerja tahunan cakupan Peserta KB Aktif tahun 2020 sebesar angka 82,96%. Realisasi 2020 sebesar 70,60% diperoleh dari jumlah peserta KB aktif sebesar 137.183 jiwa dibagi jumlah PUS sebesar 194.309 jiwa. Dengan bertambahnya peserta KB aktif diharapkan dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kualitas SDM dapat meningkat dan dapat mengentaskan kemiskinan. Adapun perkembangan cakupan peserta KB aktif, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.36
Capaian kinerja cakupan peserta KB Aktif tahun 2019-2020

NO.	URAIAN KINERJA	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,3	2,3
2.	Jumlah akseptor KB	141.808	137.676
	a. Laki-Laki	5.847	5.618
	b. Perempuan	135.961	132.058
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur	198.546	199.214
4.	Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB	141.808	137.183

Sumber : DINSOS PPKB Kab. Kebumen, 2020

Capaian kinerja cakupan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar angka 136,05%. Atau dengan kata lain Realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 44,04%. Persentase ini dihitung dari jumlah PUS anggota poktan keluarga prasejahtera dan sejahtera I yang ber KB sebesar 21.243 jiwa dibagi PUS anggota poktan keluarga prasejahtera dan sejahtera I sebesar 48.236 jiwa

Tabel 3.37
Rekapitulasi Tingkat Kesejahteraan Keluarga

NO	TINGKAT KESEJAHTERAAN	JUMLAH
1.	Tahapan Keluarga Pra Sejahtera	49.079
2.	Tahapan Keluarga Sejahtera I	218.000
3.	Tahapan Keluarga Sejahtera II	100.960
4.	Tahapan Keluarga Sejahtera III	-
5.	Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus	-
	TOTAL	**368.039**

Sumber : DINSOS PPKB Kab. Kebumen 2020

9. Urusan Perhubungan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan perhubungan dilaksanakan melalui lima program prioritas yang meliputi : Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. Adapun capaian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.38
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perhubungan		Dinas Perhubungan	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	**Cakupan Kualitas Layanan transportasi**	**%**	**20**	**20**	**100%**	**-**	**-**
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah unit alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	unit	9	9	100%	-	-
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah unit terminal Gombong yang dipelihara	unit	12	-	0%	Rasionalisasi anggaran	-
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpelihara	unit	54	54	100%	-	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan	**Pogram peningkatan pelayanan angkutan**	capaian kualitas layanan trasnportasi	**%**	**20**	**20**	**100%**	**-**	**-**
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	Jumlah sosialisasi dan koordinasi dengan awak angkutan dan agen bus, sosialisasi kepada agen bus menjelang lebaran, rapat Koordinasi dengan agen bus dan Paguyuban angkutan yang dilaksanakan, sosialisasi kepada paguyuban angkutan	kali	12	12	100%		-
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Jumlah halte bertemakan Geopark yang dibangun	unit	2	2	100%	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Jumlah bulan perijinan di Bidang Angkutan yang terfasilitasi	Bulan	12	12	100%	-	-
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru	Jumlah pelayanan Pos lebaran (14 hari kerja), Pos Natal dan tahun baru (12 hari kerja) dan Sewa bus mudik lebaran gratis (4 bus) yang ditingkatkan	kali	2	2	100%	-	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan	**Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas**	Cakupan Kualitas Layanan transportasi	**%**	**20**	**20**	**100%**	**-**	**-**
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan	unit	127	127	100%	-	-
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Pengadaan marka jalan	Jumlah marka jalan di kab. Kebumen yang diadakan	m2	754	754	100%	-	-
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah pagar pengaman jalan yang diadakan	meter	324	324	100%	-	-
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Masalah Lalu Lintas	Jumlah kegiatan Rapat Tim Andalalin (12 bulan, 100 juta) yang dilaksanakan	kali	12	12	100%	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Pengadaan Traffic Light, Warning Lamp, Papan Nama Jalan	Jumlah traffic light, warming lamp berbasis ATCS yang diadakan	unit	1	1	100%	-	-
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Operasi ketertiban dan pengendalian arus lalu lintas	Jumlah kegiatan operasi laik jalan dan kegiatan patroli dan pengawalan lalu lintas dan piket car free day yang dilaksanakan	kali	122	122	100%	-	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah operasi laik jalan	kali	66	30	45%	Adanya Pandemi Covid OLJ di Tiadakan	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah patroli dan patwal lalu lintas untuk pengamanan jalan	kali	12	76	633%	-	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah Piket Car Free Day	kali	44	16	36%	Adanya Pandemi Covid CFD di Tiadakan	-
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan lalu lintas	Jumlah sarana dan prasarana pengaman lalu lintas yang diadakan	unit	256	256	100%	-	-
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan pengelolaan parkir	Jumlah pengendalian dan pengelolaan parkir	kali	12	12	100%	-	-
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan pengelolaan fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan	Jumlah pengendalian dan pengeloaan upah bulanan	bulan	12	12	100%	-	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah pengendalian dan pengadaan BPJS Ketenagakerjaan	bulan	12	12	100%	-	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah pelatihan penjaga palang pintu	kali	3	3	100%	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah THL penjaga palang pintu KA yang diadakan	orang	62	62	100%	-	-
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Keselamatan Pengguna Jalan	Jumlah pos jaga keselamatan pengguna jalan (klepusanggar, kaligawe, pekunden, penularan, sodor, kalisalam) yang dibangun	unit	1	1	100%	-	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah radio RIG pos KA yang diadakan	unit	9	9	100%	-	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah HT yang diadakan	unit	17	17	100%	-	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah Rambu Lalu Lintas	unit	-	-		-	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah Suku Cadang Palang Pintu (seling, tali, gir dan Genset)	unit	10	10	100%	-	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah CCTV yang diadakan	unit	2	2	100%	-	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah Genset yang diadakan	unit	-	-	-	Refocusing anggaran	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah Konsultan Perencana	dokumen	1	1	100%	-	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah Konsultan Pengawas	dokumen	-	-	-	Refocusing anggaran	-
	Perhubungan		Dinas Perhubungan		Jumlah Zona Aman Sekolah	meter	-	-	-	Refocusing anggaran	-
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Pembinaan Keselamatan Transportasi	Jumlah Dokumen inspeksi keselamatan jalan (9 kecamatan @15 juta)	dokumen	-	-	-	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Perhubungan		Dinas Perhubungan	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**Cakupan Kualitas Layanan transportasi**	**%**	**20**	**20**	**100%**	**-**	**-**
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji kendaraan (exeload dan breaktester, spidometer tester) yang diadakan	unit	3	3	100%	-	-
	Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dinas Perhubungan	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah operasional dan gaji THL	bulan	12	12	100%	-	-

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perhubungan, dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 94,72%, sehingga tingakta kesesuai antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram adalah 105,58 % atau sangat tinggi.

c. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Kualitas Layanan transportasi. Adapun dalam pelaksanaan urusan dengan indicator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3.39
Perkembangan Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Cakupan Kualitas Layanan Transportasi	%	73,21	72,96	80,56	110	85,10

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen, 2020

Cakupan Kualitas Transportasi diperoleh dengan cara menghitung persentase dari perbandingan :

$$x = \frac{\left\{\frac{\text{Jlh sarana kelengkapan jalan kondisi baik}}{\text{Jlh sarana kelengkapan jalan yg harusnya ada}}\ x\ 100\%\right\} + \left\{\frac{\text{Jlh sarpras LLAJ kondisi baik}}{\text{Jlh sarpras LLAJ yang harusnya ada}}\ x\ 100\%\right\} + \left\{\frac{\text{Jlh kendaraa yang uji KIR}}{\text{Jlh kendaraan yg harus uji KIR}}\ x\ 100\%\right\}}{3}$$

Cakupan Kualitas Layanan Transportasi capaiannya 80,56% realisasi menggunakan persentase perbandingan (Jumlah sarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik/jumlah sarana kelengkapan jalan yg seharusnya adax100%)+(Jumlah sarana prasarana LLAJ dlm kondisi baik/Jumlah sarana prasarana LLAJ yang seharusnya ada x 100%)+(Jumlah kendaraa yang uji KIR / Jumlah kendaraan yang seharusnya uji KIR x 100%)/3).

Tabel 3.40
Sarana Kelengkapan Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Kelengkapan Jalan	Jumlah	Kebutuhan	%
1	Rambu – Rambu Lalu Lintas	2.406	8.000	30,08
2	LPJU	4.904	14.000	35,03
3	Traffic Light/WL	60	60	100
	Total Persentase I			**56,27**
1	Pagar Pengaman Jalan	1.204	2.000	60,2
2	Deliniator	195	350	55,71
3	Paku Jalan	231	350	66
4	Barikade	455	550	82,73
5	Water Barier	42	100	42
	Total Persentase II			**61,33**
1.	Jumlah Kendaraan Uji KIR	8.066	6.500	124,09

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen, 2020

Dengan demikian perhitungan Capaian kinerja adalah sebagai berikut :(56,27+61,33+124,09)/3= 80,56%.

10. Urusan Komunikasi Dan Informatika

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan Komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui program prioritas Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Adapun capaian program dan kegiatan sebegaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.41
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	Terlaksananya Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	%	100	100	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan persandian	kegiatan	1	1	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah sewa koneksi internet, pemeliharaan jaringan LAN, pemeliharaan alat listrik dan elektronik dan pemeliharaan alat mesin	bulan	12	12	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah paket Sewa Koneksi Internet	paket	3	3	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah Bulan Pemeliharaan Jaringan LAN Kabupaten	bulan	12	12	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah bulan Pemeliharaan Alat Listrik dan Elektronik	bulan	12	12	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	bulan	12	12	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Jumlah paket Operasional Subid Infrastruktur dan Teknologi yang dilakukan	kegiatan	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah kegiatan Operasional Team Programmer, Sistem Informasi Pendukung GRMS dan SmartCity dan Jasa Pihak Ketiga yang tidak bisa ditangani Oleh team Programmer	bulan	12	12	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah bulan Operasional Team Programmer (programmer, sistem analis)	bulan	12	12	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah Sistem Informasi Pendukung GRMS dan SmartCity	aplikasi	106	106	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah Jasa Pihak Ketiga yang tidak bisa ditangani Oleh team Programmer	paket	1	1	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Jumlah paket Operasional Pemeliharaan Jaringan LAN	kegiatan	1	1	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah paket Jasa Pembangunan Pemeliharaan sistem Informasi GRMS dan Pengadaan Software Original	paket	1	1	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Smart City Kabupaten Kebumen	jasa			#DIV/0!	rasionalisasi	
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		**Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi**	Terlaksananya Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	%	100	100	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Tower Telekomunikasi Blanspot	paket	2	2	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah tersedianya peralatan telekomunikasi	jenis	5	5	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah Sosialisasi persandian/ keamanan informasi	kegiatan	1	1	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pengembangan Media Alternatif	Jumlah Pertemuan LKM (12 LKM) dan FK Metra	kali	13	17	131%	ada pertemuan yg didanai bukan dr apbd	
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah Peyelenggaraan Festival FK Metra tingkat eks karesidenan					rasionalisasi	
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	Peningkatan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	%	100	100	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah desa yang dilaksanakan pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo	desa	100	100	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah orang yang diikutkan pelatihan website dengan lembaga pelatihan komputer	orang	16	16	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah kegiatan pelatihan SDM Dinas Kominfo yang dilaksanakan	kegiatan	3	3	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		**Program kerjasama informasi dengan mas media**	Terpublikasinya kebijakan pemkab kebumen melalui siaran Tv dan Radio In FM dan Bertambahnya peralatan studio dan Komputer ratih TV	%	100	100	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah kegiatan siaran ratih tv (berita kebumen, SMK dan program lainya) dan siaran radio in fm (reportase , hiburan, talkshow, streaming dan program lainya) yang dilaksanakan	jam/hari	31	31	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah kegiatan Operasional ratih tv 12 jam siaran per hari yang dilaksanakan	jam/hari	12	12	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah kegiatan Operasional in FM 19 jam siaran per hari yang dilaksanakan	jam/hari	19	19	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah orang yang dibiayai honor non PNS (radio 15 orang, ratih tv 24 orang, kebersihan/penjaga 4 orang)	orang	43	43	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah kegiatan Belanja jasa khusus (jasa dekorasi, jasa pemeliharaan pemancar, jasa penyusunan program acara (7 program) yang dilaksanakan	program	7	7	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Rapat Bakohumas Kabupaten yang diselenggarakan	kali	6	2	33%	refoqusing	
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah rapat Terbentuknya PPID Pembantu di Lingkunga Pemda Kebumen	kali	4	4	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah kegiatan belanja operasional (cetak banner hari kebebasan pers (18); DL jakarta (1x), DL Semarang (12x)) yang dilaksanakan	kegiatan	31	31	100%		
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan			Jumlah desa Terselenggaranya	desa	26	26	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Informatika			sosialisasi pembentukan PPID Desa						

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 95,83% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 95,47%, sehinggat tingkat kesesuain antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram adalah 100,38% atau sangat tinggi.

Secara umum adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika adalah letak geografis daerah Kabupaten Kebumen di sebelah utara yang didominasi bukit dan pegunungan membuat jaringan telekomunikasi tidak merata sebab bukit atau gunung-sekitar menghalangi jangkauan jaringan komunikasi tersebut ke beberapa titik area sehingga jangkauan jaringannya naik turun. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan jangkauan dan integrasi wilayah.

Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan yang anggarannya direfocusing yang seharusnya menunjang tingkat capaian program. Kegiatan yang mengalami refocusing adalah pengadaan jaringan fiber optik yang rencananya akan dilakukan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Buayan, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Adimulyo.

c. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah serta Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah. Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dengan capaian indicator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel 3.42
Perkembangan Indikator Kinerja
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Capaian Layanan Komunikasi	%	100	90.38	100	110.64	100

Sumber : DISKOMINFO Kabupaten Kebumen, 2020

Cakupan Layanan komunikasi yang dimaksud dalam hal ini meliputi jumlah zona layanan komunikasi yang ada) : (jumlah zona layanan telekomunikasi yang seharusnya ada) x 100%. Dari 460 desa yang ditargetkan mendapatkan pelayanan, terealisasi 460 desa, atau dengan kata lain capaian layanan komunikasi mencapai target 110.64 %.

11. Urusan Koperasi (Usaha Kecil Dan Menengah)

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan ini dilaksanakan melalui program prioritas : Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Adapun capaian program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.43

Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		**Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif**	jumlah Sosialisasi UMKM, Sosialisasi Kebijakan UMKM, Sosialisasi Sistem Jaminan Halal, Sosialisasi BPOM, Fasilitasi Perijinan PIRT, Penyusunan Database UMKM	orang	80	80	100%		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	jumlah Sosialisasi UMKM, Sosialisasi Kebijakan UMKM, Sosialisasi Sistem Jaminan Halal, Sosialisasi BPOM, Fasilitasi Perijinan PIRT, Penyusunan Database UMKM	orang	80	80	100%		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	Meningkat-nya jumlah UMKM yang terfasilitasi mengikuti pameran; Peningkatan Jumlah UMKM	UMKM	15	0	0%	tidak dapat di jalankan karena Covid	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	1. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah fasilitasi UMKM untuk pengembangan produk dan pemasaran	UMKM	6	6	100%		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	2. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah magang UKM, pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi badan hukum	UMKM	352	352	100%		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	3. Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah orang dalam terlaksanannya peningkatan kwalitas Sumbar daya manusia pengelola koperasi	Orang	80	40	50%	sebagian tidak jalankan karena covid	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	Meningkatnya akses UMKM dan Koperasi terhadap fasilitas pembiayaan pemerintah; Peningkatan Jumlah UMKM	persen	90	85	94%		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	1. Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah paket pelatihan kewirausahaan	Paket	11	4	36%	adanya pembatasan dalam pertemuan karena pandemi covid 19	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	2. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah	jumlah orang bagi pembinaan IRT	orana	130	130	100%		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	Meningkatnya Persentase koperasi aktif	Persen	92	87,11	95%		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	1. Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi dan pembinaan koperasi yang dinilai	Koperasi	60	60	100%		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	2. Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	jumlah orang bagi pelatihan komputerisasi akuntansi, pelatihan manajemen resiko, pelatihan pelaporan online koperasi, dan sosialisasi peraturan perkoperasian	Koperasi	80	80	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah koperasi penerima fasilitas pemerintah yang di monev	Kopeasi	0	0	0%	anggarann di rasionalisasi	

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Koperasi Dan UMKM diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 72,28% atau kategori sedang dimana Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Rata-rata capaian kegiatan adalah 76,26%, sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 94,78% atau sangat tinggi.

Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program adalah dikarenakan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan di refocusing. Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 adalah masih rendahnya kualitas UMKM serta masih banyak belum dikenal untuk itu upaya yang akan dilakukan pada masa yang akan datang melakukan kegiatan yang meningkatkan mutu UMKM serta memfasilitasi UMKM untuk dikenal dengan kegiatan pameran sehingga dapat bersaing di luar daerah

c. Capaian Kinerja Urusan

Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indicator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel 3.44
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Presentase Koperasi Aktif	%	84	90	87,11	95	92
Peningkatan Jumlah UMKM	Jumlah	45.715	45.457	46.057	102	46.057

Sumber : Disnaker UKM, Kabupaten Kebumen, 2020

Adapaun rincian persentase jumlah koperasi aktif dan jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.45
Data Jumlah Koperasi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (unit)		
		Aktif	Tidak Aktif	JML
1	KUD	22	2	24
2	Kop. Pertanian	11	1	12
3	Kop. Perkebunan	0	0	0

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (unit)		
		Aktif	Tidak Aktif	JML
4	Kop. Peternakan	0	0	0
5	Kop. Perikanan	14	0	14
6	Kop. Kehutanan	0	0	0
7	Kopti	1	0	1
8	Kopra	0	0	0
9	Kopinkra	1	0	1
10	Koppontren	12	5	17
11	Kopkar	9	4	13
12	Kop. Angkatan Darat	2	0	2
13	Kop. Angkatan Laut	0	0	0
14	Kop. Angkatan Udara	0	0	0
15	Kop. Kepolisian	1	0	1
16	Kop. Serba Usaha	72	20	92
17	Kop. Pasar	3	2	5
18	Kop. Simpan Pinjam	44	3	47
19	Kop. Angkutan Darat	1	0	1
20	Kop. Angkutan Laut	0	0	0
21	Kop. Angkutan Udara	0	0	0
22	Kop. Angkutan Sungai	0	0	0
23	Kop. Angkutan Penyeberangan	0	0	0
24	Kop. Wisata	0	0	0
25	Kop. Telkom	0	0	0
26	Kop. Perumahan	0	0	0
27	K.B.P.R	0	0	0
28	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	89	4	93
29	Kop. Listrik Perdesaan	0	0	0
30	Koperasi Asuransi Indonesia	0	0	0
31	Kop. Wanita	7	0	7
32	Kop. Profesi	0	0	0
33	Kop. Veteran	1	0	1
34	Kop. Wredatama	7	0	7
35	Kop. Pepabri	3	0	3
36	Kop. Mahasiswa	0	0	0
37	Kop. Pemuda	0	0	0
38	Kop. Pertambangan	0	0	0
39	Kop. Pedagang Kaki Lima	1	0	1
40	Kop. Jamu Gendong	0	0	0
41	Kop. Lainnya	0	1	1
42	KJKS/KSPPS	35	8	43
43	Koperasi sekunder Kabupaten	2	0	2
Jumlah KOPERASI		338	50	388

Sumber : DISNAKER Kabupaten Kebumen, 2020

Tabel 3.46
Jumlah UMKM Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	Adimulyo	2163
2	Ambal	1123
3	Ayah	882
4	Buayan	14
5	Buluspesantren	3451
6	Gombong	4678
7	Karanganyar	767
8	Kebumen	7185
9	Klirong	4127
10	Kutowinangun	608
11	Kuwarasan	1200
12	Mirit	1378
13	Padureso	454
14	Petanahan	719
15	Poncowarno	1141
16	Prembun	1206
17	Puring	1972
18	Rowokele	1488
19	Sempor	1971
20	Sruweng	1766
21	Bonorowo	878
22	Pejagoan	847
23	Karangsambung	1338
24	Alian	3531
25	Sadang	667
26	Karanggayam	503
	Total	46057

Sumber : DISNAKER Kabupaten Kebumen, 2020

12. Urusan Penanaman Modal

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan ini dilaksanakan melalui program Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Untuk mendukung program dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu : Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah, Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, Penyelenggaraan pameran investasi, Pemetaan potensi investasi daerah.

Tabel 3.47
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**Meningkatnya nilai investasi PMA/PMDN**	**Milyar**	**382763000000**	**388644285520**	**101,54%**		
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	1. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah Dokumen data dan informasi potensi peluang investasi	Dokumen	2	2	100%	Pelaksanaan penyusunan dokumen terbatas karena rasionalisasi anggaran pandemi covid-19 mengakibatkan berkurangnya aktivitas pengumpulan informasi dan data	
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah kegiatan Anugerah Usaha Terbaik, Kebumen Bisnis Forum, Temu Usaha	Kegiatan	3	2	67%	Pelaksanaan penyusunan dokumen terbatas karena rasionalisasi anggaran pandemi covid-19 mengakibatkan berkurangnya aktivitas pengumpulan informasi dan data	
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	3. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen	1	1	100%	Pelaksanaan survey yang sedianya dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun hanya dilaksanakan satu kali dikarenakan rasionalisasi anggaran	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	4. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah penanam modal yang mendapatkan kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	penanam modal	30	21	70%	Rasionalisasi Anggaran	
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	5. Penyelenggaraan pameran investasi	jumlah kali Pameran Investasi	Kali	4	2	50%	Pelaksanaan kegiatan terbatas karena rasionalisasi anggaran dan pandemi covid-19	
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	6. Pemetaan potensi investasi daerah	jumlah kali sosialisasi informasi tentang perizinan energi dan sumber daya mineral	Kali	2	0	0%	Rasionalisasi Anggaran	

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Penanaman modal, dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah melebihi 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Terdapat satu program yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan ini yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan indikator kinerja program Meningkatnya nilai investasi PMA/PMDN. Program ini didukung 6 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 64%. Dengan demikian tingkat kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 156% atau sangat tinggi.

Faktor yang menyebabkan tercapainya target kinerja program adalah dengan dukungan kegiatan Promosi penanaman modal secara virtual yang dilaksanakan meskipun adanya kondisi pandemi Covid-19, Adanya refocusing anggaran, Menurunnya kepeminatan investasi di Kabupaten Kebumen, serta Tidak terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman modal. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara:

1. Perbaikan pelayanan publik dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP);
2. Pelaksanaan kegiatan promosi secara virtual;
3. Pelaksanaan kegiatan temu usaha secara virtual;
4. Penyebarluasan peluang investasi secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi;

c. Capaian Kinerja Urusan

Capaian indicator kinerja urusan penanaman modal sebanyak 3 Indikator yang seluruhnya telah mencapai target tahunan yang tetapkan di dalam RPJMD 2016-2021, dengan 2 indikator kinerja yang melampaui target RPJMD 2016-2021. Secara lengkap capaian kinerja Urusan Penanaman Modal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 48
Perkembangan Indikator Kinerja
Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASAI	CAPAIAN	
1. Nilai investasi PMA/PMDN	Rp. Miliar	887.522.601.767	382.763.000.000	388.644.285.520	101,53	405.729.000.000

2.	Nilai Survey (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	Nilai rata-rata tertimbang	82,15	81,25	82,85	101,96	82,50/ A
3.	Jumlah Usaha Perdagangan Berizin	Izin	4507	2380	1502	63,10	2413

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2020

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Rezim penanaman modal diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP OSS”) yang mana sekarang perizinan penanaman modal umumnya diselenggarakan berdasarkan sistem Online Single Submission (“OSS”). Akan tetapi, PP OSS tidak mengatur ketentuan investasi dan permodalan. Target nilai investasi investasi PMA/PMDN tahun 2020 adalah Rp. 382.763.000.000 dengan Realisasi Rp. 388.644.285.520 hal ini menggambarkan investasi di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintah untuk melakukan survey kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. IKM juga diharapkan dapat mengidentifikasi harapan masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Dari target nilai IKM 81,25 / A, terealisasi 82,85 yang artinya termasuk dalam kategori sangat baik. Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.

13. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan melalui program prioritas : Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**.** Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Pembinaan organisasi kepemudaan, Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan, Penyelenggaraan kompetisi olahraga, serta Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Adapun capaian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.49
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan skala regional dan nasional**	**0rang**	**50**	**27**	**54,00%**		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi Kepemudaan di Kabupaten Kebumen Pengiriman HSP ke TK. Provinsi, Pelaksanaan TUB BB Kabupaten, Seleksi TUB Karesidenan dan Provinsi, Pelaksanaan Paskibraka Kabupaten, Pengiriman peserta paskibraka Prov, Seleksi Kemah Bhakti Pemuda, Seleksi Jambore Pemuda Indonesia, Pelatihan Pelatih Bagi TUB BB, pengiriman-pengiriman ke tikgkat provinsi, Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Pemuda (, Rias), Seminar Kepemudaan	0rang	205	20	10%	Rasionalissasi anggaran untuk covid	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan (Kabupaten Kebumen, Kedu, Kwarda dan Kwarnas)	Kegiatan	4	3	0,75		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata		**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**	**Pengiriman Atlit POPDA SD, SMP, SMA Tk Kab Kebumen, Kedu, Tk. Prov Jateng**	atlet	277	277	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah pelatih dan atlet Pemusatan Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Tingkat Kabupaten	pelatih dan atlet	51	51	1		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	2. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah Pemberian Tali Asih / penghargaan pada atlet juara Provinsi dan Nasional	orang	0	0	0	Rasionalisasi anggaran untuk covid	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**	Terfasilitasi-nya pengembangan Olah raga melalui even perlom-baan dan olahraga	event	3	2	67%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarpras olahraga (terbangunnya tribune penonton Stadion Chandradimuka, dan peningkatan sarpras olahraga lainnya)	Paket	3	2	67%	tidak dilaksanakannya event perlombaan kabupaten dan kedu	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Panjer		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Presentase Organisasi Pemuda yang berperan dalam membangun desa	%	100	100	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Panjer	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah kali Pembinaan organisasi kepemudaan	kali	1	1	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Selang		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Presentase Organisasi Pemuda yang berperan dalam membangun desa	%	100	100	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Selang	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan	keg	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Selang		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**	Terfasilitasinya pengembangan olahraga melalui even perlombaan dan olahraga	%	100	100	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Selang	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olah raga	set	5	5	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Tamanwinangun		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Presentase Organisasi Pemuda yang berperan dalam membangun desa	%	100	100	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Tamanwinangun	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah kali kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	kali	1	1	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Tamanwinangun		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**	Prosentase meningkatnya kebutuhan sarpras olah raga	%	100	100	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Tamanwinangun	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana olahraga	paket	1	1	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Kebumen		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Jumlah Pemuda Yang Difasilitasi dalam Kegiatan Skala Regional dan Nasional	%	100	100	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Kebumen	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan Pemuda	orang	60	60	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Alian		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	%	100	80	80%	-	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Alian	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Narkoba	desa	16	16	100%	-	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Alian	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	2. Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat	kegiatan	0	0	0%	adanya revocusing anggaran	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Prembun		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	%	100	100	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Prembun	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah desa pembinaan sosial masyarakat	Desa	13	13	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Mirit		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	Orang	100	100	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Mirit	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan Pelatihan Managemen Remaja Masjid	Orang	44	44	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Ambal		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	desa	32	32	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Ambal	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah desa dengan Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	desa	32	32	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Ambal	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah bulan pembinaan sosial masyarakat	desa	32	32	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Pejagoan		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	%	100	50	50%	adanya refocusing anggaran	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Pejagoan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kegiatan	1	1	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Pejagoan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat	Kegiatan	0	0	0%	adanya refocusing anggaran	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Klirong		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	%	100	50	50%	adanya refocusing anggaran	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Klirong	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Orang Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kegiatan	1	1	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Klirong	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah Kegiatan pembinaan sosial masyarakat	Kegiatan	1	0	0%	adanya refocusing anggaran	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Petanahan		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	%	100	100	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Petanahan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan sosial masyarakat	Kegiatan	4	4	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Sruweng		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	%	100	80	80%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Sruweng	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan organisasi kepemudaan	desa	21	21	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Sruweng	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan sosial masyarakat	keg	0	0	0%	Kegiatan tidak dilaksanakan krn ada pandemi covid -19	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Plarangan		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Presentase Organisasi Pemuda yang berperan dalam membangun desa	%	100	20	20%	dilaksanakan namun dibatasi karena adanya refocusing anggaran untuk mitigasi pandemi Covid19	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Plarangan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	Kegiatan	1	1	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Panjatan		**Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembnagunan desa	%	100	100	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Panjatan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Jumlah Pemuda yang diberi Pelatihan Keterampilan	Orang	28	28	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Karanganyar		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Presentase Organisasi Pemuda yang berperan dalam membangun desa	persen	100	100	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Karanganyar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan organsasi kepemudaan	kali	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Karanggayam		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	%	100	100	100%	-	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Karanggayam	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan Di desa Yang Dibina	desa	19	19	100%	-	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Karanggayam	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah Kelompok Organisasi sosial yang dibina	desa	19	19	100%	-	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Puring		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	%	100	50	50%	adanya pandemi kegiatan tidak dilaksanakan	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Puring	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1 Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan	keg	0	0	0%	rasionalisasi anggaran	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Puring	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2 Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat	keg	1	1	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Gombong		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**	Prosentase meningkatnya sarpras olah raga	%	100	100	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Gombong	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah unit sarana olah raga	unit	77	77	100%	-	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Wonokriyo		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Persentase Pemuda Yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Skala Regional dan Nasional	%	100	100	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kelurahan Wonokriyo	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Jumlah kegiatan pelatihan ketrampilan bagi pemuda	kegiatan	1	1	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Buayan		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	%	100	100	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Buayan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan Organisasi Kepemudaan	kegiatan	3	3	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Sadang		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	%	100	50	50%	adanya pandemi covid 19	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Sadang	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Kelompok Organisasi Pemuda yang dibina	organisasi	8	8	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Sadang	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah peserta dalam rangka kegiatan festival keagamaan	orang	0	0	0%	adanya pandemi covid 19	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Poncowarno		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	%	100	67	67%	adanya pandemi covid 19	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Poncowarno	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	kegiatan	0	0	0%	rasionalisasi anggaran	
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Poncowarno	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan sosial masyarakat	kegiatan	3	2	67%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	Kebijakan	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Bonorowo		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	%	1	1	100%		
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kecamatan Bonorowo	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan sosial masyarakat	kegiatan	2	2	100%		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Kepemudaan dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 84,56% atau kategori Hasil Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 74,82%, sehinggat tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 109,41 atau sangat tinggi.

Adapun program yang tidak mencapai target adalah Program peningkatan peran serta kepemudaan dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga. Factor yang menyebabkan tidak tercapainya target program adalah masih belum diadakannya event-event olahraga akibat Pandemi Covid-19. Secara umum adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara optimalisasi fasilitasi bagi pemuda untuk tetap berperan aktif dalam kegiatan skala regional dan nasional dengan protokol kesehatan dan optimalisasi pembinaan pengurus cabang olahraga serta meningkatkan nilai tali asih bagi kesejahteraan pelaku olahraga yang beprestasi.

c. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan kepemudaan dan olahraga melalui pelaksanaan program diatas adalah Capaian Prestasi Pemuda dan olahraga, yang mencapai target, bahkan melebihi target RPJMD, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.50
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
Capaian Prestasi Pemuda dan Olahraga	%	102,77	58,65	23,50	40,29	61,22

Pada indikator sasaran ini mencapai target sebesar 23,50% dari yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 58,65% atau dengan capaian kinerja sebesar 40,29%, Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 ada peningkatan dari realisasi 102,77% menjadi 23,05% di tahun 2020 untuk capaian prestasi

pemuda dan olahraga. Adapun rumus perhitungannya adalah Capaian Prestasi Cabang Olahraga ditambah Capaian Keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional dibagi dua. Berikut data capaian prestasi pemuda dan olahraga tahun 2020

Tabel 3.51
Jumlah Perhitungan Capaian Realisasi

Tahun	Capaian Prestasi Cabang Olahraga		Capaian keikutsertaan Pemuda dalam skala Regional dan Nasional	
	Jumlah Cabang Olahraga yang mendapatkan kejuaraaan	Jumlah cabang olahraga yang mewakili Kabupaten	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional	Jumlah rencana kegiatan Kepemudaan skala regional dan nasional
2015	14	39	250	6
2016	19	40	350	7
2017	20	40	400	8
2018	20	40	586	8
2019	35	19	1210	9
2020	0	0	188	4

Sumber : DISPORAWISATA Kabupaten Kebumen, 2020

14. Urusan Statistik

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan ini dilaksanakan melalui program prioritas : Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah. Pelaksanaan urusan statistik dilaksanakan semua perangkat daerah, dengan dukungan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a) penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
b) Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah
c) Penyusunan Database dan Profil Desa/Kecamatan

Adapun capaian program dan kegiatan urusan statistik tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.52

Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Statistik	Dinas Pendidikan		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya perkembangan penyajian data / informasi kelembagaan	%	100	100	100,00%		
	Statistik	Dinas Pendidikan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku Daftar Rangkuman Sekolah, Buku Profil Pendidikan Kab. Kebumen yang disusun	Dokumen	1	1	100%		
	Statistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya perkembangan penyajian data / informasi kelembagaan	%	100	100	100,00%		
	Statistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen Satatistik kelembagaan dan dokumen pasca bencana	dok	1	1	100,00%		
	Statistik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya Dokumen Database Perangkat Daerah	%	100	100	100,00%		
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen database DPRD dan Profil DPRD Kabupaten Kebumen	dok	1	1	100,00%		
	Statistik	Kecamatan Kebumen		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100,00%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kecamatan Kebumen	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah Database Dan Profil Desa/Kecamatan	dokumen	2	2	100%		
		Kecamatan Kebumen	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dok perencanaan dan dok lainnya yang disusun (RKA, RKO, DPA, Lakip, LKPJ, LPPD, Renja 2020, Renstra Teknokratis 2021-2025)	dokumen	8	8	100%		
	Statistik	Kelurahan Panjer		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database perangkat daerah	%	100	100	100%		
		Kelurahan Panjer	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah Dokumen, Database & Profil yang disusun	dokumen	2	2	100%		
	Statistik	Kelurahan Kebumen		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database perangkat daerah	%	100	100	100%		
		Kelurahan Kebumen	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah dokumen database yang disusun	dokumen	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Alian		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	dokumen	2	2	100%		
		Kecamatan Alian	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Base dan Profil Desa/Kecamatan yang Disusun	dokumen	2	2	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Statistik	Kecamatan Karangsambung		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100%		
		Kecamatan Karangsambung	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah dokumen database dan Profil Desa/Kecamatan yang disusun	dokumen	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Prembun		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	Dokumen	5	5	100%		
		Kecamatan Prembun	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah dokumen database yang disusun	Dokumen	5	5	100%		
	Statistik	Kecamatan Mirit		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Jumlah Dokumen Database yang di susun	%	100	100	100%		
	Statistik	Kecamatan Mirit	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah desa yang menyusun Database dan Profil Desa/Kecamatan	Desa	22	22	100%		
	Statistik	Kecamatan Kutowinangun		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100%		
	Statistik	Kecamatan Kutowinangun	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah Dokumen Databasen dan Profil Desa/Kecamatan yang disusun	Kegiatan	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Ambal		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	kegiatan	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Ambal	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa	Jumlah desa yang menyusun data base	dokumen	3	3	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				/Kecamatan							
	Statistik	Kecamatan Buluspesantren		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100%		
	Statistik	Kecamatan Buluspesantren	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah Dokumen Database yang disusun	dokumen	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Pejagoan		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100%		
	Statistik	Kecamatan Pejagoan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Base yang disusun	dokumen	13	13	100%		
	Statistik	Kecamatan Klirong		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100%		
	Statistik	Kecamatan Klirong	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah dokumen database yang disusun	dokumen	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Petanahan		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100%		
	Statistik	Kecamatan Petanahan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah Dokumen Database dan Profil Desa/Kecamatan Yang DIsusun	Buku	2	2	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Statistik	Kecamatan Sruweng		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100%		
	Statistik	Kecamatan Sruweng	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah dokumen data base yang disusun	Dok	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Karanganyar		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100%		
	Statistik	Kecamatan Karanganyar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah Dokumen database yang disusun	Dok	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Karanggayam		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100%	-	
	Statistik	Kecamatan Karanggayam	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah Dokumen Database dan Profil Desa/Kecamatan yang disusun	dokumen	2	2	100%	-	
	Statistik	Kecamatan Adimulyo		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100%		
	Statistik	Kecamatan Adimulyo	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah dokumen database dan Profil Desa/Kecamatan yang disusun	Buku	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Kuwarasan		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Statistik	Kecamatan Kuwarasan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah Dokmen Database dan Profil desa/kecamatan yang disusun	Dokumen	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Puring		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100%		
	Statistik	Kecamatan Puring	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah Dokumen Database dan Profil Desa/Kecamatam yang disusun	Dokumen	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Gombong		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	penyusunan data base dan profil desa/kecamatan	%	100	100	100%		
	Statistik	Kecamatan Gombong	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Base yang disusun	Dokumen	2	2	100%		
	Statistik	Kelurahan Wonokriyo		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database perangkat daerah	%	100	100	100%		
	Statistik	Kelurahan Wonokriyo	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah dokumen database yang disusun	dokumen	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Sempor		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	dokumen	1	1	100%		
	Statistik	Kecamatan Sempor	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah dokumen database yang disusun	dokumen	1	1	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Statistik	Kecamatan Buayan		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100%	100%	100%		
	Statistik	Kecamatan Buayan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah dokumen data base yang disusun	Dokumen	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Ayah		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100%		
	Statistik	Kecamatan Ayah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah dokumen Database dan Profil Desa/Kecamatan yang disusun	dokumen	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Sadang		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	100	100	100%		
	Statistik	Kecamatan Sadang	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah database dan profil desa/kecamatan yang disusun	dokumen	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Poncowarno		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	dokumen	0	0	0%	rasionalisasi anggaran	
	Statistik	Kecamatan Poncowarno	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah dokumen database yang disusun	dokumen	0	0	0%	rasionalisasi anggaran	
	Statistik	Kecamatan Padureso		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	%	20	20	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Statistik	Kecamatan Padureso	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah dokumen database yang disusun	Dokumen	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Bonorowo		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	Tersedianya dokumen database kecamatan	dokumen	2	2	100%		
	Statistik	Kecamatan Bonorowo	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Jumlah dokumen database yang disusun	dokumen	2	2	100%		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Statistik dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau sangat tinggi.

Secara umum adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan statistik adalah data yang diberikan kurang kurangnya SDM pengelola statistik. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara menjalin kerjasama dengan BPS.

c. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah. Pengembangan data statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor/urusan sehingga memudahkan dalam analisis perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Capaian kinerja urusan statistik selama periode 2020 antara lain tersusunnya Buku Daerah Dalam Angka, Buku Produk Domestik Regional Bruto, Buku Profil Daerah, Buku Studi Ketimpangan Pendapatan dan Buku Studi Nilai Tukar Petani. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan untuk mengakses data statistik, melalui penyusunan berbagai sistem informasi manajemen (SIM) data pembangunan daerah yang memuat data statistik hasil pembangunan daerah, seperti SIM Pengentasan Kemiskinan, Sistem Informasi Profil Daerah, SIM Keuangan Daerah, SIM Perencanaan, SIM Pengendalian, SIM Pelaporan, SIMBADA, dan lain-lain. Hal lainnya adalah mampu mewujudkan kemudahan mengakses data statistik melalui penyusunan berbagai sistem informasi manajemen (SIM) data pembangunan daerah yang memuat data statistik hasil pembangunan daerah yang terintegrasi melalui aplikasi Data Analisis Pembangunan Daerah (SIPD).

Tabel 3.53
Kinerja Urusan statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

No	Indikator	2019	2020
1.	Jumlah dokumen statistik yang telah diterbitkan	6	6
2.	Kebumen Dalam Angka	ada	ada
3.	PDRB Kabupaten	ada	ada
4.	Profil Daerah (SIPD)	ada	ada
5.	Studi Ketimpangan Pendapatan	ada	ada
6.	Studi Nilai Tukar Petani	ada	ada
7.	Statisik Sektoral Kab. Kebumen	ada	ada

Sumber: Diskominfo dan BAPPEDA Kabupaten Kebumen, 2020

15. Urusan Kebudayaan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan ini dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan capaian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.54
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kebudayaan	Dinas Pendidikan		**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	Banyaknya fasilitasi pengelolaan keragaman budaya	Persen	65	70	108%		
		Dinas Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1. Jumlah paket pengadaan Alat kesenian	Paket	4	4	100%		
					2. Jumlah bulan pembiayaan kesekretariatan Kampung Jawa Kebumen	Bulan	12	12	100%		
		Dinas Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah paket cagar budaya yang direhabilitasi	paket	1	1	100%		
	Kebudayaan	Dinas Pendidikan		**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	Banyaknya fasilitasi pengelolaan keragaman budaya	Persen	65	70	108%		
		Dinas Pendidikan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah obyek Inventarisasi /dokumentasi benda cagar budaya	Objek/ lokasi	20	20	100%		
	Kebudayaan	Kelurahan Panjer	-	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	Banyaknya fasilitasi pengelolaan keragaman budaya	%	100	98	98%		
		Kelurahan Panjer	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	keg	1	1	100%		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan data diatas, rata-rata capaian program adalah 104 % atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 100%, dengan demikian tingkat kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 104% atau sangat tinggi.

c. Capaian Kinerja Urusan

Di wilayah Kabupaten Kebumen banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi. Sebagian benda tersebut sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Benda peninggalan sejarah yang ada hingga tahun 2019 sebanyak 92 buah dibandingkan tahun 2019 hanya 82 buah. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan, khususnya yang merupakan kesenian dan kebudayaan asli Kebumen, adalah dengan menyelenggarakan festival seni dan budaya serta pelestarian benda, situs dan kawasan Cagar Budaya. Penyelenggaraan festival seni dan budaya selain memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda, juga untuk melestarikan seni dan budaya asli Kebumen.

Tabel 3.55
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

NO.	URAIAN KINERJA	2019	2020
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	15	0
2.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	82	92
3.	Jumlah srana penyelenggaraan seni dan budaya	16	0
4.	Jumlah grup kesenian	350	442
a	Kuda lumping	140	202
b	Ketoprak	38	24
c	Wayang Kulit	135	34
d	Campursari	12	10
e	Angguk	5	7
f	Rebana	71	72
g	Karawitan	14	24
h	Jamjaneng	13	24
i	Calung	9	13
j	Lengger	6	9
k	Seni Peran	5	5
l	Sanggar Seni	15	19

m	Cepetan	2	2
n	Angklung	2	2
o	Teater	6	6

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen

capaian kinerja urusan kebudayaan menunjukkan bahwa secara umum kinerja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan utamanya yang berupa festival dan kegiatan dalam bentuk fisik tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi Covid 19.

16. Urusan Perpustakaan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan ini dilaksanakan melalui program prioritas Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program adalah :

a) Pengembangan minat dan budaya baca
b) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
c) Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
d) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
e) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
f) Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka

Dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan literasi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, Dinas Perpustakaan daerah melibatkan guru PAUD, Guru/Pengelola Perpustakaan Sekolah, Penggiat Perpustakaan TBM/Komunitas, Pemerhati Perpustakaan dan Budaya Baca, Pengelola berbagai jenis Perpustakaan, PKK dan Media cetak dan Elektronik dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial menuju indonesia cerdas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kreatifitas dan membangun kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perpustakaan serta literasi digital. sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca.

Keberhasilan pelaksanaan urusan ini dapat pula dibuktikan dengan adanya beberapa penghargaan yang diterima oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagai berikut pada tahun 2020 :

1. Juara 1 Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Tingkat ProvinsiI Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Juara 4 Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Desa Gemeksekti).

Adapun capaian program dan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.56
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa.	%	15	15	100%	-	
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Pengembangan minat dan budaya baca	jumlah layanan perpustakaan keliling yang dilaksanakan	kunjungan	400	63	16%	Rasionalisasi dan adanya pandemi Covid 19	
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			jumlah fasilitas kegiatan masyarakat yang dilaksanakan	kegiatan	12	12	100%	-	
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			jumlah kegiatan pameran buku dan community fair yang dilaksanakan	kali	1	-	0%	Rasionalisasi dan adanya pandemi Covid 19	
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah Bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah yang dilaksanakan	perpustakaan	10	10	100%	-	
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			jumlah bimbingan teknis pengelola perpustakaan desa yang dilaksanakan	kali	1	1	100%		
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			jumlah SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang meningkat kapasitas/kompetensinya	orang	7	7	100%	-	
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	jumlah perpustakaan Desa yang pengelolaannya meningkat	unit	26	26	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			jumlah perpustakaan sekolah yang memenuhi standar nasional perpustakaan	unit	10	10	100%		
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	jumlah lomba bercerita yang dilaksanakan	kegiatan	1	-	0%	Rasionalisasi	
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			Jumlah kegiatan story telling dan kegiatan Kupu-kupu Malam	kali	20	20	100%	-	
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			jumlah kegiatan pemilihan duta baca yang dilaksanakan	kali	1	-	0%	Rasionalisasi	
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			jumlah regulasi tentang penyelenggaraan perpustakaan yang dihasilkan	dokumen	1	1	100%		
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			jumlah buletin perpustakaan yang tersusun	dokumen	1	1	100%		
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			jumlah kegiatan jambore perpustakaan yang dilaksanakan	kegiatan	1	-	0%	Rasionalisasi	
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			Jumlah lomba-lomba literasi perpustakaan yang dilaksanakan	kegiatan	6	2	33%	Rasionalisasi	
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah koleksi bahan pustaka baru	buku	500	500	100%	-	
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			Jumlah permainan anak yang bertambah	unit	3	-	0%	Rasionalisasi	
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	6. Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka	jumlah bahan pustaka yang dialihmediakan secara digital	buku	20	-	0%	Rasionalisasi	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			jumlah perpustakaan yang masuk dalam jaringan informasi perpustakaan	unit	15	-	0%	Rasionalisasi	

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perpustakaan dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Capaian kinerja kegiatan rata-rata adalah 55,21%, sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 181% atau sangat tinggi.

Terdapat satu program yang dilaksanakan yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan indikator capaian Meningkatnya pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan layanan perpustakaan kabupaten ditutup mulai Bulan Maret 2020. Selain hal tersebut permasalahan yang dihadapi Bidang Perpustakaan yaitu adanya refocusing yang menyebabkan kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai target.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara meningkatkan layanan Perpustakaan Kabupaten secara online diantaranya melalui fasilitas Perpustakaan Digital iKebumen, mengupload konten-konten literasi melalui media sosial seperti youtube (kegiatan inovasi story telling anak online/ starline), facebook dan instagram, mengadakan lomba film pendek secara online. Dalam rangka akreditasi Perpustakaan Desa, Sekolah dan Perguruan Tinggi diselenggarakan Seminar Nasional tentang Akreditasi secara Online dengan narasumber dari Perpustakaan Nasional RI.

c. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan perpustakaan secara umum ditunjukkan dengan satu indikator yaitu capaian kunjungan perpustakaan. Persentase kunjungan ditargetkan 16,63 % dan terealisasi 6,06 % atau belum tercapai. Secara lengkap capaian kinerja Urusan perpustakaan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.57
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	CAPAIAN KINERJA 2020		
			Target	Realisasai	Capaian
Capaian kunjungan perpustakaan	%	101	162.159	59.073	6,06

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, 2020

Cara menghitung capaian kunjungan perpustakaan adalah (Jumlah kunjungan perpustakaan / Jumlah populasi yang harus dilayani) x 100 %. Semakin tinggi jumlah kunjungan menggambarkan semakin meningkatkan minat baca masyarakat. Pada Tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 59.073 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dari jumlah kunjungan tahun 2019 sebesar 142.833 orang atau sebesar 58,64 % dari populasi yang dilayani yang berjumlah 975.278 orang.

Sementara Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani pada tahun berjalan diperoleh dari data Kebumen dalam Angka, yaitu data penduduk Kabupaten Kebumen menurut kelompok umur lima tahunan range usia 5-64 tahun. Secara rinci perkembangan capaian kinerja urusan perpustakaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.58
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

NO	URAIAN	TAHUN	
		2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan (unit)	**840**	988
2	Jumlah Kunjungan Perpustakaan (Orang)	142.833	59073
3	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (Buku)	43.664	44736
4	Prosentase Pengunjung Perpustakaan %	14,65	6,06

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, 2020

17. Urusan Kearsipan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Urusan ini dilaksanakan melalui program prioritas yaitu Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dengan kegiatan pendukung meliputi : Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah dan

Penataan dan pemeliharaan arsip daerah. Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangungan serta Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.

Jumlah Perangkat Daerah yang ditargetkan menerapkan arsip baku Tahun 2020 sebanyak 42 unit kerja dan terealisasi 35 atau capaian 83%. Penerapan arsip baku yaitu dimaksudkan untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip dengan menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan standar, prosedur dan kaidah kearsipan. Capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.59
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kearsipan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku	%	42	35	83%		
	Kearsipan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah desa yang di monitoring pengelolaan arsip desanya dan di jadikan sebagai desa percontohan pada masing-masing Kecamatan	desa	24	60	250%		
	Kearsipan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Penataan dan pemeliharaan arsip daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan pengelolaan arsipnya	OPD	10	3	30%		
	Kearsipan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**	Prosentase peningkatan layanan informasi arsip	%	20	20	100%		
	Kearsipan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah pengadaan khasanah arsip daerah	dokumen	1	0	0%		
	Kearsipan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2. Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Jumlah paket pembuatan ruang informasi kearsipan	paket	1	1	100%		
	Kearsipan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah petugas arsip di Tata Usaha SMP Negeri /Swata yang tersosialisasi tentang kearsipannya	kegiatan	80	80	100%		
	Kearsipan	Kecamatan Klirong		**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku	%	100	100	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kearsipan	Kecamatan Klirong	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Penataan dan pemeliharaan arsip daerah	Jumlah Dokumen Penataan dan pemeliharaan arsip daerah	dokumen	16	16	100%		
	Kearsipan	Kecamatan Petanahan		**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku	%	100	100	100%		
	Kearsipan	Kecamatan Petanahan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penataan dan pemeliharaan arsip daerah	Jumlah kegiatan Penataan dan pemeliharaan arsip daerah	Kegiatan	1	1	100%		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kearsipan dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 96% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 97,14%, sehingga tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 98,65% atau sangat tinggi.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah adanya pembatasan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengumpulan masa seperti rapat-rapat/bimtek/sosialisasi secara luring akibat pandemi covid 19, sehingga beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas pengelola arsip OPD/Unit Kerja tidak dapat terlaksana. Selain hal tersebut, adanya refocusing juga menyebabkan target kegiatan yang sudah direncanakan tidak terlaksana karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara :

1. Memenuhi undangan pembinaan pengelolaan kearsipan dari Desa dan Kecamatan yang dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan;
2. Melaksanakan pembinaan pengelolaan kearsipan bagi petugas/pengelola kearsipan Desa dan Kecamatan secara virtual (zoom meeting).

c. Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku dan Prosentase peningkatan layanan informasi arsip.

Tabel 3.60
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASAI	CAPAIAN	
Persentase jumlah Perangkat Daerah menerapkan arsip baku	%	36,02	42,72	64,55	151	49,43

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, 2020

Capaian kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2019-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, persentase OPD yang telah menerapkan arsip baku hanya 36,02 % atau 188 OPD, Namun pada tahun 2020 OPD yang telah menerapkannya telah mencapai 337 OPD atau 64,55 %. Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah pelatihan aplikasi pengelolaan arsip secara otomatis kepada OPD. Selain itu, untuk mengembangkan kearsipan di desa juga telah dilakukan sosialisasi penyuluhan kearsipan kepada sekretaris desa. Hal ini bertujuan agar arsip di desa tertata dengan baik, sehingga memudahkan perangkat desa untuk mencarinya dan membantu dalam pengambilan kebijakan nantinya. Adapun capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.61
Perkembangan Penerapan Arsip Baku
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

URAIAN	2019	2020
1. Jumlah OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku	188	337
2. Jumlah OPD	522	522
3. Presentase OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku	36,02%	64,55%

Sumber : Disarpus Kab. Kebumen 2020

Keberhasilan pelaksanaan urusan ini dapat pula dibuktikan dengan adanya beberapa penghargaan yang diterima oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagai berikut pada tahun 2020 yaitu Juara 1 Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen tahun 2020 meliputi Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian dan Urusan Transmigrasi. Adapun capaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan Urusan Pemerintah Pilihan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan program prioritas Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, Program pengembangan budidaya perikanan, Program pengembangan perikanan tangkap serta Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Capaian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.62
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan		**Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir**	Meningkatnya pengetahuan teknis dan manajemen kelompok	kelompok	302	302	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Pembinaan pelaku usaha perikanan	1. Jumlah kelompok yang dibina	kelompok	100	100	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			2. Jumlah orang/RTM yang mengikuti pelatihan dan mendapat bantuan alat	orang	202	202	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	2. Fasilitasi pelayanan usaha perikanan	Jumlah bulan pelayanan usaha perikanan	bulan	12	12	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan		**Program pengembangan budidaya perikanan**	1. Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya;	ton	2951,48	3.139,32	106,36%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			2. Terbentuknya dan Berkembangnya Kawasan Agrobisnis Perikanan dan Kelautan	kawasan	6	9,00	150%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	1. Pengembangan bibit ikan unggul	1. Jumlah lokasi yang mendapat bantuan operasional (BBI Pringtutul, Pasar Ikan Ungaran, dan tambak dinas)	lokasi	3	3	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			2. Jumlah benih ikan dengan mutu terjamin	juta ekor	35,25	36,82	104,45%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	2. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	1. Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan pendampingan dan monev	kelompok	50	50	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			2. Jumlah pengembangan Kawasan Kampung nila (Desa Kedungdowo Kec. Poncowarno)	kelompok	3	3	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			3. Jumlah bantuan benih dan pakan ikan bagi kelompok pembudidaya ikan di Kab. Kebumen (Desa Adiwarno, Dukuhrejosari, Karangpoh, Wonotirto, Bulurejo, Klegenrejo, Ranterejo, Gadungrejo, Kebadongan, Indrosari, Pekutan, Sawangan-Alian, Jatisari, Sawangan-kuwarasan, Gandusari-Kuwarasan, Kuwarasan, Pondokgebangsari, Harjodowo, Kalisari, Redisari, Balingasal, Mangunweni, Kaleng, Tresnorejo, Kedungsari, Sidomukti-Ambal, Pejagatan, Kaliputih, Gemeksekti, Menganti-Sruweng,	kelompok	55	55	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Klepusanggar, Sugihwaras, Kebapangan, Muktisari, candiwulan, Panjer, Gombong, Sikayu, Tegalretno, karangrejo, Jogomertan, kewangunan, jatimulyo, sitirejo, tambakrejo, Plempukan kembaran, Kradenan, Wiromartan, Singoyudan, Karanggede, Kedungweru, Bagung, Lundong, Triwarno, Kambangsari, Kebulusan, Sekarteja, caruban, Tegalsari, Kamulyan, Karangtengah, Bonjoklor)						
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			4. Jumlah bantuan Kolam budidaya, benih ikan dan pakan ikan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kab. Kebumen,	orang	180	180	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			5. Jumlah desa yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan lele (Desa Karangduwur Kec. Petanahan)	-	-	-		dirasionalisasi	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			6. Jumlah sarana dan prasarana budidaya ikan bagi pokdakan (Kuota Kecamatan) di Desa Triwarno, Jlegiwinangun, Lumbu, Kuwarisan, Karangsari(Kec. Kutowinangun); Desa pejagoan-Pejaboan; Desa Karangrejo, Wonotirto, Ginandong, Binangun(Kec. Karanggayam); Desa Tepakyang-adimulyo; Desa Patemon-Gombong, Desa Kedungdowo, lerepkebumen, Jatipurus(Kec. Poncowarno); Desa Bojongsari, Surotrunan, Sawangan, Jatimulyo(kec. alian); desa Kalisari, Redisari (Kec. rowokele); Desa Mekarsari, Desa Kutowinangun, Desa Babadsari (Kec. Kutowinangun),	kelompok	9	9	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	3. Pembinaan dan pengembangan perikanan	1. Jumlah desa yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya agribisnis perikanan	desa	19	19	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			2. Jumlah kelompok yang mendapatkan pemantauan di Kabupaten Kebumen (Pokdakan di kawasan Agrobisnis Perikanan dan Pokdakan lainnya)	kelompok	30	30	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	4. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	1. Jumlah paket renovasi gedung dan fasilitas fungsional lainnya (BBI Pringtutul)	-	0	0	0%	rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid 19	
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			2. Jumlah paket rehabilitasi gedung jaga dan fasilitas fungsional lainnya di Tambak Dinas	-	0	0	0%	rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid 19	
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			3. Jumlah Demplot Budidaya Udang galah di BBI Pringtutul	paket	0	0		rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid 19	
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			4. Jumlah Demplot Percontohan Budidaya Ikan Gurami, Jumlah Demplot Percontohan Budidaya Ikan Nila Di Kolam, Jumlah Demplot Percontohan Budidaya Udang sederhana, Jumlah Demplot Percontohan Budidaya Ikan Lele Di Kolam, Jumlah Demplot Percontohan MinaPadi.	paket	5	5	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5. Pengendalian lingkungan dan kesehatan ikan	1. Jumlah tahun tersedianya obat-obatan bagi pokdakan dan UPR	tahun	1	1	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			2. Jumlah paket sarana operasional pengambilan sampel kualitas air yang tersedia bagi pokdakan dan UPR	paket	1	1	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan		**Program pengembangan perikanan tangkap**	Meningkatnya produksi ikan tangkap	ton	9268,53	9068,53	97,84%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	1. Jumlah sosialisasi program kenelayanan yang terlaksana	kali	0	0	0,00%	rasionalisasi anggaran	
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			2. Jumlah orang yang mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan	orang	600	600	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	2. Pembangunan tempat pelelangan ikan	jumlah TPI Perintis yang terbangun	unit	0	0	0%	Rasionalisasi anggaran	
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	3. Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	Jumlah lokasi yang mendapatkan pemeliharaan fasilitas fungsional pokok dan penunjang TPI	lokasi	3	3	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	4. Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	1. Jumlah orang yang mendapatkan honor petugas TPI	orang	40	40	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			2. Jumlah lokasi TPI yang mendapatkan sarana operasional	lokasi	8	8	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	5. Pengembangan sarana alat tangkap	1. Jumlah paket jaring untuk nelayan	paket	9	0	0%	rasionalisasi anggaran	
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			2. Jumlah mesin motor tempel 15 PK	unit	19	0	0%	rasionalisasi anggaran	
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			3. Jumlah kapal 5 GT Lengkap	unit	5	0	0%	rasionalisasi anggaran	
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			4. Jumlah unit rumpon	-	0	0	0%	rasionalisasi anggaran	
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			5. Jumlah paket jaring gillnet Bawal 5 inch bagi KUB : Mina Karya, Mina Murti, Mina Barokah Desa Pasir Kec. Ayah (Kuota Kecamatan)	paket	3	3	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			6. Jumlah unit perahu nelayan PUD tanpa mesin uk < 1 GT bagi Desa Kedungdowo Kecamatan Poncowarno (Kuota Kecamatan)	unit	4	4	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			7. Jumlah Paket Alat Bantu Penangkapan Ikan (DAK)	unit	10	10	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			8. Jumlah Paket Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (DAK)	paket	2	2	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			9. Jumlah Perahu Lengkap uk < 3 GT (DAK)	unit	2	2	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	6. Pengembangan sumber daya ikan dan lingkungan	1. Jumlah paket KUMBANG IKAN	paket	10	10	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			2. Jumlah lokasi Penebaran benih ikan di PUD	lokasi	3	3	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			3. Jumlah Naskah Raperda Perlindungan SDI dan Lingkungan yang tersusun	dok	0	0	0%	Rasionalisasi	
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	7. Perlindungan Nelayan terhadap Bencana Alam Laut	Jumlah tahun penyediaan alat keselamatan operasional penangkapan ikan	tahun	1	1	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			Jumlah liter BBM untuk operasional pengawasan / TPKL	liter	2000	2000	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan		**Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**	Peningkatan angka konsumsi makan ikan	kg/ka/th	20,71	22,46	108,45%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul	1. Jumlah sosialisasi dan promosi Gemarikan	kegiatan	2	2	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			2. Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi Sarpras Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	kelompok	20	0	0%	rasionalisasi anggaran	
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			3. Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi sarpras Usaha Garam Rakyat	kelompok	5	5	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			4. Jumlah KK (RTM yang memilki ibu Hamil dan Balita) yang mendapatkan bantuan Ikan Segar dan Olahan	orang	1375	1375	100%		
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			5. Jumlah paket peralatan pengolahan ikan untuk Poklahsar Desa Kedungdowo Kecamatan Poncowarno (Kuota Kecamatan)	paket	1	0	0%	rasionalisasi anggaran	

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Kelautan, dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 100% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 73,28%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah sangat tinggi.

c. Capaian Kinerja Urusan

Terdapat 4 indikator Capaian kinerja Urusan kelautan dan perikanan pada RPJMD Tahun 2015-2021, akan tetapi 1 indikator sejak tahun 2016 berperpindahan kewenangan dari daerah ke propinsi). Hal ini berdasarkan ketentuan peraturan tentang Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah Undanf-undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun capaian kinerja urusan kelautan sesuai dengan perjanjian kinerja adalah :

Tabel 3.63
Capaian Kinerja Urusan Perikanan Dan Kelautan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA 2019	TAHUN 2020			T.AKHIR RPJMD
				TARGET	REAL	% CAPAIAN	
1	Prosentase peningkatan jumlah produksi benih	%	32,85	35,25	36,82	104,45	39,48
1	Peningkatan jumlah produksi tangkapan ikan	ton	8.915,80	9.268,53	9.068,53	97,84	9.639,28
2	Peningkatan jumlah produksi budidaya ikan	ton	2.876,10	2.951,48	3.139,32	106,36	3.187,60

Sumber : Dinlutkan Kabupaten Kebumen, 2020

2. Urusan Pariwisata

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pariwisata dilaksanakan dengan program prioritas Terdapat dua program yang dilaksanakan untuk mendukung urusan Pariwisata yaitu Program pengembangan pemasaran pariwisata dan Program pengembangan destinasi pariwisata. Program yang tidak mencapai target adalah Program pengembangan pemasaran pariwisata. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target program adalah adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pemerintah daerah untuk menutup aktivitas diantaranya penutupan obyek wisata dan juga kegiatan-kegiatan lainnya.

Tabel 3.64
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pariwisata	**Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata**		**Program pengembangan pemasaran pariwisata**	**Jumlah kunjungan wisatawan**	**orang**	**2.511.841**	**854.315**	**34%**	**Obyek wisata sering ditutup akibat pandemi covid 19**	**menjaga pintu masuk obyek wisata apabila dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan dan apabila obwis ditutup menghalau pengunjung agar tidak masuk**
	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah kegiatan Festival Lukulo dan Geo Fest, Pembuatan leaflet dan Booklet, Promosi Pariwisata di Area Bandara, Promosi Pariwisata (Baliho) di Luar Kabupaten Kebumen, Event di Obyek Wisata	kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	pandemi covid dan refocusing anggaran	efisiensi pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan dengan cara virtual
	Pariwisata	**Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata**		**Program pengembangan destinasi pariwisata**	**Bertambah-nya Fasilitasi sarana/ prasarana obyek wisata**	**unit**	**9**	**9**	**100%**		
	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Pembangunan Kios Pedagang dan Fasilitas Sarpras Obwis Pantai Logending	Paket	1	1	100%	-	
	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata			Pembangunan Pemecah Gelombang Obwis Pantai Suwuk	Paket	1	1	100%	-	
	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata			Pembangunan Menara Pandang Obwis Pantai Logending	Paket	1	1	100%	-	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata			Pembangunan Panggung Pertunjukan Obwis Pantai Logending	Paket	1	1	100%	-	
	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata			Pembangunan Pintu Gerbang Loket Obwis Pantai Logending	Paket	1	1	100%	-	
	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata			Pembangunan Kios Pedagang dan Fasilitas Sarpras Obwis Pantai Logending	Kios	20	20	100%	-	
	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi	Jumlah Prosentase sertifikasi profesi Bimbingan Usaha Jasa Pariwisata Kabupaten Kebumen	Org	50	0	0%	pandemi covid dan refocusing anggaran	-
	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pemeliharaan sarana dan prasarana / fasilitas obyek wisata	Pengadaan Alat Protokol Kesehatan	Paket	1	1	100%	-	-
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata			Belanja Pajak Bumi Bangunan Obyek Wisata Goa Jatijajar dan Goa Petruk	Obyek	2	2	100%	-	-
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata			Revitalisasi Obyek Wisata Goa Jatijajar	Paket	1	1	100%	-	-
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata			Rehab Pesanggrahan Pandan Kuning Obwis Pantai Petanahan	Paket	1	1	100%	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata			Revitalisasi Kamar Madni Obyek Wisata PAP Krakal	Paket	1	1	100%	-	-
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata			Rehab Fasilitas Sarpras Obwis Waduk Sempor	Paket	1	1	100%	-	-
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata			Rehabilitasi Drainase Obwis Goa Petruk	Paket	1	1	100%	-	-
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata			Rehab Kanopi/Atap Loket Obwis Pantai Suwuk	Paket	1	1	100%	-	-

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pariwisata dapat diketahui rata-rata capaian program adalah 67% atau kategori Hasil Sedang menunjukkan Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Secara umum adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara penyelenggaran event-event yang mendatangkan potensi minat wisatawan domestik dan mancanegara dengan cara virtual, pembinaan dan pengembangan obyek wisata rintisan oleh masyarakat dan pembinaan menejemen pengelolaan kepada pokdarwis/Stackholder pariwisata.

Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan yang anggarannya direfocusing yang seharusnya menunjang tingkat capaian program. Kegiatan yang mengalami refocusing adalah pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri, peningkatan pembangunan sarpras pariwisata, pemeliharaan sarpras pariwisata, pengembangan sumber daya manusia profesionalisme bidang pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

c. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan pariwisata ditunjukkan dengan satu indikator yaitu Persentase Persentase peningkatan kunjungan wisata.

Tabel 3.65
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	% Capaian	
1. Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	2.927.444	2.511.841	854.315	34,01	1.310.000
2. Lama tinggal wisatawan	Hari	1,03	0.6	0.32	0,5	0,70

Sumber : DISPORAWISATA Kabupaten Kebumen, 2020

Kinerja urusan pariwisata Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, dan kebijakan penutupan obyek wisata yang dikelola pemerintah daerah dan yang delola oleh masyarakat.

3. Urusan Pertanian

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pertanian dilaksanakan melalui program prioritas : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan, Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

Pelaksanaan urusan ini dilaksanakan oleh distapang Kabupaten Kebumen. Terdapat delapan program yang dilaksanakan dalam urusan pertanian. Program yang mencapai target terdiri dari :

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Program peningkatan produksi hasil peternakan
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.66
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pertanian	**Dinas Pertanian Dan Pangan**		**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**Persentase kelompok tani yang bankable**	**Persen**	**12**	**12**	**100%**		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	1. Jumlah petani yang terlatih dalam hal penggunaan pupuk organik	Orang	240	240	100%		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			2. Jumlah kecamatan penerima pelatihan petani pelaku agribisnis (POKIR)	Kecamatan	0	0	0%	Rasionalisasi Anggaran untuk Covid-19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	1. Jumlah dokumen programa penyuluhan yang tersusun	Dokumen	27	27	100%		
	Pertanian				2. Jumlah Kelompok yang dilaksanakan Pembinaan pendampingan kelompok penerima PMUK (15 klpk), P	Kelompok	15	15	100%		
	Pertanian				3. Pembinaan Peningkatan Petani Nelayan Kecil (P4) (25 Klpk),	Kelompok	25	25	100%		
	Pertanian				4. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)	Kelompok	50	50	100%		
	Pertanian				5. Jumlah Tenaga Pendampingan Kegiatan Pertanian	Orang	64	64	100%		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Peningkatan kemampuan lembaga petani	1. Jumlah kelompok yang meningkat kualitas lembaga taninya	Kelompok	150	150	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pertanian				2. Jumlah kelompok yang terlayani pembinaan dan penilaian kelas kelompok	Kelompok	1797	1797	100%		
	Pertanian				3. Jumlah Kegiatan Pengelolaan irigasi partisipatif dan terpadu	Kegiatan	1	1	100%		
	Pertanian	**Dinas Pertanian Dan Pangan**		**Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)**	a. **Penurunan Angka Kehilangan Hasil (%)**	**% persen**	**10,82%**	**9%**	**82,90%**		
					b. **Nilai Produksi Perkebunan (Juta Rupiah)**	**Rp Juta**	**666, 16**	**181429**	**272%**		
					c. **Nilai Produksi Industri Pengolahan Perkebunan (Ribu Rupiah)**	**Rp Juta**	**446,95**	**173321757**	**387805%**		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	1. Jumlah Peserta Pelatihan Pengamatan Kehilangan Hasil Pertanian	Orang	163	163	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			2. Jumlah Alat Panen (Power Thresher 14 Unit) dan Combine Harvester Kecil (3 Unit)	Unit	14	14	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			3. Jumlah Alat Mesin Power Threser (Kuota Kecamatan)	Unit	0	0	0%	Rasionalisasi Anggaran untuk Covid-19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	1. Luas Demplot Area Tanaman Jagung	Ha	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			2. Luas Demplot Area Tumpang Sari Jagung dan Ubi Kayu	Ha	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			3. Luas Demplot Area Tanaman Padi	Ha	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			4. Jumlah Kelompok Yang dibantu Benih Padi, Pelatihan dan Pendampingan (Kuota Kecamatan)	kelompok	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			5. Luas Demplot Rintisan Padi Organik	Ha	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			6. Luas Demplot Area Tanaman Kedelai	Ha	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			7. Luas Coorporate farming	Ha	15	15	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pengembangan diversifikasi tanaman	1. Jumlah Pengadaan dan Penanaman Bibit Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	Batang	68905	68905	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			2. Jumlah Pengadaan Bibit tanaman buah-buahan KUOTA KECAMATAN	paket	0	0	0%	Refocusing penanganan Covid-19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Evaluasi pohon induk kelapa dan Evaluasi pohon induk cengkeh	kegiatan	2	2	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pengembangan Sentra Tanaman Hortikultura dan Buah - buahan	1. Jumlah Petani yang dilakukan Pembinaan dan sosialisasi hortikultura	orang	140	140	100%	-	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			2. Jumlah paket SL GAP Hortikultura	paket	0	0	0%	Refocusing penanganan Covid 19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			3. Jumlah paket Farm Field Day (FFD)	paket	0	0	0%	Refocusing penanganan Covid 19	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			4. Jumlah batang Pengadaan bibit tanaman buah-buahan	batamg	0	0	0%	Refocusing penanganan Covid 19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			5. Jumlah demplot Demplot Hortikultura	paket	1	1	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	1. Jumlah Alat pengemasan (Packing)	unit	0	0	0%	Refocusing penanganan Covid 19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			2. Jumlah Fasilitasi alat angkut roda 3	unit	0	0	0%	Refocusing penanganan Covid 19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			3. Jumlah Dapur bersih	unit	0	0	0%	Refocusing penanganan Covid 19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			4. Jumlah Dapur Bersih KUOTA KECAMATAN	unit	0	0	0%		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			5. Jumlah kemlompok yang dilaksanakan Pembinaan pelatihan kelompok hortikultura	kelompok	13	13	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			6. Jumlah desa yang dilaksanakan Pelatihan Pascapanen KUOTA KECAMATAN	desa	0	0	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			7. Jumlah unit Peralatan pengolahan gula	unit	0	0	0%	Refocusing penanganan Covid 19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			8. Jumlah Unit Pengolahan Hasil Bahan Olah Karet (BOKAR)	unit	0	0	0%	Refocusing penanganan Covid 19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			9. Panjang Jalan Usaha Tani Kuota Kecamatan	meter	0	0	0%	Refocusing penanganan Covid 19	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			10. Jumlah desa Bantuan Alat Pengolahan Produk Pertanian/Perkebunan	desa	0	0	0%	Refocusing penanganan Covid 19	
	Pertanian	**Dinas Pertanian Dan Pangan**		**Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan**	**Terfasilitasinya Promosi hasil produksi pertanian dan pangan**	**Kali**	**1**	**1**	**100%**	**-**	**-**
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah pameran dan promosi hasil produksi pertanian dan perkebunan yang diikuti	kali	1	1	16,66%	Refocusing penanganan Covid 19	
	Pertanian	**Dinas Pertanian Dan Pangan**		**Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**	**Tingkat Kecukupan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; Produksi industri pengolahan perkebunan**	**Persen**	**92,01**	**92,01**	**100%**		
	Pertanian			**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**Prosentase Kelompok Tani yang bankable**	**persen**	**12**	**12**	**100%**		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1. Jumlah Pengadaan stok obat-obatan tanaman perkebunan	paket	1	1	100%		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			2. Jumlah Desa yang melaksanakan SLPHT Cengkeh (KUOTA KECAMATAN)	desa	0	0	0%	Refocusing penanganan Covid 19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	3. Jumlah petani yang Terlatih dalam SLPHT	Orang	175	175	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			4. Jumlah Pengadaan stok obat-obatan tanaman pangan	Paket	1	1	100%	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			5. Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan	kecamatan	0	0	0%	Refocusing penanganan Covid 19	
	Pertanian	**Dinas Pertanian Dan Pangan**		**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**	a. **Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;**	**%**	**0,5**	**0,5**	**100%**		
				Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	b. **Nilai Produksi Perkebunan (Juta Rupiah)**	**Rp. Juta**	**666,16**	**181429**	**272%**		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	1. Jumlah kecamatan yang melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)	Kecamatan	26	26	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			2. Jumlah dokumen data alat mesin pertanian (alsintan)	Dokumen	1	1	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			3. Jumlah Kecamatan yang terdampingi Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) nya	Kecamatan	26	26	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			4. Jumlah Pengadaan Traktor	Unit	0	0	0%	Refocusing penanganan Covid 19	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			5. Jumlah Pengadaan Pompa Air	Unit	40	40	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			6. Jumlah Alat Pra Panen Mendukung Corporate Farminng	Kegiatan	1	1	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			7. Jumlah Kecamatan yang menerima Sarana Produksi Pertanian Kuota Kecamatan	Kecamatan	3	3	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			8. Jumlah Kecamatan yang menerima Sarana Produksi Pertanian POKOK PIKIRAN	Kecamatan	5	5	100%	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	1. Jumlah petani yang mengikuti Sosialisasi/pembinaan tanaman pangan	Orang	150	200	133%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			2. Jumlah paket Saprodi budidaya tanaman pangan	Paket	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			3. Jumlah hektar yang terlaksanan pemberian bantuan benih padi Inpari 32, Pupuk NPK, Urea, Pestisida dan Pelatihan (KUOTA KECAMATAN)	Hektar	0	0	0%	Rasionalisasi Covid-19	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)	1. Jumlah hektar Demplot tembakau	hektar	15	15	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			2. Jumlah buah Rigen	buah	2000	2000	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			3. Jumlah unit Bak Penampung Air	unit	2	2	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			4. Jumlah lokasi Jalan Produksi	lokasi	2	2	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			5. Jumlah unit Mesin Perajang	unit	2	2	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			6. Jumlah Kg Pupuk NPK	kg	5250	5250	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			7. Jumlah Kg Pupuk KNO3	kg	2500	2500	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			8. Jumlah Unit UPPO	unit	1	1	100%	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			9. Jumlah Unit Pompa Air	unit	5	5	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			10 Jumlah kemlompok yang dilaksanakan kegiatan Pembinaan pelatihan/ Bimtek Kelompok	Kelompok	17	17	100%	-	-
	Pertanian	**Dinas Pertanian Dan Pangan**		**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**	**Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan**	**Ekor**	**13750**	**9555**	**69,49%**	**Tidak ada pengadaan obat dan pelayanan terbatas karena situasi pandemi Covid 19**	**Pengadaan obat hewan dan penerapan prototokol kesehatan secara ketat saat pelayanan**
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pendataan masalah peternakan	1. Jumlah kegiatan Penyediaan jasa laboratorium diagnostik veteriner sampel feses dan darah ternak dan sampel produk/ bahan asal hewan; pendataan penyakit ternak	kegiatan	0	0	0%	Tidak dilaksanakan penilaian SKSB (Surat Keterangan Layak Bibit)	Penilaian SKLB tetap dilaksanakan
	Pertanian				2. Pendataan Penyakit hewan	kegiatan	1	1	100%		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah paket Pengadaan obat-obatan ternak; workshop kesehatan hewan	Paket	0	0	0%	Tidak ada pengadaan obat hewan dan workshop petugas kesehatan hewan (Rasionalisasi anggaran)	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Fasilitasi Pendukung Penanganan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavert)	Jumlah paket Pembangunan Rumah Potong Hewan dan Perlengkapannya; DED	Paket	0	0	0%	Tidak dilaksanakan pembangunan RPH Gombong (Rasionalisasi	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										anggaran)	
	Pertanian	**Dinas Pertanian Dan Pangan**		**Program peningkatan produksi hasil peternakan**	a. **Capaian Produksi Daging**	**Kilogram**	**11.102.470**	**25.038.352**	**226%**	**Penerbitan SKLB tidak dilaksanakan karena anggaran dirasionalisasi sehingga populasi bibit SKLB 0.**	**Pengajuan anggaran di tahun berikutnya.**
				Program peningkatan produksi hasil peternakan	b. **Capaian produksi telur**	**Ekor**	**3.838.470**	**9.908.985**	**258%**		
				Program peningkatan produksi hasil peternakan	c. **Bertambah nya jumlah produksi bibit sapi**	**Ekor**	**500**	**0**	**0%**		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pembibitan dan perawatan ternak	1. Jumlah paket sarana dan prasarana kawin suntik (IB)	Paket	1	1	100%	-	-
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			2. Jumlah Kontes Ternak Sapi PO Kebumen	Kali	0	0	0%	Kontes Ternak Sapi tidak dilaksanakan karena anggaran Dirasionalisasi	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			3. Jumlah ekor Pengamanan Bibit Unggul Ternak Sapi	Ekor	0	0	0%	Pengadaan Bibit Unggul Ternak Sapi tidak dilaksanakan karena anggaran dirasionalisasi	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			4. Jumlah kelompok yang dilaksanakan Pembinaan Kelompok Perbibitan dan Budidaya	Kelompok	14	17	121%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	1. Jumlah kelompok tani ternak yang dibina	Kelompok	8	8	100%		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			2. jumlah unit Gudang pakan yang terbangun	unit	0	0	0%	Anggaran kegiatan tersebut di rasionalisasi.	
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			3. Jumlah Paket Sarana dan Prasarana pengolahan pakan	paket	1	1	100%		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pengembangan agribisnis peternakan	1. Jumlah LS Pengembangan eduwisata peternakan terintegrasi dan pengembangan agribisnis peternakan	LS	0	0	0%		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			2. Jumlah LS Bantuan bibit ternak dan perlengkapannya	LS	0	0	0%		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			3. Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengadaan Bibit Ternak (KUOTA KECAMATAN)	Kecamatan	0	0	0%		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			4. Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengadaan Bibit Ternak (POKOK PIKIRAN)	Kecamatan	0	0	0%		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan			5. Jumlah kegiatan Identifikasi dan pembinaan kelembagaan	Kegiatan	0	0	0%		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Fasilitasi Pendataan Peternakan	Jumlah kartu ternak yang Terimplementasi	Buah	3000	1953	65,10%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pertanian	**Dinas Pertanian Dan Pangan**		**Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan**	**Terpeliharanya sarana pemasaran hasil produksi peternakan**	**Unit**	**2**	**2**	**100%**		
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	1. Jumlah Pameran/promosi hasil produksi peternakan unggulan Kabupaten Kebumen	Kali	0	0	0%	Anggaran kegiatan tersebut di rasionalisasi.	Pengajuan anggaran di tahun berikutnya.
	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan	2. Jumlah unit Pemeliharaan rutin Rumah Potong Hewan (RPH)	Unit	2	2	100%	Awalnya RPH Gombong mau dibangun, sehingga pemeliharaan hanya untuk RPH Kebumen.Karena RPH tidak jadi dibangun pemeliharaan dilalkukan untuk 2 unit RPH	Pengajuan anggaran di tahun berikutnya.

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pangan diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 126% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. rata-rata capaian kegiatan 56 %, sehingga analisis kesesuai kegiatan terhadap kinerja program adalah 226% atau sangat tinggi yang artinya tingkat kesesuai antara kegiatan dengan target kinerja program adalah sangat tinggi.

c. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan Pertanian ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 3.67
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
1. Produktivitas padi	Ton/ Ha	6,34	6,56	5,77	87,95	6,57
2. Produktivitas jagung	Ton/ Ha	6,27	6,27	5,99	80,08	7,48
3. Produktivitas kedelai	Ton/ Ha	1,58	1,58	1,12	91,05	1,23
4. Kenaikan Angka Nilai Tukar Petani (NTP)	%	Na	103	100,8	97,86	103,2
5. Produksi kelapa	Ton	198.345,28	189.945,13	155.737	81,99	190.225,42
6. Produksi tembakau	Ton	467,62	415,35	438,7	105,62	415,35
7. Produksi daging	Kg	11.102.667	11.102.470	13.608.463	122,57	11.102.580
8. Produksi Telur	Kg	3.838.172	3.838.172	9.068.960	236,38	3.836.510

Sumber : DISTAPANG Kab. Kebumen 2020

Program yang belum mencapai target adalah Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) dan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program adalah Adanya pandemi Covid 19

menyebabkan beberapa kegiatan yang anggarannya direfocusing yang seharusnya menunjang tingkat capaian program. Kegiatan yang direfocusing tersebut meliputi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija, pengembangan diversifikasi tanaman, pengembangan sentra tanaman hortikultura dan buah-buahan, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan, jumlah pelayanan kesehatan ternak, pendataan masalah peternakan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, fasilitasi pendukung penanganan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavert),

Permasalahan yang lainnya yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 urusan pertanian adalah tidak ada pengadaan obat dan pelayanan terbatas karena situasi pandemi covid 19, tidak dilaksanakan penilaian SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit), tidak ada pengadaan obat hewan dan workshop petugas kesehatan hewan, tidak dilaksanakan pembangunan RPH Gombong, penerbitan SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit) tidak dilaksanakan, kontes ternak sapi tidak dilaksanakan, pengadaan bibit unggul ternak sapi tidak dilaksanakan,awalnya RPH Gombong mau dibangun sehingga pemeliharaan hanya RPH Kebumen karena RPH Gombong tidak jadi dibangun maka pemeliharaan dilakukan untuk 2 unit RPH untuk itu upaya yang akan dilakukan pada masa yang akan datang yaitu pengadaan obat hewan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan, penilaian SKLB tetap dilaksanakan, pengajuan anggaran untuk penerbitan SKLB sehingga populasi bibit SKLB tidak nol, pengajuan anggaran untuk promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah, pengajuan anggaran untuk pembangunan RPH Gombong

4. Urusan Perdagangan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan perdagangan dilaksanakan melalui program prioritas Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**.** Capaian programd dan kegiatan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.68
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perdagangan	**Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**		**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**	**Prosentase tertanganinya pengaduan konsumen**	**%**	**26**	**26**	**100%**		
	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah peredaran barang dan jasa, ketentuan/ tata niaga perdagangan barang bersubsidi dan barang berbahaya Kecamatan di Kabupaten Kebumen	kecamatan	26	26	100%	Aduan konsumen hanya dilakukan secara lisan (tidak surat resmi ke dinas)	Semua pengaduan telah ditindaklanjuti dengan baik
	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Jumlah UTTP yang tertera, tera ulang dan pengawasan metrologi	UTTP	5095	1900	37%	Hanya ada 1 (satu) Pegawai Berhak yang melaksanakan Tera/Tera Ulang yang statusnya masih JFT Penyuluh Perindag (Pengawasan blm dilaksanakan)	Mempercepat pengadaan SDM Penera baik yang Tingkat Terampil maupun Tingkat Ahli dan PPNS Metrologi
	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)	Jumlah Kecamatan data/informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai	kecamatan	26	26	100%		
	Perdagangan	**Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**		**Program peningkatan dan pengembangan ekspor**	**Terlaksananya peningkatan dan pengembangan informasi peluang pasar luar negeri/ekspor**	**Kegiatan**	**3**	**1**	**33%**		
	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar luar negeri dan Terciptanya Ekportir (Trade Expo, Batam, Semarang, Bintek di Kebumen)	Pameran dan Bintek	3 Pameran dan 1 Bintek	1 Bintek	25%	Untuk Kegiatan Pameran dirasionalisasi untuk penanggulangan covid 19	Penyesuaiaan Kegiatan dengan anggaran yang diterima

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Perdagangan	**Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**		**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**	**Prosentase Pasar Tradisional Dalam kondisi Baik**	**pasar**	**48**	**46**	**96%**		
	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah Kecamatan informasi harga kepokmas dan terjaminnya ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan barang penting	Kegiatan	2	2	100%		
	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah Lokasi kebersihan, keamanan, dan terlaksananya pemungutan retribusi pasar	Lokasi	12	12	100%		
	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	jumlah kali pameran produk unggulan tingkat daerah dan nasional (Kbm (Kriya, Pesta Wira Usaha, Kbm Fair, Peduli UKM, Forum UMKM) Jkt (INACCRAFT) Surabaya (PPUD_PPN), Semarang (Gebyar batik Jateng), Magelang (Hari jadi kota Mgl)	Pameran	9	2	22%	Adanya Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid 19	Penyesuaiaan Kegiatan dengan anggaran yang diterima
	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah	Jumlah UPTD Pemeliharaan / Rehabilitasi pasar pasar daerah	unit	4	4	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pengembangan pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan Operasional penegelolaan Gudang dengsn Sistem Resi Gudang dan pemberian Subsidi Penyimpanan Kepada masyarakat Petani, POKTAN, GAPOKTAN di Gudang SRG dan Terwujudnya Pasar Lelang 2 kali	Kegiatan	2	1	50%	Untuk kegiatan pasar lelang dirasionalisasi untuk penanggulangan covid-19	Penyesuaiaan Kegiatan dengan anggaran yang diterima
	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pemeliharaan/rehabilitasi pasar - pasar daerah (DAK)	Jumlah Lokasi Pembangunan Pasar Pasar Daerah sehingga menjadi pasar yang nyaman, sehat, dan representatif	Lokasi	2	0	0%	dirasionalisasi anggaran	
	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pembangunan/ Pengembangan Pasar-pasar Daerah	Jumlah UPTD Pembangunan / Pengembangan pasar pasar daerah	unit	1	1	100%		
	Perdagangan	**Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**		**Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan**	**BanyaknyaLokasi PKL dan Asongan yang Tertata**	**Lokasi**	**26**	**26**	**100%**		
	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah Keamatan penguatan Organisasi PKL Meningkkatnya disiplin PKL,tersediannya bantuan peralatan usaha bagi PKL,Meningkatnya mutu dagangan PKL dan tersediannya THL untuk satgas keamanan PKL	Kecamatan	26	26	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah Lokasi bangunan tempat usaha PKL	Lokasi	2	0	0%	Adanya Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid 19	

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perdagangan, dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 82,29% atau kategori Hasil Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kegiatan adalah 64,19%, dengan demikian tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 128,19% atau sangat tinggi.

c. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan perdagangan ditunjukkan dengan indikator Capaian sebagai berikut :

Tabel 3.69
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
1. Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	%	80	77,78	82,50	106,07	100
2. Jumlah usaha perdagangan berizin	unit	2740	2380	3718	135,69	2413

Sumber : Disperindagsar Kabupaten Kebumen, 2020

Berikut Data pasar tradisional di kabupaten kebumen disertai dengan kondisi pasar.

Tabel 3.70
Data Pasar Tradisional Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP)	KONDISI PASAR
1	Pasar Jatiluhur	Desa Jatiluhur Kec. Rowokele	2000	APBD	Rusak Berat
2	Pasar Karangjambu	Desa Karangjambu Kec. Sruweng	2005	APBD	Rusak Berat
3	Pasar Dorowati	Desa Dorowati Kec. Klirong	2000	APBD	Rusak Berat
4	Pasar Banyumudal	Desa Banyumudal Kec Buayan	2015	DAK	Baik
5	Pasar Ayah	Desa Ayah Kecamatan Ayah	2011	TP	Baik
6	Pasar	Desa Karangsari	2019	DAK	Baik

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP)	KONDISI PASAR
	Karangsari	Kec. Buayan			
7	Pasar Tanjungsari	Desa Tanjungsari Kec. Petanahan	2005	APBD	Rusak Berat
8	Pasar Candirenggo	Desa Candirenggo Kec. Ayah	2011	DAK	Baik
9	Pasar Rowokele	Desa Rowokele Kec.Rowokele	2015	DAK	Baik
10	Pasar Kritig	Desa Kritig Kec. Petanahan	2018	DAK	Baik
11	Pasar Jatisari	Desa Jatisari Kec. Kebumen	2012	TP	Baik
12	Pasar Kelapa Prembun	Desa Prembun Kec. Prembun	2016	APBD	Rusak
13	Pasar Sruni	Desa Sruni Kec. Alian	2014	TP	Baik
14	Pasar Jogosimo	Desa Jogosimo Kec. Klirong	2018	APBD	Baik
15	Pasar Caruban	Desa Caruban Kec. Adimulyo	2017	DAK	Baik
16	Pasar Sidomulyo	Desa Sidomulyo Kec. Adimulyo	2019	DAK	Baik
17	Pasar Giwangretno	Desa Giwangretno Kec. Sruweng	2015	TP	Baik
18	Pasar Tamanrejo	Kel Tamanwinangun Kec. Kebumen	2007	APBD	Rusak Berat
19	Pasar Indrakila	Desa Krakal Kec. Alian	2011	TP	Baik
20	Pasar Hewan Purbowangi	Desa Purbowangi Kec Buayan	2019	APBD	Baik
21	Pasar Demangsari	Desa Demangsari Kec. Ayah	2016	DAK	Baik
22	Pasar Kuwarasan	Desa Kuwarasan Kec. Kuwarasan	2017	APBD	Baik
23	Pasar Ungaran	Desa Ungaran Kec. Kutowinangun	2017	DAK	Baik
24	Pasar Puring	Desa Sitiadi Kec. Puring	2017	TP	Baik
25	Pasar Hewan Argopeni	Desa Argopeni Kec. Kebumen	2018	APBD	Baik
26	Pasar Bocor	Desa Bocor Kec. Buluspesantren	2016	TP	Baik
27	Pasar Prembun	Desa Prembun Kec. Prembun	2012	TP	Baik
28	Pasar Tlogopragoto	Desa Tlogopragoto Kec. Mirit	2012	APBD	Baik
29	Pasar Ambal	Desa Ambalresmi Kec. Ambal	2011	TP	Baik

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP)	KONDISI PASAR
30	Pasar Petanahan	Desa Petanahan Kec. Petanahan	2013	APBD	Baik
31	Pasar Kabekelan	Desa Kabekelan Kec. Prembun	2018/2020	TP	Baik
32	Pasar Tumenggungan	Kelurahan Kebumen Kec. Kebumen	2012	APBD	Baik
33	Pasar Kutowinangun I	Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun	2013	TP	Baik
34	Pasar Karanganyar	Kel Karanganyar Kec. Karanganyar	2012	TP	Baik
35	Pasar Wonokriyo	Kel Wonokriyo Kec. Gombong	2018	APBD	Baik
36	Pasar Karanggayam	Desa Karanggayam Kec Karanggayam	2014	APBD	Baik
37	Pasar Burung dan Klithikan	Kelurahan Kebumen Kec. Kebumen	2019	APBD	Baik
38	Pasar Kayu Gombong	Desa Plumbon Kec. Karangsambung	2011	TP	Baik
39	Pasar Hewan Karanganyar	Kel Karangayar Kec. Karanganyar	2015	DAK	Rusak
40	Pasar Kutowinangun 2 (Ps Lama)	Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun			Rusak Berat

Sumber : Disperindag Kab. Kebumen 2020

Kenaikan Usaha Perdagangan berizin khususnya di bidang industri menggambarkan kesadaran pelaku usaha/industri akan pentingnya Izin usaha. Dengan ijin usaha yang dimiliki menandakan peluang pasar semakin besar, dikarenakan untuk produk produk IKM yang ingin masuk atau diperjual belikan ke Pasar/toko Modern dipersyaratkan untuk memiliki izin sepertti SP-PIRT yaitu Sertifikat Produksi-Pangan Industri Rumah Tangga yang dalam hal ini masuk ke kategori Usaha Mikro. Setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen mengadakan fasilitasi SP-PIRT berikut uji lab yang dipersyaratkan.

5. Urusan Perindustrian

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Perindustrian dilaksanakan dengan program prioritas Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah, serta Program Penataan Struktur Industri. Adapun capaian program dan kegiatan sebagaimana tebl berikut ini :

Tabel 3.71
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perindustrian	**Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**		**Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi**	**Meningkatnya jumlah IKM yang menerapkan merek bagi produknya**	**IKM**	**40**	**20**	**50%**	**Adanya Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid 19**	**Penyesuaiaan Kegiatan dengan anggaran yang diterima**
	Perindustrian	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah UMKM data industri kreatif,	IKM	100	10	10%	**Adanya Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid 19**	**Penyesuaiaan Kegiatan dengan anggaran yang diterima**
					pelatihan industrin Kreatf,	IKM	50	0	0%	**Adanya Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid 19**	**Penyesuaiaan Kegiatan dengan anggaran yang diterima**
					Festifal industri Kreatif.yang sesuai standar SNI	komoditas	1	0	0%	**Adanya Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid 19**	**Penyesuaiaan Kegiatan dengan anggaran yang diterima**
	Perindustrian	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan		**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	**Kenaikan Jumlah Indusri Kecil dan menengah**	**IKM**	**54945**	**56405**	**103%**	**-**	**-**

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Perindustrian	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah Kelompok bantuan alat, pelatihan, untuk ikm, Sertifikasi Organik, Fasilitasi SPP-IRT, Fasilitasi Sertifikasi Halal, Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Evaluasi Kegiatan untuk meningkatkan IKM	Kelompok	10	2	20%	Adanya Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid 19	Penyesuaian Kegiatan dengan anggaran yang diterima
	Perindustrian	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri	Jumlah Paket bantuan alat dan pelatihan IKM	Paket	2	2	100%	-	-
	Perindustrian	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT)	Jumlah Kegiatan pelatihan/magang Pengolahan Hasil Pertanian, Pelatihan Peningkatan Sumber daya manusia , Pertukangan Kayu, Kreasi dan optimalisasi penggunaan bahan baku ikan atau udang	Kegiatan	8	4	50%	Adanya Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid 19	
	Perindustrian	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Pembinaan industri kecil dan menengah sektor industri agro, kimia dan hasil hutan	Jumlah Kegiatan Pelatihan IKM kapasitas IKM yang telah mengkuti pelatihan Gula semut	Kegiatan	2	1	50%	adanya Rasionalisasi anggaran karena pandemi covid 19	

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Perindustrian	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan		**Program penataan struktur industri**	**Terbentuknya Kawasan Industri**	**Kawasan**	**-Penilaian BMD - Lelang Pengelola Kawasan Industri**	**0**	**0%**	**HPL Belum Turun**	**MenungguHPL Turun**
	Perindustrian	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah	Jumlah Dokumen Update data Industri dan perbup RPIK	Dokumen	- Update Data - Penyusunan Perbub	250 IKM	50%	Perbup tidak diperlukan	

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perdagangan, dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 51% atau kategori Hasil rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Program yang tidak mencapai target yaitu Program penataan struktur industry dengan indikator kinerja yaitu Terbentuknya Kawasan Industri. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program adalah tertundanya ijin Hak Pengelolaan (HPL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)..

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan perindustrian adalah Pandemi Covid 19 sehingga anggaran kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dilakukan refocusing untuk menangani Corona Virus Disease 19. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara melakukan koordinasi secara lebih intensif dengan pihak-pihak terkait.

c. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan Perindustrian ditunjukkan dengan indikator Capaian Perindustrian sebagai berikut :

Tabel 3.72
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasai	Capaian	
1. Terbangunnya kawasan industri	%	20	100	80	80	100
2. Jumlah industri kecil menengah	unit	56.339	54.949	56.411	102,66	54.959

Sumber : DISPERINDAG Kabupaten Kebumen, 2020

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Pembangunan Kawasan merupakan strategi pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2015 merupakan tahap awal perencanaan pembangunan Kawasan Industri berupa rapat rapat koordinasi dengan OPD terkait, ditindak lanjuti Pada Tahun 2016 tercapai 20% yaitu Pembuatan Rencana Induk, Studi

Kelayakan, pembentukan Surat Keputusan penetapan lokasi Kawasan Industri, Tahun 2017 tercapai 20% untuk Konsultasi, Penyusunan BED (Basic Engineering Design, Tahun 2018 tercapai 20% Koordinasi dan konsultasi ke Pemprov Jateng, Kemenperin, Kemendagri, Bappenas dan BKPM, pendataan lahan milik masyarakat. Tahun 2019 tercapai 20% untuk kegiatan Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Industri bersama Disperindag Prov. Jateng, Pengusulan Hak Pengelolaan (HPL) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tahun 2020 capaian 20% dengan melakukan Penilaian Aset, Lelang Pengelola Kawasan Industri dan Kontrak Kerjasama dengan Pihak Pengelola Kawasan Industri

6. Urusan Transmigrasi

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen. Terdapat satu program dalam pelaksanaan urusan transmigrasi yaitu Program pengembangan wilayah transmigrasi dengan indikator kinerja banyaknya keluraga Miskin daerah bencana yang difasilitasi pemindahannya ke daerah transmigrasi dengan realisasi capain program adalah 0.

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program adalah Mendasari surat Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor : B.675/PKT.04.01/IV/2020 tanggal 15 April 2020 Perihal Penundaan Penempatan Transmigran Tahun 2020 Antisipasi Dampak Wabah Pandemik Covid-19, maka program perpindahan dan penempatan transmigran penduduk asal (TPA) dan transmigran penduduk setempat (PTS) tahun 2020 ditunda penempatannya ke tahun 2021.

Tabel 3.73
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transmigrasi	**Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**		**Program pengembangan wilayah transmigrasi**	**Banyaknya keluraga Miskin daerah bencana yang difasilitasi pemindahannya ke daerah transmigrasi**	**KK**	**5**	**0**	**0%**	**tidak jalankan karena covid**	**Dilaksanakan tahun berikutnya**
		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Jumlah penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM dan peningkatan kesejahtraan	KK	5	0	0%	tidak jalankan karena covid	**Dilaksanakan tahun berikutnya**

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan transmigrasi diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 0% atau kategori sangat rendah dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Capaian Kinerja Urusan

Meskipun pada tahun 2020 tidak dilaksanakan program dan kegiatan transmigrasi dikarenakan pandemi covid, capaian kinerja Urusan Transmigrasi ditunjukkan dengan jumlah fasilitasi transmigrasi penduduk Kabupaten Kebumen. Jumlah KK yang difasilitasi pada kurun waktu 2016-2020 cukup fluktuatif. Secara lengkap capaian kinerja urusan transmigrasi tersaji dalam tabel di berikut ini:

Tabel 3.77
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah KK yang difasilitasi untuk bertranmigrasi	13 KK	5 KK	4KK	10 KK	0 KK

Sumber : Disnaker UKM Kabupaten Kebumen, 2020

7. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan energy dan sumber daya mineral dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.75
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Energi Dan Sumber Daya Mineral	**Dinas Perhubungan**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan**	**Bertambahnya jumlah LPJu yang terpasang**	**unit**	**20**	**20**	**100%**	**-**	
		Dinas Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen	Jumlah bulan rekening LPJU yang dibayarkan (12 bulan, 6,7 milyar)	bulan	12	12	100%	-	
		Dinas Perhubungan	Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pengembangan dan Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan	Jumlah unit LPJU Listrik dan Solarcell di Kab. Kebumen yang terpasang dan Jumlah dokumen masterplan 5 tahunan yang disusun	unit	185	80	43%	rasionalisasi anggaran	
		Dinas Perhubungan		Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum	Jumlah bulan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Kebumen	bulan	12	12	100%	-	

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan energi dan sumber daya mineral diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 100% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja urusan energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi pada kurun waktu 2016-2018. Namun pada kurun waktu tahun 2018-2020 kinerjanya mengalami penurunan. Hal itu dapat dilihat dari kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB yang menurun dari 5,27% di tahun 2018 menjadi 5,15% pada tahun 2020. Jika melihat kegiatan pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kebumen yang didominasi dengan kegiatan penambangan galian C di badan sungai, maka penurunan kontribusi sektor tersebut memberikan dampak yang baik pada sektor lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen. Capaian kinerja urusan energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.76
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

URAIAN KINERJA	2016	2017	2018	2019	2020*
Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB (persen)	5,07	5,07	5,27	5,15	5,15

Sumber: Data diolah, 2020

3.1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan pengawasan. Fungsi penunjang dilaksanakan oleh Badan. Sementara inspektorat adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, BAP3DA mempunyai kedudukan sebagai urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun tugasnya

membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Mendasari Peraturan Bupati Kebumen nomor 84 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan pengelolaan Keuangan dan Aset daerah. BPKAD mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Selain BPKAD, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen nomor 85 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tatakerja Badan pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kedudukan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan Daerah, Tugas BAPPENDA juga membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Mendasari Peraturan Bupati Kebumen nomor 83 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, BKPPD mempunyai kedudukan melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan, dinamika dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal melaksanakan fungsi kelitbangan, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen telah bekerjasama dengan Perguruan tinggi dan 370 LKPJ Kabupaten Kebumen T.A. 2019 Dewan Riset Kabupaten Kebumen , diantaranya dalam hal penyusunan kajian yang dibutuhkan dan pelaksanaan riset unggulan daerah dengan melibatkan beberapa pakar di Perguruan Tinggi yang ada. Berikut uraian terkait pelaksanaan urusan fungsi lainnya.

1. Fungsi Perencanaan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 3.77
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Perencanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		**Program pengembangan data/informasi**	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renja Bap3da 2021, Perubahan Renja Bap3da 2020, Renstra Teknokratis Bap3da 2021-2026, LKJIP 2019)	Dokumen	4	4	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan profile daerah	Jumlah dokumen profil daerah yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100		
	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		**Program Kerjasama Pembangunan**	Terfasilitasinya kluster ekonomi daerah (Non Akumulatif)	Klutser	5	5	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyelenggaraan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (FEDEP)	Jumlah kluster Pengembangan Ekonomi Lokal yang terfasilitasi	Klutser	5	5	100		
	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	Terfasilitasinya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan	5	5	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah kegiatan diklat/bintek perencanaan (untuk OPD dan untuk kecamatan/kelurahan)	Kegiatan	2	2	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah (RUD, DRD,dan 5 kajian pendukung perencanaan)	Kegiatan	3	3	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah			Jumlah dokumen penelitian RUD	Dokumen	6	6	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah			Jumlah buan fasilitasi kegiatan DRD	Bulan	12	12	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah			Jumlah dokumen Kajian pendukung perencanaan	Dokumen	7	7	100		
	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		**Program perencanaan pembangunan daerah**	Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	3	3	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen (RPJMD Teknokratis 2021-2026	Dokumen	1	1	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten yang diselenggarakan	Kegiatan	1	1	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah			Jumlah fasilitasi Musrenbang RKPD di Kecamatan	Kecamatan	26	26	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah			Jumlah konsultasi publik RA RKPD	Kegiatan	1	1	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan (RKPD 2021 dan Perubahan RKPD 2020)	Dokumen	2	2	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dokumen	1	1	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan inovasi	Jumlah kegiatan kreativitas dan inovasi masyarakat yang terselenggara	Kegiatan	1	1	100		
	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen	7	7	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Jumlah Dokumen Analisis Ekonomi Daerah Kabupaten Kebumen yang tersusun	Dokumen	1	1	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang produksi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Subbidang Produksi (RKPD 2021, Perubahan RKPD 2020, Dalev Perencanaan 2020 Subbidang Produksi) yang tersusun	Dokumen	3	3	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang distribusi, jasa dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi sub bidang distribusi, jasa, & keuangan (RKPD 2021, Perubahan RKPD 2020, Dalev Perencanaan 2020 sub bidang distribusi, jasa, & keuangan)	Dokumen	3	3	100		
	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		**Program perencanaan sosial dan budaya**		Dokumen	6	6	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi perencanaan pembangunan subidang pengembangan sumber daya manusia	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi sub bidang pemerintahan & pendidikan (RKPD 2021, Perubahan RKPD 2020, Dalev Perencanaan 2020 sub bidang pengembangan sumber daya manusia) dan laporan penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2020	Dokumen	4	4	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi perencanaan pembangunan subidang pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi sub bidang kesra dan sosial (RKPD 2021, Perubahan RKPD 2020, Dalev Perencanaan 2020 sub bidang pemerintahan)	Dokumen	3	3	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi perencanaan pembangunan subidang pemberdayaan masyarakat dan kependudukan	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi sub bidang kesra dan sosial (RKPD 2021, Perubahan RKPD 2020, Dalev Perencanaan 2020 sub bidang pemberdayaan masyarakat dan kependudukan)	Dokumen	3	3	100		
	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		**Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam**	Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Kali	25	25	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang pengembangan wilayah	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi sub bidang pengembangan wilayah (RKPD 2021, Perubahan RKPD 2020, Dalev Perencanaan 2020 sub bidang pengembangan wilayah)	Dokumen	3	3	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah			Jumlah Road Map Pengembangan Geopark yang tersusun (3 Sub Kluster)	Dokumen	1	1	100		
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang infrastruktur dan prasarana wilayah	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi sub bidang infrastruktur dan prasarana wilayah (RKPD 2021, RPJM Teknokratis, Perubahan RKPD 2020, Dalev Perencanaan 2020 sub bidang infrastruktur dan prasarana wilayah)	Dokumen	4	4	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah			Jumlah dokumen RAD, AMPL dan Sanitasi, IPDMIP	Dokumen	1	1	100		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan penunjang fungsi perencanaan adalah 100% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 100%. Terhadap tingkat kesesuain antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 100% atau kategori sangat tinggi.

Pada tahun 2019 telah terbit Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut telah mengatur secara detail pembagian berdasarkan urusan dan kewenangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program antar Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah dilakukan pemetaan perubahan nomenklatur sub kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan mensinkronkan indikator maupun sub indikator kegiatan dengan tetap mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Selain itu, telah terbit Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya. Adanya peraturan tersebut maka proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pertanggungjawaban terintegrasi dalam satu sistem yang terhubung. Penerapan SIPD dilaksanakan mulai penyusunan perencanaan tahun 2021.

c. Capaian Kinerja Urusan

Capaian kinerja program perencanaan yang dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Kebumen. Capaian kinerja program dalam RKPD sampai tahun 2020 sebesar 90 % dari RPJMD Kebupaten Kebumen 2016-2021. Masih ada program yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, secara ideal semua program yang tertuang dalam RPJMD dilaksanakan dalam RKPD. Permasalahan yang dialami yaitu tidak bisanya merevisi RPJMD karena keterlambatan dan adanya Permendagri no 86 tahun 2017 yang memberikan batasan tentang batas waktu revisi RPJMD. Perubahan nomenklatur No. 90 tahun 2020 merupakan tantangan tersendiri karena harus mensinkronisasi RPJMD dengan Permendagri tersebut. Sebagai imbasnya tidak semua program dapat terakomodir di RKPD walau sudah diadakan sinkronisasi. Faktor lain adanya perpindahan wewenang urusan yang dilimpahkan oleh

provinsi seperti pendidikan menengah atas, pertambangan, kehutanan dan sektor lain, sehingga program yang ada di RPJMD tidak dapat dilakukan.

Tabel 3.78
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2019-2020

Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020
Capaian Kinerja Program	90%	90%

Sumber*: BAPPEDA Kabupaten Kebumen, 2020*

2. Fungsi Keuangan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Fungsi Penunjang Keuangan , dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 97,68% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Terdapat dua program yang dilaksanakan yaitu Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.79
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	Capaian Realisasi belanja; Capaian Penerbitan Dokumen keuangan daerah tepat waktu ; Capaian SKPD Tertib Administrasi AsetTepat Waktu;	%	93,25	96	103%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja	dokumen	1	1	100%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang indeks Standarisasi Harga	dokumen	1	1	100%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD	dokumen	2	2	100%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Perda Perubahan APBD dan Perbup Perubahan APBD	dokumen	2	2	100%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD LKPD, Perda, Perbup dan Laporan Semesteran	dokumen	3	3	100%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah dokumen pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset	dokumen	2	2	100%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah pemasangan plang tanda kepemilikan tanah pemda, bangunan/gedung, patok tanda batas tanah pemda	buah	50	50	100%	nihil	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			Jumlah unit Asuransi Kendaraan Dinas yang terbayar	unit	22	22	100%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan KUAPBD dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS murni dan perubahan	dokumen	4	4	100%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	Jumlah obyek intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	obyek	3	3	100%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan dilaksanakannya sinkronisasi data keuangan OPD dan Pengesahan SPJ Fungsional OPD dan Penatausahaan BOS dan BLUD	bulan	12	12	100%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pengelolaan Belanja Langsung	Jumlah dokumen data penatausahaan keuangan daerah belanja langsung dan pembinaan bendahara OPD	dokumen	1	1	100%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	Jumlah dokumen pengelolaan gaji dan penerbitan SP2D belanja tidak langsung	dokumen	1	1	100%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota**	Jumlah SKPD yang mengirim SPJ fungsional tepat waktu	1	177	177	100%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan/Aset Daerah Perbup Sewa dan Pinjam pakai aset BMD, dan menindaklanjuti PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah	dokumen	2	2	100%	nihil	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah OPD di evaluasi kinerja Pengelolaan Keuangan OPD	OPD	177	177	100%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Sosial	Jumlah SPM Pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial hibah bagi hasil dan pembiayaan	SPM	120	319	266%	nihil	
	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	Capaian reailsasi pendapatan	%	100	112.46	112%		
	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	Jumlah jenis pajak yang menjadi Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah	Pajak Daerah	11	11	100%		
	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pendataan obyek dan subyek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak dalam Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah	Objek Pajak	1339152	1339152	100%		
	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pemutakhiran dan pemeliharaan basis data dan pengendalian pajak daerah	Jumlah bulan pelaksanaan rekonsiliasi basis data dan pengendalian pajak daerah	Bulan	12	12	100%		
	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah bulan penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	Bulan	12	12	100%		
	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penetapan dan verifikasi objek dan subjek pajak daerah	Jumlah objek pajak pada Data Ajuan Pajak Daerah yg terverifikasi	Objek Pajak	1339152	1339152	100%		
	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota**	Tertibnya pengelolaan pajak daerah	%	100	100	100%		
	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan penertiban dan pengelolaan Pajak Daerah	Bulan	12	12	100%		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Rata-rata capaian program urusan penunjang fungsi keuangan adalah 100% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 104%. Terhadap tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program adalah 104% atau kategori sangat tinggi.

c. Capaian Kinerja Urusan

Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Target kinerja yang ingin dicapai adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Untuk target tahun 2020 indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas LKPD 2019 terealisasi WTP yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD 2019 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mampu mempertahankan penghargaan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan opini WTP dari BPK RI atas LKPD yang ke-6 kalinya dan 3 tahun terakhir meraih selama tiga kali berturut-turut yakni tahun 2017-2018-2019.

Tabel 3.80
Capaian Kinerja Opini BPK atas LKPD

Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini BPK atas LKPD	WTP atas LKPD 2018	WTP	WTP atas LKPD 2019	96,51%	WTP	100%

Sumber : BPKAD Kabupaten Kebumen 2020.

Berdasarkan Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 166/S/XVIII.SMG/05/2020 Tanggal 19 Mei 2020 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019, BPK RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian kinerja indikator Opini BPK atas LKPD sebesar 100% dengan kriteria capaian kinerja Baik. Pemberian Opini WTP dari BPK RI menggambarkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah memenuhi :

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
b. Sistim Pengendalian Internal Pemerintah secara umum memadai
c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

3. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalitas ASN dengan penerapan sistem merit melalui Permenpan RB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem Merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem Merit meliputi 8 aspek yaitu : perencanaan kebutuhan ASN; pengadaan ASN, pembagian karir; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian; penghargaan dan disiplin; perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi. Capaian program dan kegiatan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

Tabel 3.81
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Prosentase pegawai yang tidak dijatuhi hukuman disiplin**	%	100	40	40%		
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS	Jumlah monitoring dan evaluasi penegakkan disiplin	kegiatan	10	4	40%		
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		**Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS**	**Prosentase penempatan ASN yang sesuai kebutuhan dan kompetensinya**	%	100	112	112%		
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pemindahan tugas PNS	Jumlah ASN yang dimutasikan	Orang	350	392	112%	1. Dengan berlakunya Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi sehingga memperpanjang proses selesainya mutasi. 2. Belum tersedianya kebijakan/aturan internal Pemkab Kebumen yang mengatur mengenai mutasi PNS.	
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		**Program Pendidikan Kedinasan**	**Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis**	%	915	917	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah ASN yang mengikuti dan memahami materi diklat teknis	Orang	785	785	100%		
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Jumlah ASN yang dikirim ke lembaga-lembaga diklat untuk mengikuti diklat	Orang	130	132	102%		
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya**	Orang	31	30	97%		
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang memahami materi diklat prajabatan	Orang	0	0	0%	Proses perekrutan CPNS ditunda, sehingga pelaksanaan Latsar ditiadakan, anggaran direfocusing.	
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti dan memahami materi diklat kepemimpinan	Orang	26	26	100%		
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti dan memahami materi diklat fungsional	Orang	5	4	80%	Target tidak terpenuhi karena tingginya indeks biaya diklat auditor tingkat ahli, sehingga anggaran yang tersedia hanya cukup membiayai 4 orang	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pengiriman peserta ujian dinas,ujian PI serta terbitnya ijin belajar dan penggunaan gelar	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian PI, dan yang mendapatkan ijin belajar dan ijin penggunaan gelar	orang	400	335	84%	PNS yang akan menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi, ada yang tidak linear dengan pendidikan sebelumnya	
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		**Program pembinaan dan pengembangan aparatur**	Terfasilitasi-nya aparatur pemerintah sejak perekrutan, penempatan, pengembang-an karier sampai dengan penghargaan prestasi	Orang	100	68	68%		
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah SK jabatan fungsional yang diterbitkan	Dokumen	300	235	78%	1. Berkas usulan jabatan fungsional tidak lengkap 2. Rekomendasi dari instansi pembina belum ada	
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah Calon ASN yang diadakan	orang	550	525	95%	Adanya formasi yang tidak terisi atau diminati pelamar antara lain formasi dokter spesialis	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah PNS yang menerima SK kenaikan pangkat	Orang	1100	1432	130%	1. Masih adanya nota usul kenaikan pangkat yang tidak memenuhi syarat 2. Masih adanya berkas yang dinyatakan BTL (Berkas Tidak Lengkap) 3. Masih adanya keterlambatan usul kenaikan pangkat dari OPD/Instansi ke BKPPD	
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data SIMPEG yang dikelola	data	11,306	10574		Masih perlu penyempurnaan pada kebutuhan menu simpeg dan update data tepat waktu sehingga Aplikasi pendukung tidak mengalami hambatan,,Update data PNS tidak tepat waktu	
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah satya lencana karya satya (SLKS) yang diterbitkan	Orang	150	122	81,33	Banyak berkas SLKS yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Prosentase kasus yang ditangani	jumlah sidang	9 kali	10 kali	111%		
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah PNS tugas belajar yang menerima bantuan	orang	25	5	20%	Dalam masa pandemi, penerimaan mahasiswa baru tugas belajar dari pemberi beasiswa antara lain Kementerian Kesehatan, ditunda pelaksanaannya.	
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah ASN yang mendapatkan pengurusan JKK/JKM	orang	10	6	60	Proses JKK tergantung banyaknya usulan PNS yang mengalami kecelakaan/ tewas dari OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah			Jumlah ASN yang mendapatkan cuti	orang	300	242	80,67	Jenis cuti yang banyak yang daimbil oleh PNS adalah cuti tahunan/besar untuk melaksanakan Umroh serta cuti besar untuk menunaikan ibadah haji. Dikaenakan pandemi Covid - 19, maka ibadah umroh dan ibadah haji dibatalkan. Hal ini berimbas pada menurunnya pengajuan cuti PNS yang dimaksudkan untuk menunaikan ibadah umroh dan haji.	
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah			Jumlah ASN yang mendapatkan uji kesehatan	orang	10	9	90	Usulan uji kesehatan ditentukan oleh usulan dari OPD	
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah			Jumlah penyelenggaraan Rakor Faceprint/e-kinerja/e-presensi	kali	1	1	100		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah			Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi JKK/JKM	kali	1	0	-	Pandemi Covid-19 berakibat pembatasan kerumunan, pengumpulan massa. Sosialisasi JKK yang bersifat pengumpulan massa, didrop dalam annggaran perubahan sebagai upaya mengurangi poenyebaran Covid 19	
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Jumlah pejabat struktural yang ditata	Orang	400	105	26%	Rotasi/mutasi pejabat struktural tidak dapat dilaksanakan karena adanya aturan Pilkada yang melarang adanya rotasi/mutasi jabatan	
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen	Jumlah PNS yang mengambil sumpah/janji	orang	500	508	102%	Tidak ada permasalahan yang signifikan	
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pelaksanaan penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen	Jumlah PNS yang mendapatkan SK pensiun	Orang	632	673	106%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan data formasi dan DUK	Jumlah Buku Formasi dan DUK yang disusun	buku	2	2	100%	Penyusunan formasi melalui aplikasi E Formasi, dilakukan mengikuti dibukanya aplikasi tersbut	

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Fungsi Penunjang Kepegawaian dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 83% atau kategori Hasil Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Program yang tidak mencapai target yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dan Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program adalah karena :

a) Penyediaan gaji CPNS formasi 2019 tidak bisa direalisasikan anggarannya karena adanya pandemi Covid 19, maka pelaksanaan SKD dan SKB diundur sehingga sampai proses pengangkatan CPNS SPMT Januari 2021. Sedangkan penyediaan Gaji PPPK masih menunggu keputusan dari Mendagri.
b) Kegiatan pelantikan dan seleksi terbuka JPT Pratama belum dilaksanakan karena belum memperoleh ijin Kementrian Dalam Negeri.
c) Pelaksanaan Ujian PI yang semula direncanakan 2 kali, karena adanya Pandemi Covid 19 oleh Provinsi hanya diselenggarakan 1 kali, sehingga ada sisa anggaran untuk kegiatan fasilitasi tersebut.

Berikut dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan sebagai berikut :

c. Capaian Kinerja Urusan

Kinerja di urusan fungsi penunjang Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan ditunjukkan dengan indicator Capaian sebagai berikut :

Tabel 3.82
Perkembangan Indikator Kinerja
Fungsi Penunjang Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	CAPAIAN KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	
Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	92,51	94,80	86,23	90,95	96,52

Sumber : BKPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 maka realisasi Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang diampu BKPPD tahun 2020 mengalami penurunan dari 92,51% menjadi 90,95% karena dipengaruhi penurunan capaian 3 sub indikator yang meliputi komponen prosentase pejabat struktural yang mengikuti diklatpim ditambah prosentase pegawai yang tidak dijatuhi hukuman disiplin ditambah prosentase jumlah pejabat struktural. Atau tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 jumlah pejabat yang mendapatkan promosi jabatan masih banyak yang belum mengikuti diklat pim, sehingga terjadi ketimpangan pada presentase jumlah pejabat structural yang seharusnya sudah mengikuti diklat pim sesuai dengan jenjang eselonnya. Adapaun uraiannya sebagai berikut :

a) Capaian Prosentase Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengirim pejabat struktural eselon II, III dan IV untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan ke lembaga diklat sebanyak 492 orang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 24 orang, Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 115 orang dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 353 orang. Untuk tahun 2020 Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan baik tingkat II, III maupun IV sesuai jenjang jabatannya sebanyak 479 orang dari total Jumlah Pejabat struktural yang ada sebanyak 724 orang atau masih ada 245 pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan, sehingga diperoleh prosentase capaian sebesar 77,43%. Kabupaten Kebumen belum dapat mengirimkan pejabat struktural untuk mengikuti Diklatpim secara keseluruhan mengingat anggaran yang tersedia dan kuota diklat di lembaga penyelenggara diklat yang terbatas.

b) prosentase pegawai yang tidak dijatuhi hukum disiplin

Prosentase pegawai yang tidak dijatuhi hukuman disiplin" memperoleh capaian sebesar 100,050% atau melebihi target yang ditentukan dari target sebesar 99,80% dan dapat terealisasi 99,85%. Dari jumlah PNS Kabupaten Kebumen kondisi 31 Desember 2020 sebanyak 10.574 orang yang dijatuhi hukuman disiplin hanya sebanyak 15 orang. Ini menandakan bahwa kedisiplinan aparatur di Kabupaten Kebumen relatif baik melalui upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin dengan cara inspeksi mendadak (sidak) ke OPD dan tempat umum pada jam kerja.

Disamping itu juga BKPPD melaksanakan sosialisasi peraturan yang menyangkut disiplin pegawai kepada OPD secara berkala setiap tahun.

c) Prosentase jumlah pejabat struktural

Prosentase jumlah pejabat struktural" memperoleh capaian sebesar 93,48% yang diperoleh dari target sebesar 99,16% dapat terealisasi sebesar 92,70%. Perhitungan ini diperoleh dari jumlah pejabat yang ada sebanyak 724 pejabat dari 781 kotak jabatan struktural yang tersedia sehingga masih ada kotak jabatan struktural sebanyak 57 yang belum dapat diisi.

4. Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sesuai dengan target Perjanjian Kinerja

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui dua program prioritas yaitu Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan indikator capaian adalah Persentase LAKIP yang nilainya meningkat; Persentase SKPD yang tidak ada temuan penyim-pangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK; Tingkat Maturitas SPIP pada Level 3; Nilai Leveling APIP Kabupaten. Program lainnya adalah Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan fungsi pengawasan adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.83
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat		**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	Persentase LAKIP yang nilainya meningkat; Persentase SKPD yang tidak ada temuan penyim-pangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK; Tingkat Maturitas SPIP pada Level 3; Nilai Leveling APIP Kabupaten	%	24	24	100%		
	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah pemeriksaan reguler sesuai PKPT	Obrik	80	80	100%		
	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus yang tertangani	Kasus	25	23	100%		
	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah OPD /Sekolahan/Desa yang dimonitoring	0PD	36	36	100%		
	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah kasus dan pungutan liar yang ditangani	Kasus	48	46	98%		
	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan	Obrik	80	80	100%		
	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah pelaksanaan Rakorwas,jumlah kerugian daerah yang tertangani dan jumlah OPD yang melaksanakan LHKPN	Kali	24	24	100%		
	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah	Kali	1	1	100%		
	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Evaluasi LAKIP Bupati	Jumlah OPD yang telah dievaluasi SAKIPNYA	OPD	28	28	100%		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Implementasi SPIP	Jumlah OPD yang disosialisasi SPIP	OPD	28	26	94%		
	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Review Laporan Keuangan	Jumlah SKPD yang di reviu	Lokasi	140	140	100%		
	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat		**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan	orang	35	33	94%		
	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0rang	35	33	91%		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Fungsi Penunjang Pengawasan dapat diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 97% atau kategori Hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Program yang tidak mencapai target yaitu Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program adalah karena dimasa pandemic Covid-19 pengiriman peserta diklat dilakukan secara daring/on line sehingga anggaran iuran Diklat tidak bisa digunakan secara penuh atau tidak bisa terserap 100%.

Adapun permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah adanya pandemi Covid 19 beberapa kegiatan dilakukan secara daring/Zoom Meting/on line disamping itu juga adanya evisiensi anggaran terutama pada Program Pelayanan Administrasi Umum pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hanya terserap 92,97%. dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor pada Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor hanya terserap 89,30%, hal ini karena adanya pembangunan Gedung baru. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara mengirimkan peserta untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Tehnis yang volumenya lebih.

c. Capaian Kinerja Urusan

Capaian kinerja urusan fungsi pengawasan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.84
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan
Kabupaten Kebumen 2019-2020

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
a. Persentase LAKIP yang nilainya meningkat	%	17,33	14	14,29	102,07	14
b. Persentase Perangkat Daerah yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK	%	96,18	95	99,43	104,66	95
c. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	%	94,26	92	95,34	101,14	92

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2019	KINERJA 2020			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
tepat waktu						
d. Nilai Leveling APIP Kabupaten	Nilai	3	3	2,5	75%	3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kebumen 2020

Indikator Meningkatnya Tingkat Leveling APIP Kabupaten dengan target Nilai 3 Realisasi Nilai 2,5 , sehingga antara Target dan realisasi tercapai 75 %. Indikator Meningkatnya nilai leveling APIP Kabupaten dengan target nilai 3 dengan tujuan untuk mengetahui Tingkat Leveling APIP Kabupaten dengan target 3 dan realisasi 2,5, bahwa nilai Leveling APIP Kabupaten yang dinilai oleh BPKP Perwakilan Jogja sesuai dengan target . Nilai APIP tertinggi adalah 5. tingkat leveling apip untuk mengetahui kualitas apip yang terdiri dari 6 elemen meliputi :

1. Peran dan Layanan
2. Manajemen SDM
3. Praktek Profesional
4. Akuntabilitas dan manajemen kinerja
5. Budaya dan hubungan organisasi
6. Struktur tata Kelola

Dari 6 (enam) Elemen tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Kebumen mendapatkan nilai sebagai berikut :

1. Peran dan Layanan dengan nilai 2
2. Manajemen SDM dengan nilai 2
3. Praktek Profesional dengan nilai 2
4. Akuntabilitas dan manajemen kinerja dengan nilai 3
5. Budaya dan hubungan organisasi dengan nilai 3
6. Struktur tata Kelola dengan nilai 3

5. Pelaksanaan Fungsi Lainnya

a. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan fungsi lainnya sebagai berikut :

Tabel 3.85
Capaian Program Dan Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Lainnya Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fungsi Lainnya	Sekretariat Daerah									
	Fungsi Lainnya	**Bagian Pemerintahan**		**Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Cakupan lahan Bersertifikat**	**%**	**20**	**26**	**94**		
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah usulan dokumen Pensertifikatan Tanah Aset Pemkab Kebumen	bidang	240	300	974		
	Fungsi Lainnya	**Bagian Pemerintahan**		**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**%**	**25**	**25**	**100%**		
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Otonomi Daerah dan Kerjasama	Jumlah Rakor Urusan Subbag Otda Kerjasama	Kali	12	12	100%		
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Hari Jadi Kab. Kebumen	kali	1	1	100%		
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan			Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah	dok	5	5	100%		
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan			Jumlah Dok Lap. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Otda dan Kerjasama	dok	1	1	100%		
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pemerintahan	Jumlah Rakor Urusan subbag Pemerintahan						
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan			Jumlah fasilitasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020	Keg	1	1	100%		

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan			Jumlah Dokumen Laporan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020	dok	1	1	100%		
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan			Jumlah Dokumen Inventarisasi Data Rupabumi di Kabupaten Kebumen	dok	1	1	100%		
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan			Jumlah Dokumen Laporan Capaian SPM	dok	1	1	100%		
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perangkat Wilayah	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan PATEN bagi petugas di kecamatan	Keg	1	1	100%		
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan			Jumlah Kegiatan monitoring evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat di kecamatan	keg	26	26	100%		
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan			Jumlah dokumen hasil pilar batas daerah	DOK	1	1	100%		
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan			Jumlah rapat koordinasi perangkat wilayah	Keg	1	1	100%		
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Nilai EKPPD	Nilai	3	3	100%		
	Fungsi Lainnya	Bagian Pemerintahan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Kinerja LPPD dan LKPJ	Nilai	3	3	100%		
	Fungsi Lainnya	**Bagian Hukum**		**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	**Ditetapkannya Perda/Raperda; Terwujudnya harmonisasi dan singkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan**	**dokumen**	**10**	**14**	**140%**	**perda sebelumnya adalah luncuran dari tahun sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 2020**	

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					penyelenggara Pemerintah Daerah						
		Bagian Hukum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah perkara/kasus yang ditangani	perkara	4	6	150%		
		Bagian Hukum			Jumlah Bantuan Hukum masyarakat miskin yang tertangani	perkara	8	0	0%	Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Miskin yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan belum ditetapkan, masih dalam tahap pembahasan di DPRD	koordinasi dengan DPRD dmengenai pembahasan Raperda dan rencananya ditetapkan tahun 2021
		Bagian Hukum		Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Perda yang terharmonisasi	perda	10	14	140%		
		Bagian Hukum			Jumlah Perbup yang terharmonisasi	perbup	30	102	340%		
		Bagian Hukum			Jumlah Keputusan Bupati yang terharmonisasi	sk	500	499	99,80%		
		Bagian Hukum			Jumlah Perjanjian yang terharmonisasi	perjanjian	30	15	50%		
		Bagian Hukum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Desa yang mengikuti Penyuluhan Hukum terpadu.	desa	0	0	0%	karena adanya pandemi covid19	

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Bagian Hukum			Jumlah kecamatan yang mengikuti Penyuluhan Hukum Tipikor	kecamtan	10	10	100%		
		Bagian Hukum			Jumlah orang yang mengikuti Sosislisasi HAM	orang	150	150	100%		
		Bagian Hukum			Jumlah kegiatan Lomba Kadarkum	1 paket	0	0	0%	karena adanya pandemi covid19	
		Bagian Hukum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	Jumlah Kajian produk hukum Daerah	perda/perbup	3	5	166%		
		Bagian Hukum			Jumlah dokumen Kajian produk hukum Pemerintah Desa yang tersusun	perdes	20	20	100%		
		Bagian Hukum		Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Jumlah paket jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terkelola	paket	1	1	100%		
		Bagian Hukum			Jumlah kali pertemuan berkala JDIH di Pusat	kali	0	0	0%	karena adanya pandemi covid19	
		Bagian Hukum			Jumlah buku lembaran lepas yang tersusun	buku	30	30	100%		
		Bagian Hukum			Jumlah buku Himpunan Lembaran Daerah dan Berita daerah yang tersusun	buku	0	0	0%	karena adnya pandemi covid19	
		Bagian Hukum			Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah	orang	150	150	100%		
		Bagian Pembangunan		**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Terlaksana-nya kegiatan pengendalian pembangunan di kabupaten pada seluruh SKPD**	**bulan**	**12**	**12**	**100%**		

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Bagian Pembangunan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Infrastruktur Daerah	Jumlah penyelenggaraan Rakor Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang	kali	4	10	250%		
		Bagian Pembangunan			Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pengendalian Pembangunan Fisik Kontruksi/Infrastruktur	bulan	12	10	83,33%		
		Bagian Pembangunan			Jumlah Dokumen SK Bupati Bantuan Semen kepada Desa/Kelurahan yang tersusun	dokumen	1	1	100%		
		Bagian Pembangunan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah penyelenggaraan Rakor Urusan Perencanaan, Penelitian/ Pengembangan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan (DAU dan Banprov)	kali	1	1	100%		
		Bagian Pembangunan			Jumlah Dokumen Juklak pengendalian APBD yang tersusun	dokumen	1	0	0%	Draft masih dalam koordinasi	Melakukan Koordinasi
		Bagian Pembangunan			Jumlah Pelaksanaan Rakorpop Kabupaten/ Rapat Dinas	kali	4	4	100%		
		Bagian Pembangunan			Jumlah Pelaksanaan Rakorpop Setda	kali	4	4	100%		
		Bagian Pembangunan			Jumlah dokumen SK Bupati Peringkat Perangkat Daerah Terbaik	dokumen	1	1	100%		
		Bagian Pembangunan			Jumlah Dokumen Laporan SIMPEL dan TEPRA yang tersusun	dokumen	12	12	100%		

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Fungsi Lainnya	**Bagian Perekonomian**		**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**%**	**100**	**100**	**100%**	**tingkat capaian 100% dari target yang telah disesuaikan di Perubahan**	
		Bagian Perekonomian		Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Jumlah penyelenggaraan rakor urusan Perindagkop UKM	kali	6	6	100%		
		Bagian Perekonomian			Jumlah penyelenggaraan rakor ekuinda, TPAKD, TPID;	kali	4	0	0%	di Perubahan dihilangkan karena *refocusing* anggaran untuk penanggulangan penyebaran COVID-19	Melaksanakan kegiatan secara daring
		Bagian Perekonomian			Jumlah dokumen laporan KUR, TPID, TPAKD yang tersusun	dokumen	3	1	33%	di Perubahan target disesuaikan menjadi 1 dokumen yang berisi KUR, TPID dan juga TPAKD oleh PPTK agar lebih ringkas	
		Bagian Perekonomian			Jumlah penyelenggaraan sosialisasi urusan Perindagkop UKM	kali	4	2	50%	di Perubahan disesuaikan menjadi 2 kali karena dampak COVID-19 terkait *social distancing* dan juga *refocusing* anggaran untuk penanggulangan penyebaran COVID-19	

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Bagian Perekonomian		Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Sumber Daya Alam dan Tenaga Kerja	Jumlah penyelenggaraan rakor urusan sumber daya alam dan tenaga kerja, DBHCHT	kali	22	14	64%	di Perubahan target disesuaikan menjadi 14 karena *refocusing* anggaran untuk penanggulangan penyebaran COVID-19	
		Bagian Perekonomian			Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi energi, kartu tani dan DBHCHT	kali	3	1	33%	di Perubahan target disesuaikan menjadi 1 kali karena dampak COVID-19 terkait *social distancing* dan juga *refocusing* anggaran untuk penanggulangan penyebaran COVID-19	
		Bagian Perekonomian			Jumlah dokumen laporan realisasi HEA dan DBHCHT	dokumen	4	0	0%	di Perubahan dihilangkan oleh PPTK guna penyederhanaan Output Kegiatan	
		Bagian Perekonomian		Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah penyelenggaraan rakor pembinaan BUMD	kali	24	24	100%		
		Bagian Perekonomian			Jumlah dokumen laporan kegiatan pembinaan BUMD yang tersusun	dokumen	1	1	100%		

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Bagian Perekonomian			Jumlah dokumen studi kelayakan	dokumen	2	0	0%	untuk studi kelayakan tidak dilaksanakan karena *refocusing* anggaran untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 namun di anggaran perubahan diganti dengan kajian subsidi bunga bagi UMKM yang dirasa lebih tepat dan sangat diperlukan ditengah pandemi ini bagi UMKM di Kabupaten Kebumen	
		Bagian Kesejahteraan Rakyat		**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Terlaksana-nya kegiatan pengendalian pembangunan di kabupaten pada seluruh SKPD**	**%**	**100**	**92**	**92%**		
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa / Kelurahan dan Modin, Rakor Pengendalian Penduduk dan KB	kali	6	4	67%		
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Kemasyarakatan	Jumlah Sosialisasi Pencairan dan Pembuatan SPJ Hibah dan Bantuan Keuangan, Terlaksananya Monitoring lokasi Hibah dan Bantuan Keuangan , Terfasilitasinya kegiatan Subbag Kemasyarakatan	%	100	93	93%		

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi pengembangan UKS Kabupaten, Monitoring, Evaluasi dan Penerimaan KKN, Fasilitasi Pertandingan Olahraga ASN	%	100	97	97%		
		Bagian Organisasi		**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Tersedianya pedoman standar kompetensi pegawai**	**%**	**100**	**100**	**100**		
		Bagian Organisasi		Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi	Dok	2	2	100%		
		Bagian Organisasi			Jumlah Dokumen roadmap RB 2021-2026	Dok	1	1	100%	Dokumen Roadmap disusun bersamaan penyusunan RPJMD	
		Bagian Organisasi		**Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	**Kelengkapan peraturan tentang ketatalaksanaaan, pelayan-an publik dan kinerja SKPD**	**%**	**90**	**90**	**100%**		
		Bagian Organisasi		Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggara Pelayanan Publik yang tersusun	dok	1	1	100%		
		Bagian Organisasi			Jumlah Unit Kinerja Pelayanan Publik yang dievaluasi	UPP	26	25	104%		
		Bagian Organisasi			Jumlah Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)	kali	1	1	100%		
		Bagian Organisasi			Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP)	dok	1	1	100%		
		Bagian Organisasi			Jumlah Peserta BIntek Pelayanan Publik	org	70	-		Rasionalisasi Covid	
		Bagian Organisasi			Jumlah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten	kali	1	1	100%		
		Bagian Organisasi			Jumlah inovasi yang difasilitasi	kali	2	2	100%		

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Bagian Organisasi			Jumlah dokumen Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penataan Sarana dan Prasarana Kantor	Perbup	1	1	100%		
		Bagian Organisasi			Jumlah SOP yang di Evaluasi/ Review	OPD	10	10	100%		
		Bagian Organisasi			Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	dok	1	1	100%		
		Bagian Organisasi			Jumlah Unit Pelayanan Publik Yang Di Evaluasi	UPP	25	26	104%		
	Fungsi Lainnya	**Bagian Humas**		**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	**Tercukupinya kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**		
		Bagian Humas		Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pelayanan Keprotokolan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	kali	3240	3240	100%		
		Bagian Humas			Jumlah kegiatan Pelayanan Keprotokolan Penerimaan Tamu tamu Dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	acara	30	30	100%		
		Bagian Humas		**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Terlaksana-nya kegiatan pengendalian pembangunan di kabupaten pada seluruh SKPD**	**%**	**100**	**100**	**100**		
		Bagian Humas		Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Hubungan Masyarakat dan Protokol	Jumlah penyelenggaraan Pelatihan Kehumasan dan Keprotokolan	-	-	-	100%	Ditiadakan karena pandemi (rasionalisasi)	Anggaran masuk penanganan Covid-19
		Bagian Humas			Jumlah pelaksanaan Jumpa Pers	kali	12	12	100%	Kegiatan bersifat tematik	Menyesuaikan tema dan perkembangan
		Bagian Humas			Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Pers Nasional	kali	1	1	100%	kerjasama dengan insan media	Koordinasi

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Fungsi Lainnya	**Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa**		**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Terlaksananya kegiatan pengendalian pembangunan di kabupaten pada seluruh SKPD**	**%**	**100**	**100**	**100**	**-**	**-**
		Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa		Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa, Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kebumen	Paket	149	199	133.56%	Aanggaran yang tersedia tidak mencukupi operasional karena adanya realokasi atau refocusing anggaran	Perlunya koordinasi dan perencanaan anggaran yang lebih optimal
		Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa		Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi/Koordinasi proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik	jenis	4	4	100%	Kurangnya personil sebanyak 6 orang PNS guna mendukung kelembagaan LPSE setelah bergabung dengan Bagian PBJ sehingga layanan pengadaan secara elektronik dapat berjalan dengan baik dan optimal	Koordinasi dengan BAPPEDA guna kecukupan anggaran untuk merekrut THL dan koordinasi dengan BKPPD agar kekurangan formasi di LPSE dapat terpenuhi
		Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa		Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	orang	110	110	100%	Rasionalisasi Anggaran akibat pandemi covid19 sehingga adanya penyesuaian target	Pengangggaran kembali tahun anggaran tahun berikutnya untuk memenuhi target yang disesuaikan karena covid19
		Satuan Polisi Pamong Praja		**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	**Terwujudnya Harmonisasi dan sinkroni-sasi Rancang-an Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penye-lenggaraan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**100**	**100%**		

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Satuan Polisi Pamong Praja	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan binluhwas bagi masyarakat rawan melanggar Perda/Perkada		kali	24	24	100%	
		Sekretariat DPRD Kab. Kebumen		**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	**Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**bulan**	**12**	**12**	**100%**	**-**	
		Sekretariat DPRD Kab. Kebumen	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah Protokoler dan Fasilitasi Kegiatan Hearing/Dialog, Rapat dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah	-	-	-	-	-	
		Sekretariat DPRD Kab. Kebumen	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Rapat-rapat paripurna	Jumlah Rapat-rapat Paripurna	kali	57	65	114%	Lebih dari target karena ada Rapat Paripurna Penetapan Perubahan Bamus	
		Sekretariat DPRD Kab. Kebumen	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses DPRD	kali	3	3	100%	-	
		Sekretariat DPRD Kab. Kebumen	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Data dan Dokumen Pembanding Kajian Peraturan Daerah dan Masukan untuk Peningkatan Pimpinan dan Anggota DPRD	bulan	12	12	100%	-	
		Sekretariat DPRD Kab. Kebumen			Jumlah Data dan Dokumen Pimpinan	dokumen	54	54	100%	-	
		Sekretariat DPRD Kab. Kebumen			Jumlah Data dan Dokumen Komisi	dokumen	96	96	100%	-	
		Sekretariat DPRD Kab. Kebumen			Jumlah Data dan Dokumen Banggar, Bamus, BK, dan Badan Prolegda	dokumen	8	8	100%	-	

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Sekretariat DPRD Kab. Kebumen	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kebumen serta Bimtek Setwan	kali	4	4	100%	-	
		Sekretariat DPRD Kab. Kebumen			Jumlah Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kebumen (50 orang)	kali	4	4	100%	-	
		Sekretariat DPRD Kab. Kebumen			Jumlah Bimtek Setwan (23 orang)	-	-	-	-	-	
		Sekretariat DPRD Kab. Kebumen		**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	**Ditetapkan Perda /Raperda**	**buah**	**20**	**13**	**65%**	**Belum selesai dalam pembahasan Pansus**	
		Sekretariat DPRD Kab. Kebumen	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Proses Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen sesuai Program Pembentukan Perda	kali	20	13	65%	Belum selesai dalam pembahasan	
		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Tersedianya data rekonsiliasi pelaporan keuangan daerah**	**%**	**100**	**100**	**100%**		
		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pengendalian Kas Daerah	Jumlah bulan pengelolaan dana transfer APBD dan transfer daerah dengan capaian realisasi belanja	bln	12	12	100%		
		Kecamatan		**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani**	**bulan**	**12**	**12**	**100%**		

NO.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Bulan Penyelenggaraan PATEN	bulan	12	12	100%		

b. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan fungsi penunjang lainnya diketahui rata-rata capaian kinerjanya adalah 99,49% atau kategori sangat tinggi dimana Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Capaian Kinerja Urusan

Selama tahun 2019-2020 kinerja pelayanan publik Kabupaten Kebumen cenderung mengalami peningkatan. Secara umum gambaran pelayanan publik di Kabupaten Kebumen sampai tahun 2020 masuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik mencapai skor 81,97. Namun kinerja pelayanan publik masih perlu terus ditingkatkan hingga capaian di atas skor 90.

Indek pelayanan kecamatan dan kelurahan dan pendidikan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mendapatkan nilai B. Indek layanan pada pelayanan terpadu mengalami fluktuasi di tahun 2018 namun di tahun 2020 pelayanan kembali meningkat dengan pembukaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya peningkatan kemudahan perijinan pada akhir tahun 2019. Indek survay layanan kesehatan mengalami perbaikan dari tahun ketahun dengan capaian di tahun 2020 diasumsikan sebesar 82,92. Perkembangan capaian kinerja pelayanan publik di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019-2020 selengkapnya tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 3.86
Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Publik
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	2019	2020
1	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan (%)	B	B
2	Capaian peningkatan pelayanan kelurahan (%)	B	B
3	Indek survey layanan Pendidikan	B	B
4	Indek survey layanan terpadu	82,15	82,15
5	Indek Survey layanan Kesehatan	82,92	82,92
6	Nilai IKM Kebumen	80,61	81,97

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Kebumen, 2020

Upaya peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dapat ditempuh melalui beberapa hal antara lain dengan perbaikan mutu SDM, peningkatan saranna dan prasarana layanan termasuk memperhatikan pelayanan yang ramah anak atau bersifat inklusif, serta perbaikan prosedur pelayanan.

3.1.5. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Pada Bab sebelumnya telah disebutkan lima prioritas pembangunan daerah tahun 2020 yang merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Untuk mengukur ketercapaiannya maka telah dirumuskan 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Capaian IKU Daerah Tahun 2020 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.87
Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,04	13,34	102,3%	13,20	101,06%
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,16	7,54	105,31%	7,20	104,72%
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	61,47	66,6	108,43%	63,39	105,14%
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	24	23,5	97,92%	65,38	35,94%
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Tahun	72,97	73,40	100,58 %	73,01	100,53 %
		6. Angka Kematian Ibu	Rasio	75	76,73/ 100.000 KH	97,69%	68/ 100.000 KH	87,16%
		7. Angka Kematian Bayi	Rasio	10,75	6,9/ 1000 KH	135,81%	10,5	134,29%
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100%	100%	100%	100%
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagama-an	%	35,13	33,36%	94,96%	37,65%	88,61%
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hokum	Kasuprasarans	600	60 kasus	190%	500 kasus	188%
7.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbu-han ekonomi	%	1-3	-1,7	-170%	6	-28 %
		12. Pendapatan perkapita penduduk	Rp.000	13.890,0	22.878,99	165%	25.179,48	91%
		13. Rasio/ Indeks Gini	Rasio	0,22	0,21	104,55%	0,21	100%
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Kawasan	5	5 Unit	100%	6 Unit	83,33%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	1	-56,21	-56,21%	6	-93,7%
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	15-16	-70,82%	-443%	19,69	-360%
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	61,88	77,66	126%	62,88	125,52%
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	76,00	74,22	98%	77,5	96%
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	18-19	17,59	102,28%	15,45	86,15%
13.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	4-5	6,07%	78,6%	1,97%	-108,12
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	82,73	85,29	103,09%	83,87%	101,69%
15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	96	100%	104,17%	96%	104,17%
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B (3)	B (3,3226)	110,75%	B 3	110,75
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	B 61,85	103,08%	B 60	103,08%
		25. Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP atas LKPD 2019	100%	WTP	100%
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	80,00	79,2	98,75%	80%	98,75%
Rata-Rata						**71,46%**		**73,71%**

Sumber data : Data diolah Tahun 2020

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya melalui indikator kinerja utama tersebut. diketahui bahwa 14 (empat belas) indikator sasaran atau 58,85% pencapaiannya dengan kriteria **Sangat Baik**, 9 (sembilan) indikator sasaran atau 34,62% pencapaiannya dengan kriteria **Baik**, dan 3 (tiga) indikator sasaran atau 11,54% pencapaian dengan kriteria **Kurang Baik,** sehingga dapat disimpulkan rata-rata realisasi capaian kinerja 71,46% atau bermakna **Cukup Baik**. Jadi rata-rata capaian kinerja Kebupaten Kebumen pada tahun 2020 (71,46%) lebih rendah dari pada rata-rata capain kinerja pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019 (156,85) dan Tahun 2018 (136,69), faktor utama yang mempengaruhi kinerja tahun 2020 yang menurun adalah adanya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan pembatasan kegiatan dan refocusing anggaran untuk penanganan *Covid-19*.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata capaian kinerja Baik. Namun demikian, terdapat 9 (sembilan) indikator yang belum mencapai target yaitu :

1. Capaian prestasi pemuda dan olahraga
2. Angka Kematian Ibu
3. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan
4. Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan); dan
5. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN
6. Persentase peningkatan kunjungan wisata
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
8. Angka Pengangguran.
9. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

Berikut penjalasan ringkas ke 26 indikator tersebut.

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Pada sasaran ini pencapaian nilai sasaran sudah mencapai target yang ditetapkan tahun 2020 atau capaian kinerja 102,3% kategori Sangat Baik, dengan kondisi target Angka Harapan lama sekolah tahun 2020 adalah 13,04 tahun dan realisasi capaian 13,34 tahun. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi angka harapan lama sekolah tahun 2020 lebih tinggi yang

artinya sacara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,34 tahun atau setara dengan Diploma I.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS:2019). RLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Pada indikator sasaran ini pencapaian nilai rata-rata lama sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 105,31% atau bermakna Sangat Baik. Rata-rata Lama sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 7,54 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 7,17 tahun. Dibandingkan dengan realisai pada tahun 2019 ada peningkatan dari nilai Rata-rata Lama Sekolah.

Sedangkan apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator angka harapan sekolah telah mencapai 104,72%. Keberhasilan peningkatan Angka RLS adalah dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan Formal maupun Nonformal dimana akses pendidikan nonformal untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun keatas pada kegiatan belajar Paket A, Paket B dan Paket C.

Upaya yang perlu mendapat perhatian adalah layanan pendidikan NonFormal, karena diperlukan koordinasi lintas sektor lebih lanjut di tingkat Kabupaten terhadap target peningkatan IPM terutama untuk penduduk usia 15 tahun keatas yang masih banyak tingkat kelulusan pendidikannya baru di tingkat SMP, SMA/SMK bahkan sebagian baru lulus jenjang SD.

3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan

Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dengan rumus ((Prosentase APS (Angka Partisipasi Sekolah) + Prosentase Sekolah Terakreditasi A)/2)). Berdasarkan perhitungan rumus indikator Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dapat disimpulkan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2020 adalah 108,43%. Adapun realisasi Angka Partisipasi Sekolah dan Prosentase Sekolah terakreditasi sampai dengan 2020 sebagai tabel berikut berikut :

Tabel 3.88
Realisasi Angka Partisipasi Sekolah dan Sekolah Terakreditasi

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah	Sekolah Terakreditasi
2019	95,12%	30,20%
2020	95,88%*	37,42%

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

4. Capaian prestasi pemuda dan olah raga

Indikator ini dihitung dengan cara Capaian Prestasi Cabang Olahraga ditambah Capaian Keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional dibagi dua.

Tabel 3.89
Capaian Cabang Olahraga dan Keikutsertaan Pemuda
dalam Skala Regional dan Nasional

Tahun	Capaian Prestasi Cabang Olahraga		Capaian Keikutsertaan Pemuda dalam Skala Regional dan Nasional	
	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan kejuaraan	Jumlah cabang olahraga yang mewakili kabupaten	Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional	Jumlah rencana kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional
2019	35	19	1210	8
2020	0	0	188	4

Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2020

5. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun. Pada indikator sasaran angka harapan hidup dari target yang ditetapkan sebesar 72,97 dengan realisasi sebesar 73,40 atau capaian kinerja sebesar 100,58% dengan kriteria Sangat Baik. Sesuai rekomendasi DPRD pada LKPJ tahun 2019, berikut kami sampaikan data jumlah penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang berumur diatas angka harapan hidup.

Tabel 3.90
Data jumlah penduduk usia >75 tahun
Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN	
		L	P
1.	AYAH	928	875
2.	BUAYAN	866	931
3.	PURING	1.296	1.280
4.	PETANAHAN	1.104	1.179
5.	KLIRONG	1.392	1.485
6.	BULUSPESANTREN	1.073	1.096
7.	AMBAL	1.298	1.260
8.	MIRIT	973	1.004
9.	PREMBUN	525	672
10.	KUTOWINANGUN	823	891

11.	ALIAN	1.008	1.092
12.	KEBUMEN	1.752	2.131
13.	PEJAGOAN	818	843
14.	SRUWENG	1.172	1.282
15.	ADIMULYO	928	1.095
16.	KUWARASAN	801	896
17.	ROWOKELE	945	1.071
18.	SEMPOR	1.040	1.164
19.	GOMBONG	926	1.210
20.	KARANGANYAR	836	980
21.	KARANGGAYAM	1.039	905
22.	SADANG	327	276
23.	BONOROWO	507	473
24.	PADURESO	305	317
25.	PONCOWARNO	312	335
26.	KARANGSAMBUNG	748	758
Total		**23.742**	**25.501**

Sumber : DISDUKCAPIL Kabupaten Kebumen, 2020

6. Angka Kematian Ibu

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll di setiap 100.000 kelahiran hidup. Indikator sasaran angka kematian ibu dari target yang ditetapkan sebesar 75/100.000 KH dengan realisasi sebesar 76/100.000 KH.

Pada tahun 2020 Kabupaten Kebumen Angka Kematian Ibu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini salah satunya karena danya pandemi Covid berdampak pada penurunan kesehatan Ibu Hamil. Adapun dari jenis kematian Ibu di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020, meninggal dalam keadaan hamil 1 orang, keadaan bersalin 3 orang dan ibu nifas 11 orang. Sementara berdasarkan kelompok umur, kejadian kematian maternal terbanyak adalah pada usia 20-34 tahun sebesar 9 orang, kemudian pada kelompok umur $\geq$35 tahun sebanyak 4 orang dan pada kelompok umur $\leq$20 tahun sebanyak 2 orang. Dari total kematian Ibu (maternal) sebanyak 15 kasus terbanyak dikarenakan hipertensi pada kehamilan sebanyak 6 orang, karena perdarahan 5 orang dan karena penyebab lain 4 orang (2 orang karena terkonfirmasi Covid, 1 orang dengan penyakit jantung dan 1 orang karena Emboli air ketuban).

7. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Tahun 2020 Kabupaten Kebumen berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Angka Kematian Bayi tahun 2020 ditargetkan 10,75/1000 KH, terealisir 6,9/1.000 KH atau capaian kinerja 135,81% kategori Sangat Baik. Pada tahun 2020 Angka kematian bayi sebanyak 127 kasus tersebar pada 26 kecamatan. Data kasus kematian bayi yang terjadi tahun 2020 sebagaimana telah kami sampaikan pada analisis capaian program dan kegiatan urusan kesehatan diatas.

8. Angka Melek huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah

Indikator Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah merupakan perbandingan Jumlah Siswa Lulus Sekolah bisa membaca Al-quran (JSLB-Al) dengan Jumlah Siswa Lulus Sekolah beragama islam (JSLS-Is) dikalikan seratus persen. Adapun Rincian Jumlah siswa lulus sekolah bisa membaca Al Qur'an tingkat SD dan SMP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.91
Rincian Jumlah Siswa Lulus Sekolah Bisa Membaca Al Qur'an

Tingkat Pendidikan	2020	
	JSLB-Al	JSLS-Is
SD	21.337	21.337
SMP	19.929	19.929
Jumlah	41.266	41.266

Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Target yang ditetapkan atau capaian kinerja 100% dengan kriteria capaian kinerja Baik. Salah satu penilaian pada proses kelulusan untuk siswa/peserta didik yang beragama Islam adalah dapat membaca Al-Quran pada ujian sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa peserta yang beragama Islam pada Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang berhasil lulus juga sudah lulus tes membaca Al-Quran. Salah satu penilaian pada proses kelulusan untuk siswa/peserta didik yang beragama Islam adalah dapat membaca Al-Quran pada ujian sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa peserta yang beragama Islam pada Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang berhasil lulus juga sudah lulus tes membaca Al-Quran.

9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Indikator kinerja Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan diperoleh dari rumus perhitungan Capaian Penurunan (Rehabilitasi Kasus Narkoba tahun n+ Penemuan Kasus Baru HIV tahun n + Kasus Pertikaian Agama tahun n). Berikut rincian dari masing-masing indikator pendukung Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan :

Tabel 3.92
Rincian Indikator Pendukung Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Tahun	Rehabilitasi Kasus Narkoba [1)]	Penemuan Kasus Baru HIV [2)]	Kasus Pertikaian Agama [3)]
2019	1	184	0
2020	3	184	0

Sumber Data : [1).] Kantor Kesbangpol,
[2).] Dinas Kesehatan dan Bagian Kesra,
[3).] Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan diartikan bahwa kasus yang ditemukan dan ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerjanya. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan tahun 2020 dapat belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 94,96 % atau masuk pada kriteria capaian kinerja Baik. Terkait penemuan kasus baru HIV, dari 184 kasus yang ditemukan, 180 orang = tertular karena perilaku menyimpang(melanggar norma), sedangkan 4 orang = tertular karena proses persalinan dari ibu ke anak

10. Penurunan kasus pelanggaran hukum yang ditangani.

Indikator Kasus pelanggaran hukum diperoleh dari jumlah laporan masyarakat dan temuan petugas dalam menegakkan perda/ perkada yang telah dilakukan pembinaan. Adapun capaian kinerja kasus pelanggaran hukum tahun 2019 sebanyak 60 kasus. Rincian data kasus pelanggaran Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagaimana telah diuraikan diatas pada tabel data kasus pelanggaran peraturan daerah pada penjelasan capaian kinerja urusan ketentraman dan ketertiban. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya kasus pelanggaran hukum terhadap Peraturan Daerah pada wilayah Kabupaten Kebumen mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 terjadi 634 kasus pelanggaran peraturan daerah.

11. Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan)

Indikator ini ditargetkan sebesar 1-3% pada Tahun 2020, dengan realisasi kinerja sebesar -1,7% sehingga capaian -170% atau kriteria capaian Kurang. Pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, indikator ini

ditargetkan sebesar 1-3% pada Tahun 2020, dan terealisasi sebesar -1,7% sehingga tingkat capaiannya adalah -170%. Capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh dampak pandemic Covid-19, yang memberlakukan aturan pembatasan di semua sektor, termasuk sektor ekonomi. Pergerakan ekonomi yang terbatas menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa di tingkal lokal, regional serta nasional.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat kebijakan dengan *refocusing* anggaran Pemerintah Daerah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. Pemulihan ekonomi dilakukan dengan berbagai strategi antara lain bantuan bahan usaha untuk pelaku usaha mikro, bantuan subsidi Bungan, padat karya tunai dan peningkatan ketahanan pangan. Diharapkan program ini dapat membangkitkan perekonomian daerah yang mengalami keterpurukan, yang selanjutnya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

12. Pendapatan per Kapita Penduduk

Apabila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Capaian kinerja indikator pendapatan perkapita penduduk telah mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 165 % dengan kriteria capaian kinerja Sangat Baik.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Kebumen mencapai Rp 23.156.270,- pada Tahun 2019, diperkirakan menurun karena adanya pandemic covid-19 dengan target pada Tahun 2020 menjadi Rp.13.890.000,- dan realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp 22.878.990,-.

13. Rasio/Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Indikator kinerja ketigabelas yaitu Rasio/Indeks Gini pada tahun 2020 yang ditargetkan sebesar 0,22.

Rasio Gini di Kabupaten Kebumen menunjukan penurunan yang dapat diartikan bahwa ketimpangan yang ada semakin menurun dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, walau ketimpangan yang ada masih dalam cakupan yang dapat dianggap rendah, situasi ini masih tetap dapat ditindaklanjuti untuk semakin menurunkan Rasio Gini melalui program/kegiatan yang lebih berpihak pada masyarakat yang berpendapatan rendah,dimana berbagai macam program tersebut terimplementasi pada program dan rencana kerja tiap Perangkat Daerah.

Capaian kinerja indikator rasio/ indeks gini telah mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 104,5% dengan kriteria capaian kinerja Sangat Baik. Indeks Gini Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 mencapai 0,21 yang jauh lebih rendah dari tingkat ketimpangan di level nasional yang mencapai skor 0,39. Capaian ini juga sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan adanya Indeks Gini yang rendah, diharapkan bahwa upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan tidak berimbas kepada segelintir golongan, namun bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Meskipun tingkat ketimpangan kita lebih rendah dibandingkan nasional maupun provinsi, namun upaya-upaya pemerataan harus tetap dilakukan, minimal adalah untuk menjaga agar ketimpangan tidak semakin melebar. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target melalui berbagai program pembangunan yang menyasar penduduk berpendapatan rendah. Dalam pelaksanaan program-program tersebut, tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh peran dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam penerapannya diperlukan adanya sinergitas baik di internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Kurangnya sinergitas ini yang seringkali menjadi kendala yang dapat mengurangi keefektifan program. Bila kendala ini dapat ditangani, maka diharapkan target yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD akan dapat dicapai.

14. Terbangunnya Kawasan Pembangunan Ekonomi

Rumus pencapaian Indikator Sasaran ini adalah Jumlah Kawasan Industri yang terbangun + Jumlah Kawasan Perdesaan yang Terbentuk. Target dari Indikator terbangunnya kawasan industri merupakan target yang menunjukkan progress, karena pada tahun 2020 sudah terbangun 5 (lima) kawasan pedesaan sehingga capaian Kinerja 100% atau kriteria capaian Baik. Kawasan perdesaan dibentuk sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan Keputusan Bupati Kebumen nomor : 410/178/KEP/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen berbasis potensi sumberdaya wilayah, antara lain kawasan desa wisata, kawasan anyaman pandan, kawasan gula semut, kawasan batik dan kawasan peternakan sapi terpadu (5 kawasan). Tujuan pembentukan kawasan perdesaan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan, dengan target pada periode akhir RPJMD 2016-2021 sebanyak 6 kawasan (5 kawasan pedesaan, 1 Kawasan Industri) yaitu :

a. Kawasan pantai pesisir, terdiri dari Desa Karangbolong Kecamatan Buayan, Desa Pasir, Srati, Karangduwur, Argopeni, Ayah, Candirenggo Kecamatan Ayah;
b. Kawasan anyaman pandan, terdiri dari Desa Grenggeng, Wonorejo, Pohkumban Kecamatan Karanganyar, Desa Karanggayam, Penimbun, Kecamatan Karanggayam;
c. Kawasan batik, terdiri dari Desa Jemur Kecamatan Pejagoan dan Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen;
d. Kawasan peternakan sapi terpadu, terdiri dari Desa Tanggulangin dan Jogosimo Kecamatan Klirong; dan
e. Kawasan gula semut, terdiri dari Desa Jladri, Wonodadi, Rangkah, Geblug, Pakuran Kecamatan Buayan.

Tetapi adanya rasionalisasi anggaran APBD Kabupaten Kebumen sebagai salah satu dampak adanya wabah COVID 19, anggaran untuk kawasan perdesaan ikut dirasionalisasi. Dari sisa anggaran setelah dirasionalisasi tersebut hanya kegiatan operasional pendampingan bantuan keuangan untuk desa penyangga kawasan, sedangkan kegiatan yang lainnya tidak dapat dilaksanakan.

Tahun 2015 merupakan tahap awal perencanaan pembangunan Kawasan Industri berupa rapat rapat koordinasi dengan OPD terkait, ditindak lanjuti Pada Tahun 2016 tercapai 20% yaitu Pembuatan Rencana Induk, Studi Kelayakan, pembentukan Surat Keputusan penetapan lokasi Kawasan Industri, Tahun 2017 tercapai 20% untuk Konsultasi, Penyusunan BED (Basic Engineering Design,

Tahun 2018 tercapai 20% Koordinasi dan konsultasi ke Pemprov Jateng, Kemenperin, Kemendagri, Bappenas dan BKPM, pendataan lahan milik masyarakat. Tahun 2019 tercapai 20% untuk kegiatan Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Industri bersama Disperindag Prov. Jateng, Pengusulan Hak Pengelolaan (HPL) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tahun 2020 capaian 20% dengan melakukan Penilaian Aset, Lelang Pengelola Kawasan Industri dan Kontrak Kerjasama dengan Pihak Pengelola Kawasan Industri

15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN.

Indikator sasaran ini diukur dengan membandingkan Nilai atau Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n - Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n-1 dengan Jumlah realisasi investasi (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun n-1 dikalikan 100%.

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 telah ditetapkan bahwa target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase peningkatan investasi PMA/PMDN adalah naik sebesar 1% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp. 887.522.601.767,-. Dari angka realisasi Tahun 2020 mencapai Rp. 388.644.285.520 atau dengan kata lain memperlihatkan realisasi -56,21% atau capaian kinerja -56,21% dengan kriteria capaian kinerja Kurang. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi kinerja pada tahun 2020 lebih rendah. Adapun kurang tercapainya target Investasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020 disebabkan oleh:

1. Dampak kondisi pandemi Covid-19;
2. Adanya refocusing anggaran;
3. Menurunnya kepeminatan investasi di Kabupaten Kebumen;
4. Tidak terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

16. Meningkatnya kunjungan wisatawan.

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan kunjungan wisata. Adapun rumus perhitungannya adalah Jumlah kunjungan Wisatawan tahun n - Jumlah kunjangan wisatawan tahun (n-1) dibagi Jumlah kunjungan tahun (n-1) x 100. Jumlah kunjungan diambil dari obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah dan yang bukan dikelola Pemerintah Daerah (swasta/desa-desa wisata). Hal ini dikarenakan dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan secara fluktuatif per tahunnya, mulai tahun 2016 Pemerintah Daerah telah melakukan intervensi terhadap pengelolaan obyek

wisata yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah. Wujud intervensi tersebut dengan melakukan pembinaan manajemen pengelolaan kepada kelompok sadar wisata/stakeholder pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga berusaha membantu masyarakat membangun wisata mandiri yakni dalam bentuk pembinaan dan pengembangan obyek wisata rintisan yang akan dibangun oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha menciptakan *multiplier effect* dari usaha pariwisata yang dibangun masyarakat dengan tujuan agar pengunjung datang kembali ke Kabupaten Kebumen sehubungan banyaknya obyek wisata pilihan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi Persentase peningkatan kunjungan wisata tahun 2020 lebih rendah hal ini dikarenakan adanya pendemi *virus covid-19* sehingga Pemerintah Daerah menutup kegiatan atau aktifitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa diantaranya penutupan obyek wisata. Sedangkan apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator Persentase peningkatan kunjungan wisata menjadi -443%. Solusi atau upaya untuk mencapai target adalah untuk tahun 2020 masih mengikuti aturan Pemerintah terkait dengan upaya pencegahan Covid19. Capaian kinerja Presentase peningkatan kunjungan wisata sebesar -443% atau kriteria capaian kinerja Kurang. Berikut rincian dari jumlah kunjungan wisata milik Pemerintah Kabupaten Kebumen dan non Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Tabel 3.93
Kunjungan Obyek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen
dan Non Pemkab Kebumen Realisasi Pengunjung Tahun 2019 – 2020

NO	OBYEK WISATA	TAHUN	
		2019	2020
MILIK PEMDA (A)		**947.260**	**358.859**
1	Goa Jatijajar	344.736	98.291
2	Pantai Logending	87.087	34.543
3	Goa Petruk	6.994	2.588
4	Pantai Karangbolong	31.279	17.864
5	Pantai Petanahan	128.623	58.245
6	Waduk Sempor	35.926	22.136
7	PAP. K R A K A L	85.987	28.449
8	Waduk Wadaslintang	32.850	10.473
9	Pantai Suwuk	193.778	86.270
NON PEMDA (B)		**1.980.184**	**495.456**
1	Balai Informasi Dan Konservasi Kebumian Karangsambung	17.160	2.414
2	Benteng Van Der Wijck	38.310	10.896
3	Wisata Alam Jembangan - Poncowarno	36.364	-
4	P. Menganti - Ayah	437.840	286.210
5	Bukit Hud - Buayan	10.775	-
6	Pentulu Indah	32.325	17.259
7	Alian Butterfly Park	5.070	-

NO	OBYEK WISATA	TAHUN	
		2019	2020
8	Sawangan Adventure - Ayah	7.155	1.937
9	Pantai Pedalen - Ayah	-	-
10	Pantai Sawangan - Puring	-	-
11	Pantai Pecaron - Ayah	-	-
12	Brujul Adventure Park - Pejagoan	8.399	4.995
13	Wiskuno Maduretno	1.832	-
14	Pantai Laguna Lembupurwo	200.000	70.121
15	Taman Reptil	13.394	3.653
16	Pesona Kayangan Karanggayam	5545	430
17	Kebumen River tubing Desa Rahayu	1.250	4.209
18	Bulupitu Tunjung seto	2.557	-
19	Wiskuno Maduretno	1.602	-
20	Kampung Sapi (Sitiadi Puring)	7.200	-
21	Lampon Pasir	16.738	-
22	Patemon Pasir-Ayah	529	-
23	Watubale Pasir-Ayah	19.612	-
24	Surumanis Pasir-Ayah	16.643	9.799
25	Makam mbah Lancing Mirit	12625	-
26	Dewajati Jatijajar	4.014	5.538
27	wisata Alam Prabu Tirtomoyo	17.991	-
28	Gebangsari	1.564	-
29	Songging waterpatk Adimulyo	5.200	1.040
30	Taman Organik Adimulyo		-
31	Rumah Martatilaar Gombong	12.000	-
32	Sendal Explore	10.416	4.209
33	Taman Banyulangit	4.000	-
34	Selo Asri Seboro	592	-
35	Desa wisata Grenggeng	8.215	-
36	Goa Barat	387	-
37	Kampung Etnik	499.859	48.896
38	Wanalela forest- Argopeni Ayah	4.761	1.050
39	Wisata Edukasi Garam	4.000	-
40	Festifal Lukulo	15.150	7.500
41	Geo Bird Festival	1.000	-
42	Geo Roster Festival	400	-
43	Kebumen Night Carnival	7.000	-
44	Kebumen Expo 2019	80.000	-
45	Geo Fun Bike	3.000	-
46	KODE 4	5.000	-

NO	OBYEK WISATA	TAHUN	
		2019	2020
47	JEEP Wisata	5.376	-
48	Pantai BOCOR	250.000	-
49	Curug Sindaro	2.000	-
50	Pantai Suwuk Pintu Barat (Masyarakat)	145.334	-
51	Bukit Comal- Karanggayam	-	15.000
52	Plesir Pit-pitan	-	300
TOTAL (A+B)		**2.927.444**	**854.315**

Sumber : DISPORAWISATA Kabupaten Kebumen Tahun 2020

17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah.

Rumus perhitungan indikator Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 menggunakan penjumlah antar indikator pendukung yaitu (Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik) + (Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik) + (Rumah tangga pengguna air bersih) dibagi 3.

Dikarenakan Cakupan jaringan listrik rumah tangga menjadi Kewenangan Propinsi sehingga Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah dihitung dari Prosentase capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik , Prosentase capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik, prosentase capaian cakupan pelayanan air bersih dibagi tiga. Uraian dari masing-masing indikator pendukung sebagai berikut :

a. Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan di Kabupaten Kebumen yang baru adalah 960,358 kilometer sedangkan jalan dalam kondisi mantap tahun 2020 adalah sebesar 702,591 kilometer atau capaian sebesar *73,16 %.*

Tabel 3.94
Ketersediaan Jalan Sesuai Kondisi Di Kabupaten
Kebumen Tahun 2019-2020 (dalam kilometer)

Indikator Kinerja	Tahun	
	2019	2020
Kondisi Jalan		
a. Baik	525,233	365,191
b. Sedang	187,625	337,400
c. Rusak Ringan	121,138	124,364
d. Rusak Berat	126,362	133,403
Status Jalan		
a. Jalan Nasional	56,428	56,428
b. Jalan Provinsi	29,670	29,670
c. Jalan Kabupaten	960,358	960,358
d. Jalan Desa	-	-

Sumber : DPUPR Kab. Kebumen, 2020

b. Ketersediaan jaringan Irigasi

Pada Tahun Tahun 2020 jumlah luasan jaringan dalam kondisi baik sebesar 8.986,06 Ha, Sedangkan Total luasan jaringan irigasi sebesar 12.260 Ha, atau capaian kinerja sebesar *73,30 %.* Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya lebih *tinggi* namun capaian tersebut masih di bawah target yang direncanakan hal ini disebabkan oleh masih banyak saluran dan bendungan yang mengalami kerusakan.

c. Cakupan Air bersih yang digunakan oleh rumah tangga sejumlah 301.580 sambungan rumah dengan jumlah seluruh rumah tangga 454.165 rumah tangga atau capaian kinerja sebesar *86,53 %.* keberhasilan indikator ini didukung oleh ketersediaan sumber mata air dan pengelola (kelompok pengelola SPAM), apabila sumber mata air banyak dan pengelolaan yang baik berkelanjutan maka bangunan akan berfungsi dengan baik, sehingga air bersih dapat tersalurkan ke masyarakat.

18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Capaian realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari target IKLH yang ditetapkan Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebesar 76, realisasi mencapai 74,22 dengan prosentase capaian sebesar 98 % atau kategori capaian kinerja Baik. Adapun capaian IKLH tahun 2020 dengan menggunakan 3 variabel berdasarkan standar perhitungan IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut:

Tabel 3.95
IKLH Kementerian Lingkungan Hidup

Variabel	Indeks	X	Hasil
Indeks Kualitas Air	57,69	0,376	21,69
Indeks Kualitas Udara	90,75	0,405	36,75
Indek Tutupan Lahan	70,66	0,219	15,48
IKLH			73,92

Predikat IKLH*:*

• < 40 = waspada • 40-50 = sangat kurang baik • 50-60 = kurang baik • 60-70 = cukup baik • 70-80 = baik • > 80 = sangat baik

19. Angka Kemiskinan.

Angka Kemiskinan merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPS. Selama kurun 2019-2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen menurun. Secara umum, pencapaian angka kemiskinan tahun 2019 sudah mampu mencapai target RPJMD Kabupaten Kebumen, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 15,45% membutuhkan dukungan dan komitmen dari

seluruh stakeholders melalui sinergitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Dibandingkan dengan nasional dan provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Untuk wilayah Jawa Tengah, persentase penduduk miskin turun dari 13,58% pada tahun 2019 menjadi 11,41% pada tahun 2020. Sedangkan ditingkat nasional persentase penduduk miskin turun dari 9,41% pada tahun 2019 menjadi 9,78% pada tahun 2020. Angka kemiskinan naik baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional hal ini dikarenakan dampak adanya pandemi covid-19. Adapun prioritas untuk mencapai sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui beberapa hal, sebagai berikut:

1. Mempertahankan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
2. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Pelestarian pengembangan kepekaan masyarakat terhadap permasalahan sosial;
4. Pemantapan kemampuan penanganan masalah sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka efisiensi distribusi pangan yang menjamin agar rumah tangga miskin dan rawan pangan dapat menjangkau kemandirian pangan; dan
6. Kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi seimbang, keamanan dan kehalalan pangan.
7. pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil, petani dan kegiatan ekonomi lainnya .

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, beberapa hal yang telah yang telah disusun sebagai upaya-upaya terobosan, antara lain :

1. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan PenanggulanganKemiskinan.
2. Adanya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Pendataan Penduduk Miskin beserta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun2015.
3. Pembentukan Kelembagaan TKPK (Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk melalui Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/412/KEP/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten

Kebumen yang telah dirubah sebanyak 3 (tiga) kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/249 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen. Keputusan tersebut telah diganti dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/123 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen;

20. Angka pengangguran.

Perhitungan angka pengangguran diperoleh dengan menggunakan rumus jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja (Penganggur terbuka) dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan 100% dalam satu tahun. Pada tahun 2020 angka pengangguran di Kabupaten Kebumen ditargetkan mencapai 4-5%, namun terealisasi 6,07% atau tidak mencapai target yang diharapkan dengan capaian kinerja 78,6% atau kategori Baik. Pada tahun 2020 data angkatan kerja dan angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja sebagai berikut:

Tabel 3.96
Angkatan Kerja

Tahun	Angkatan Kerja Yang Tidak Memperoleh Kesempatan Kerja	Angkatan Kerja	Pengangguran (%)
2019	32.357	586.034	5,52
2020	37.421	616.494	6,07

Sumber Data: BPS dan Dinas Tenaga Kerja dan KUKM Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Upaya/peran nyata Kabupaten Kebumen dalam menurunkan angka pengangguran pada tahun 2020 antara lain:

1. Mengurangi efek pengggangguran terbuka dengan mengadakan kegiatan padat karya yang memberikan pekerjaan sementara kepada penganggur;
2. Memberikan bantuan UMKM bagi yang terdampak covid 19, sehingga dapat bertahan di masa pandemic dan diharapkan dapat tumbuh dan menjadi umkm naik kelas membuka lapangan kerja;
3. Memfasilitasi pengantar kerja dalam dan luar negeri dimana kantong-kantong penerimaan tenaga kerja masih banyak yang diluar daerah dan luar negeri;
4. Memberikan pelatihan eks imigran sehingga memilki ketrampilan wirausaha baru, diharapkan dengan itu mereka dan berusaha dan membuka lapangan kerja dan tidak kembali menjadi pekerja imigran.

Permasalahan yang menjadi penyebab tidak berhasilnya capaian kinerja antara lain: rendahnya kualitas/kompetensi tenaga kerja; rendahnya Keterserapan tenaga Kerja, perusahaan masih belum sepenuhnya melaporkan

data ketenagakerjaan dan sistem kerja kontrak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi yang telah selesai kontrak dan kembali menjadi pengangguran.

21. Prosentase gedung sekolah dalam kondisi baik

Prosentase gedung sekolah dalam kondisi baik dihitung dari (Prosentase gedung Pendidikan Anak Usia Dini (dalam kondisi baik+Prosentase gedung Sekolah Dasar)/sederajat dalam kondisi baik+Prosentase gedung Sekolah Menengah Tingkat Pertama /sederajat dalam kondisi baik) dibagi tiga. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 ada peningkatan sebesar 2,75%. Berikut adalah jumlah gedung dalam kondisi baik dan jumlah total gedung PAUD/ SD/ SMP atau yang sederajat di Kabupaten Kebumen:

Tabel 3.97
Jumlah Gedung PAUD/ SD /SMP Kebumen

Tahun	Jumlah gedung PAUD/ sederajat kondisi baik	Total gedung PAUD/ sederajat	Jumlah gedung SD/ sederajat kondisi baik	Total gedung SD/ sederajat	Jumlah gedung SMP/ sederajat kondisi baik	Total gedung SMP/ sederajat
2019	574	692	719	885	177	204
2020	960	1140	752	876	184	207

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator Prosentase gedung sekolah dalam kondisi baik telah mencapai 101,69%. Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah mempersiapkan perencanaan dan data awal terhadap kebutuhan sarana prasarana sekolah dan kebutuhan kantor serta terhadap perencanaan proses pengadaan pada tahun berikutnya, sehingga target yang diharapkan pada akhir tahun RPJMD 2016-2021 dapat tercapai.

22. Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam kesehatan. Tahun 2020 target indikator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan sebesar 96% dan realisasi sebesar 100% atau capaian kinerja 104,71% dengan kriteria capaian kinerja Sangat Baik. Indikator ini dilihat dari Dilihat dari tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bahwa indikator semua puskesmas sudah tersedia obat minimal 40 item obat dan 5 item vaksin yang tersedia di Puskesmas, tingkat pelayanan kegawatdaruratan bahwa untuk semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen sudah mampu mengatasi pasien dengan gawat darurat, dan untuk tingkat mutu pelayanan kesehatan

bahwa semua Puskesmas sudah menerapkan sistem manajemen kesehatan karena dari total 35 Puskesmas sudah dilakukan penilaian akreditasi tingkat Nasional.

23. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

merupakan hasil penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun n-1, Realisasi kinerja berdasarkan formula Indikator Kinerja Kunci untuk Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Nilai EKPPD Target yang ingin dicapai adalah nilai B atau Tinggi. Nilai EKPPD disampaikan setelah penilaian oleh Tim Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 beserta ketentuan pelaksanaannya. Nilai EKPPD dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Status dan Kinerja Pemerintahan Daerah. Realisasi Nilai EKPPD tahun 2020 didasarkan pada Nilai EKPPD tahun 2018 sebagaimana Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 23 April 2020 dengan nilai 3,3226 atau tercapai dengan realisasi sebesar 110,75% atau dengan capian kinerja kategori Sangat Baik.

24. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen merupakan hasil penilaian Evaluasi dari Kemenpan dan RB. Dikarenakan sampai dengan laporan ini dibuat Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen belum keluar maka nilai masih berdasarkan nilai pada tahun 2019, dengan realisasi penilaian 61,85 yaitu capaian kinerja sebesar 103,08% dengan kategori Sangat Baik.

Adapun rekomendasi LHE SAKIP antara lain :

a. Melakukan reviu secara berkala atas Renstra Perangkat daerah terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja;
b. Melakukan integrasi aplikasi sim perencanaan, sim KUA PPAS, SIMDA Keuangan yang telah ada dengan aplikasi e-sakip sehingga tercipta sistem informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja;
c. Memanfaatkan cascading kinerja dalam menyusun perjanjian kinerja pada tingkat penanggungjawab program dan kegiatan serta melakukan casecading kinerja organisasi setiap perangkat daerah hingga pada level individu;
d. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;
e. Meningkatkan kualitas evaluasi atas implementasi AKIP dan kinerja yang

dilakukan oleh Inspektorat, BAP3DA dan Bagian Organisasi Setda Kebumen; dan

f. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam implementasi kinerja, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Solusi atas hasil rekomendasi LHE SAKIP adalah terhadap RPJMD sudah tidak bisa dilakukan perubahan sehingga difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target untuk didorong capaian kinerjanya, menyusun *Casecading* yang difasilitasi oleh BAP3DA sehingga semua Perangkat Daerah mempunyai dokumen *Casecading*, pelaksanaan Paparan Capaian IKU Bupati Kebumen Tahun 2019 dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019 oleh Kepala Perangkat Daerah dihadapan Bapak Bupati sehingga diharapkan dapat meningkatkan implementasi AKIP dan Kinerja, Inspektorat menginisiasi Pemberantasan Korupsi dengan mengajukan Perangkat Daerah (Bagian Pembangunan Setda, Inspektorat, BKPPD dan DPMPTSP) sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kemenpan RB serta Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal integrasi sistem perencanaan sampai dengan pelaporan masih pada tahap proses pembangunan sistem.

Nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Kebumen merupakan hasil kerja bersama antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten tersebut, secara khusus dilaksanakan melalui Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Penyerapan anggaran tidak sepenuhnya karena adanya efisiensi dengan menggunakan aplikasi tata naskah dinas elektronik (e-Letter) sehingga mengurangi biaya/belanja perjalanan, belanja perjalanan dinas tidak dilaksanakan dikarenakan berkurangnya intensitas undangan keluar daerah dan honor Narasumber tidak terealisasi secara maksimal karena merupakan sisa dari penyediaan dari yang kami rencanakan, karena narasumber yang hadir tidak sesuai dengan yang direncanakan. Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan Kendala Pelaksanaan Kegiatan yaitu Penyusunan LKjIP Bupati berdasarkan IKU Bupati yang menjadi tanggungjawab beberapa Perangkat Daerah dalam analisis capaian kinerja belum semua Perangkat Daerah mendiskripsikan dengan jelas usaha/upaya, kendala dan solusi dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Solusi perbaikan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yaitu update aplikasi e-sakip.kebumenkab.go.id sehingga diharapkan nanti semua dokumen SAKIP diupload oleh semua perangkat daerah dan dipublikasikan untuk umum.

25. Opini BPK atas LKPD

Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target kinerja yang ingin dicapai adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Untuk target tahun 2020 indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas LKPD 2019 terealisasi WTP yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD 2019 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Capaian kinerja indikator Opini BPK atas LKPD sebesar 100% dengan kriteria capaian kinerja Baik. Pemberian Opini WTP dari BPK RI menggambarkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah memenuhi:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
b. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara umum memadai
c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Sampai dengan saat laporan ini disusun, LKPD tahun 2020 masih dalam tahap pendahuluan proses audit oleh BPK.

26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

Rumus perhitungan indikator sasaran ini adalah Jumlah ASN ditambah Pegawai BUMD yang membayar Zakat Melalui BAZNAS dibagi Jumlah Total ASN ditambah total Pegawai BUMD dikali seratus persen. Secara rinci jumlah ASN ditambah Pegawai BUMD yang membayar Zakat Melalui BAZNAS sebagai berikut:

Tabel 3.98
Realisasi ASN dan Pegawai BUMD membayar Zakat

Tahun	Jumlah ASN + Pegawai BUMD yang membayar Zakat Melalui BAZNAS	Jumlah Total ASN + Pegawai BUMD
2019	8.299	11.855
2020	8.378	10.574

Sumber Data : Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2020

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan

ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta menghambat investasi.

Pada tahun 2020 jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan sebanyak 14 Peraturan Daerah, 105 Peraturan Bupati dan 504 Surat Keputusan Bupati. Berbicara mengenai peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 terdiri dari 2 (dua) jenis: a. peraturan gubernur; dan b. peraturan bupati/walikota. Masing-masing peraturan kepala daerah tersebut disusun oleh penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Peraturan gubernur disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berdasarkan kewenangan. Sehingga dalam penyusunannya salah satu dari unsur/syarat pembentukan peraturan gubernur tersebut harus terpenuhi.

Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Perda adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah memiliki kedudukan strategis, karena berlandaskan konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Selain sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Hal tersebut untuk menyelenggarakan kewenangan dalam mewujudkan otonomi yang dimiliki.

Peraturan Bupati (Perbup) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atas wewenangnya dalam daerah otonom terkait suatu hal demi kepentingan masyarakat dan secara tertulis. Kepala daerah menetapkan peraturan bupati berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Beikut ini data Perda dan Perbup yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2020 yang bersifat strategis :

Tabel 3.99
Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Daerah

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
PERATURAN DAERAH			
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah b. Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Melaksanakan amanat Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sebagai dasar hukum penarikan retribusi pelayanan pemakaman dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah
3	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah agar terselenggara dengan tertib, efisien dan akuntabilitas
4	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Untuk mewujudkan masyarakat yang maju, aman, sejahtera, sehat lahir dan batin di Kabupaten Kebumen dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui tata kehidupan yang teratur, tertib dan disiplin seluruh masyarakat
5	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor	Sebagai dasar pengelolaan kearsipan agar penyelenggaraan kearsipan terlaksana secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
6	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai upaya mencerdaskan bangsa, memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat
7	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan sebagai dasar perubahan bentuk hukum BUMD
8	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan tanpa diskriminasi, serta memberikan jaminan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga peran serta masyarakat
10	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	2020	Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai dasar penyesuaian perubahan anggaran dan kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan
11	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan sebagai dasar perubahan bentuk hukum BUMD
12	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan sebagai dasar perubahan bentuk hukum BUMD
13	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada BUMD Kabupaten Kebumen	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai dasar pelaksanaan penyertaan modal pada BUMD yang telah terbagi dalam 5 tahun beserta besarannya
14	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Aanggaran 2021	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah
PERATURAN BUPATI			
1	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kab. Kebumen T.A 2020	a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional c. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Sebagai dasar hukum pemberian besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2020
2	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Sosial Kesehatan kepada Pemerintah Desa Di Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2020	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta sebagai pedoman pelaksanaan ADD
3	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Di Kab. Kebuman	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah	Melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Tahun Anggaran 2020	beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta sebagai dasar pembagian besaran ADD yang diberikan ke Desa
4	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada RSUD Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,	Sebagai dasar hukum pemberian remunerasi pada RSUD Kabupaten Kebumen yaitu RSDS dan RSUD Prembun
5	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Sosial Sarana Prasarana Budidaya Ikan Bagi Rumah Tangga Miskin	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	Sebagai dasar pemberian belanja bantuan sosial kepada warga miskin untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan
6	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik	Sebagai dasar pembentukan Mal Pelayanan Publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah
7	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik	Melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik dan sebagai pedoman pelaksanaan survei kepuasan masyarakat bagi Perangkat Daerah yang melakukan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Kebumen		pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
8	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Lokasi usaha Pedagang Kaki Lima	Melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Lokasi usaha Pedagang Kaki Lima dan sebagai pedoman penataan Pedagang Kaki Lima dalam rangka menciptakan ketertiban, keindahan dan kenyamanan Daerah
9	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kebumen	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai	Dasar pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
10	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah c. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Dasar perubahan anggaran dan kegiatan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
11	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan sebagai pedoman bagi Desa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
12	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2020	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa	Sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Desa serta kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Dana Desa
13	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kebumen	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai	Sebagai dasar penyesuaian karena adanya perubahan ketentuan mengenai sasaran, pelaksanaan pengisian daftar hadir elektronik dan laporan capaian kinerja, serta penyesuaian besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
14	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Peralatan Pengolahan Kedelai Bagi Lanjut Usia Potensial di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pemberian Peralatan Pengolahan Kedelai bagi Lanjut Usia Potensial di Kabupaten Kebumen sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya kelompok usia lanjut yang masih bisa produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
15	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Peralatan	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan	untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pemberian Peralatan Pengolahan Ubi Kayu

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Pengolahan Ubi Kayu Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen	Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial guna mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen
16	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium,Harga Pengadaan Barang / jasa,Biaya Pemeliharaan Dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Hargas satuan Regional	Dasar penyesuaian adanya perubahan standar harga dan jenis barang sebagai salah satu item pelaksanaan kegiatan dan anggaran
17	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dasar perubahan anggaran dan kegiatan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
18	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kebumen	a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap b. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,	Sebagai dasar pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Kebumen melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sehingga terwujud kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel dalam rangka

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis	meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan
19	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan	Sebagai dasar perubahan pelaksanaan Jamkesda di Kabupaten Kebumen
20	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2016 tentang Belanja Tidak Terduga	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Sebagai dasar perubahan pelaksanaan Belanja Tak terduga antaralain penggunaannya untuk penanggulangan pandemi covid 19
21	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dasar perubahan anggaran dan kegiatan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
22	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6	Sebagai dasar pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam rangka peningkatan sarana prasarana olahraga di Desa

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Tahun 2014 tentang Desa	
23	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sanggar Kegiatan Belajar Di Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2020	Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020	Sebagai dasar pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sanggar Kegiatan Belajar
24	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sebagai dasar perubahan pelaksanaan pemberian insentif yang menjadi bagian dari tambahan penghasilan pegawai
25	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, SD, dan SMP	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama agar dapat berjalan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
26	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan	Sebagai dasar pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Program Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen, agar tercipta lingkungan yang bersih dan higienis

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	
27	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan	Sebagai dasar perubahan pelaksanaan Jamkesda di Kabupaten Kebumen
28	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	dasar pengaturan pelaksanaan tata kerja, tugas dan fungsi sekretariat daerah pada umumnya dan per bagian pada khususnya
29	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Kebumen		sebagai pedoman dalam rangka upaya pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Kebumen dalam rangka mengurangi penularan COVID-19 dan meningkatkan kepedulian serta kedisiplinan masyarakat
30	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dasar perubahan anggaran dan kegiatan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
31	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2020 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Kebumen TA 2020	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020	Sebagai pedoman bagi kelurahan dalam melaksanakan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
32	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada PNS yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan	Sebagai dasar pemberian THR kepada PNS
33	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2020	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020	Sebagai dasar perubahan prioritas penggunaan Dana Desa salah satunya adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai yang dialokasikan dari Dana Desa
34	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua	Sebagai dasar pelaksanaan Belanja bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pada Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen sebagia salah satu upaya penanganan, percepatan dan peningkatkan kualitas perumahan dan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	permukiman kumuh.
35	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen	a. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Sebagai dasar perubahan ketentuan mengenai pelaksanaan Belanja bantuan Sosial pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu
36	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Agar tercapainya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembayaran dalam pelaksanaan APBD
37	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik	sebagai pedoman penilaian dan pemberian Penghargaan bagi Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara untuk mempercepat peningkatan kualitas Pelayanan Publik di Daerah
38	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTDinas Kesehatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	dasar hukum dan pedoman dalam penerapan tarif yang berlaku pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen
39	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada UPTD Klinik	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum	dasar hukum dan pedoman dalam penerapan tarif yang berlaku pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Paru	Daerah	Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen
40	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan Perangkat Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi
41	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2020 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Kebumen TA 2020	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagimana telah diubah dengan	Sebagai dasar perubahan pelaksanaan DAU Tambahan Bnatuan Pendanaan Kelurahan
42	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
43	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Taman Pendidikan AlQuran	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Sebagai dasar perubahan pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Taman Pendidikan AlQuran
44	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Miskin Terdampar Corona	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan	Sebagai dasar pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Miskin Terdampar Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kabupaten

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Kebumen	Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	Kebumen yang diberikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kebumen yang terdampak secara ekonomi atau memiliki risiko sosial yang disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
45	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	Sebagia dasar perubahan pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen
46	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sebagi dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
47	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Sebagai dasar perubahan pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
48	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dasar perubahan anggaran dan kegiatan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
49	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTDinas Kesehatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Sebagai dasar perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTDinas Kesehatan terkait rapid test dan swab test
50	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada UPTD Klinik Paru	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Sebagai dasar perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan pada UPTD Klinik Paru rapid test dan swab test
51	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga
52	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Dinamis di Lingkungan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5	Sebagai pedoman bagi bagi pencipta arsip dalam rangka menentukan masa simpan arsip dan melakukan penyusutan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Pemerintah Kabupaten Kebumen	Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
53	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Sebagai pedoman standar harga satuan yang digunakan dalam kegiatan Perangkat Daerah tahun anggaran 2021
54	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Sebagai dasar perubahan atas kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah tahun anggaran 2020
55	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 55 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Sebagai dasar pembagian dan pelaksanaaan pengalokasian bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masayarakat desa
56	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dasar perubahan anggaran dan kegiatan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
57	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati	a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari	Sebagai dasar perubahan pelaksanaan Dana Desa khususnya dengan adanya perintah atau amanat

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa	penggunaan Dana Desa untuk BLT Covid19 serta perpanjangannya
58	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Dinas Kesehatan RSU Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	dasar perubahan kedudukan dan susunan organisasi RSU Kebumen menjadi UPTD Dinas Kesehatan serta pengaturan pelaksanaan tata kerja, tugas dan fungsi RSU Kebumen yang meliputi RSDS dan RSUD Prembun
59	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dasar perubahan standar biaya umum kegiatan, honorarium harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk Tahun Anggran 2020
60	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Korban Bencana Alam	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan	Dasar pemberian dan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial pada Korban Bencana Alam utamanya terkait kriteria penerima, besaran dan mekanisme penyaluran, agar berjalan tertib dan lancar

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	
61	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dasar perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah pada tahun 2021
62	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan dan menganggarkan belanja kegiatan agar terwujud perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
63	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Sosial Berupa Alat Kewirausahaan Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Sosial Berupa Alat Kewirausahaan Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kebumen sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan
64	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14	Sebagai pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa dalam rangka mewujudkan clean government dan transparansi informasi serta membangun kepercayaan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	publik terhadap kinerja Pemerintah Desa
65	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen yang berasal dari APBD	Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan	Sebagai dasar dan pedoman pemberian gaji ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen yang berasal dari APBD
66	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Dana Alokasi Khusus Pembangunan Infrastruktur Bidang Sanitasi di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	Sebagai dasar pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Dana Alokasi Khusus Pembangunan Infrastruktur Bidang Sanitasi di Kabupaten Kebumen untuk memperbaiki dan menyediakan infrastruktur sanitasi agar kesehatan masyarakat meningkat
67	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2020 tentang Belanja Batuan Sosial Masyarakat Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Subbidang Rumah Swadaya di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan	Sebagai dasar pelaksanaan Belanja Batuan Sosial Masyarakat Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Subbidang Rumah Swadaya di Kabupaten Kebumen agar berjalan tertib dan lancar

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	
68	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kabupaten Kebumen	a. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah	sebagai pedoman dalam rangka upaya pencegahan penularan COVID-19 di Daerah untuk mengurangi penularan COVID-19 dan meningkatkan kepedulian dan kedisiplinan masyarakat
69	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH dalam rangka menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah yang dikelola secara terpadu dan terintegrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab
70	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan penunjukan Plh. dan Plt. sehingga proses kerja dapat tetap berjalan efektif meskipun pejabat definitif berhalangan
71	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Daerah	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	Sebagai dasar perubahan standar satuan biaya yang akan digunakan dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2021

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021		
72	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dasar perubahan anggaran dan kegiatan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
73	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemem Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara On Line	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data transaksi usaha wajib pajak secara online serta meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak dan meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaporan Wajib Pajak.
74	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	Sebagai dasar pelaksanaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi yang diberikan pada pelaku usaha mikro agar mereka dapat bertahan dalam masa pandemi covid19
75	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran DAK	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana	Sebagai pedoman pelaksanaan Penyaluran dan Pembayaran DAK Bidang Pendidikan Sumber Dana Sisa

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Bidang Pendidikan Sumber Dana Sisa DAK	Alokasi Khusus Fisik	DAK
76	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018	Sebagai dasar perubahan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dengan menambahkan beberapa ketentuan salah satunya mengenai sanksi sehingga penerima hibah atau bantuan sosial dapat lebih tertib dalam mempertanggungjawabkan pemberian tersebut
77	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	Sebagai dasar pemberian dan pelaksanaan Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen
78	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Sebagai dasar perubahan pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2020 karena adanya perubahan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan
79	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 79 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6	Sebagai dasar pemberian dan pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kawasan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Pemerintah Desa untuk Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen	Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Perdesaan di Kabupaten Kebumen agar berjalan tertib dan lancar serta tepat sasaran
80	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa	a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah	melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah dan pedoman pelaksanaan peran dan kewenangan desa dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan desa termasuk Dana Desa untuk melaksanakan kegiatan konvergensi pencegahan stunting terintegrasi di tingkat desa.
81	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, tenaga pendamping profesional dan pihak lainnya dalam : a. menyelenggarakan pembangunan Desa; b. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat; c. memfasilitasi pembangunan Desa; dan d. mengembangkan kerjasama/kemitraan Desa
82	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Sebagai pedoman bagi Desa dalam menyusun APBDesa sehingga APBDesa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik mengenai penggunaan dalam belanja maupun pengalokasiannya serta

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			sinkron dengan APBD Kabupaten
83	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen TA 2021	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Sebagai dasar dan pedoman bagi Desa dalam penyusunan rencana kegiatan yang menggunakan standar harga satuan Desa
84	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai	Sebagai dasar perubahan pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya mengenai besaran prosentase pembagian insentif yang menjadi salah satu item Tambahan Penghasilan Pegawai
85	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran PBB P2 di Kabupaten Kebumen	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang PBB P2	Sebagai dasar perubahan pelaksanaan Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran PBB P2 di Kabupaten Kebumen karena adanya perubahan jenis dan mekanisme pemberian pemacu
86	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dasar perubahan anggaran dan kegiatan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
87	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBD	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Sebagai dasar perubahan pelaksanaan Pembayaran dalam Pelaksanaan APBD
88	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 88 Tahun 2020	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Sebagai dasar perubahan perencanaan dan penganggaran

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2020 tentang RKPD Tahun 2021	b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Perangkat daerah tahun anggaran 2021
89	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan dan Perkotaan	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen	Sebagai dasar pelaksanaan Hibah Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan dan Perkotaan
90	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Sebagai dasar pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen
91	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dasar perubahan anggaran dan kegiatan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
92	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dan serta Dana Operasional Pimpinan DPRD TA 2021	a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional c. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Sebagai dasar hukum pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dan serta Dana Operasional Pimpinan DPRD TA 2021
93	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah	Sebagai dasar perubahan pelaksanaan sistem akuntansi Pemerintah Daerah untuk mensinkronkan dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
94	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasisi Akrual Pemkab. Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah	Sebagai dasar perubahan pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Berbasisi Akrual Pemkab. Kebumen untuk mensinkronkan dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
95	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Kebumen	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme b. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk membangun integritas Aparatur Sipil Negara
96	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	Memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kab. Kebumen	Satu Pintu Daerah	perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya dan Untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
97	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 97 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kab. Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah	Sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam rangka mengoptimalkan dana bagi hasil pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal dan meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha
98	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	sebagai pedoman sikap tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam melaksanakan tugasya dalam rangka mewujudkan aparatur pelaksana pelayanan terpadu satu pintu yang baik, profesional dan bertanggung jawab
99	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Kebumen	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai	Sebagai dasar perubahan pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya mengenai perubahan penerima dan besaran prosentase pembagian insentif yang menjadi salah satu item Tambahan Penghasilan pegawai
100	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah,
101	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Sebagai dasar perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi BPKAD dalam rangka menyesuaikan nomenklatur bidang dan subbidang dengan mendasarkan pada klasifikasi

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Belanja Daerah sehingga Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja disesuaikan
102	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dasar pelaksanaan anggaran dan kegiatan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
103	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
104	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan,	Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebagai salah satu pendorong terjadinya korupsi
105	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang PBB P2	Sebagai dasar pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen dalam rangka optimalisasi pemungutan PBB-P2
KEPUTUSAN BUPATI			
1	Keputusan Bupati Kebumen No.590/29 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah	Tim dibentuk dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan tanah di wilayah Urutsewu dengan tugas

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Permasalahan Tanah di Wilayah Urutsewu	beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	melakukan sosialisasi mengenai tahapan dan proses penanganan permasalahan tanah dan memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi tanah di wilayah tersebut
2	Keputusan Bupati Kebumen No.440/148 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Tim dibentuk dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan akses penanganan korban/pasien dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan secara terpadu dan terintegrasi
3	Keputusan Bupati Kebumen No.440.1/165 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Covid 19	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Gugus Tugas dibentuk dalam rangka penanganan dan pencegahan virus Covid-19
4	Keputusan Bupati Kebumen No.440/225 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Penunjukan Rumah Sakit dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya penanganan penyakit yang menimbulkan wabah
5	Keputusan Bupati Kebumen No.050/248 Tahun 2020 tentang Desa Prioritas Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	Penunjukan Desa Prioritas Penurunan Stunting Terintegrasi dimaksudkan agar penanganan stunting di Kabupaten Kebumen secara terintegrasi dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan agar tidak ada lagi kasus

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Pemerintahan Daerah	stunting di Kabupaten Kebumen
6	Keputusan Bupati Kebumen No.660.1/335 Tahun 2020 tentang Zona Prioritas Konservasi Lingkungan Di Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Penetapan Zona Prioritas Konservasi Lingkungan dimaksudkan agar penanganan lahan kritis dapat

Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen, 2020

3.3. Rekomdasi DPRD atas LKPJ Tahun 2019

Tabel 3.100
Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2019 dan Rencana tindak lanjut
Berdasarkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Capain IKU Daerah

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
1.	PENGELOLAN PENDAPATAN DAERAH	a. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kebumen, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengaruhnya belum signifikan dalam postur APBD oleh sebab itu DPRD merekomendasikan adanya strategi-strategi baru dalam upaya peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping sumber-sumber pendapatan lainya juga perlu ditingkatkan seperti : 1. laba BUMD, 2. Lain-lain pendapatan yang sah, 3. Dana Perimbangan, 4. Dana Alokasi Umum, 5. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sehingga secara bertahap proporsi Dana Perimbangan dapat mulai digantikan dengan sumber–sumber pendapatan yang dapat diupayakan Pemerintah Kabupaten Kebumen.	BAPPENDA	a. Terkait dengan pandangan dari DPRD tersebut kami sepakat akan dilaksanakan strategi baru optimalisasi peningkatan PAD. Beberapa langkah yang kita tempuh diantaranya: 1. Studi potensi pendapatan daerah 2. Peningkatan kualitas integritas dan skill SDM 3. Update basis data wajib pajak dan objek pajak 4. Optimalisasi implementasi tapping box 5. Pendapatan potensi objek pajak baru seperti: waduk peternakan ayam, dan sarang burung walet di bangunan-bangunan 6. Evaluasi tarif perda pajak daerah 7. Pembentukan tim optimalisasi pajak 8. Upgrade sistem IT untuk pelayanan dan pembayaran 9. Memfungsikan petugas pemeriksaan pajak	Masih banyak wajib pajak yang belum memfungsikan tapping box

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
			Bagian Perekonomian	1. evaluasi kinerja BUMD secara periodek per Triwulan oleh Tim pembina BUMD 2. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi setiap setiap bulan - Koordinasi per telepon - Rapat Koordinasi Dari kegiatan diatas cukup efektif dalam hal peningkatan kinerja BUMD, sehingga perolehan Laba BUMD di Tahun 2019 dapat melebihi target serta berbanding lurus dengan pendapatan deviden yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di Tahun 2020.	1. Dari 7 BUMD yang dimiliki Pemda Kebumen 6 masuk Kategori Sehat:PDAM, PD BPR BKK Kebumen, PD BPR Bank Kebumen, PD Apotek Luk Ulo, Bank Jateng, dan PT PRPP. Sedangkan 1 BUMD dengan kategori kurang sehat yaitu: PT BPR BKK Jateng (Perseroda) karena masih dalam proses transisi pasca konsolidasi (merger) BKK se-Jawa Tengah. 2. Dampak pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap perolehan laba BUMD di Tahun 2020 dan penerimaan Deviden di Tahun 2021 nanti.
		b. DPRD merekomendasikan dilakukannya sebuah kajian secara mendalam, cermat dan akurat tentang potensi daerah yang nantinya dapat dipergunakan sebagai landasan dalam perencanaan pendapatan daerah.	BAPPENDA	Untuk kajian secara mendalam, cermat dan akurat tentang potensi daerah telah dilaksanakan studi potensi pada parkir tepi jalan, parkir objek wisata dan potensi retribusi Pasar Tumenggungan dan Pasar Indrakila pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2021 akan dilaksanakan studi potensi NJOP PBB-P2 dan tahap berikutnya akan dirancang kajian strategi optimalisasi pendapatan daerah.	

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
		c. DPRD merekomendasikan agar dilakukan optimalisasi dari retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan basis database wajib pajak bumi dan bangunan sebagaimana amanah Perda Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan	DPUPR	Terkait dengan optimalisasi Retribusi IMB, mengingat adanya keterkaitan data retribusi IMB dengan Objek Pajak Bumi dan Bangunan maka akan dilakukan sinkronisasi data antar stakeholder agar diperoleh peningkatan akurasi data baik melalui pendataan bangunan PBB-P2 di Bappenda, pengajuan IMB melalui DPMPTS dan pendataan bangunan dan gedung yang dilakukan oleh DPU-PR di Kabupaten Kebumen. Pendataan bangunan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini, mulai dari gedung pemerintah. Untuk meningkatkan motivasi pengajuan IMB juga dalam rangka mengakomodasi amanah Undang-Undang Cipta Kerja, saat ini tengah disusun Peraturan Bupati untuk memberikan keringanan Retribusi IMB. 1. Berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait sinkronisasi database Pajak Bumi dan Bangunan dan kesesuaian antara Nomer Obyek Pajak dengan Data Koordinat yang dipakai dalam penentuan titik lokasi dalam IMB 2. Pembentukan data dasar Bangunan Gedung di Kabupaten Kebumen melalui Pendataan Bangunan Gedung, dimulai dari Bangunan Gedung Pemerintah, dengan tujuan	Perbedaan data base dan mekanisme penetapan obyek/titik lokasi yang dipergunakan untuk Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Koordinat lokasi Bangunan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib IMB

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sedang berjalan (seperti IMB, SLF, atau perpanjangan SLF)	
2.	BELANJA DAERAH	Agar postur APBD ke depan untuk prosentase alokasi Belanja Modal untuk ditingkatkan	BAP3DA	1. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sepakat belanja modal untuk ditingkatkan karena belanja modal merupakan jenis belanja yang memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian masyarakat.	Sesuai Perubahan nomenklatur belanja sesuai Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019
			BPKAD	2. SKPD pada tahun perencanaan telah ditekankan upaya peningkatan Belanja Modal/Belanja Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan Per Undang-Undangan;	SKPD dalam penyusunan rencana kerja banyak mengalokasikan belanja hibah/bansos baik berupa uang/barang, yang masa manfaatnya kurang dari 12 bulan, sehingga tidak masuk kategori Belanja Modal. Selain Itu Perlunya komitmen Penyelenggara Pemerintahan untuk meningkatkan Belanja Modal/Belanja Infrastruktur dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada tahun perencanaan. Contoh: Perlu dipertimbangkan kebijakan pengalokasian belanja hibah/bansos setelah memprioritaskan belanja

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
					mandatory (Belanja Modal/Belanja Infrastruktur)
3.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	dalam penyajian LKPJ agar menjelaskan target IPM yang dingin dicapai pada tahun yang dievaluasi untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja.	BAP3DA	Bahwa IPM pada RPJMD 2016-2021 tidak menjadi indikator kinerja utama (IKU), namun variable-variable pembentuk IPM nya yang menjadi IKU seperti AHLS,RRLS dan AHH.	Data final/fix pembentuk IPM dari BPS diupdate/dirilis secara resmi pada tahun n+2
	PERTUMBUHAN EKONOMI	a. DPRD merekomendasikan agar dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah untuk memodernisasi pertanian baik melalui program pelatihan, bantuan maupun kemitraan agar produktivitas petani meningkat dan konsisten sepanjang musim. Hal ini merupakan langkah penting untuk mengatasi angka kemiskinan karena wilayah kantong kemiskinan umumnya berada di pedesaan.	Distapang	Distapang akan memulai pembangunan pembangunan pertanian berbasis kawasan komoditas dan integrasi pertanian, dengan mengoptimalkan pelatihan/penyuluhan, mendorong akses permodalan dan kemitraan, yang sudah mulai berjalan di sub sektor peternakan (unggas).	
		b. DPRD merekomendasikan agar perencanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen memasukan unsur konsumsi masyarakat sebagai parameter dalam indicator kinerja karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen saat ini sudah bergeser basisnya dengan berbasis konsumsi bukan industri, pertanian	BAPPEDA	Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan PDRB adhk oleh BPS. PDRB yang d hitung oleh BPS selain d hitung dr sisi output (sektor2 ekonomi) jg telah d hitung dr sisi pendapatan yg t.d konsumsi masyarakat , Investasi, pengeluaran pemerintah n nett expo.	

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
		maupun pertambangan.			
		c. mengupayakan penciptaan lapangan kerja baru yang produktif padat karya dan banyak menyerapkan para pencari kerja baru	DISNAKER	Upaya menyerap pencari kerja baru dilakukan dengan membuka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan agar dapat mengadakan seleksi di wilayah kebumen dan kegiatan padat karya juga sudah dilakukan dengan sasarn masyarakat penganggur di tingkat desa/kelurahan	
		d. Agar memiliki program/kegiatan untuk memajukan pasar-pasar rakyat supaya pasar rakyat dapat menjadi sumber nafkah para pelaku UMKM dan pedagang kecil.	DISPERINDAGSAR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020 terdapat program /kegiatan untuk memajukan pasar rakyat. Untuk memajukan pasar rakyat termasuk diantaranya penanganan kebersihan pasar. Penanganan kebersihan pasar ini dikandung maksud agar pasar rakyat menjadi pusat perekonomian masyarakat yang dapat bersaing ditengah era modern ini,dimana serbuan dari banyaknya pasar modern yang menggunakan fasilitas yang lengkap. Untuk itu dilakukan penanganan kebersihan dipasar secara rutin dan berkelanjutan dengan program atau kegiatan : • Program peningkatan efesiensi perdaganagn dalam negeri,kegiatan pengembangan kelembagaan kerja sama kemitraan yaitu untuk mencukupi kekurangan SDM di pasar dengan tenaga harian lepas untuk pelayanan pemungutan	• Belum maksimalnya penanganan kebersihan di Pasar Rakyat karena keterbatasan jumlah SDM yang ada saat ini dimana banyak tenaga yang pensiun dan jumlah Tenaga Harian Lepas yang terbatas jumlahnya. • Belum optimalnya pelayanan kebersihan juga untuk prasarana dan sarana pasar belum adanya anggaran secara rutin per tahun.

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				retribusi sejumlah 16 orang. Untuk itu pelayanan kebersihan pasar yaitu tenaga kebersihan pasar sejumlah 41 orang sedangkan untuk pelayanan keamanan pasar yaitu dengan tenaga keamanan pasar sejumlah 13 orang. • Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebersihan pasar yaitu untuk mencukupi 4 UPTD Pasar (40 pasar) dengan peralatan kebersihan rutin yang diperlukan seperti sapu, cangkul, tempat sampah, alat pel, pembersih lantai, cakar, sekop, dll. Peralatan kebersihan ini digunakan secara rutin oleh petugas kebersihan pasar guna membersihkan pasar sesuai dengan jadwal pembersihan pasar dari UPTD Pasar. Dilakukan juga upaya pengolahan sampah di Pasar Tumenggungan. Kemudian juga dengan kegiatan ini dilakukan pengambilan sampah secara rutin dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Pasar Rakyat ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan armada truk sampah 3 unit melayani 18 pasar rakyat yaitu Pasar Petanahan, Pasar Sruni,	

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				Pasar Indrakila, Pasar Prembun, Pasar Ambal, Pasar Kabekelan, Pasar Jatisari, Pasar Puring, Pasar Giwangretno, Pasar Ayah, Pasar Karangsari, Pasar Hewan Purbowangi, Pasar Tlogopragoto, Pasar Ungaran, Pasar Sruni, Pasar Demangsari, Pasar Rowokele, Pasar Bocor.	
4.	ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH	a. Capaian dari Program yang mendukung Indikator ini untuk bisa disampaikan dalam LKPJ seperti berapa anak sekolah dikebumen yang menerima Program Indonesia Pintar, Berapa Keluarga Miskin yang menerima Beasiswa. b. Untuk Program Beasiswa Kelurga Miskin yang bersumber dari APBD agar lebih difokuskan dikantong-kantong kemiskinan.	DISDIK	Bansos BKM Tahun 2020 (kelas IX SMP/MTs 2.039 siswa dan kelas VI SD/MI 4.278 siswa) BKM akan lebih difokuskan di kantong kemiskinan seperti di wilayah Kec. Karanggayam, Kec. Ayah, dan Kec. Sadang.	Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program pusat yang usulannya langsung dari sekolah melalui aplikasi Dapodik dan penentuan kuota serta calon penerima ditentukan Kemendikbud.
5.	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	a. Target IKU Rata-Rata sekolah ini untuk lebih akseleratif dengan program wajib belajar 12 tahun. hal ini sangat terkait dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk, dengan pendidikan yang cukup diharapkan terbentuk angkatan kerja dengan	DISDIK	Tahun 2020 Bansos Beasiswa Kurang Mampu (BKM) kepada 2.039 siswa kelas IX SMP/MTs (ditujukan untuk membantu pembiayaan melanjutkan ke SMA/K). Tahun 2021 BKM SMP siswa kelas IX (ditujukan untuk membantu pembiayaan melanjutkam ke SMA/K). Sosialisasi dan verifikasi data Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) dengan melibatkan penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).	- Kewenangan Kabupaten hanya sampai jenjang SMP (SMA/K menjadi kewenangan provinsi). - Sebagian Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) pada usia sekolah karena kemauan sendiri san alasan bekerja. - Pernikahan usia dini

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
		kompetensi yang tinggi sehingga dapat diserap dunia kerja, setelah memiliki penghasilan maka akan berkontribusi mengurangi angka kemiskinan. b. Program Kegiatan Belajar Paket A, Paket B dan Paket C untuk lebih disosialisasikan lagi sehingga penduduk kebumen yang tidak masuk pendidikan formal/tidak meneruskan/putus sekolah bisa menyelesaikan jenjang pendidikan sesuai dengan umurnya		Rekrutmen calon peserta didik baru program kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C).	
6.	PRESENTASE AKSES DAN MUTU PELAYANAN PENDIDIKAN	Pemerintah Kabupaten Kebumen harus melakukan pemerataan kualitas sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen agar tidak terjadi ketimpangan mutu lulusan dan kualitas antar wilayah	DISDIK	PPDB berbasis zonasi	Masih beragamnya pemahaman masyarakat tentang zonasi PPDB, masih kuatnya dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan.
7.	ANGKA HARAPAN HIDUP	dalam penyampaian indikator ini agar bisa menampilkan berapa jumlah penduduk kebumen diperiode laporan LKPJ yang dilaporkan yang umurnya diatas angka harapan hidup, agar bisa dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam periode laporan LKPJ yang memudahkan dalam menilai capaian kinerja		Telah disampaikan pada capaian kinerja urusan Kesehatan pada LKPJ 2020	

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
8.	ANGKA KEMATIAN IBU	a. Agar dalam penyajian LKPJ dicantumkan target Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) yang ditetapkan dalam RPJMD dan dibandingkan dengan pencapaianya pada tahun yang dilaporkan b. disampaikan rencana apa yang akan dilakukan setelah mengetahui faktor penyebab kematian ibu dimaksud untuk meminimalisir angka kematian ibu.	DINKES	a. telah dicantumkan dalam capaian kinerja ksehatan jumlah angka kematian ibu (AKI) dan dibandingkan dengan capaiannya. b. rencana yang ilakukan setelah mengetahui faktor penyebab kematian ibu - Peningkatan upaya program kerja tentang kesehata ibu (upaya promotif, upaya perbaikan gizi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, Pemberdayaan Keluarga Berencana) - Peningkatan antenatal yang berkualitas (mampu mendeteksi dan menangani kasus resiko tinggi secara memadai) - Pelayanan pasca persalinan/kelahiran yang aman - Meningkatkan pelayanan kegawatdaruatan obstetri yang komprehensif mudah dijangkau serta meningkatkan jejaring rujukan Puskesmas PONED ke RS PONEK	Perhitungan denumerator merupakan rumus nasional
9.	ANGKA KEMATIAN BAYI	Agar dalam penyajian LKPJ bisa dicantumkan berapa jumlah angka kelahiran bayi pada periode laporan LKPJ dikelompokan ke dalam jenis tingkatan penduduk serta titik penyebarannya sehingga DPRD bisa menganalisa dan menilainya serta	DINKES	Akan dicantumkan beberapa jumlah angka kelahiran bayi pada periode laporan LKPJ dan dikelompokkan sesuai jenis tingkatan penduduk serta tituk penyebarannya	Penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah, dan infeksi

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
		agar bisa dibuat rencana tindakan ke depan setelah mengetahui faktor penyebab kematian bayi.			
10.	PRESENTASE ANGKA MELEK HURUF AL QURAN SISWA LULUS SEKOLAH	DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar indikator kinerja ini tidak digunakan lagi dalam RJMD mendatang dan diganti dengan IKU yang dapat mencerminkan filosofi Kebumen Beriman dan perhatian pemerintah kepada pihak-pihak yang bergerak di bidang pendidikan agama non sekolah harus diperhatikan.	- DISDIK - BAP3DA	Indikator kinerja ini tidak digunakan lagi dalam RPJMD periode berikutnya	
11.	CAKUPAN PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN NORMA-NORMA KEAGAMAAN	Pada LKPJ berikutnya diberikan penjelasan lebih lanjut terkait Penemuan Kasus Baru HIV apakah semata-mata karena ada perilaku pendudukan yang melanggar norma-norma keagamaan yaitu perzinahan atau karena tertular sehingga bisa dilakukan antisipasi ke depan dan terkait dimungkinkan adanya tempat prostitusi untuk ditutup.	BAG KESRA SETDA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS	Telah tercantum dalam uraian capaian IKU daerah	
12.	PENURUNAN KASUS PELANGGARAN HUKUM	a. DPRD merekomendasikan dilakukan sosialisasi melalui pendekatan yang persuasif kepada masyarakat terhadap perda – perda Kabupaten Kebumen sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat	SATPOL PP	a. Proses penegakan hukum / Perda / Perkada yang dilakukan Satpol PP telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan SOP yang ada (Permendagri Nomor 54 Tahun 2011). Dalam hal Sosialisasi Perda / Perkada telah dilakukan sosialisasi	

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
		meningkat, setelah itu baru dilakukan penegakan perda. b. OPD terkait untuk membuat asumsi Perda apa saja yang kemungkinan akan dilanggar, sehingga dapat diantisipasi dari awal.		dengan pendekatan yang persuasive melalui kegiatan Fasilitasi Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diharapkan pemahaman dan kesadaran masyarakat meningkat. Sosialisasi telah dilakukan kepada seluruh masyarakat yang rentan pelanggaran sebanyak 24 kali selama setahun. b. OPD pengampu Perda sejak dari penyusunan, FGD Raperda dan pembahasan di DPRD semaksimal mungkin sudah menampung masukan dari masyarakat dan *stakeholders*. Setelah Perda ditetapkan kewajiban OPD pengampu Perda untuk melaksanakan sosialisasi... Untuk Satpol PP juga melaksanakan sosialisasi setelah OPD terkait melaksanakan sosialisasi dengan sasaran masyarakat dan *stakeholder* yg rawan melanggar Perda	
13	RASIO INDEKS GINI	Meningkatkan upah minimum Kabupaten agar pendapatan karyawan meningkat. Hal ini juga terkait dengan garis kemiskinan karena UMP di Kabupaten Kebumen	BAP3DA	Terima kasih atas rekomendasi yang disampaikan. Upaya menurunkan ketimpangan pada dasarnya difokuskan kepada tiga pilar utama,yakni pemerataan kesempatan, penciptaan	Peningkatan UMK tidak hanya melibatkan kabupaten,bahkan penetapannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.Selain itu , penghitugan UMK juga

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
		masih tergolong rendah.		lapangan pekerjaan yang layak dan bantuan jika masyarakat miskin terkena guncangan. Salah satu upaya meningkatkan pendapatan masyarakat adalah melalui peningkatan upah. Namun demikian perlu dipertimbangkan juga kondisi pasar tenaga kerja baik sisi suplly/ketersediaan (jumlah dan kualitas) maupun demand (kondisi perekonomian/kemampuan dunia usaha/industry).	dilakukan dengan formula baku yang mengacu pada Peraturan Menteri Nakertrans Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Kemudian dari sisi penerapan, akan sangat dipengaruhi juga oleh tingkat ketaatan peruahaan dimana saat ini saja belum semua pengusaha di Kebumen menerapkan upah sesuai UMK.
14	TERBANGUNNYA KAWASAN PEMBANGUNAN EKONOMI	DPRD merekomendasikan agar segera menyelesaikan tahapan tahun ke 4 yaitu koordinasi dengan KPKNL dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan kementrian ATR untuk mendapatkan izin HPL.	BAP3DA DISPERINDAGSAR BAG. PEMERINTAHAN BAG PEREKONOMIAN	- Dinas disperindag sudah melakukan koordinasi dalam KPKNL siap membantu	- Penilaian asset dan lelang pengelola kawasan industri.
15	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI PMA/PMDN	Perlu dibuat perda perlindungan investasi daerah, dengan tujuan agar pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Kebumen mengambil bahan dan tenaga kerja dari wilayah Kabupaten Kebumen, hal ini untuk mengurangi pegangguran dan kemiskinan secara fsekaligus.	DPMPTSP	1. Diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. 2. Disusunnya Raperbup tentan petinjuk pelakasanaan Perda. Perbud akan ditetapkan melalui subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (sesuai Permendagri Nomor 90/2019) pada Tahun 2021.	1. Rasionalisasi Anggaran 2020. 2. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada Realisasi Investasi sejak Triwulan II Tahun 2020.
16	PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA	a. Lakukan Perhitungan Terpisah Antara Data wisatawan yang mengunjungi obyek wisata yang	DISPORAWISATA	Melalui pelaksanaan program berikut ini diharapkan dapat memudahkan dalam melaksanakan rekomendasi DPRD :	1. Penerimaan Data dari Obyek Wisata yang dikelola oleh Desa (non Pemerintah

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
		dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan Obyek wisata yang dikelola oleh swasta sehingga jelas dalam pengukuran kinerjanya. b. Data yang dilaporkan terutama terkait dengan target dan capainnya harus riil dan obyektif, selain itu harus pula ada inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menggenjot pendapatan daerah dari sektor pariwisata ini. c. Pembangunan kepariwisataan harus fokus untuk mewujudkan Kebumen sebagai tujuan wisata yang berkelanjutan, jika perlu dapat melibatkan konsultan pariwisata yang handal.		1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada Keg. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri, 2. Program Pngembangan estinasi Pariwisata Pada kegiatan Peningkatan Pemb.sarpras serta pemeliharaan sarpras/fasilitas obwis dan 3. Program Pengembangan Kemitraan Pada kegiatan Pengemb.SDM dan profesionalisme bidang pariwisata	) sulit dilakukan meskipun sudah dilakukan pendampingan dan sosialisasi 2. Data perolehan Kunjungan Wisatawan tahun 2019 sebanyak 2.927.444 orang terdiri dari : un Obwis yang dikelola Pemerintah Daerah sebanyak 947.260 org dan non Pemda berikut kunjungan Event sebanyak dan 1.980.184 orang 3. Pembangunan fasilitas dan revitalisasi antara lain sebagai berikut : a. Obwis. Pantai Petanahan; b. Pantai Karangbolong c. Logending; d. Jatijajar; e. Suwuk; f. Waduk Sempor dan g. PAP . Krakal
17	PERSENTASE TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	agar metode untuk menghitung prosentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah dirubah dan disarkan pada ketentuan yang mendasar dengan bersumber pada peraturan yang terkait serta memasukan parameter baru sebagai variable penyusun IKU Pelayanan	DPU PR BAPPEDA	1. Penentuan IKU Pelayanan Dasar salah satunya mendasari pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pada bidang Pekerjaan Umum mendasari pada peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29	

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
		Infrastruktur ditambah yaitu capaian kondisi jembatan dikabupaten kebumen		Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman. 2. Koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait penetapan perhitungan IKU Daerah prentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah adalah rata-rata dari: 1) Capaian panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik 2) Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik 3) Cakupan pelayanan air bersih	
				Perhitungan IKU Daerah persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah adalah rata-rata dari : 1. Capaian jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik 3. Cakupan pelayanan air bersih adapun variabel penyusun IKU jalan dalam kondisi baik adalah rata-rata dari Prosentase jalan kabupaten kualitas mantap Prosentase jembatan kabupaten kualitas mantap. Terkait usulan agar ditambah kondisi jembatan akan kita kaji dalam proses penyusunan	

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				rpjmd 2021-2025	
18	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	a. Agar dicari pengganti angka indeks tutupan vegetasi untuk menghitung IKLH yang benar-benar mencerminkan kondisi lingkungan saat itu. b. Agar Program yang terkait dengan konservasi lingkungan harus ditingkatkan dari hulu sampai dengan hilir sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.	DISPERKIM LH	a. Untuk menghitung capaian indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dapat digunakan data IKTL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. b. Program yang dilaksanakan dalam rangka konservasi lingkungan yaitu: 1) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. a) Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem. 2) Program rehabilitasi dan pemuliahan cadangan sumber daya alam. a) Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.	Jumlah tutupan lahan mengalami penurunan disebabkan: - Penebangan tanaman tidak berimbang (berlebihan). - Konflik kepentingan penggunaan air untuk MCK maupun kebutuhan pertanian. Mengakibatkan : - Lahan kritis - Tangkapan air berkurang'debit air mengalami penurunan
19	ANGKA KEMISKINAN	a. Perlu dibentuk sebuah pokja untuk mengevaluasi dan menyusun data kemiskinan yang valid, lengkap dan komprehensif sesuai kondisi kemiskinan di Kabupaten Kebumen. b. Untuk mengakselerasi penurunan angka kemiskinan, diharapkan segera membentuk Panja Kemiskinan, membuat peta sebaran rumah tangga	BAP3DA	Saat ini telah dibentuk TIM Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKP2KD) yang terdiri dari berbagai unsur/lembaga yang terkait dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen Terkait dengan data,akan dilakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan serta mensinkronkan data yang telah dilakukan oleh Dinsos PPKB	Program/Kegiatan yang terintegrasi antar OPD masih belum maksimal.

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
		miskin (RTM) dan agar pelaksanaan pengentasan kemiskinan harus terintegrasi, berkelanjutan dan satu kendali.		Saat ini telah dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKP2KD) yang terdiri dari berbagai unsur/lembaga yang terakit denga upaya upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Peta sebaran RTM juga telah disusun. Data yang telah diolah oleh Dinsos PPKB sudah menunjukkan sebaran RTM.	
20	ANGKA PENGANGGURAN	agar IKU angka pengangguran direview kembali parameternya karena berbanding terbalik dengan indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen. Secara teori ilmu eknomi makro, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang.	DISNAKER UMKM BAP3DA	Terima kasih atas masukannya,dan akan kami jadikan masukan dalam penentuan IKU tersebut pada dokumen perencanaan jangka menengah selanjutnya. Akan tetapi perlu kami samaikan juga bahwa perhitungan yang menyebutkan pertumbuha ekonomi 1 persen bisa menyerap 400 ribu tenaga kerja adalah berbasis pada pertumbuhan ekonomi level nasional yang tentu saja sangat berbeda dengan level kabupaten. Pertumbuhan 1 % dari PDB nasional tentu saja sangat berbeda dengan pertumbuhan 1 % dari PDRB kabupaten. Sebagai ilustrasi, tingkat PDB Nasional mencapai 15.833 triliun (2019) sangat jauh berbeda dengan PDRB Kabupaten yang hanya mencapai 26 triliun (2019).	
			DISNAKER	• Penciptaan dan perluasan lapangan kerja • Meningkatkan kualitas SDM • Menciptakan fleksibilitas tenaga kerja	a. Di Kabupaten Kebumen Jumlah Pencari Kerja tidak sebanding dengan jumlah Lowongan

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				• Pelatihan-pelatihan berbagai sektor, serta perbaikan sistem penggajian	Pekerjaan b. Perusahaan-perusahaan sudah mengetrapkan setiap tenaga kerja wajib punya sertifikasi keahlian. c. Ketidaksesuai pekerjaan dengan pendidikan sehingga penggajian tidak sesuai
21	PERSENTASE GEDUNG SEKOLAH DALAM KONDISI BAIK	agar pelaksanaan pembangunan maupun rehab gedung sekolah diprioritaskan didaerah kantong kemiskinan dan di sekolah yang belum terakreditasi A serta peningkatan Alokasi Anggaran untuk sekolah swasta dan sederajat	DISDIK	Tahun 2020 - Pembangunan gedung sekolah - Penambahan ruang kelas sekolah - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah - Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD (DAK) - Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP (DAU) untuk MTs swasta dan SMP Negeri - Belanja hibah rehab bangunan gedung lembaga PAUD swasta. Tahun 2021 Program dan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah diprioritaskan untuk daerah-daerah kantong kemiskinan seperti diwilayah Kec. Karanggayam, Kec. Ayah, dan Kec. Sadang.	
22	PERSENTASE TINGKAT AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN	agar penyampaian IKU ini juga dijelaskan prosentase masing-masing tolak ukur itu berapa dalam menyumbang target kinerja dan metode pengukuran indikator	DINAS KESEHATAN	Akan ditambahkan presentase masing-masing tolak ukur dalam target kinerja dan metode pengukuran indikator kinerja menggunakan rumus.	

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
		kinerja menggunakan rumus seperti apa sehingga kami DPRD dapat menganalisa dan menilai kinerja yang sudah dilaksanakan.			
23	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	dalam penyajian IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja disampaikan kendala yang sangat mempengaruhi pencapaian nilai, apa saja dan penyebabnya apa sehingga DPRD dapat menganalisa dan menilai sehingga kami DPRD dapat memberikan masukan-masukan	BAG. ORGANISASI	Akan disampaikan pada LKPJ tahun berikutnya terkait permasalahan dalam mencapai akuntabilitas kinerja	
24	OPINI BPK ATAS LKPD	Dikarenakan pada saat penyusunan LKPJ hasil evaluasi BPK atas pengelolaan keuangan daerah belum diterbitkan, maka dapat memberikan informasi awal sejauh mana LKPD tahun 2019 diperiksa oleh BPK dan prediksinya apa.	BPKAD	- Terkait dengan opini WTP merupakan kewenangan dari BPK dan tidak dapat diprediksi. Namun untuk meraih opini tersebut selalu diupayakan dengan peningkatan tata kelola keuangan dan aset. - Untuk LKPD 2019 berdasarkan Surat BPK Tanggal 19 Mei 2020 Nomor 166/S/ XVIII.SMG/05/2020BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019.	
25	PERSENTASE PNS DAN PEGAWAI BUMD YANG MENYALURKAN ZAKATNYA	Pada LKPJ berikutnya menyajikan peta sebaran penyaluran zakat di masing-masing OPD dan BUMD	BAG. KESRA	Telah diuraikan pada capaian indikator kinerja utama, sebagaimana *terlampir.*	

NO	FOKUS	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
	MELALUI KELEMBAGAAN BAZ				

Tabel 3.101
Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2019 dan Rencana tindak lanjut
Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
1.	PENDIDIKAN	a. Lakukan terobosan dalam peningkatan kompetensi Guru dan sarana Pendidikan yang melibatkan pihak ketiga, serta perlu dilakukan pembenahan terhadap penghasilan Guru Tidak Tetap. b. perlu juga adanya peningkatan mutu tutor Pendidikan Luar Sekolah sehingga perlu adanya dukungan anggaran dari Pemerintah.	DINAS PENDIDIKAN	1. Diklat Penulisan karya tulis Ilmiah bagi 100 orang guru TK/SD/SMP (Tahun 2020) 2. Bimtek Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Era Revolusi Industri 4.0 bagi 100 orang guru TK/SD/SMP (Tahun 2020) 3. Fasilitasi diklat bagi 108 office 365 guru SD (Tahun 2021) 4. Fasilitasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru PNS 70 orang (Guru SD 66 orang, SMP 4 orang), SD Guru Tetap Yayasan 57 orang (Guru TK 46 orang, SD 6 orang dan SMP 5 Orang) 5. Penambahan anggaran untuk GTT dan PTT (Tahun 2019 honor GTT @Rp. 600.000,- PTT @Rp, 400.000,-, Tahun	

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				2020 honor GTT @Rp. 750.000, Rp. 500.000,-, Rp 300.000,-, Rp . 200.000,-, PTT @Rp. 500.000,-, Rp. 200.000,- Tahun 2021 Honor GTT @Rp. 1.000.000, Rp. 750.000,-, Rp. 500,000, Rp. 400.000,-, PTT@ Rp 750.000 dan 400.000 1. Fasilitasi tutor berprestasi 2. Diklat di P2PAUD Dikmas dan Direktorat	
2.	KESEHATAN	Dinas Kesehatan harus lebih intensif melakukan monitoring dan supervisi untuk meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan kapitasi di Puskesmas, serta pencairan klaim dana JKN Non Kapitasi yang lebih tepat waktu.	DINAS KESEHATAN	Telah dilaksanakan monitoring serta supervise dan akan dilakukan perbaikan	
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	a. Untuk penyajian cakupan pelayanan air bersih agar bisa menampilkan kondisi awal dari tahun 2015 jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih dan yang belum menggunakan air bersih itu berapa jiwa sampai dengan tahun 2019 sehingga DPRD mudah menganalisa dan menilai kinerjanya	DPU PR	1. Tahun 2015 di 8 Desa , Jumlah jiwa yang terlayani sebanyak 14.385, Jumlah jiwa yang belum terlayani 10.467, Jumlah yang terlayani KK 2.037, Jumlah yang belum terlayani KK 3.789 2. Tahun 2016 di 37 Desa , Jumlah jiwa yang terlayani sebanyak 14.056, Jumlah jiwa yang belum terlayani 100.190, Jumlah yang	

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				terlayani KK 3.514, Jumlah yang belum terlayani KK 25.048 3. Tahun 2017 di 15 Desa , Jumlah jiwa yang terlayani sebanyak 14.734, Jumlah jiwa yang belum terlayani 30.618, Jumlah yang terlayani KK 7.475, Jumlah yang belum terlayani KK 6.100 4. Tahun 2018 di 17 Desa , Jumlah jiwa yang terlayani sebanyak 29.899, Jumlah jiwa yang belum terlayani 23.764, Jumlah yang terlayani KK 5.642, Jumlah yang belum terlayani KK 11.437 5. Tahun 2019 di 18 Desa , Jumlah jiwa yang terlayani sebanyak 6.260, Jumlah jiwa yang belum terlayani 49.641, Jumlah yang terlayani KK 1.565, Jumlah yang belum terlayani KK 12.410	
		b. Terhadap anggaran untuk capaian indikator kinerja jalan kabupaten dalam kondisi baik agar ditingkatkan sehingga diakhir tahun RPJMD 2016-2021 bisa tercapai		Dinas teknis mengikuti RKPD dan Plafon Anggaran yang tersedia serta menyesuaikan dengan skala prioritas penanganan/pemeliharaan	Ketersediaan anggaran

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				jalan untuk mencapai kondisi baik	
4.	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Untuk anggaran bantuan stimulant RTLH untuk tahun anggarn 2020 DPRD merekomendasikan untuk dinaikan menjadi minimal Rp. 12.500.000,00 s.d maksimal Rp. 15.000.000,00 per Unit	DISPERKIM LH	Program yang dilaksanakan dalam rangka penanganan RTLH, yaitu : 1. Program pengembangan perumahan. 1) Kegiatan fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu (P2MKM). 2) Pembangunan perumahan swadaya (DAK Bid. Perumahan) 3) Pembangunan perumahan (APBD Provinsi) Untuk kegiatan tahun 2020 sudah direncanakan pada tahun N-1 (2019) sehingga belum dapat disesuaikan, besarannya masih Rp. 10.000.000,- / unit. Penyesuaian besaran bansos RTLH direncanakan tahun 2021 sebesar Rp. 12.500.000,- /unit dengan perhitungan Rp. 10 juta untuk fisik dan Rp2.500.000,- untuk bantuan upah tenaga kerja	Bansos RTLH merupakan dana stimulant bagi masyarakat kurang mampu, dalam hal ini masih diperlukan swadaya, namun tidak semua calon penerima memiliki kemampuan untuk swadaya.

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyajian data Indikator Kasus pelanggaran Hukum disertai data Perda apa saja yang dilanggar dan berapa kasus	SATPOL PP	Sudah disampaikan pada indikator kinerja urusan	
6.	SOSIAL	Capaian Penyelenggaraan urusan sosial dapat dilihat dari meningkatnya jumlah cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2019 ditargetkan 16,16% terealisasi 70,65%, atau mencapai 436,11% sedangkan pada tahun 2018 data capaian sebesar 67,25% terkait angka ini DPRD mempertanyakan kevalidan dan keakuratan data yang disampaikan	DINAS SOSIAL	Angka 70,65% diperoleh dari total PMKS yang sudah mendapatkan pelayanan atau bantuan sosial dibagi dengan total PMKS di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Kepmensos No 84/HUK/2019 tahun 2019 total PMKS dikabupaten Kebumen adalah 154.739 Juta, sedangkan PMKS yang mendapatkan BPNT sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin no 13A/4/SK/HK.0202-10-2019 tentang perubahan jumlah penerima manfaat bantuan pangan non tunai di 458 di daerah Kabupaten/Kota tahun 2019, Kabupaten Kebumen mendapakan 126.775 KPM. Pencapaian kinerja yang jauh melampaui target disebabkan beberapa Program yang diluncurkan oleh Kementrian Sosial yang sebelumnya belum	

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				diperhitungkan dikarenakan adanya program BPNT. Solusinya adalah tahun 2020 di APBD perubahan akan dilakukan verval data DTKS	
7.	TENAGA KERJA	a. Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta untuk meningkatkan kualitas SDM dan menciptakan fleksibilitas tenaga kerja. b. Banyaknya tenaga kerja yang tidak memenuhi kompetensi dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada, untuk itu diperlukan pembangunan ketenagakerjaan dalam berbagai bidang dengan memberikan pelatihan-pelatihan berbagai sektor, serta perbaikan sistem penggajian. c. dalam penyampaian LKPJ agar disebutkan berapa jumlah pengangguran, berapa jumlah tenaga kerja yang terserap/sudah bekerja.	DISNAKER UMKM	a. perlu kebijakan pemerintah kabupaten kebumen dalam upaya menciptakan perluasan lapangan kerja yaitu dengan kebijakan membangun kawasan industry manufaktur, jasa ataupun industry sektor lainnya yang prinsipnya banyak menyerap tenaga kerja local dalam jumlah besar b. pemberian pelatihan kepada tenaga kerja dilakukan melalui balai latihan kerja sesuai program di BLKdan sesuai minat kerja, selain itu pelatihan dengan sasaran langsung di masyarakat juga sudah dilakukan dengan berbagai macam pelatihan c. jumlah angka pengangguran bersumber dari data BPS hanya dalam bentuk persentase, untuk angka tenaga kerja yang terserap diperoleh dari DISNAKER KUKM.	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Gerakan PKK melalui 10 Program Pokok PKK untuk lebih ditingkatkan dan mendapat perhatian yang cukup dari Pemerintah Kabupaten termasuk kepada KPAD (Kelompok Pemerhati Anak Desa)	DISPERMADES P3A	- Melakukan pembinaan dan koordinasi secara rutin tentang pengelolaan gerakan PKK, mulai dari tingkat kabupaten sampai	- Data-data untuk pendukung kegiatan PKK masih kurang valid dan up to date. - Masih adanya

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				desa, termasuk kelompok-kelompok PKK (RT/RW) - Mengupayakan penambahan anggaran PKK yang memadai, terutama untuk TP. PKK Kabupaten dan TP. PKK Kecamatan.	anggapan bahwa kegiatan PKK adalah kegiatan perempuan (ibu-ibu), sehingga peran laik-laki dalam kegiatan PKK masih kurang. - Penguasaan IT para kader PKK masih kurang. - Administrasi PKK masih belum tertib dikarenakan kesibukn kegiatan lainnya, atara lain untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. - Pada saat terjadi pergantian Ketua PKK, dukungan dari para pengurus yang tidak mendukung calon kepala pemerintahan terpilih berkurang, hal tersebut biasanya disebabkan oleh faktor politik, sehingga ada beberapa pengurus yang mengundurkan

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
					diri atau tidak aktif lagi dalam kegiatan PKK di wilayahnya.
9	PANGAN	Untuk pembentukan LPDM agar diprioritaskan di daerah-daerah kantong kemisikinan dan daerah-daerah rawan kekurangan pangan.	DISTAPANG	Lokasi pembangunan Lumbung Pangan Masyarkat (LPM) diprioritaskan untuk desa-desa rawan pangan, agar dengan adanya lumbung pangan, sehingga wilayah tersebut memiliki cadangan pangan yang dapat digunakan saat terjadi kerawanan pangan di wilayah setempat.	Tidak semua desa rawan pangan memiliki tanah milik kelompok atau hibah kepada kelompok untuk lokasi pembanguan lumbung karena dalam persyaratan pembangunan lumbung tidak dapat dibangun di atas tanah desa
				Lokasi pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) diprioritaskan untuk wilayah sentra produksi padi. LDPM diharapkan mampu menyerap gabah petani di wilayah tersebut, sehingga harga jual petani pada saat panen tidak jatuh. LDPM juga difungsikan sebagai usaha pengembangan ekonomi gapoktan melalui kegiatan distribusi/pemasaran atau pengolahan hasil serta difungsikan sebagai cadangan pangan di wilayah tersebut.	Sasaran pemberdayaan LDPM di prioritaskan untuk gapoktan yang telah memiliki embrio kegiatan usaha ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui kegiatan distribusi/ pemasaran dan pengelolaan hasil, sedangkan tidak semua gapoktan belum memiliki sumber daya yang

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
					cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
10	LINGKUNGAN HIDUP	Agar dilakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap masyarakat dialiran sungai khususnya sungai Lukulo dan sungai Wawar dan sungai-sungai lainnya pada umumnya untuk berperilaku sehat serta selalu menjaga kualitas air sungai	DISPERKIM LH	Program yang dilaksanakan yaitu ; 1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan a. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan b. Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup c. Kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3 d. Kegiatan penataan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup e. Kegiatan penerapan manajemen lingkugan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL (DBHCHT) 2. Program peningkatan pengendalian polusi a. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Kegiatan yang dilaksanakan anatara lain pemantauan	Masih terjadi pencemaran air yang berasal dari limbah domestik antara lain diakibatkan adanya perilaku masyarakat BAB sembarangan, pembuangan limbah industry kecil langsung ke saungai dan penggunaan pupuk buatan untuk pertanian/perkebuman (Proses Pencucian)

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				kualitas air secara periodik, sosialisai dan pembinaan kepada masyarakat serta pembuatan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) industry kecil.	
11	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pemerintah Kabupaten agar mencanangkan Program Pembuatan Akta Kelahiran Gratis untuk Masyarakat Kurang Mampu/Miskin serta sosialisasi akan pentingnya Akta Kelahiran bagi bayi yang lahir dikemudian hari.	DISDUKCAPIL	Untuk pembuatan Akta Kelahiran di Kabupaten Kebumen, sudah Gratis, dan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 untuk, untuk pembuatan Akta Kelahiran yang lebih dari 60 hari ada denda keterlambatan sebesar Rp.20.00,- selanjutnya DInas Kependudukan dan Catatan Sipil setiap tahunya telah mengadakan sosialisasi kepada kecamatan, desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan telah bekerja sama dengan 35 Puskesmas, 13 Rumah Sakit, dan 3 Klinik bersalin yang ada di Kabupaten Kebumen dengan progam inovasi BALADEWA LAHIR (Bayi Lahir Pulang Membawa Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga).	
12	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pemerintah Kabupaten untuk segera membuat Perbup tentang Kawasan Perdesaan	DISPERMADES P3A	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembangunan	- Rencana Strategis 5 kawasan perdesaan

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
	DAN DESA			Kawasan Perdesaan sedang dalam proses. Paling lambat akhir tahun 2020 telah tersusun draft yang akan mulai dibahas awal tahun 2021	yang telah disusun bekerjasama dengan UGM belum sesuai dengan sistematika RPKP sesuai ketentuan dari Kemendes PDTT RI. - Penyusunan Perbup dimaksud sebagai salah satu syarat akes Tenaga Ahli Pendamping Kawasan dan progran/kegiatan lain di Kemendes PDTT RI paling lambat bulan Maret 2021, namun dengan ketiadaan anggaran pada tahun 2020 ini maka akan dilakukan paya dengan segala keterbatasan personil dan kompetensi yang ada untuk semaksimal mungkin dapat menyusun RPKP kerjasama anrata BAPPEDA dan Dispermades P3A. Selanjutnya

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
					akan dievaluasi pada akhir tahun 2020, apabila progresnya masih belum memenuhi target dengan konsultan/perguruab tinggi sehingga target Maret 2021 dapat diselesaikan.
13	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemerintah Kabupaten untuk segera membuat Perbup tentang Kampung KB.	DINSOSPPKB	penyusunan draf Peraturan Bupati terkait dengan kelompok kerja fasilitasi masyarakat peduli Keluarga berencana di kabupaten kebumen	
14	PERHUBUNGAN	terhadap kegiatan Angkutan Gratis DPRD Kabupaten Kebumen dengan menimbang beberapa hal dan kendala dilapangan merekomendasikan untuk ditiadakan dan ini sudah dilakukan di tahun anggaran 2020	DISHUB	1. Program Angkuan Gartis di tahun 2020 ditiadakan karena pandemi Covid-19 dan pelajar sbagai sasaran utama melakukan pembelajaran di rumah masing-masing 2. Program Angkutan Gratis di Tahun 2021 direncanakan diadakan kembali dengan sasaran Warga Miskin sebagai Pelaku UMKM, Pedagang Pasar yang terdampak Covid-19 di 5 (lima) kecamatan dengan indeks kemiskinan tertinggi, dengan perencanaan	

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : a. Penentuan Rangking kecamtan termiskin didasari dari BAPPEDA Kab. Kebumen dengan perhitungan Desil 1 data DTKS Dinas Sosial PPKB Kab. Kebumen b. Data calon penerima manfaat angkutan gratis dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen, karena kecamatan Poncowarno tidak ada jalur trayek maka diganti dengan usulan dibawahnya dengan rincian target sasaran sebagai berikut : 1) Karangsambung target penerima ; 85 2) Karanggayam target penerima : 171 3) Sadang target penerima : 45 4) Sempor target penerima : 83 5) Rowokele taget penerima :	

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				615 + Jumlah target penerima : 1000 c. Data by name by adress Calon Penerima Angkutan Gratis diperoleh dari data kemiskinan DTKS Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen, yang diverifikasi dengan data DISNAKERTRANS, UMKM, Koperasi (Data UMKM) dan data Disperindag (Data Pedagang Pasar)	
15	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	terhadap SDM pengelola urusan Komunikasi dan Informatika untuk diberikan pelatihan yang maksimal dan perlunya pengawasan terhadap kualitas data elektronik secara lebih mendalam.	DISKOMINFO	1. Telah dilakukan pengembangan SDM urusan Komunikasi dan Informatika berupa Pelatihan untuk 23 orang karyawan Dinas Kominfo, 70 Perangkat Daerah dan 100 desa 2. Pengawasan terhadap kualitas data elektronik telah dilakukan dengan : a. Dipastikan keutuhannya, artinya data dari produsen sampai kepada penerima tanpa ada perubahan; b. Hanya dapat diakses oleh orang yang berhak	

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				mendapatkan akses; c. Data elektronik dapat diakses kapan saja dan dimana saja sesuai SOP yang ada; d. Sistem Informasi yang digunakan telah melalui pengawasan dan pengujian sesuai dengan standar keamanan informasi	
16	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	terhadap penyajian laporan terkait Prosentase Koperasi Aktif agar didukung data berapa jumlah koperasi pada saat periode laporan serta penyajian jumlah UMKM agar bisa dikelompokan per jenis/bidang UMKM	DISNAKER	a. Pendataan ulang UMKM di Kabupaten Kebumen b. Membuat data base UMKM By Name, By Adress serta perbidang usahanya	
17	PENANAMAN MODAL	terinformasi adanya Letter Of Intens (LOI) yang sudah ditandatangani oleh Bupati DPRD juga mengapresiasi. Terhadap Letter of Intens (LOI) yang sudah ditandatangani di Tahun 2019 seperti Rencana Investasi Industri Garmen di Kecamatan Alian dan Industri Peternakan di Kecamatan Pejagoan untuk bisa dikawal dan dilanjutkan untuk bisa terealisasi dengan tetap memegang aturan-aturan yang telah ditentukan	DPMPTSP	1. LOL tersebut merupakan hasil dari kegiatan CJIBF) di hotel bidakara Jakarta tanggal 5 november 2019 2. Dokumen LOL dikawal bersama DPMPTSP Kab. Kebumen dan DPMPTSP Prov Jateng 3. Rencana Investasi industry garmen di Kecamatan alian telah memiliki lahan di Desa Bojongsari Kecamatan Alian seluas 8 Ha. 4. Rencana investasi industry peternakan di Kecamatan Pejagoan telah memiliki Nomor ijin berusaha dan mengurus	Kurang aktifnya respon dari investor dalam mengurus aktivitas penanaman modalnya di Kabupaten Kebumen

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				kelengkapan komitmen izin usaha.	
18	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DPRD merekomendasikan untuk adanya peningkatan nilai tali asih bagi atlet dan pelaku olahraga yang berprestasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	DISPORAWISATA	Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga pada Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestas masih dibawah standar harga dg Kab. Lain dan kami mengusulkan Kenaikan Nilai Standarisasi harga Ke Tim TAPD Kab Kebumen pada Th 2020	Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga pada Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestas masih dibawah standar harga dg Kab. Lain dan kami mengusulkan Kenaikan Nilai Standarisasi harga Ke Tim TAPD Kab Kebumen pada Th 2020
19	KEBUDAYAAN	a. terhadap Jumlah Group Kesenian Jam Janeng, Lengger dan Cepetan agar diupayakan tidak terjadi penurunan, apabila terjadi maka perlu disampaikan penyebabnya sehinggga jangan sampai ditahun berikutnya akan terus mengalami penurunan b. DPRD merekomendasikan untuk tersedianya sebuah Museum	DISDIK	1. Masa berlaku Surat Keterangan terdaftar bagi Organisasi Kesenian 5 (lima) Tahun dan penerbitnya berdasarkan permintaan dari organisasi kesenian yang bersangkutan 2. Pendataan organisasi kebudayaan	Organisasi Kesenian cenderung pasif Kabupaten Kebumen belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				Secara Prinsip Dinas Pendidikan mendukung adanya Museum di Kabupaten Kebumen	
20	PERPUSTAKAAN	Dengan telah disetujuinya Perda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh DPRD pada Masa Sidang I di Tahun 2020 agar segera Bupati kebumen menyiapkan Peraturan Bupati sebagai aturan turunan sebagai amanat Perda dimaksud.	DISARPUS	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 telah menyusun Draft Peraturan Bupati Kebumen sebagai aturan turunan Perda sebagai berikut : 1. Peraturan Bupati Kebumen tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perpustakaan 2. Peraturan Bupati Kebumen tentang Pendaftaran dan Pelestarian Naskah Kuno	Draft Peraturan Bupati yang diajukan ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen masih ada revisi dan masih dalam perbaikan
21	ARSIP	Dengan telah disetujuinya Perda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kearsipan oleh DPRD pada Masa Sidang I di Tahun 2020 agar segera Bupati kebumen menyiapkan Peraturan Bupati sebagai aturan turunan sebagai amanat Perda dimaksud.	DISARPUS	Menyusun Peraturan Bupati sebagai aturan turunan	Sebelum disahkan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kearsipan sudah memiliki beberapa Peraturan Bupati terkait dengan Pengelolaan Kearsipan sebagai berikut : 1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2009,

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
					Tentang Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen; 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2009, Tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan; 3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2009, Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian; 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 25 Tahun 2014, Tentang Pedoman Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen. 5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2014, Tentang Pedoman

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
					Pengurusan Surat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen. 6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2014, Tentang Pedoman Penataan Berkas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen. 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pengelolaan arsip statis di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen. 8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 29 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Arsip Vital di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
					Kebumen. 9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen. 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen.
22	PERTANAHAN	Pemerintah Daerah harus menginventarisir aset-aset daerah termasuk tanah negara yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen untuk dimanfaatkan, dikelola, dijaga, dan didokumentasikan, selain itu perlu disediakan regulasinya agar dapat menjadi potensi sumber pendapatan asli daerah.	BPKAD BAG. PEMERINTAHAN	Pemerintah sudah menginventarisasi aset yang dikuasai oleh pemda (Dokumen aset Daerah) yaitu KIB A,B,C	
23	KELAUTAN DAN PERIKANAN	a. agar pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan saja	DINLUTKAN	1. Akan dilakukan penyesuaian LKPJ, dimana indikator untuk	1. Tidak ada permasalahan dalam

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
		sehingga hasil pengukuran kinerja lebih riil, terukur dan obyektif b. agar dilakukan identivikasi lahan atau tanah yang digunakan oleh kelompok untuk usaha garam untuk selanjutnya agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan		produksi garam akan dikeluarkan. 2. Untuk tahun 2020 pengembangan produksi garam masuk dalam Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul. Untuk tahun 2021 masuk dalam Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kegiatan Penyedian dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengelolaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemberian Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Usaha garam yang dilakukan di tahun 2020 dengan pemberdayaan kelompok usaha garam rakyat dan koperasi dilakukan pada :	pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019, Begitupun dalam penyusunan LKPJ. Hanya saja terkait uraian tambahan indikator produksi garam itu merupakan bukti kalau Dinas Kelautan dan Perikanan selalu melakukan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan perkembangan sektor usaha kelautan dan perikkanan. 2. Dalam pelaksanaan identifikasi lahan garam pada awalnya mengalami kesulitan karena lokasi usaha tambak garam yang terpencar dari Puring sampaai Ke Mirit. Namun dengan adanya koordinasi baik dengan pihak

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				a. Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit pada lahan pemeritah desa disebelah utara/diluar lahan TNI b. Desa Miritpetikusan Kecamatan Mirit pada lahan pemerintah desa disebelah utara/diluar lahan TNI c. Desa Kaibon Kecamatan Ambal pada lahan pemerintah desa disebelah utara/diluar lahan TNI d. Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal pada lahan pemerintah desa disebelah utara/ diluar lahan TNI e. Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong pada lahan Pemerintah Kabupaten Kebumen peruntukan tambak udang hak pakai Dinas Kelautan dan Perikanan f. Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan, Desa Waluyorejo, Sidoharjo dan Surorejan Kecamatan Puring dilaksanakan pada lahan	pemerintahan desa maupun instansi terkait akhirnya identifikasi lahan dapat dilakukan. Dan dengan lahan yang sudah jelas identifikasinya akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang, Salatiga Demak, Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				pemerintah Kabupaten Kebumen peruntukan kebun bibit hak pakaian Dinas Pertanian dan Pangan	
24	PARIWISATA	Agar dilakukan evaluasi dan identivikasi faktor-faktor penyebab menurunnya jumlah kunjungan ke 5 (lima) objek wisata yaitu Goa Jatijajar, Pantai Logending, Pantai Petanahan, Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang. karena dari sektor ini yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan terkait penyebab penurunan jumlah kunjungan untuk disajikan dalam laporan	DISPORAWISATA	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi sumber sumber Pendapatan aerah 1. Banyaknya bermunculan Daya tarik Wisata baru; 2. Kebocoran yang diakibatkan premanisme dengan penguasaan tiketing di sore hari; 3. Belum Optimalnya peran dari aparat keamanan; 4. pintu barat Obwis Pantai Suwuk yang dikuasai oknum; 5. Banyaknya infrastruktur menuju obyek wisata yang rusak serta 6. Adanya rehab dan revitalisasi sarpras Obwis yang dikelola Pemerintah Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi sumber sumber Pendapatan aerah 1. Banyaknya bermunculan Daya tarik Wisata baru; 2. Kebocoran yang diakibatkan premanisme dengan penguasaan tiketing di sore hari; 3. Belum Optimalnya peran dari aparat keamanan 4. pintu barat Obwis Pantai Suwuk yang dikuasai oknum 5. Banyaknya

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
					infrastruktur menuju obyek wisata yang rusak serta 6. Adanya rehab dan revitalisasi sarpras Obwis yang dikelola Pemerintah Daerah
25	PERTANIAN	Agar dilakukan evaluasi dan identifikasi faktor-faktor penyebab menurunnya Produktivitas Padi, Produktivitas Jagung dan Produktivitas Kedelai dan terkait penyebab penurunan jumlah produktifitas untuk disajikan dalam laporan	DISTAPANG	Upaya-upaya peningkatan dan pencapaian target produktifitas Pajale adalah : a. Meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan monitoring secara lebih intensif b. Budidaya baik sesuai kondisi iklim seperti pemilihan komoditi dan melakukan kegiatan tanam tepat waktu c. Melakukan gerakan pengendalian OPT d. Melakukan koordinasi di tingkat lapangan e. Melakukan pendataan dan pelaporan secara berjenjang Kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan kegiatan: a. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, dengan	Dampak Perubahan Iklim (DP) musim kemarau tahun 2019 ini periodenya maju dan berlangsung lama sehingga meyebabkan permasalahan kurangnya ketersedian air terutama untuk sawah tadah hujan dan umumnya swah irigasi yang sumber airnya juga mullai berkurang dan sulit diakses. Berdasarkan data BMKG curah hujan Kabupaten Kebumen bulan Januari – Juli menunjukkan adanya penurunan yaitu sebagai berikut : a. Januari : 301 – 400

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana pertanian berupa Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Jalan Usaha Tani (JUT), dam parit, Jaringan Irigasi Air Permukaan (JIAP), dan Jaringan Irigasi AIR Tanah (JIAT) b. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna, yaitu pengadaan traktor dan pompa air c. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan, dengan kegiatan sekolah Lapangan Pengendalian Hama Tanaman (SLPHT) dan Sekolah Lapangan Iklim (SLI) Pengembangan Intensifikasi tanaman padi dan palawija, dengan dem area tanaman padi dan palawija	mm b. Februari : 301 – 400 mm c. Maret : 301 – 400 mm d. April : 201 – 300 mm e. Mei : 151 – 200 mm f. Juni : 51 – 100 mm g. Juli : 51 – 100 mm Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan ketersedian air dan akan sangat berpengaruh terhadap proses budidaya tanaman mulai pengolahan tanah sampai dengan masa panen. Berdasarkan hasil Monitoring kondisi di lapangan rata-rata di semua kecamatan di Kabupaten Kebumen mengalami kekeringan untuk tanaman padi. Jumlah keseluruhan lahan sawah yang mengalami kekeringan di Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil pemetaan di lapangan

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
					diperkirakan seluas 2952 Ha. Adapun beberapa wilayah kecamatan yang mengalami kekeringan cukup luas yaitu sebagai berikut : 1. Puring : 547 Ha 2. Ayah : 461 Ha 3. Buayan : 340 Ha 4. Buluspesantren: 213 Ha 5. Gombong : 210 Ha 6. Kebumen : 188 Ha 7. Kuwarasan : 175 Ha 8. Sadang : 85 Ha 9. Karangsambung: 74 Ha 10. Rowokele : 71 Ha Kondisi Tanam dan Panen Musim Tanam MT I dan MT II Tahun 2019 berdasarkan data petugas SP pada MT II (April-September 2019) terjadi mundur tanam yang dipengaruhi faktor ketersediaan air karena musim kemarau yang mengalami maju waktunya mulai Juni dan Berlangsung lama

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
					sampai bulan Oktober. Sebagian besar wilayah Kecamatan di Kabupaten Kebumen taam padi mengalami mundur dan puncak tanamnya baru bulan Mei dengan luasan 22.313,9 Ha, sedangkan jagung juga puncak tanam mei seluas 621,9 Ha. Namun demikian kondisinyapun kurang optimal karena mulai Juni sampai Oktober akibat musim Kemarau terjadi kekeringan sehinggga tanaman yang sudah ditanam mengalami kekuragan air. Adapun untuk tanaman padi dan jagung yang masa tanamnya seharusnya September mundur menjadi November-Desember mengikuti periode mulai turunnya hujan. Luas panen padi sampai Januari-Desember

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
					2019 sebanyak 73213,60 Ha Produktifitas rata – ratanya 6,339 Ton/Ha yang puncak panennya yaitu di Bulan Agustus Seluas 22.049,7 Ha sedangkan untuk tanaman jagung sebanyak 5.032 Ha denga prioritas rata-rata 6,269 Ton/Ha yang puncak panennya Agustus 818,3 Ha. Terkait dengan tanaman padi maupun jagung yang baru bisa ditanam November – Desember maka akan dipanen sekitar Bulan Maret-April 2020
26	PERINDUSTRIAN	a. khusus untuk target jumlah IKM yang produknya berstandar SNI agar dievaluasi jangan terlalu banyak target yang ditetapkan	DISPERINDAGSAR	Dinas Perindag sudah melakukan koordinasi dalam KPKNL siap membantu	Penilaian asset dan lelang pengelolan kawasan industri
		b. Terkait Capaian terbangunnya Kawasan Industri yang mana target 20% di Tahun 2019 yang mana kami DPRD beranggapan bahwa 20% tersebut adalah sampai dengan terbitnya izin Hak Pengelolaan Lahan (HPL) akan tetapi sampai saat ini Pemkab belum menerima izin HPL dari Kementrian ATR sehinggal penilaian terhadap kinerja ini belum mencapai target,		- Penilaian ASSET/BMD - Lelang Pengelolan kawasan industri - Membuat perjanjian antara pemkab dengan pemenang lelang - Bagian Pemerintahan setda telah berkoodinasi dengan	Kegiatan tersebut dapat dilakukan setelah HPL turun dari Kementrian ATR/BPN

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
		DPRD merekomendasikan agar segera dilakukan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh RPJMD		Kementrian ATR/BPN untuk mempercepat turunnya HPL	
		c. Khusus untuk target jumlah IKM yang produknya berstandar SNI agar dievaluasi jangan terlalu banyak target yang ditetapkan	DISPERINDAG	Melaksanakan edukasi/pelatihan kepada IKM untuk menghasilkan produk dengan StandarNasional Indonesia (SNI) agar mampu bersaing dengan produk luar seperti melaksanakan pelatihan dari tahap dasar GMP, HACCP, sertifikasi jaminan halal, MD	Untuk pelatihan/fasilitasi di tahun 2020, beberapa tidak dapat dilaksanakan karena terkena rasionalisasi untuk penanganan pandemik covid di tahun 2021 diusulkan kembali
				Melakukan riset dalam rangka pengembangan produk-produk IKM Kabupaten Kebumen, selain itu perlu mengajak dunia usaha untuk ikut berpartisiasi dalam rangka riset pengembangan produk produk lokal	Anggaran Pemerintah tidak mencukupi untuk melaksanakan Riset dalam rangka pengembangan produk IKM dalam rangka memperoleh SNI
27	PERDAGANGAN	Agar Persentase Pasar Tradisional Dalam Kondisi Baik diimbangi dengan Kondisi Kebersihan Yang Baik serta Fasilitas Umum Yang Cukup seperti WC Umum dan Mushola	DISPERINDAGSAR	Sesuai Perda No. 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan pasar rakyat jumlah Pasar Rakyat yang dikelola Dinas Perindag ada 40 Lokasi Pasar. Jumlah Pasar sesuai dalam kondisi baik tahun 2019 ada 32 pasar (80%) dengan fasilitas yang cukup seperti WC,dll. Sedangkan untuk pasar yang kondisi belum baik ada 8 pasar	Belum maksimalnya penambahan pasar dalam kondisi baik karena butuh ketersedian anggaran untuk mencapai pasar kondisi baik 100%

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				yaitu pasar Kelapa Prembun, Pasar Kutowinangun 2, Pasar Hewan Tamanrejo, Pasar Dorowati, Pasar Karangjambu, Pasar Tanjungsari, Pasar Kayu Gombong dan Pasar Jatiluhur.	

Tabel 3.102
Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2019 dan Rencana tindak lanjut
Berdasarkan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
1.	PERENCANAAN	a. Bupati untuk merekrut dan menambah ASN yang kompeten dan professional di lingkup BP3AD	BAP3DA	a. Bappeda telah menyusun bezzeting dan mengajukan SDM sesuai formasi kebutuhan organisasi kepada BKPPD b. Perekrutan Tenaga Analisis (kontrak) untuk membantu kekurangan ASN c. Kerjasama dengan pihak ketiga (Perguruan Tinggi, Praktisi/Akademisi dna konsultan ahli) dalam penyusunan dokumen2 pendukung	Formasi tambahan ASN saat ini sangat terbatas dan diutamakan untuk pemenuhan SDM di urusan wajib pelayanan dasar seperti Pendidikan (guru) dan kesehatan (dokter, perawat)

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				perencanaan pembangunan daerah	
		b. Bupati untuk segera selesaikan kesamaan dan kesatuan data dalam pelbagai bidang.	a. Untuk pengelolaan satu data, sesuai perda SOTK terbaru, masuk dalam urusan Statistik yang diampu oleh Dinas Kominfo. BAPPEDA selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo terkait kebutuhan data-data yang akan dianalisa sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan b. Integrasi	Aplikasi SIPD terkait menu Data Pembangunan Daerah saat ini belum siap sepenuhnya (dalam proses pengembangan Kemendagri)	

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
			data saat ini telah diatur dalam Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD dengan menggunakan aplikasi Sistem Infromasi Pemerintahan Daerah Kemendagri		
		c. Segera selesaikan revisi Perda RTRW, Perda RDTR dan LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan)	a. Prosess revisi Perda RTRW sampai saat ini masih di Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi Gubernur untuk selanjutnya diajukan Persetujuan Substansi dari Kementerian		

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
			ATR dan BPN. Proses untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur berjalan secara simultan dengan proses Validasi KLHS RRTR di Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah. b. RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten Kebumen sudah disusun di beberapa Kawasan Perkotaan yaitu Kawasan Perkotaan Kebumen, Kawasan Perkotaan		

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
			Gombong, Kawasan Perkotaan Karanganyar. sedangkan penetapan Perda RDTR akan dilakukan setelah perda		
		c. Bupati agar memberikan kepercayaan kepada BAP3DA secara penuh tanpa ada intevensi dari pihak manapun sehingga menjadi perangkat daerah penunjang yang profesional.	Terima kasih atas rekomendasi yang disampaian. Pada prinsipnya, Bappeda selalu berupaya melaksanakan semua tugas yang diberikan dengan optimal dan professional. Bappeda juga membutuhkan dukungan dan sinergi yang baik dan optimal dengan seluruh pemangku kepentingan		
2.	KEUANGAN	a. Segera revisi Perda yang mengatur tentang	a. Terkait	Implementasi awal	

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
		Retribusi Daerah yang sudah lama tidak mengalami penyesuaian. b. Masukan variable tingkat kepatuhan membayar pajak tingkat desa kedalam penentuan alokasi anggaran, program atau kegiatan yang akan diterima oleh Desa	dengan Perda yang mengatur tentang Retribusi Daerah, Bappenda telah melaksanakan koordinasi dengan OPD pengelolaan pendapatan lainnya untuk dapat dicermati dan dikaji, mengenai kemungkinan penyesuaian beberapa tarif retribusi. Disperindag telah merubah Perda Retribusi lama menjadi Perda nomor 3/2009 tentang Pelayanan Pasar. b. Terkait	mengalami kendala karena pedagang menghendaki adanya pengurangan tarif	

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
			dengan variabel tingkat kepatuhan membayar pajak telah dikoordinasikan dengan Bagian Pembangunan untuk penggunaan bantuan semen		
3.	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	a. Agar dilakukan evaluasi terkait metode dan tempat pelatihan Pegawai.	BKPPD	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai meliputi: a. Pengiriman Peserta Diklat ke Lembaga Diklat yang terakreditasi (Lembaga Diklat Nasional/Regional) b. Penyeleenggaraan Diklat Pola Kerjasama dengan Lembaga Diklat (Kerjasama BKPPD Kabupaten Kebumen dengan Badan Pengembangan Sumber Daya	

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				Manusia Provinsi Jawa Tengah) - Ijin Penyelenggaraan dan Penjaminan Mutu dikeluarkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, meliputi : kurikulum, metode, jadwal, narasumber, dan tempat penyelenggaraan diklat. - Evaluasi terhadap narasumber, metode pembelajaran dan penyelenggaraan/ tempat penyelenggaraan dilaksanakan setiap akhir kegiatan diklat	
		b. Maksimalkan Penegakan Disiplin kepada PNS, Instansi dan OPD secara massif dan terus menerus, berdayakan Satpol PP secara penuh.		Melaksanakan penegakan disiplin PNS melibatkan instansi terkait yaitu: 1. Satpol PP 2. Bagian Organisasi 3. Inspektorat Secara rutin pada	Anggaran belum mencukupi untuk melaksanakan Monev Penegakan Disiplin PNS, agar lebih banyak sasaran pada

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				setiap tahun nya	setiap tahun nya
		c. ke Depan agar dalam SOTK, bupati dan baperjakat betul-betul melihat kemampuan, kompetensi dan penempatan yang tepat (the right man of the right place)		Dalam proses penataan pejabat dalam rangka perubahan maupun SOTK selama ini Bupati dan Tim Penilai Kinerja PNS (Baperjakat) telah melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dengan aturan lainya yang berlaku. Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II) dilaksanakan melalui seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi JPT dengan tahapan seleksi meliputi Seleksi Administrasi, Uji Kompetensi Manjerial (assessment), Uji Kompetensi Bidang (penulisan makalah dan wawancara) dan penelusuran rekam jejak,	

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
				sedangkan rotasi/mutasi JPT dilaksanakan dengan proses uji kompetensi diantara pejabat pimpinan tinggi pratama dalam satu instansi oleh Panitia Seleksi Rotasi/Mutasi dimana pelaksanaanya berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pengisian dan penataan Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) dilaksanakan melaui siding Tim Penilai Kinerja PNS (Baperjakat) dengan mempertimbangkan hasil assessment dari lembaga terakreditasi, pendidikan,golongan, dan usulan dari OPD. Ke depan Pemkab Kebumen akan terus melaksanakan mekanisme ini sehingga diharapkan dapat memperoleh calon-calon pejabat yang tepat, berkemampuan tinggi, kompeten, dan berintegritas (*the man on the right place*)	

NO	URUSAN	REKOMENDASI DPRD	OPD TERKAIT	TINDAKLANJUT	PERMASALAHAN
4.	PENGAWASAN	Inspektorat dengan tidak mengesampingkan tugas pemeriksaan inspektorat untuk mengedepankan fungsi pembinaan. Hal ini dirasakan oleh SKPD, bahwa pembinaan yang dilakukan inspektorat sangatlah minim, jangan sampai terkesan tidak melakukan pembinaan tapi pemeriksaan bahkan menyalahkan	INSPEKTORAT	a. telah melakukan advisory/training role yang sudah dilaksanakan ataupun yang belum dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2020 b. melakukan layanan konsultasi yang diberikan kepada OPD/Desas c. Penguatan Kelembagaan Inspektorat dengan menambah fungsi dan satu irban pembantu khusus /investigasi	a. Jumlah APIP masih kurang dari 86 orang yang ada baru 41 orang b. Kompetisi APIP masih perlu ditingkatkan c. Alokasi anggaran belum memenuhi ketentuan (0,5%) dari total APBD

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat maupun provinsi kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Tingkat Pemerintah tingkat atasnya

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Kebumen adalah DIPA-090.02.4.039600/2020 dan DIPA-026.04.4.039596/2020. Tugas Pembantuan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 diterima dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perdagangan melalui Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) untuk pembangunan Pasar Kabekelan di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun dan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan Kesempatan Kerja dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 576.390.000 (*lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) untuk Pemberdayaan Tenaga Kerja.

Adapun Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yaitu berdasarkan DIPA NOMOR: SP DIPA- 018.11.3.039427/2020 secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat adalah 100% dengan realisasi keuangan dari target Rp.

3.076.390.000, Rp. 3.043.375.500 atau sebesar 99%. Sementara untuk capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah 94,13% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 97,38% dari target Rp. 7.180.820.800 realisasi Rp. 6.993.141.150.

Tabel 4.1
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2020

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
1.	Kementerian Ketenagakerjaan RI / Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan Kesempatan Kerja	DIPA-026.04.4.039596/2020	Program : Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja / Kegiatan : Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja / Tenaga Kerja yang diperdayakan melalui sistem padat karya (60 orang)	Kabupaten Kebumen	Dinas Tenaga Kerja dan KUKM Kab. Kebumen	151.500.000	148.769.400	98,20	60 orang	100	
			Program : Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja / Kegiatan : Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja / Wirausaha Baru (120 orang)	Kabupaten Kebumen	Dinas Tenaga Kerja dan KUKM Kab. Kebumen	360.000.000	354.676.100	98,52	120 orang	100	
			Program : Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja / Kegiatan : Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja / Administrasi Dana Tugas Pembantuan	Kabupaten Kebumen	Dinas Tenaga Kerja dan KUKM Kab. Kebumen	64.890.000	52.895.000	81,51	100	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
2.	Kementrian Perdagangan RI	DIPA-090.02.4.039600/2020	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri / Kegiatan Pengembangan Sarana DistribusiPerdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan / Output Kegiatan sarana perdagangan yang dibangun/direvitalisasi	Kabupaten Kebumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kebumen	2.500.000.000	2.487.035.000	99,48	1	100	
3.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	DIPA NOMOR: SP DIPA-018.11.3.039427/2020	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat/ Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan/ Layanan Stabilisasi Harga komoditas pangan strategis di tingkat Produsen dan Konsumen	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	554.000.000	554.000.000	100	7 Unit	100	
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	DIPA NOMOR: SP DIPA-018.11.3.039427/2020	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat/ Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	554.000.000	554.000.000	100	7 unit	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			Harga Pangan/ Layanan Stabilisasi Harga komoditas pangan strategis di tingkat Produsen dan Konsumen								
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	DIPA NOMOR: SP DIPA-018.11.3.039427/ 2020	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat/ Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan/ Lumbung Pangan Masyarakat	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	86.090.000	86.090.000	100	2 unit	100	
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	DIPA NOMOR: SP DIPA-018.11.3.039427/ 2020	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat/ Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan/ Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	810.285.800	810.195.800	99, 99	21 klp	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	DIPA NOMOR: SP DIPA-018.11.3.039427/ 2020	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat/ Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan/Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	17.955.000	17.955.000	100	1 kab	100	
8	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	SP DIPA-018.03.4.039151/ 2020	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan/Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia/Kawasan Padi/Kawasan Padi Irigasi/Penyaluran Sarana Produksi/Pengembangan Padi Bebas Residu	Kabupaten Kebumen							
			- Bantuan Benih Padi (25 kg/ha) Kab Kebumen	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	37.500.000	35.962.500	95, 90	3750 kg	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			- Bantuan Pupuk organik non subsidi plus ongkir dan atau pembenah tanah (1 pkt/ha) Kab Kebumen	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	94.500.000	66.375.000	70, 24	45000 kg	100	
			- Bantuan Bio Pestisida (1 paket/ha) Kab Kebumen	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	12.900.000	12.092.850	93, 74	22500 g	100	
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	SP DIPA-018.03.4.039151/2020	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan/Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan/Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat/Melaksanakan Penyaluran Benih Padi Bersertifikat/Bantuan Benih Padi Inbrida (128.184 Ha)/Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	1.525.000.000	1.462.475.000	95, 90	152.500 kg	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			Masyarakat/Pemda/Kebumen								
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	SP DIPA-018.03.4.039151/2020	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan/Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat/Melaksanakan Penyaluran Benih Jagung Bersertifikat/Bantuan Benih Jagung Hibrida Umum 3 (108.145 Ha)/Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda/Kebumen	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	2.192.250.000	2.186.325.000	99,73	59.250 kg	100	
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	SP DIPA-018.03.4.039151/2020	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan/Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	10.000.000	9.000.000	90	1 Paket	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			Pangan/Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah/Scanner dan Printer								
			Jumlah Bidang Urusan Tanaman	Kabupaten Kebumen		3.872.150.000	3.772.230.350	97, 42			
12	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	DIPA-018.08.4.039158/ 2020	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian/ Jaringan Irigasi Tersier/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersiaer	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	550.000.000	550.000.000	100	500 Ha	100	
13	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	DIPA-018.08.4.039158/ 2020	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian/ Irigasi Perpompaan Irigasi Perpompaan	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	381.000.000	353.187.000	92, 70	93 Ha	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			Besar Wilayah Barat								
14	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	DIPA-018.08.4.039158/ 2020	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian/ Embung Pertanian/ Pembangunan Embung Pertanian	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	120.000.000	120.000.000	100,00	30 Ha	100	
15	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	DIPA-018.08.4.039158/ 2020	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian/ Layanan Dukungan Manajemen Satker/ Tanpa Sub Output/ Layanan manajemen dan perkantoran	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	135.000.000	84.107.000	62,30	-	100	
16	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	DIPA-018.08.4.039158/ 2020	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Fasilitasi	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten	317.550.000	316.780.000	99,76	-	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			Pupuk dan Pestisida/ e-RDKK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani/ Tanpa Sub Output/ Penyusunan dan penginputan e-RDKK mendukung kartu tani		Kebumen						
17	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	DIPA-018.08.4.039158/ 2020	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Fasilitasi Pupuk dan Pestisida/ Pelaksanaan KP3 Mendukung Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	84.500.000	83.358.000	98,65	-	100	
18	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	DIPA-018.08.4.039158/ 2020	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Fasilitasi Pembiayaan Pertanian/ Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Pembiayaan Pertanian/ Tanpa Sub Output/ Persiapan dan pelaksanaan bimtek	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	27.000.000	26.550.000	98,33	-	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			lingkup pembiayaan pertanian								
19	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	DIPA-018.08.4.039158/ 2020	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Fasilitasi Pembiayaan Pertanian/ Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Pembiayaan Pertanian/ Tanpa Sub Output/ Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	225.290.000	218.688.000	97,07	-	100	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Pertanian			1.840.340.000	1.752.670.000	95,24			
20	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	DIPA NOMOR: SP DIPA-018.11.3.039427/ 2020	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat/ Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan/	Kabupaten Kebumen	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	554.000.000	554.000.000	100,00	7 unit	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			Layanan Stabilisasi Harga komoditas pangan strategis di tingkat Produsen dan Konsumen								

Sumber : data diolah 2020

4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya

Tabel 4.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya yang dilaksanakan oleh Desa

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN RINCIAN KEGIATAN	DESA	SKPD PEMBERI TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepala Pemerintahan Desa	449 Desa	BPKAD SELAKU PPKD	9.677.560.000,00	9.657.463.900,00	99,8%	Tidak dicairkan sebesar Rp 20.096.100 sebanyak 1 Desa yaitu Desa Jladri Kec. Buayan	100%	DISPERMADES P3A
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	449 Desa	BPKAD SELAKU PPKD	3. 733.986.000,00	3.728.996.300,00	99,9%	Tidak dicaikan sebesar Rp 4.989.700,00 sebanyak 1 Desa yaitu Desa Jladri Kec Buayan	100%	DISPERMADES P3A
3	Belanja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	449 Desa	BPKAD SELAKU PPKD	164.654.912.000,00	164.654.841.500,00	100%	100%	100%	DISPERMADES P3A
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat yang Bersumber dari APBN	449 DESA	BPKAD SELAKU PPKD	407.006.031.000,00	406.697.733.400,00	99,92%	Transfer langsung dari pusat ke RKD (Rekening Kas Desa)	100%	DISPERMADES P3A

5	Belanja Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS Kades dan Perangkat Desa	449 DESA	BPKAD SELAKU PPKD	5.366.616.000,00	5.277.202.000,00	98,33%	Tahap IV tidak mencairkan sebesar Rp 89.414.000,00 karena sebanyak 26 desa sampai tahap III sudah mencukupi	100%	DISPERMADES P3A
6	**Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa terdiri dari :**	**449 Desa**	**BPKAD SELAKU PPKD**	**7.075.415.000,00**	**7.060.414.100,00**	**99,79%**	**100%**	**100%**	**DISPERMADES, DISPORAWISATA, BAGIAN KERSA, DISPERKIMLH**
	Pembangunan Kawasan Perdesaan	22 DESA	BPKAD SELAKU PPKD	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	100%	100%	DISPERMADES P3A
	Bantuan Keuangan Desa Berinovasi	12 DESA	BPKAD SELAKU PPKD	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	100%	100%	DISPERMADES P3A
	Bantuan Keuangan Kawasan Kumuh	5 DESA	BPKAD SELAKU PPKD	1.650.000.000	1.650.000.000	100%	100%	100%	DISPEKIM LH
	Bantuan Keuangan Operasional TPQ	449 DESA	BPKAD SELAKU PPKD	2.245.000.000	2.230.000.000	99%	Terealisasi 446 desa, 3 Desa tidak mencairkan karena 2 Desa tidak memiliki TPQ yaitu Desa Karangglonggong Kec. Klirong dan Desa Kambangsari Kec. Alian, 1 Desa tidak mengajukan yaitu Desa Tanuharjo Alian	99%	BADAN KESRA SETDA
	Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	3 DESA	BPKAD SELAKU PPKD	180.415.000	180.414.100	1	100%	100%	DISPORAWISATA

4.2. Hambatan Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memperhatikan tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan mencapai 99% dimana tidak terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya.

BAB V
PENUTUP

Laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2020 dan capaian kinerjanya serta permasalahan dan solusinya diwujudkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Periode Tahun 2020 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ini merupakan Laporan tahunan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Sistematika penulisan LKPJ ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perihal Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020, menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup positif yang ditandai adanya peningkatan indikator-indikator kinerja dengan harapan dapat membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan adanya berbagai kendala dan permasalahan. Untuk itu perlu adanya penyempurnaan strategi penanganan dan komitmen bersama untuk mempercepat pencapaian target dan perolehan hasil yang optimal. Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen, semoga dapat memberikan manfaat dan semoga ***Allah Subhanahuwata'ala*** senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan ridhonya kepada kita semua dalam memajukan Kabupaten Kebumen.

LAMPIRAN

Laporan Rekap Transaksi Zakat Semua Bank
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen
Periode Januari-Desember 2020

NO	SATUAN KERJA	TOTAL	
		ZAKAT	INFAK
INSTANSI VERTIKAL			
1	Kantor Kementerian Agama KBM	198.000.000,00	-
SEKRETARIAT DAERAH			
2	Kantor Sekretariat Daerah	188.911.000,00	-
DINAS DAERAH			
3	BAP3DA	33.680.650,00	8.488.843,00
4	INSPEKTORAT	40.458.000,00	2.684.000,00
5	BAPPENDA	60.779.865,00	-
6	BPKAD	63.223.930,00	2.215.500,00
7	BKPPD	46.939.700,00	-
8	SEKRETARIAT DPRD	24.154.000,00	-
9	DPRD KAB. Kebumen	-	-
10	DINAS KESEHATAN	280.844.560,00	78.868.500,00
11	DPU PR	121.556.086,00	-
12	DISHUB	28.041.301,00	110.000,00
13	DISPERINDAG	118.637.650,00	120.000,00
14	DINSOS PPKB	30.640.000,00	380.000,00
15	DISPERKIM LH	84.301.120,00	-
16	DINLUTKAN	25.687.000,00	5.304.600,00
17	DISNAKER KUKM	65.914.198,00	-
18	DISTAPANG	75.089.000,00	23.235.000,00
19	KESBANGPOL	9.160.095,00	3.734.311,00
20	DISPERMADES P3A	50.186.000,00	-
21	DISPORAWISATA	53.177.000,00	-
22	DISKOMINFO	41.105.136,00	-
23	DPM PTSP	32.254.669,00	1.160.000,00
24	DISDUKCAPIL	23.149.000,00	-
25	SATPOL PP	11.486.000,00	40.000,00
26	Sekretariat KPU	-	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21.740.565,00	600.000,00
28	BPBD	29.152.000,00	40.000,00
29	RSUD dr.Soedirman Kebumen	341.245.051,00	68.880.000,00
30	RSUD Prembun	55.138.106,00	2.635.000,00
31	DINAS PENDIDIKAN	292.436.625,00	107.383.378,00
32	BKKBN	20.599.000,00	1.144.000,00
32	PLKB	10.372.000,00	315.000,00
BUMN/BUMD/PERUSAHAAN			
31	PD BPR BKK Kbm Cab. Ayah	11.893.340,00	2.406.058,00
32	PD BPR BKK Kbm Cab. Buayan	1.970.520,00	2.460.000,00
33	PD BPR BKK Kbm Cab. Puring	-	1.140.000,00
34	PD BPR BKK Kbm Cab. Petanahan	2.434.800,00	870.000,00
35	PD BPR BKK Kbm Cab. Klirong	7.511.289,00	1.825.000,00
36	PD BPR BKK Kbm Cab. Ambal	-	1.405.000,00
37	PD BPR BKK Kbm Cab. Mirit	-	1.265.000,00
38	PD BPR BKK Kbm Cab. Prembun	1.932.688,00	380.000,00
39	PD BPR BKK Kbm Cab. Kutowinangun	-	1.465.000,00
40	PD BPR BKK Kbm Cab. Alian	3.299.032,00	1.025.000,00
41	PD BPR BKK Kbm /KPO	12.229.694,00	1.705.000,00
42	PD BPR BKK. Keb. KTR Pusat	18.853.202,00	3.730.000,00
43	PD BPR BKK Kbm Cab. Pejagoan	-	1.635.000,00

NO	SATUAN KERJA	TOTAL	
		ZAKAT	INFAK
44	PD BPR BKK Kbm Cab. Adimulyo	3.542.000,00	345.000,00
45	PD BPR BKK Kbm Cab. Kuwarasan	-	1.060.000,00
46	PD BPR BKK Kbm Cab. Rowokele	3.682.770,00	3.225.000,00
47	PD BPR BKK Kbm Cab. Sempor	-	1.485.000,00
48	PD BPR BKK Kbm Cab. Gombong	7.400.614,00	580.000,00
49	PD BPR BKK Kbm Cab. Karanganyar	1.700.000,00	1.035.000,00
50	PD BPR BKK Kbm Cab. Karanggayam	-	425.000,00
51	PD BPR BKK Kbm Cab. Sadang	61.333,00	1.150.000,00
52	PD BPR Kebumen	5.635.000,00	510.000,00
53	BPD Bank Jateng Kebumen	440.000,00	170.000,00
54	KANTOR POS KEBUMEN	-	-
55	PD Apotik Lukulo	-	1.335.000,00
56	PDAM Kabupaten Kebumen	-	-
KECAMATAN			
57	Kantor Kecamatan Kebumen	23.875.000,00	400.000,00
58	Kantor Kecamatan Alian	16.461.122,00	-
59	Kantor Kecamatan Karangsambung	21.221.434,00	-
60	Kantor Kecamatan Prembun	16.362.400,00	2.091.400,00
61	Kantor Kecamatan Mirit	14.420.013,00	-
62	Kantor Kecamatan Kutowinangun	9.702.000,00	2.785.000,00
63	Kantor Kecamatan Ambal	2.098.375,00	250.000,00
64	Kantor Kecamatan Buluspesantren	13.589.972,00	1.620.000,00
65	Kantor Kecamatan Pejagoan	8.591.000,00	-
66	Kantor Kecamatan Klirong	15.998.801,00	-
67	Kantor Kecamatan Petanahan	15.370.900,00	440.000,00
68	Kantor Kecamatan Sruweng	12.236.200,00	-
69	Kantor Kecamatan Karanganyar	14.272.547,00	9.715.000,00
70	Kantor Kecamatan Karanggayam	3.275.000,00	5.105.000,00
71	Kantor Kecamatan Adimulyo	5.363.000,00	1.150.000,00
72	Kantor Kecamatan Kuwarasan	30.327.386,00	-
73	Kantor Kecamatan Puring	22.752.161,00	-
74	Kantor Kecamatan Gombong	9.315.299,00	3.530.000,00
75	Kantor Kecamatan Sempor	15.708.314,00	1.735.000,00
76	Kantor Kecamatan Buayan	21.374.000,00	1.440.000,00
77	Kantor Kecamatan Rowokele	17.300.497,00	316.600,00
78	Kantor Kecamatan Ayah	20.550.185,00	-
79	Kantor Kecamatan Sadang	14.384.555,00	120.000,00
80	Kantor Kecamatan Poncowarno	6.964.000,00	3.085.000,00
81	Kantor Kecamatan Padureso	6.138.730,00	2.000.000,00
82	Kantor Kecamatan Bonorowo	19.983.000,00	-
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN			
83	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Ayah	420.000,00	-
84	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Buayan	235.119.294,00	7.547.500,00
85	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Puring	48.197.000,00	19.085.000,00
86	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Petanahan	206.980,00	-
87	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Klirong	3.841.488,00	-
88	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Buluspesantren	-	-
89	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Ambal	130.074.588,00	-
90	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Mirit	175.931.495,00	7.090.200,00
91	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Bonorowo	11.668.900,00	13.575.000,00
92	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Prembun	2.081.400,00	10.240.000,00
93	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Padureso	-	11.230.000,00
94	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Kutownangun	51.770.600,00	10.028.000,00
95	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Alian	-	-

NO	SATUAN KERJA	TOTAL	
		ZAKAT	INFAK
96	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Poncowarno	39.758.884,00	15.305.000,00
97	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Kebumen	321.292.547,00	2.380.000,00
98	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Pejagoan	18.349.010,00	4.369.445,00
99	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Sruweng	15.465.527,00	25.305.000,00
100	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Adimulyo	51.489.582,00	28.740.000,00
101	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Kuwarasan	172.424.376,00	2.790.000,00
102	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Rowokele	155.951.614,00	-
103	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Sempor	4.780.700,00	6.919.700,00
104	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Gombong	20.663.900,00	-
105	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Karanganyar	8.856.000,00	5.460.000,00
106	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Karanggayam	28.462.100,00	14.675.000,00
107	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Karngsambng	8.724.500,00	-
108	Korwil Bid.Pendidikan Kec. Sadang	293.000,00	-
SEKOLAH NEGERI			
109	SMPN 1 Ayah	11.756.309,00	-
110	SMPN 2 Ayah	-	-
111	SMPN 1 Buayan	7.882.760,00	-
112	SMPN 2 Buayan	13.122.320,00	2.334.000,00
113	SMPN 1 Puring	10.655.900,00	-
114	SMPN 2 Puring	16.688.180,00	-
115	SMPN 1 Petanahan	6.880.000,00	-
116	SMPN 1 Klirong	3.360.000,00	-
117	SMPN 1 Buluspesantren	18.326.511,00	240.000,00
118	SMPN 2 Buluspesantren	16.500.000,00	-
119	SMPN 1 Ambal	29.767.750,00	1.965.000,00
120	SMPN 2 Ambal	-	-
121	SMPN 1 Mirit	17.039.600,00	2.730.000,00
122	SMPN 2 Mirit	6.553.200,00	2.100.000,00
123	SMPN 1 Prembun	24.464.800,00	5.630.000,00
124	SMPN 2 Prembun	3.890.000,00	8.882.000,00
125	SMPN 1 Kutowinangun	19.809.072,00	1.860.000,00
126	SMPN 2 Kutowinangun	30.331.009,00	-
127	SMPN 3 Kutowinangun	1.160.000,00	-
128	SMPN 1 Alian	7.251.770,00	-
129	SMPN 1 Poncowarno	6.437.000,00	-
130	SMPN 1 Kebumen	8.914.941,00	2.920.000,00
131	SMPN 2 Kebumen	8.669.497,00	8.512.000,00
132	SMPN 3 Kebumen	11.564.400,00	2.040.000,00
133	SMPN 4 Kebumen	19.081.100,00	200.000,00
134	SMPN 5 Kebumen	13.579.167,00	-
135	SMPN 6 Kebumen	7.224.000,00	3.780.000,00
136	SMPN 7 Kebumen	14.895.000,00	4.860.000,00
137	SMPN 1 Pejagoan	-	20.336.251,00
138	SMPN 2 Pejagoan	10.099.800,00	-
139	SMPN 1 Sruweng	24.749.500,00	980.000,00
140	SMPN 2 Sruweng	7.170.000,00	-
141	SMPN 1 Adimulyo	11.894.500,00	2.053.500,00
142	SMPN 2 Adimulyo	15.975.000,00	-
143	SMPN 1 Kuwarasan	21.101.377,00	600.000,00
144	SMPN 1 Rowokele	3.398.330,00	2.280.000,00
145	SMPN 1 Sempor	8.357.010,00	275.000,00
146	SMPN 2 Sempor	11.805.000,00	-
147	SMPN 1 Gombong	11.646.000,00	-
148	SMPN 2 Gombong	8.221.435,00	-

NO	SATUAN KERJA	TOTAL	
		ZAKAT	INFAK
149	SMPN 3 Gombong	11.379.800,00	2.736.000,00
150	SMPN 4 Gombong	7.560.000,00	1.360.000,00
151	SMPN 1 Karanganyar	2.541.843,00	-
152	SMPN 2 Karanganyar	24.693.000,00	-
153	SMPN 3 Karanganyar	-	-
154	SMPN 1 Karanggayam	1.585.000,00	4.970.000,00
155	SMPN 2 Karanggayam	-	-
156	SMPN 1 Karangsambung	16.631.512,00	6.390.000,00
157	SMPN 2 Karangsambung	10.524.000,00	-
158	SMPN 1 Padureso	5.773.038,00	-
159	SMPN 2 Rowokele	8.629.459,00	1.800.000,00
160	SMPN 1 Sadang	5.420.000,00	-
161	SMAN 1 Kebumen	-	7.135.000,00
162	SMAN 2 Kebumen	3.000.000,00	3.000.000,00
163	SMAN 1 Prembun	16.296.000,00	5.850.000,00
164	SMAN 1 Kutowinangun	120.000,00	-
165	SMAN 1 Pejagoan	47.734.900,00	-
166	SMAN 1 Karanganyar	16.765.000,00	329.000,00
167	SMAN 1 Gombong	-	-
168	SMAN 1 Rowokele	8.000.000,00	-
169	SMAN 1 Klirong	-	-
170	SMAN 1 Petanahan	33.777.220,00	3.835.800,00
171	SMAN 1 Buluspesantren	2.586.000,00	12.930.000,00
172	SMAN 1 Ayah	1.460.825,00	-
173	SMAN 1 Mirit	16.641.000,00	-
174	SMAN 1 Karangsambung	12.145.266,00	-
175	SMKN 1 Kebumen	15.522.199,00	3.757.500,00
176	SMKN 2 Kebumen	13.000.000,00	4.200.000,00
177	SMKN 1 Karanganyar	14.601.000,00	50.000,00
178	SMKN 1 Gombong	84.552.683,00	-
179	SMK N 1 Alian	8.412.982,00	-
180	SMKN 1 Ambal	-	-
181	SMKN 1 Karanggayam	12.155.200,00	-
182	SMA AL-Kahfi Somalangu	-	1.100.000,00
183	SMK Tamtama Karanganyar	4.147.000,00	7.487.500,00
184	MTs N 1 Kebumen	54.213.700,00	5.820.700,00
185	MTs N 2 Kebumen	89.681.300,00	-
186	MTs N 3 Kebumen	26.263.782,00	-
187	MTs N 7 Kebumen	73.505.500,00	-
188	MTs N 8 Kebumen	27.104.100,00	6.478.800,00
189	MAN 2 Kebumen	63.102.550,00	11.427.700,00
190	GTT PTT SD Korwil	-	15.720.000,00
191	GTT Prov	-	417.500,00
	Total	**5.653.853.062,00**	**741.865.286,00**

Sumber Data : Baznas Kabupaten Kebumen Tahun 2020